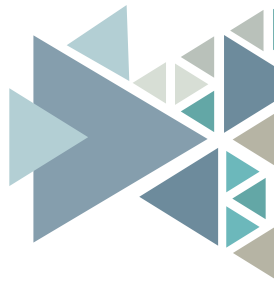




**LAPORAN TRIWULANAN**  
TRIWULAN IV- 2017

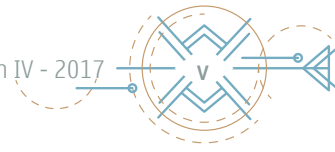


LAPORAN TRIWULANAN  
TRIWULAN IV - 2017



Laporan Triwulanan ini diterbitkan oleh  
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.  
Versi digital (PDF) dapat diunduh melalui  
[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

Otoritas Jasa Keuangan  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo Lantai 4  
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710  
Phone. (021) 29600000  
fax. (021) 386 6032



# Kata Pengantar



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan dan bimbingan-Nya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat senantiasa meningkatkan perannya dalam menjaga stabilitas dan memacu kinerja sektor jasa keuangan dalam ruang lingkup tugas pengaturan dan pengawasan serta edukasi dan perlindungan konsumen keuangan.

Pada triwulan IV-2017, kondisi perekonomian global menunjukkan perkembangan positif didorong perbaikan permintaan global dan meningkatnya harga komoditas dunia. Pemulihan perekonomian global ini tercermin dari membaiknya pertumbuhan ekonomi di hampir semua negara. Perekonomian Amerika Serikat semakin solid, didukung rencana kebijakan fiskal yang ekspansif termasuk melalui reformasi perpajakan. Kinerja Perekonomian Zona Euro juga mencatatkan perkembangan positif seiring kebijakan moneter yang akomodatif tercermin dari penurunan tingkat pengangguran dan inflasi stabil. Sejalan dengan perekonomian Eropa, perekonomian

Jepang menunjukkan perbaikan, tercermin dari kinerja eksternal Jepang yang positif. Perekonomian Tiongkok juga melanjutkan pemulihan didukung oleh kebijakan *rebalancing* secara gradual serta perbaikan tingkat konsumsi dan perdagangan eksternal.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi global tersebut, stabilitas makroekonomi domestik juga dalam kondisi terjaga dengan pertumbuhan ekonomi secara tahunan tercatat tumbuh 5,19% (yoy). Perbaikan kinerja ekonomi dalam negeri ini didorong oleh membaiknya investasi seiring berlanjutnya pembangunan infrastruktur di berbagai daerah dan positifnya kinerja perdagangan eksternal dengan neraca perdagangan Indonesia yang kembali membukukan surplus sebesar USD 0,9 miliar. Pertumbuhan ekonomi ini juga didukung dengan tingkat inflasi yang terkendali dan tingkat bunga yang terus melanjutkan tren penurunannya.



## Kata Pengantar

Sementara itu, stabilitas sektor jasa keuangan domestik secara umum masih terjaga dengan ditopang tingkat permodalan yang tinggi, likuiditas yang memadai dan tingkat risiko yang terkendali. Intermediasi lembaga jasa keuangan terpantau masih menunjukkan peningkatan walaupun belum sesuai dengan yang diharapkan. Pada triwulan IV-2017, perkembangan industri perbankan cukup baik tercermin dari pertumbuhan aset, kredit dan dana pihak ketiga Bank Umum masing-masing mencapai 9,77% (yoy), 8,24% (yoy) dan 9,35% (yoy). Kinerja Industri Keuangan Non Bank (IKNB) juga bergerak positif tercermin dari aset industri asuransi dan perusahaan pembiayaan yang tumbuh masing-masing 19,96% (yoy) dan 7,76% (yoy).

Pada Industri Pasar Modal, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penguatan signifikan, yakni sebesar 19,99% dan ditutup di level 6.355,65 yang merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah Pasar Modal Indonesia serta menjadi pertumbuhan yang tertinggi ke-empat di bursa efek utama kawasan Asia Pasifik. Kinerja penghimpunan dana dari pasar modal juga cukup baik. Selama 2017 industri pasar modal mampu menghimpun dana sebesar Rp264 triliun. Kinerja Reksa Dana juga menggembirakan tercermin dari pertumbuhan Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana yang meningkat 35,01% (yoy).

Sementara itu, pasar surat utang dalam negeri melanjutkan tren penguatan ditandai dengan penurunan rata-rata *yield* SBN dan masih terjaganya *Credit Default Swap* (CDS) *spread* yang stabil pada level yang rendah.

Di bidang pengaturan pada triwulan IV-2017 ini, OJK telah menerbitkan 22 Peraturan OJK (POJK) untuk memperkuat sektor jasa keuangan. POJK tersebut terdiri dari satu POJK yang mengatur sektor Perbankan dan 21 POJK yang mengatur sektor Pasar Modal. Di antaranya adalah POJK terkait perbankan syariah, Obligasi Daerah dan *Green Bond*. Selain itu, OJK juga menerbitkan dua Surat Edaran OJK (SEOJK) yang masing-masing mengatur sektor Perbankan dan IKNB.

Dalam rangka mendukung aktivitas pengawasan sektor jasa keuangan, OJK menginisiasi sejumlah kegiatan strategis, antara lain: Penerbitan *Roadmap* Pengawasan Terintegrasi, *Enhancement* Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi (SIPT) untuk modul data keuangan dan *Financial Conglomerate Ratio* (FICOR), dan penyempurnaan Sistem Kliring dan Penyelesaian Pasar Modal. Terkait upaya peningkatan akses keuangan, OJK menginisiasi program KUR Klaster untuk mengakselerasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan memfasilitasi pembentukan 11 Bank Wakaf Mikro di sejumlah daerah di



Indonesia. OJK juga mengukuhkan 11 TPAKD wilayah kota dan kabupaten serta memperluas implementasi Pusat Edukasi, Layanan Konsumen dan Akses Keuangan UMKM (PELAKU) ke lima wilayah baru. Di samping itu, OJK juga melakukan *capacity building* agen Laku Mikro serta memfasilitasi berbagai program pemerintah seperti program Bantuan Sosial Non Tunai, program Pembiayaan Ultra Mikro (UMI) dan program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (MEKAAR). Dalam rangka mendorong peningkatan literasi keuangan, OJK meluncurkan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (*Revisit 2017*) dan pelaksanaan Kompetisi Inklusi Keuangan (KOINKU).

Dalam rangka pengembangan kapasitas manajemen internal, OJK berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai kegiatan pengembangan kompetensi baik dari sisi *hard skill* maupun *soft skill*. Selain itu, OJK mengembangkan sarana infrastruktur untuk mendukung pengawasan sektor jasa keuangan dan pengelolaan manajemen internal, melalui pengembangan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), Sistem *E-Reporting*, Sistem Informasi *Risk Based Supervision* (SIRIBAS) Sistem Informasi Pelaporan Gratifikasi (SIPEGA), Sistem Informasi Pembuatan Peraturan Perundang-undangan di

OJK, dan Sistem Informasi Akuntansi OJK (SI-AUTO) tahap 2.

Selama periode laporan, OJK menerima penghargaan *Gold* dalam kategori *The Best Technology Innovation* bagi *Corporate* dalam ajang *The Best Contact Center* Indonesia. OJK juga menerima dua penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk penilaian pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan bidang pengendalian gratifikasi terbaik.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pegawai yang telah memberikan kontribusi terbaiknya dalam menjalankan tugas dan senantiasa memegang teguh nilai-nilai strategis institusi. OJK secara terus menerus berupaya untuk mengoptimalkan kinerjanya serta menjalin kerjasama dan koordinasi dengan anggota Komite Stabilitas Sektor Jasa Keuangan dan para pemangku kepentingan terkait lainnya dalam mewujudkan industri jasa keuangan yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

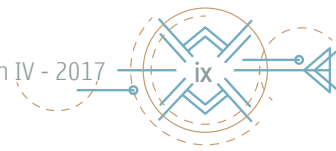
**Ketua Dewan Komisiner  
Otoritas Jasa Keuangan**

**Wimboh Santoso Ph.D**

# DAFTAR ISI

iii	<b>KATA PENGANTAR</b>
vi	<b>DAFTAR ISI</b>
viii	<b>DAFTAR TABEL</b>
xi	<b>DAFTAR GRAFIK</b>
xiii	<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>
<b>1</b>	<b>BAB I. TINJAUAN INDUSTRI SEKTOR JASA KEUANGAN</b>
3	1.1 PERKEMBANGAN EKONOMI DAN PASAR KEUANGAN
3	1.1.1 Perkembangan Ekonomi Global
5	1.1.2 Perkembangan Ekonomi Domestik
7	1.1.3 Perkembangan Pasar Keuangan
8	1.2 PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN
8	1.2.1 Perkembangan Bank Umum
9	1.2.2 Perkembangan Bank Umum Konvensional
12	1.2.3 Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
15	1.2.4 Perkembangan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
16	1.2.5 Penguatan Sektor Riil Melalui Penyaluran Kredit Produktif
18	1.3 PERKEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL
18	1.3.1 Perkembangan Perdagangan Efek
21	1.3.2 Perkembangan Perusahaan Efek
22	1.3.3 Perkembangan Pengelolaan Investasi
24	1.3.4 Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik
31	1.3.5 Perkembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal
33	1.4 PERKEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN NON BANK
34	1.4.1 Perkembangan Perasuransian Konvensional dan BPJS
37	1.4.2 Perkembangan Industri Dana Pensiun
37	1.4.3 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan
40	1.4.4 Perkembangan Industri Perusahaan Modal Ventura
42	1.4.5 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
42	1.4.6 Perkembangan Industri Jasa Keuangan Khusus
45	1.4.7 Perkembangan Industri Jasa Penunjang IKNB
46	1.4.8 Perkembangan Industri Lembaga Keuangan Mikro
46	1.4.9 Perkembangan Industri Fintech ( <i>Financial Technology</i> )
46	1.5 PERKEMBANGAN PROGRAM PRIORITAS OJK
46	1.5.1 Layanan Keuangan Tanpa Kantor (Laku Pandai)
48	1.5.2 Jangkau, Sinergi, dan <i>Guideline</i> (JARING)
48	1.5.3 Simpanan Pelajar (SIMPEL)
49	1.5.4 Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pasar Modal
49	1.5.5 Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)
49	1.5.6 Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)
49	1.5.7 Asuransi Nelayan
50	1.5.9 Asuransi Kerangka Kapal
50	1.5.10 Program Pembiayaan Ekonomi Kreatif
<b>51</b>	<b>BAB II. TINJAUAN OPERASIONAL SEKTOR JASA KEUANGAN</b>
53	2.1 AKTIVITAS PENGATURAN
53	2.1.1 Pengaturan Pengawasan Terintegrasi
53	2.1.2 Pengaturan Bank
53	2.1.3 Pengaturan Pasar Modal
56	2.1.4 Pengaturan IKNB
56	2.2 AKTIVITAS PENGAWASAN
56	2.2.1 Pengawasan Terintegrasi
57	2.2.2 Pengawasan Perbankan



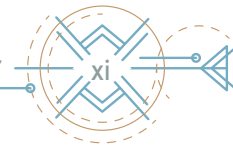


2.2.3	Pengawasan Pasar Modal	63
2.2.4	Pengawasan IKNB	71
<b>2.3</b>	<b>AKTIFITAS PENGEMBANGAN</b>	<b>84</b>
2.3.1	Pengembangan Pengawasan Terintegrasi	84
2.3.2	Pengembangan Industri Perbankan	85
2.3.3	Pengembangan Industri Pasar Modal	86
2.3.4	Pengembangan IKNB	86
<b>2.4</b>	<b>STABILITAS SISTEM KEUANGAN</b>	<b>87</b>
2.4.1	Pasar Keuangan dan Lembaga Jasa Keuangan	87
2.4.2	Arah Kebijakan dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan	89
2.4.3	Koordinasi Antarlembaga dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Nasional	90
<b>2.5</b>	<b>EDUKASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>90</b>
2.5.1	Inklusi Keuangan	90
2.5.2	Literasi dan Edukasi Keuangan	94
2.5.3	Perlindungan Konsumen	96
2.5.4	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan	100
2.5.5	Pengawasan <i>Market Conduct</i>	101
2.5.6	<i>Investor Alert Portal</i>	102
2.5.7	Penelitian Kebijakan dan Pengaturan	102
<b>2.6</b>	<b>PENYIDIKAN SEKTOR JASA KEUANGAN</b>	<b>103</b>
2.6.1	Koordinasi dengan Instansi Terkait	103
2.6.2	Penanganan Perkara	103
2.6.3	Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi/SWI)	103
2.6.4	Sosialisasi Satgas Waspada Investasi dan Pembekalan Tim Kerja SWID	106
2.6.5	Penyampaian Informasi Melalui Media	106
2.6.6	Penanganan Perkara Investasi oleh Satgas Waspada Investasi	106
<b>2.7</b>	<b>PENANGANAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APU-PPT)</b>	<b>107</b>
2.7.1	Pelaksanaan <i>Mutual Evaluation Review</i> (MER) Indonesia tahun 2017	107
2.7.2	Pengembangan <i>Risk Based Supervisory Tools</i> dalam Pengawasan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan	108
2.7.3	Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia	108
<b>2.8</b>	<b>HUBUNGAN KELEMBAGAAN</b>	<b>109</b>
2.8.1	Kerja sama Domestik	109
2.8.2	Kerja sama Internasional dan Regional	110
<b>BAB III.</b>	<b>TINJAUAN INDUSTRI DAN OPERASIONAL SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH</b>	<b>113</b>
<b>3.1</b>	<b>TINJAUAN INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH</b>	<b>115</b>
3.1.1	Perkembangan Perbankan Syariah	115
3.1.2	Perkembangan Industri Pasar Modal Syariah	118
3.1.3	Perkembangan IKNB Syariah	120
<b>3.2</b>	<b>PENGATURAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH</b>	<b>122</b>
3.2.1	Pengaturan Perbankan Syariah	122
3.2.2	Pengaturan Pasar Modal Syariah	123
3.2.3	Pengaturan IKNB Syariah	123
<b>3.3</b>	<b>PENGAWASAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH</b>	<b>123</b>
3.3.1	Pengawasan Perbankan Syariah	123
3.3.2	Pengawasan Pasar Modal Syariah	124
3.3.3	Pengawasan IKNB Syariah	124
<b>3.4</b>	<b>PENGEMBANGAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH</b>	<b>125</b>
3.4.1	Pengembangan Perbankan Syariah	125
3.4.2	Pengembangan Pasar Modal Syariah	127
3.4.3	Pengembangan IKNB Syariah	128
<b>BAB IV.</b>	<b>MANAJEMEN STRATEGIS DAN TATA KELOLA ORGANISASI</b>	<b>131</b>
<b>4.1</b>	<b>MANAJEMEN STRATEGI DAN KINERJA OJK</b>	<b>133</b>
4.1.1	Pelaksanaan Siklus Manajemen Strategi dan Kinerja	133
4.1.2	Pelaksanaan Sasaran Strategis OJK	134

134		4.1.3	Inisiatif Strategis
135	4.2	<b>AUDIT INTERNAL, MANAJEMEN RISIKO, DAN PENGENDALIAN KUALITAS</b>	
135		4.2.1	Implementasi <i>Combined Assurance</i> untuk Penguatan <i>Governance</i> OJK
136		4.2.2	Mitigasi Risiko
136		4.2.3	<i>Control Self Assessment (CSA)</i>
136		4.2.4	Program Pengendalian Gratifikasi (PPG)
136		4.2.5	<i>Whistle Blowing System</i>
136		4.2.6	Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
138	4.3	<b>RAPAT DEWAN KOMISIONER</b>	
139	4.4	<b>KOMUNIKASI</b>	
139		4.4.1	Komunikasi Informasi OJK
141		4.4.2	Kunjungan Instansi
141		4.4.3	OJK TV
142	4.5	<b>KEUANGAN</b>	
142		4.5.1	Realisasi Penerimaan Pungutan
142		4.5.2	Realisasi Anggaran
143		4.5.3	Penyempurnaan Pengelolaan Keuangan
143	4.6	<b>SISTEM INFORMASI</b>	
143		4.6.1	Penguatan Sistem Informasi untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas Pokok
144		4.6.2	Penguatan Sistem Informasi untuk Meningkatkan Kapasitas Organisasi
145	4.7	<b>LOGISTIK</b>	
145		4.7.1	Penyiapan Gedung Kantor Pusat dan Regional
145		4.7.2	Pengembangan Pengaturan dan Sistem Logistik
145	4.8	<b>SDM DAN TATA KELOLA ORGANISASI</b>	
145		4.8.1	Kebijakan Sumber Daya Manusia
146		4.8.2	Pengelolaan Sumber Daya Manusia
146		4.8.3	Pengembangan Organisasi
147	4.9	<b>OJK INSTITUTE</b>	
147		4.9.1	Program Pengembangan Kepemimpinan Berjenjang (PPKB)
147		4.9.2	Program Pengembangan Kompetensi
147		4.9.3	Program Pendidikan Formal
150		4.9.4	Program Penugasan
150		4.9.5	Program Peningkatan Kompetensi SDM Sektor Jasa Keuangan
150		4.9.6	Program Kaji Ulang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)
150		4.9.7	Program Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian di OJK
150	4.10	<b>MANAJEMEN PERUBAHAN</b>	
151		4.10.1	Program Budaya
151		4.10.2	<i>Monitoring</i> Program Budaya
151		4.10.3	Media Komunikasi Budaya dan Perubahan

## DAFTAR TABEL

5	Tabel I - 1	Proyeksi IMF dalam <i>World Economic Outlook</i> Oktober 2017
9	Tabel I - 2	Kinerja Bank Umum Triwulan IV-2017
9	Tabel I - 3	Kondisi Umum Perbankan Konvensional
10	Tabel I - 4	Tingkat Konsentrasi Aset BUK
13	Tabel I - 5	Kondisi Umum BPR
14	Tabel I - 6	Pertumbuhan Kredit BPR Berdasarkan Jenis Penggunaan
15	Tabel I - 7	Konsentrasi Penyaluran UMKM
16	Tabel I - 8	Kredit UMKM berdasarkan Kelompok Bank
16	Tabel I - 9	Konsentrasi Kredit Perbankan Menurut Sektor Ekonomi (%)
20	Tabel I - 10	Perkembangan Transaksi Perdagangan Saham
20	Tabel I - 11	Perkembangan Transaksi Perdagangan Surat Utang
21	Tabel I - 12	Jumlah Perusahaan Efek



Tabel I - 13	Jumlah Lokasi Kegiatan PE Selain Kantor Pusat	22
Tabel I - 14	Proses Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek	22
Tabel I - 15	Proses Perpanjangan Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek	22
Tabel I - 16	Proses Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran dan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas	22
Tabel I - 17	Perkembangan NAB per Jenis Reksa Dana	23
Tabel I - 18	Perkembangan Reksa Dana Dan Produk Investasi Lainnya	23
Tabel I - 19	Jenis Reksa Dana Yang Mendapat Surat Efektif	23
Tabel I - 20	Perkembangan Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin	24
Tabel I - 21	Perkembangan Penawaran Umum (Emisi)	25
Tabel I - 22	Perkembangan Nilai Emisi Berdasarkan Sektor Industri pada Triwulan IV-2017	25
Tabel I - 23	Perusahaan Yang Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham	26
Tabel I - 24	Perusahaan yang telah Melakukan Penawaran Umum Terbatas ( <i>Right issue</i> )	27
Tabel I - 25	Perusahaan yang telah Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang	28
Tabel I - 26	Rencana Penggunaan Dana Atas EPP yang Melakukan Aksi Korporasi Pada Triwulan IV-2017 Berdasarkan Sektor Industri	31
Tabel I - 27	Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal	31
Tabel I - 28	Jumlah Perusahaan Berdasarkan Hasil Pemeringkat Efek	32
Tabel I - 29	Perkembangan Profesi Penunjang Pasar Modal	33
Tabel I - 30	Total Aset IKNB	33
Tabel I - 31	Indikator Perusahaan Perasuransian Konvensional dan BPJS	34
Tabel I - 32	Portofolio Investasi Perasuransian Konvensional dan BPJS	35
Tabel I - 33	Jumlah Industri Perusahaan Perasuransian Konvensional dan BPJS	35
Tabel I - 34	Densitas dan Penetrasi Industri Perasuransian Konvensional dan BPJS	36
Tabel I - 35	RBC Industri Asuransi	36
Tabel I - 36	Distribusi Aset Industri Dana Pensiun	36
Tabel I - 37	Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun	36
Tabel I - 38	Portofolio Investasi Dana Pensiun	37
Tabel I - 39	Jumlah Dana Pensiun	37
Tabel I - 40	Piutang Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan sektor Ekonomi	38
Tabel I - 41	Indikator Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan	39
Tabel I - 42	NPF Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan sektor Ekonomi	40
Tabel I - 43	Pembiayaan/Penyertaan Berdasarkan sektor Ekonomi	41
Tabel I - 44	Pembiayaan Berdasarkan Jenis Infrastruktur	42
Tabel I - 45	Indikator Keuangan Industri Jasa Penunjang IKNB	45
Tabel I - 46	Jumlah Perusahaan Jasa Penunjang IKNB	46
Tabel I - 47	Jumlah LKM	46
Tabel I - 48	Indikator Keuangan Lembaga Keuangan Mikro Konvensional	46
Tabel I - 49	Perkembangan Industri <i>Fintech</i> ( <i>Peer To Peer Lending</i> )	46
Tabel I - 50	Realisasi Laku Pandai Triwulan IV-2017	47
Tabel I - 51	NPL Kegiatan Usaha Kredit Maritim (%)	48
Tabel I - 52	Jumlah Kapal yang Ditanggung Asuransi Penyingkiran Kapal	50
Tabel II - 1	Pemeriksaan Bank Umum	57
Tabel II - 2	Pemeriksaan Khusus Bank	58
Tabel II - 3	Produk dan Aktivitas Baru Perbankan	58
Tabel II - 4	<i>Track Record</i> Tindak Tipibank Triwulan IV-2017	59
Tabel II - 5	Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan	59
Tabel II - 6	Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan	60
Tabel II - 7	Pemberian Keterangan Ahli/Saksi	60
Tabel II - 8	Perizinan Perubahan Jaringan Kantor BU*	61
Tabel II - 9	Jaringan Kantor Bank Umum	61
Tabel II - 10	FPT Calon Pengurus dan PSP Bank Umum selama Triwulan IV-2017	62
Tabel II - 11	Perizinan BPR	62
Tabel II - 12	Daftar Hasil <i>Fit and Proper Test New Entry</i> BPR	63
Tabel II - 13	Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik	65
Tabel II - 14	Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik	65

71	Tabel II - 15	Jumlah Laporan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi yang Dianalisis
72	Tabel II - 16	Penyampaian Laporan Bulanan Dana Pensiun
72	Tabel II - 17	Penyampaian Laporan Bulanan Lembaga Pembiayaan
73	Tabel II - 18	Penerbitan LHP Lembaga Pembiayaan
74	Tabel II - 19	Pelaksanaan Pendampingan LKM selama triwulan IV-2017
75	Tabel II - 20	Pelaksanaan Asistensi Perizinan Usaha LKM selama triwulan IV-2017
75	Tabel II - 21	Pelatihan Proses Bisnis dan Laporan Keuangan LKM selama triwulan IV-2017
76	Tabel II - 22	Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Kelembagaan dan Produk IKNB sampai dengan triwulan IV-2017
77	Tabel II - 23	Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Kelembagaan dan Produk IKNB Sampai dengan Triwulan IV-2017
77	Tabel II - 24	Lembaga Keuangan Non Bank Terdaftar Triwulan IV-2017
77	Tabel II - 25	Rekapitulasi Pencabutan Izin Usaha IKNB sampai dengan triwulan IV-2017
78	Tabel II - 26	Pencabutan Izin Usaha IKNB selama triwulan IV-2017
78	Tabel II - 27	Jumlah IKNB Konvensional per 31 Desember 2017
78	Tabel II - 28	Rekapitulasi Likuidasi IKNB sampai dengan triwulan IV-2017
79	Tabel II - 29	Rekapitulasi Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan IKNB
79	Tabel II - 30	Rekapitulasi Perubahan Kepemilikan Perusahaan/Perubahan Anggaran Dasar/Perubahan Pemegang Saham/Perubahan PDP IKNB
80	Tabel II - 31	Rekapitulasi Pelaporan Kantor Cabang IKNB
80	Tabel II - 32	Rekapitulasi Pelaporan Kantor selain Kantor Cabang IKNB
81	Tabel II - 33	Rekapitulasi Pelaporan Produk sampai dengan triwulan IV-2017
81	Tabel II - 34	Rekapitulasi Permohonan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama IKNB
82	Tabel II - 35	Rekapitulasi Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama IKNB
82	Tabel II - 36	Rekapitulasi Pelaporan Perubahan Pengurus IKNB
82	Tabel II - 37	Rekapitulasi Pelaporan Syarat Keberlanjutan Pengurus IKNB
83	Tabel II - 38	Rekapitulasi Pelaporan Tenaga Kerja Asing IKNB sampai dengan triwulan IV-2017
83	Tabel II - 39	Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Kelembagaan Jasa Penunjang IKNB
83	Tabel II - 40	Pendaftaran Profesi yang melaksanakan kegiatan di IKNB
84	Tabel II - 41	Pendaftaran Agen yang melaksanakan kegiatan di IKNB
84	Tabel II - 42	Jumlah Penetapan Hasil Pengujian Kemampuan dan Kepatutan (PKK)
84	Tabel II - 43	Jumlah Perusahaan Penunjang Berdasarkan Jenis Usaha
92	Tabel II - 44	Capaian Kegiatan Bulan Inklusi Keuangan
93	Tabel II - 45	Pemenang Kategori Umum
93	Tabel II - 46	Pemenang Kategori Akademisi
93	Tabel II - 47	Pemenang Kategori PUJK
98	Tabel II - 48	Penerimaan Layanan per <i>Business Unit</i>
109	Tabel II - 49	Hubungan Kerja Sama Domestik OJK
117	Tabel III - 1	Indikator Perbankan Syariah
118	Tabel III - 2	Perkembangan Kapitalisasi Saham Syariah
118	Tabel III - 3	Perkembangan Indeks Saham Syariah
119	Tabel III - 4	Perkembangan Emisi Sukuk Korporasi
119	Tabel III - 5	Perkembangan Reksa Dana Syariah
120	Tabel III - 6	Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara <i>Outstanding</i>
121	Tabel III - 7	Aset IKNB Syariah
121	Tabel III - 8	Indikator Perusahaan Perasuransian Syariah
122	Tabel III - 9	Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah
130	Tabel III - 10	LKM Syariah pada triwulan IV-2017
140	Tabel IV - 1	Judul Siaran Pers Triwulan IV-2017
140	Tabel IV - 2	Jumpa Pers Triwulan IV-2017
141	Tabel IV - 3	Kunjungan Institusi Triwulan IV-2017
145	Tabel IV - 4	Kantor Regional dan KOJK dengan Gedung Sendiri



# DAFTAR GRAFIK

Grafik I - 1	Tingkat Inflasi Amerika Serikat	4
Grafik I - 2	Tingkat Inflasi Zona Euro	4
Grafik I - 3	Kinerja Eksternal Jepang	4
Grafik I - 4	Kinerja Eksternal Tiongkok	4
Grafik I - 5	Perkembangan Harga Komoditas Dunia	5
Grafik I - 6	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	6
Grafik I - 7	Tingkat Inflasi Indonesia	6
Grafik I - 8	Neraca Perdagangan Indonesia	6
Grafik I - 9	Pertumbuhan Penjualan Semen Triwulanan	7
Grafik I - 10	Perkembangan Indeks Saham Global dan Regional	7
Grafik I - 11	Perkembangan Nilai Tukar Global dan Regional	8
Grafik I - 12	Pergerakan Nilai Tukar Global dan Regional	8
Grafik I - 13	Perkembangan Aset BUK	10
Grafik I - 14	Tren Pertumbuhan DPK	11
Grafik I - 15	Tren Pertumbuhan Kredit ( <i>qtq</i> )	11
Grafik I - 16	Tren Pertumbuhan Kredit ( <i>yoy</i> )	11
Grafik I - 17	Tren NPL (%)	11
Grafik I - 18	Tren Rentabilitas dan Efisiensi	12
Grafik I - 19	Tren Aset BPR	13
Grafik I - 20	Tren Pertumbuhan DPK ( <i>qtq</i> )	13
Grafik I - 21	Tren Pertumbuhan DPK ( <i>yoy</i> )	14
Grafik I - 22	ROA dan BOPO BPR	14
Grafik I - 23	Penyebaran UMKM berdasarkan Wilayah	16
Grafik I - 24	Pertumbuhan Kredit Menurut Sektor Ekonomi ( <i>yoy</i> )	17
Grafik I - 25	NPL <i>Gross</i> Sektor Ekonomi	18
Grafik I - 26	Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama ( <i>qtq</i> )	19
Grafik I - 27	Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama ( <i>ytd</i> )	19
Grafik I - 28	Perkembangan Indeks Industri ( <i>qtq</i> )	19
Grafik I - 29	Perkembangan IHSG dan Nilai Rata-rata Perdagangan Saham Harian	19
Grafik I - 30	Perkembangan IHSG dan Net Asing	20
Grafik I - 31	Indonesia Government Securities Yield Curve (IBPA-IGSYC)	20
Grafik I - 32	Perkembangan Obligasi Negara Asean +3 2013 –2017	21
Grafik I - 33	Rencana Penggunaan Dana	30
Grafik I - 34	<i>Market Share</i> BAE Berdasarkan Jumlah Klien Sampai Triwulan IV-2017	31
Grafik I - 35	<i>Market Share Company Rating</i> Triwulan IV-2017	32
Grafik I - 36	Komposisi Jumlah Pelaku IKNB Triwulan IV-2017	34
Grafik I - 37	Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun	37
Grafik I - 38	Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan	38
Grafik I - 39	Piutang Perusahaan Pembiayaan	38
Grafik I - 40	Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas	40
Grafik I - 41	Pertumbuhan Pembiayaan/Penyertaan Modal	41
Grafik I - 42	Sumber Pendanaan Perusahaan Modal Ventura	42
Grafik I - 43	Tren Aset, Liabilitas dan Ekuitas	42
Grafik I - 44	Pertumbuhan Aset LJKK	42
Grafik I - 45	Pertumbuhan Aset Perusahaan Penjaminan	43
Grafik I - 46	<i>Outstanding</i> Penjaminan	43
Grafik I - 47	Pertumbuhan Aset Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	43
Grafik I - 48	Pertumbuhan Nilai Pembiayaan Ekspor Indonesia	43
Grafik I - 49	Aset dan <i>Outstanding</i> Penyaluran Pinjaman PT SMF (Persero)	44
Grafik I - 50	Aset dan <i>Outstanding</i> Penyaluran Pinjaman Pergadaian	44
Grafik I - 51	Pertumbuhan Aset PT PNM (Persero)	44
Grafik I - 52	Pertumbuhan Pemberian Pinjaman dan Pembiayaan Modal PT PNM (Persero)	44
Grafik I - 53	Pertumbuhan Aset PT Danareksa (Persero)	45

45	Grafik I - 54	Pertumbuhan Portofolio PT Danareksa (Persero)
47	Grafik I - 55	Wilayah Penyebaran Agen LAKU PANDAI Triwulan IV-2017
48	Grafik I - 56	Kredit & NPL Sektor Maritim terkait JARING
57	Grafik II - 1	Profil Konglomerasi Keuangan
60	Grafik II - 2	Sebaran Jenis Dugaan Tipibank Triwulan IV-2017
60	Grafik II - 3	Sebaran Pelaku Dugaan Tipibank Triwulan IV-2017
62	Grafik II - 4	Penyebaran Jaringan Kantor BUK Pada Triwulan IV-2017
63	Grafik II - 5	Penyebaran Jaringan Kantor BPR Triwulan IV-2017
87	Grafik II - 6	Pertumbuhan Kredit dan Dana Pihak Ketiga Perbankan
88	Grafik II - 7	Pertumbuhan Piutang Pembiayaan Perusahaan Pembiayaan
88	Grafik II - 8	<i>Risk-Based Capital (RBC)</i> Industri Perasuransian
88	Grafik II - 9	<i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i> Perbankan
88	Grafik II - 10	<i>Gearing Ratio</i> Perusahaan Pembiayaan
89	Grafik II - 11	Rasio <i>NPL</i> Perbankan dan NPF Perusahaan Pembiayaan
96	Grafik II - 12	Layanan Per Sektor (Triwulan IV-2017)
97	Grafik II - 13	Tingkat Penyelesaian Layanan (akumulasi 2013- Triwulan IV-2017)
97	Grafik II - 14	Layanan Per Sektor (akumulasi 2013- Triwulan IV-2017)
98	Grafik II - 15	Kanal Layanan Triwulan IV-2017
98	Grafik II - 16	Perbandingan Penerimaan Layanan Berdasarkan Satuan Kerja
101	Grafik II - 17	Jumlah Iklan Per Sektor
102	Grafik II - 18	Pelanggaran Berdasarkan Kategori Dugaan Pelanggaran
118	Grafik III - 1	Sektor Industri Saham Syariah di Indonesia
119	Grafik III - 2	Perkembangan Jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah
120	Grafik III - 3	Perkembangan Sukuk Negara <i>Outstanding</i>
121	Grafik III - 4	Jumlah Entitas IKNB Syariah Triwulan IV-2017
133	Grafik IV - 1	Siklus Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK)
138	Grafik IV - 2	Gambaran Topik Rapat Dewan Komisiner
139	Grafik IV - 3	Statistik Pengunjung <i>Website</i> OJK
140	Grafik IV - 4	<i>Tone</i> Pemberitaan OJK Triwulan IV-2017
140	Grafik IV - 5	Siaran Pers Per Bidang
141	Grafik IV - 6	Kunjungan Institusi Triwulan IV-2017
142	Grafik IV - 7	Statistik OJK TV Triwulan IV-2017
142	Grafik IV - 8	Realisasi Penerimaan
142	Grafik IV - 9	Realisasi Anggaran



# Ringkasan Eksekutif



# Ringkasan Eksekutif

## TINJAUAN PEREKONOMIAN GLOBAL DAN DOMESTIK

Perekonomian global sepanjang triwulan IV-2017 menunjukkan perkembangan positif dengan ketidakpastian pasar keuangan global terpantau mereda meskipun terdapat *downside risk* terkait pengetatan kebijakan moneter negara-negara maju dan peningkatan tensi geopolitik. Perekonomian Amerika Serikat (AS) melanjutkan pemulihan tercermin dari sejumlah indikator seperti tingkat pengangguran yang mencapai titik terendahnya, inflasi yang masih di atas target The Fed, serta meningkatnya permintaan domestik. Perekonomian zona Euro mencatat perkembangan yang semakin solid ditopang oleh ekspor dan impor yang membaik. Perekonomian Jepang dan Tiongkok juga mengalami perbaikan tercermin dari kinerja eksternal mengalami perbaikan serta inflasi menunjukkan tren meningkat. Secara umum, pemulihan perekonomian global antara lain didorong oleh meningkatnya harga sebagian besar komoditas dunia, terutama minyak dan nikel. Optimisme tersebut mendorong IMF untuk menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia 2017 menjadi 3,6%.

Perekonomian Indonesia dalam kondisi terjaga, dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,19% dan pertumbuhan PDB sebesar 5,07%. Pertumbuhan tersebut dipengaruhi pertumbuhan investasi khususnya pada sektor infrastruktur serta meningkatnya kinerja ekspor dan impor. Persepsi risiko dan prospek

perekonomian Indonesia menunjukkan arah perbaikan seiring terjaganya fundamental ekonomi dalam negeri. Inflasi terjaga pada level 3,61% dan surplus neraca perdagangan tercatat pada USD 0,9 miliar. Perbaikan sektor riil terpantau masih moderat, dan diperkirakan semakin solid sejalan dengan membaiknya prospek ekonomi dalam negeri.

Pasar keuangan domestik melanjutkan penguatan dengan volatilitas pasar relatif rendah. Secara keseluruhan investor nonresiden membukukan *net buy* di pasar modal domestik. Penguatan ini turut didukung oleh membaiknya prospek ekonomi domestik serta meningkatnya kepercayaan global antara lain ditandai kenaikan peringkat Indonesia oleh Fitch Ratings (dari BBB- menjadi BBB dengan *outlook* stabil) serta membaiknya posisi Indonesia dalam beberapa peringkat dunia seperti *Global Competitiveness Index* dan *Ease of Doing Business*. Pada triwulan IV-2017, IHSG termasuk dalam jajaran indeks saham berkinerja terbaik di kawasan Asia-Pasifik membukukan pertumbuhan sebesar 7,71% (*qtq*) atau 19,99% (*yoy*), dan mencetak rekor tertingginya pada level 6.355,65. Pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS relatif stabil meskipun sedikit melemah secara poin *qtq* sebesar 0,7%. Pasar surat utang dalam negeri terpantau melanjutkan tren penguatan diindikasikan dengan penurunan imbal hasil (*yield*) SBN rata-rata sebesar 12 *bps*.





## TINJAUAN OPERASIONAL SEKTOR JASA KEUANGAN

Dalam rangka mewujudkan sektor jasa keuangan yang teratur, adil dan transparan sehingga dapat tumbuh secara berkelanjutan, stabil dan melindungi kepentingan konsumen, OJK melakukan beberapa inisiatif, antara lain:

1. Peralihan Sistem Informasi Pekreditan ke SLIK

Dalam rangka mendukung pelayanan kepada Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan masyarakat serta mengendalikan risiko kredit, OJK membangun Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Untuk mempersiapkan implementasi SLIK sepenuhnya oleh OJK, telah dilakukan *parallel run* SLIK dengan Sistem Informasi Debitur (SID) selama triwulan IV-2017.

2. Penerbitan Keputusan Dewan Komisiner tentang Daerah yang Memerlukan Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank akibat Bencana Alam

OJK menerbitkan KDK 20/KDK.03/2017 tentang Penetapan Kabupaten Karangasem Bali sebagai Daerah yang Memerlukan Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank. Kebijakan ini bertujuan memberikan kelonggaran dalam penetapan kualitas kredit baik terhadap kredit secara keseluruhan maupun kredit yang direstrukturisasi kepada debitur yang terkena dampak bencana. Kebijakan merupakan bentuk perlakuan

khusus terhadap kredit yang disalurkan untuk debitur atau proyek yang berada di lokasi "*distressed area*" dan bersifat sementara (*temporary measures*).

3. Pendirian Bank Wakaf LKM Syariah di Pondok Pesantren

OJK bekerjasama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) mendirikan lembaga keuangan mikro syariah (LKM syariah) yang fokus pada pembiayaan masyarakat kecil di lingkungan pesantren. Pendirian LKM syariah ini dilakukan agar dapat meningkatkan literasi keuangan syariah serta sebagai upaya mengatasi ketimpangan dan kemiskinan di masyarakat.

4. Penerbitan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI *Revisit* 2017)

OJK menerbitkan SNLKI (*Revisit* 2017) sebagai penyempurnaan SNLKI 2013 sehingga perubahan dan perkembangan literasi dan inklusi keuangan dapat diakomodasi dengan baik, dan pencapaian indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat dapat diakselerasi. Pada SNLKI (*Revisit* 2017) terdapat penyesuaian kerangka dasar menjadi tiga Program Strategis, yang terdiri dari (1) Cakap Keuangan, (2) Sikap dan Perilaku Keuangan Bijak, dan (3) Akses Keuangan.

Dalam menjalankan fungsi dan tugas pengaturan, pengawasan, edukasi dan perlindungan konsumen, OJK senantiasa menjalin kerja sama dan koordinasi dengan berbagai lembaga antara lain Nota Kesepahaman dengan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) mengenai Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Sektor Jasa Keuangan dan Nota Kesepahaman dengan Universitas Sumatera Utara (USU) mengenai Pengembangan sektor jasa keuangan, peningkatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

Terkait penguatan kapasitas organisasi, sesuai dengan siklus Manajemen Strategis, Anggaran dan Kinerja (MSAK) OJK, dilakukan penandatanganan Kesepakatan Kinerja dan *Project Charter* Inisiatif Strategis 2018 sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan program kerja dan inisiatif strategis di tahun yang akan datang. Atas komitmen dalam pengelolaan tata kelola yang baik, OJK dianugerahi Penghargaan Pengelolaan LHKPN dan Pengendalian Gratifikasi Terbaik dari KPK untuk kategori Kementerian dan Lembaga.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OJK, telah dikembangkan sistem *e-reporting* untuk meningkatkan kualitas dan ketepatan penyampaian Laporan Keuangan serta mempermudah pengawas dalam pengolahan dan analisa data keuangan. Pengembangan pada aplikasi lainnya juga dilakukan seperti Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT), Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi (SIPT), Sistem Informasi Risk Based Supervision (SIRIBAS), Sistem Informasi Penetapan Tarif Premi Asuransi (SIPETIR), Sistem Monitoring Data Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi (SIKARIN) dan lain sebagainya.

Selama triwulan IV-2017 OJK menerima 15 kunjungan instansi dengan total 986 peserta serta memberikan 15 Siaran Pers dan enam Jumpa Pers. Atas pelayanan OJK kepada masyarakat melalui *contact centre* dengan fitur *trackable* dan *traceable* yang inovatif, OJK dianugerahi penghargaan *Gold* pada acara *The Best Contact Center Indonesia* Tahun 2017.

Pembahasan lengkap mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OJK selama triwulan IV-2017 telah dijabarkan dalam buku Laporan Triwulanan IV-2017.

# Dukungan OJK Terhadap Program Prioritas Pemerintah

OJK melaksanakan sejumlah Program dalam rangka mendukung sektor-sektor prioritas pemerintah. Sampai triwulan IV-2017 ini, program tersebut menunjukkan perkembangan positif.

## PROGRAM JANGKAU, SINERGI DAN GUIDELINE (JARING)

Pembiayaan Sektor Kelautan dan Perikanan melibatkan 15 bank *partner* dan Konsorsium lembaga pembiayaan. Penyaluran kredit program JARING tumbuh **6,81% (qtq)** menjadi **Rp28,5 triliun** dan meningkatnya kualitas kredit sehingga **NPL gross** turun menjadi **1,79%**



## ASURANSI KERANGKA KAPAL

Asuransi yang mewajibkan nelayan mengasuransikan kapalnya dengan asuransi penyingkiran kerangka kapal dan/atau perlindungan ganti rugi. Realisasi jumlah kapal yang dilindungi asuransi penyingkiran kerangka kapal menjadi **1.646 kapal**.



## ASURANSI USAHA TANI PAD (AOTP)

Program perlindungan dan pemberdayaan petani untuk meminimalkan dampak negatif perubahan iklim dan gangguan serangan organisme yang menyebabkan gagal panen pertanian. Jumlah lahan pertanian yang terdaftar meningkat **9,21% (qtq)** menjadi **997.960,55 (ha)** atau **99,80%** dari target **1 juta Ha**



## EFEK BERAGUN ASET - SURAT PARTISIPASI (EBA SP)

EBA-SP merupakan Efek Beragun Aset yang diterbitkan oleh Penerbit yang portofolionya berupa kumpulan piutang dan merupakan bukti kepemilikan secara proporsional atas kumpulan piutang yang dimiliki bersama. Adapun sampai dengan triwulan IV-2017 telah diterbitkan **4 izin EBA-SP** dengan total nilai sekuritisasi akhir sebesar **Rp2,23 triliun**.



## ASURANSI USAHA TERNAK SAPI (AUTS)

Program AUTS adalah program pemberian ganti rugi kepada peternak apabila terjadi kematian pada sapi ternak. Sebanyak **92.176 ekor** sapi telah dilindungi dan realisasi premi adalah sebesar **Rp 18.435.200.000,00**.



## LAYANAN KEUANGAN MIKRO (LAKU MIKRO)

Layanan terpadu dengan proses yang sederhana, cepat, akses mudah, dan harga terjangkau. Realisasi Laku Mikro adalah total rekening SiPintar sebanyak **1.024.556** dengan **jumlah outlet** sebanyak **9.015**



## LAKU PANDAI

Kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan didukung penggunaan sarana teknologi informasi. Jumlah agen Laku Pandai mencapai **740.121 agen**. Jumlah dana dan nasabah tabungan yang berhasil dihimpun masing-masing sebesar **Rp1,03 triliun** dan **13.645.396 nasabah**



Jumlah bank 279 bank

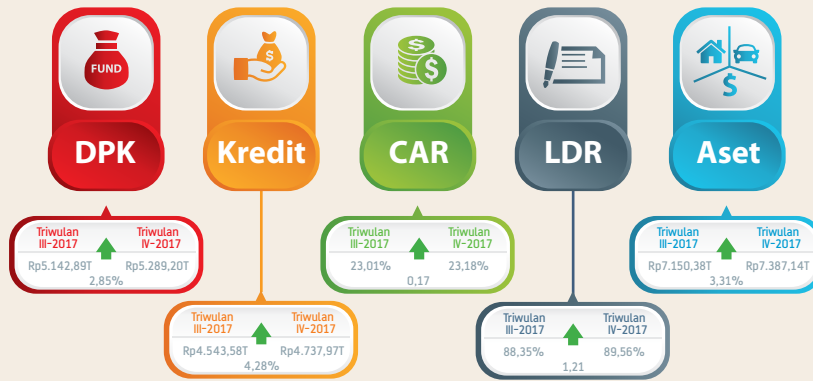
Jumlah rekening 8.045.226

Nominal Rp1,63 triliun

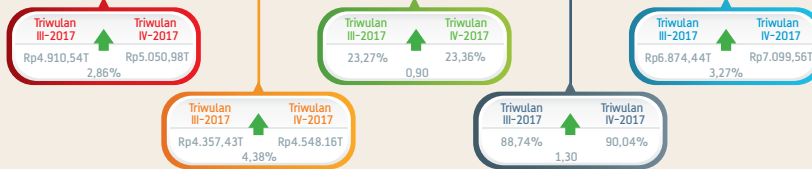
Jumlah perjanjian kerja sama 199.819



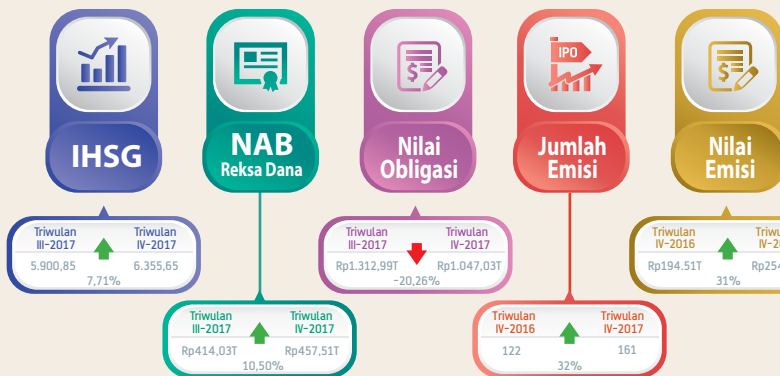
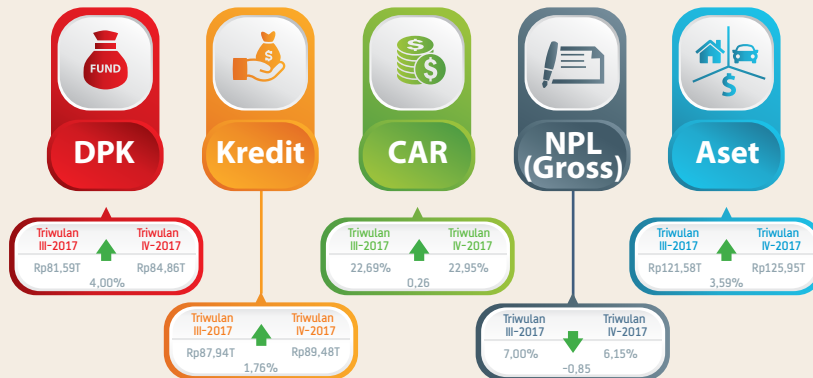
Bank Umum



Bank Umum Konvensional

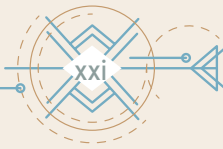


BPR

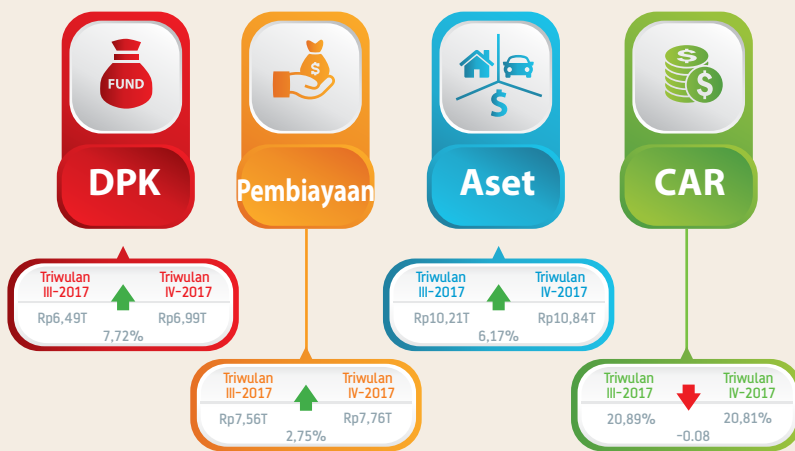
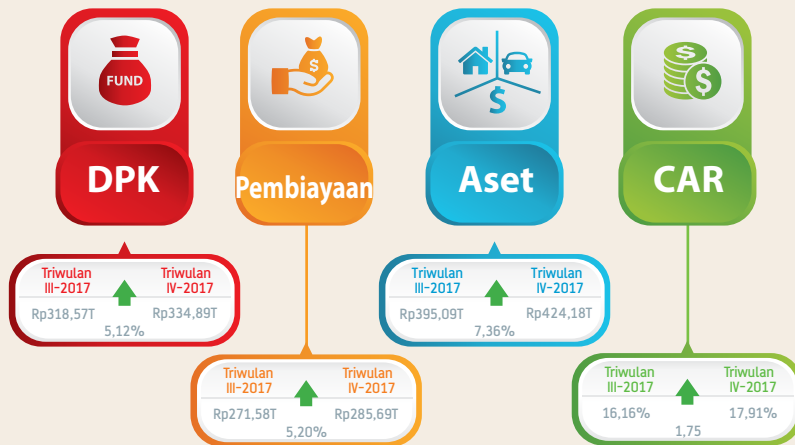


IKNB

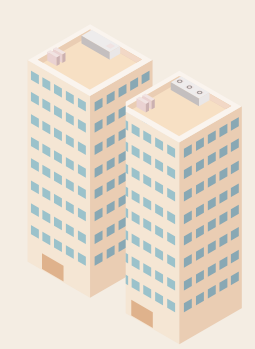
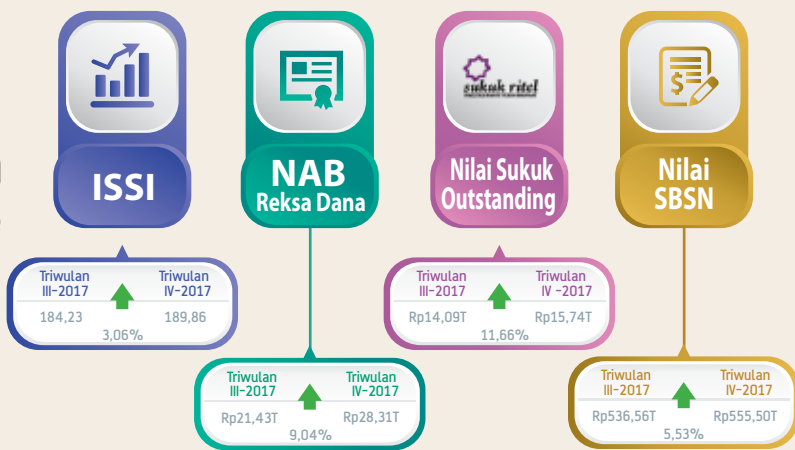




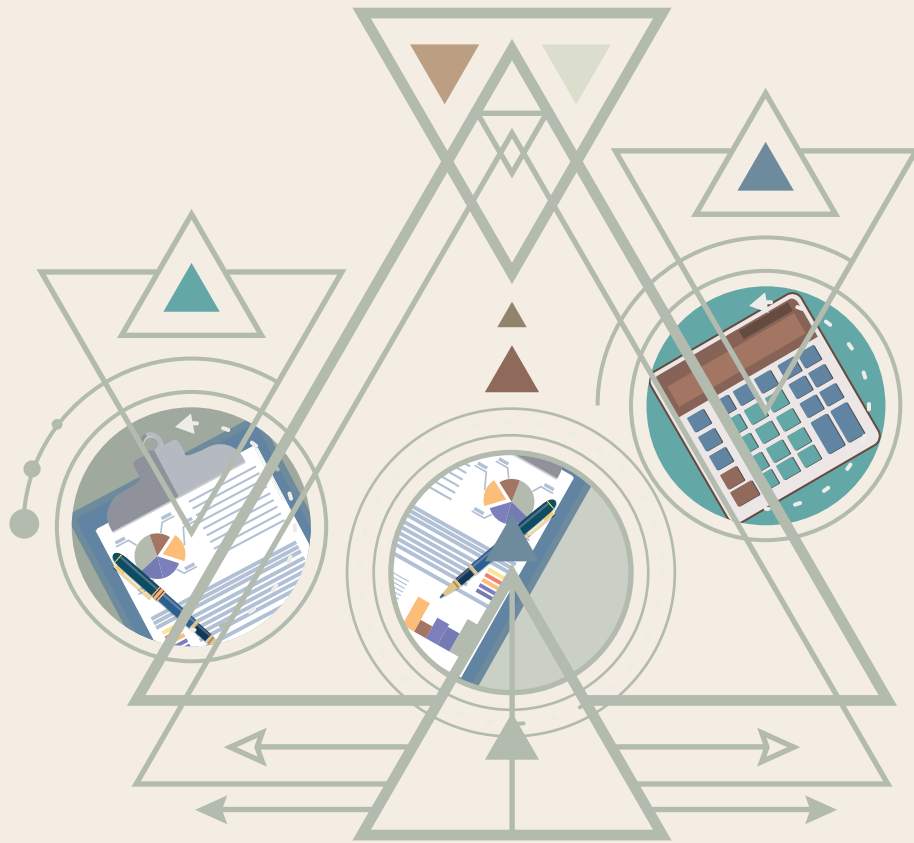
**Bank Umum Syariah**



**PASAR MODAL SYARIAH**  
*Berinvestasi yang Amanah*







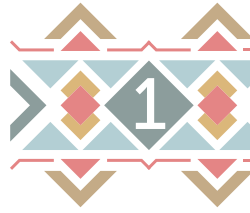
# Tinjauan Industri Sektor Jasa Keuangan







# Tinjauan Industri Sektor Jasa Keuangan



## 1.1 PERKEMBANGAN EKONOMI DAN PASAR KEUANGAN

### 1.1.1 Perkembangan Ekonomi Global

*Perekonomian global sepanjang triwulan IV-2017 menunjukkan perkembangan yang positif, yang turut didorong oleh perbaikan perdagangan dunia dan meningkatnya harga komoditas. Ketidakpastian di pasar keuangan global juga terpantau mereda, meskipun masih terdapat downside risk terkait pengetatan kebijakan moneter negara-negara maju dan peningkatan tensi geopolitik.*

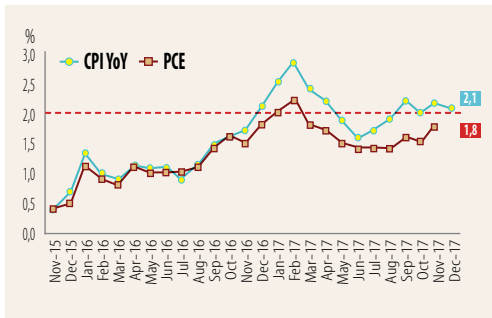
#### **Perkembangan Ekonomi Beberapa Negara Utama**

Pemulihan ekonomi Amerika Serikat (AS) pada triwulan IV-2017 masih berlanjut. Kondisi ini dikonfirmasi oleh membaiknya sejumlah data indikator perekonomian seperti tingkat pengangguran yang stabil, inflasi yang di atas target The Fed, serta meningkatnya permintaan domestik AS. Tingkat pengangguran tercatat

pada level terendahnya sejak 2001 pada level 4,1% per Desember 2017. Adapun inflasi terpantau stabil sebesar 2,1% yoy per Desember 2017 (September 2017: 2,2% yoy), didorong oleh penguatan harga energi dan komoditas dunia. Angka *Personal Consumption Expenditures* juga meningkat per Desember 2017 tercatat sebesar 1,8% yoy. Sementara itu, nilai ekspor maupun impor AS menunjukkan arah peningkatan sejalan dengan perbaikan perdagangan global.

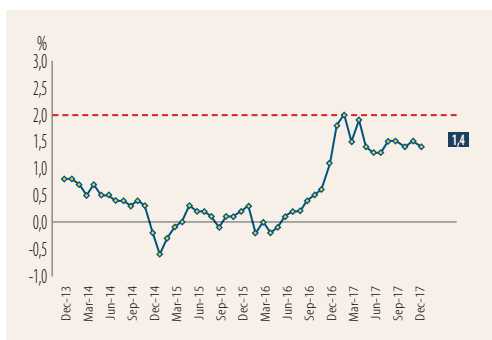
The Fed melakukan normalisasi neraca sejak Oktober 2017. Sesuai dengan ekspektasi pasar, pada rapat *Federal Open Market Committee* (FOMC) bulan Desember 2017, The Fed menaikkan *Fed Funds Rate* (FFR) sebesar 25 bps pada kisaran 1,25%-1,50%. Pada rapat tersebut, The Fed membahas *outlook* perekonomian AS setelah diterapkannya reformasi perpajakan oleh Presiden Donald Trump. The Fed berpendapat bahwa perekonomian AS berpotensi melanjutkan perbaikan pasca-reformasi pajak, sehingga mendorong The Fed untuk menaikkan FFR lebih cepat. The Fed juga menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi AS 2018 dari 2,1% menjadi 2,5%.

**Grafik I - 1** Tingkat Inflasi Amerika Serikat



Di zona Euro, perekonomian juga mencatat beberapa perkembangan positif seiring berlanjutnya kebijakan moneter yang akomodatif. Perekonomian zona Euro mencatat perkembangan yang semakin solid, yang turut ditopang oleh ekspor dan impor yang membaik di triwulan IV-2017. Tingkat pengangguran juga semakin menurun dan tercatat pada level 8,7% per Desember 2017. Selain itu, tingkat inflasi zona Euro juga sejalan dengan ekspektasi pasar, yaitu stabil pada 1,4% yoy di Desember 2017. Seiring perkembangan tersebut, Bank Sentral Eropa (ECB) menegaskan untuk mengurangi stimulus menjadi EUR30 miliar di 2018.

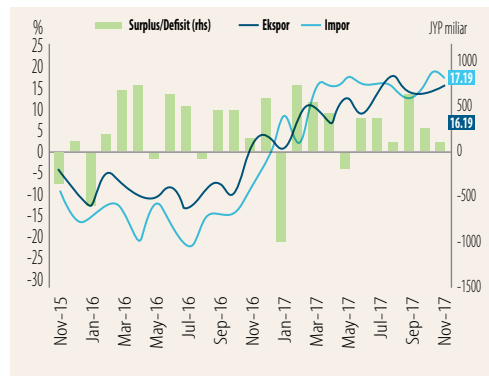
**Grafik I - 2** Tingkat Inflasi Zona Euro



Di Jepang, perekonomian mulai menunjukkan perbaikan secara gradual, terutama terlihat dari kinerja eksternal Jepang. Ekspor dan impor Jepang membukukan perbaikan, didukung oleh menguatnya permintaan global. Program stimulus Bank Sentral Jepang (BoJ) untuk mendorong perekonomian berhasil mendorong ekspor Jepang, namun belum dapat mendorong

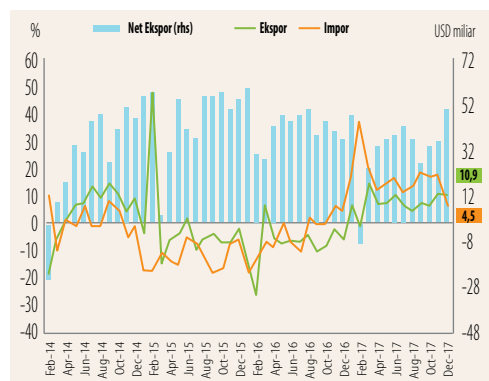
inflasi Jepang untuk mencapai target BoJ sebesar 2%. Inflasi Jepang pada Desember 2017 tercatat meningkat sebesar 1,0% yoy. BoJ menyatakan akan terus melanjutkan pembelian surat berharga dalam upaya mendorong inflasi mencapai target yang ditetapkan.

**Grafik I - 3** Kinerja Eksternal Jepang



Kinerja perekonomian Tiongkok menunjukkan perkembangan positif, didukung kebijakan *rebalancing* secara gradual serta tingkat konsumsi dan perdagangan eksternal yang membaik. Pertumbuhan ekspor maupun impor Tiongkok memasuki zona ekspansi sejak awal 2017, dengan surplus perdagangan pada triwulan IV-2017 mencapai USD133 miliar. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Tiongkok di 2017 tercatat sebesar 6,9%, membaik dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun tingkat inflasi per Desember 2017 terpantau meningkat menjadi sebesar 1,8% yoy (September 2017: 1,6% yoy).

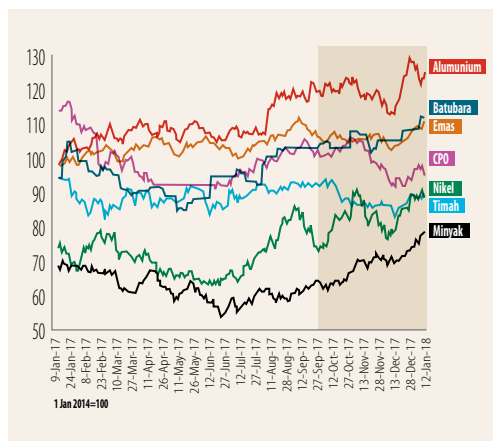
**Grafik I - 4** Kinerja Eksternal Tiongkok



## Perkembangan Harga Komoditas

Harga sebagian besar komoditas dunia melanjutkan kecenderungan meningkat pada triwulan IV-2017. Penguatan terbesar terjadi pada harga komoditas minyak dan nikel. Harga minyak menunjukkan penguatan, antara lain dipengaruhi oleh jumlah produksi dan cadangan minyak mentah AS yang menurun sejak Oktober 2017. Sementara itu, penguatan harga nikel dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan dari Tiongkok.

Grifik 1 - 5 Perkembangan Harga Komoditas Dunia



## Proyeksi Ekonomi Global

Dana Moneter Internasional (IMF) dalam *World Economic Outlook* edisi Oktober 2017 memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia akan meningkat sejalan dengan perbaikan di negara-negara ekonomi utama, khususnya Amerika Serikat dan Eropa.

IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia 2017 sebesar 3,6%, lebih tinggi dibandingkan proyeksi Juli 2017 (3,5%) dan realisasi 2016 (3,2%). Peningkatan pertumbuhan tersebut didorong oleh optimisme membaiknya perdagangan dunia, investasi, serta membaiknya keyakinan pasar. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang yang berbasis komoditas diperkirakan membaik seiring peningkatan harga komoditas dunia.

Namun demikian, dalam laporan tersebut IMF juga menyampaikan kekhawatiran akan tingkat inflasi di negara-negara maju yang masih rendah serta tekanan dari konflik geopolitik yang patut diwaspadai.

Tabel I - 1 Proyeksi IMF dalam *World Economic Outlook* Oktober 2017

Negara/Region	2016	Proyeksi 2017		Proyeksi 2018	
		Juli	Oktober	Juli	Oktober
Dunia	3,2	3,5	↑ 3,6	3,6	↑ 3,7
<i>Advanced Economies</i>	1,7	2,0	↑ 2,2	1,9	↑ 2,0
Amerika Serikat	1,5	2,1	↑ 2,2	2,1	↑ 2,3
Zona Euro	1,8	1,9	↑ 2,1	1,7	↑ 1,9
Jepang	1,0	1,3	↑ 1,5	0,6	↑ 0,7
<i>Emerging Markets</i>	4,3	4,6	↑ 4,6	4,8	↑ 4,9
<b>Non Komoditas</b>					
Tiongkok	6,7	6,7	↑ 6,8	6,4	↑ 6,5
India	7,1	7,4	↓ 6,7	7,1	↑ 7,4
<b>Komoditas</b>					
Indonesia	5,0	5,1	↑ 5,2	5,3	↑ 5,3
Brazil	-3,6	0,3	↑ 0,7	0,3	↑ 1,5
Rusia	-0,2	1,4	↑ 1,8	1,4	↑ 1,6
Malaysia	4,2	4,5	↑ 5,4	4,7	↑ 4,8

## 1.1.2 Perkembangan Ekonomi Domestik

*Stabilitas makroekonomi domestik pada triwulan IV-2017 dalam kondisi terjaga, dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga di atas level 5%. Persepsi risiko dan prospek perekonomian Indonesia menunjukkan arah perbaikan seiring masih terjaganya fundamental ekonomi dalam negeri. Perbaikan sektor riil terpantau masih moderat, dan diperkirakan akan semakin solid sejalan dengan membaiknya prospek ekonomi dalam negeri.*

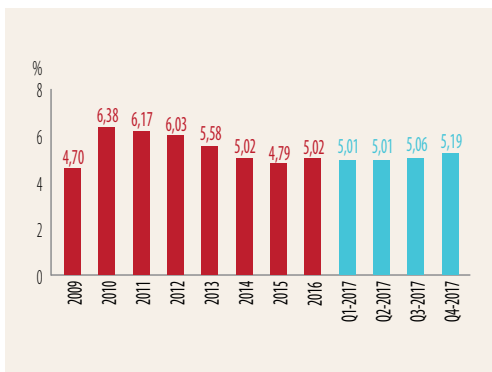
### Pertumbuhan Ekonomi

Sejalan dengan membaiknya prospek ekonomi global dan domestik, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV-2017 tercatat sebesar 5,19% yoy, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (5,06%). Secara keseluruhan, Produk Domestik Bruto Indonesia

2017 tumbuh sebesar 5,07%, yang merupakan angka pertumbuhan tertinggi dalam empat tahun terakhir.

Perbaikan kinerja ekonomi dalam negeri pada triwulan IV-2017 didorong oleh membaiknya pertumbuhan investasi, khususnya pada investasi bangunan seiring berlanjutnya pembangunan infrastruktur. Capaian ini juga turut didorong oleh meningkatnya belanja Pemerintah. Konsumsi rumah tangga dan investasi nonbangunan juga masih relatif kuat. Sejalan dengan pemulihan pada perdagangan dunia, pertumbuhan ekspor maupun impor Indonesia juga membukukan peningkatan.

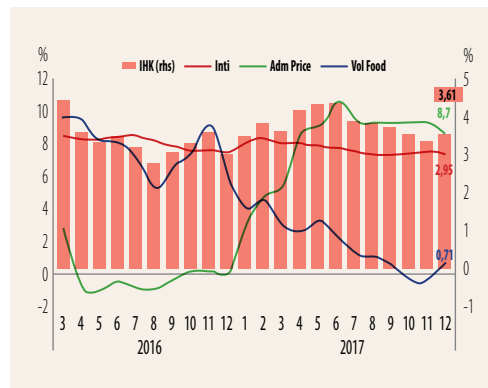
Grafik I - 6 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia



### Tingkat Inflasi

Sepanjang triwulan IV-2017, tingkat inflasi berada pada level yang terkendali sepanjang triwulan IV-2017, dan terjaga dalam kisaran target  $4 \pm 1\%$ . Pada Desember 2017, tingkat inflasi tercatat sebesar 3,61% yoy, lebih rendah dibandingkan posisi September 2017 sebesar 3,72% yoy. Terjaganya tingkat inflasi ini didorong oleh relatif rendahnya tingkat inflasi inti dan *volatile foods*, serta terjaganya dampak dari kenaikan sejumlah tarif sebagaimana tercermin dari tingkat inflasi *administered price*.

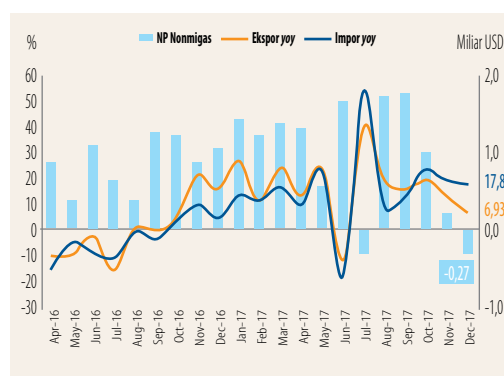
Grafik I - 7 Tingkat Inflasi Indonesia



### Perdagangan Eksternal dan Sektor Riil

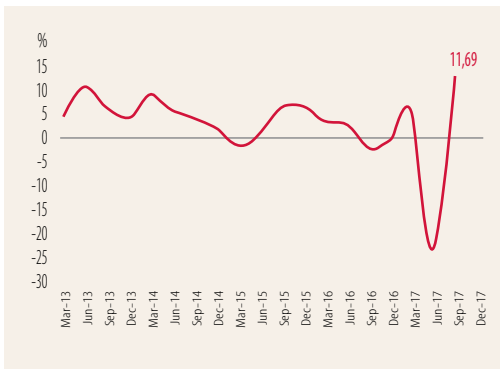
Dari sisi kinerja perdagangan eksternal, neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus sebesar USD0,9 miliar pada triwulan IV-2017, lebih rendah dibandingkan surplus triwulan sebelumnya (USD3,2 miliar). Penurunan surplus ini dilatarbelakangi oleh penurunan kinerja ekspor nonmigas, sejalan dengan tren penurunan harga minyak sawit di tengah kecenderungan peningkatan harga komoditas lainnya. Namun demikian, kinerja neraca perdagangan diperkirakan terus membaik ke depan seiring perbaikan pertumbuhan ekonomi dunia dan perdagangan global.

Grafik I - 8 Neraca Perdagangan Indonesia



Sektor riil domestik terpantau masih dalam proses konsolidasi. Hal ini tercermin dari sejumlah indikator seperti *Purchasing Manager's Index* (PMI) manufaktur, pertumbuhan penjualan semen, dan pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor yang baru mencatat perbaikan terbatas. Ke depan, seiring dengan membaiknya *outlook* perekonomian domestik, sektor riil diekspektasikan akan mencatat perbaikan yang semakin solid.

**Grafik I - 9** Pertumbuhan Penjualan Semen Triwulanan



### 1.1.3 Perkembangan Pasar Keuangan

*Pasar keuangan domestik pada triwulan IV-2017 secara umum masih melanjutkan penguatan, dengan volatilitas pasar yang terpantau relatif rendah. Secara keseluruhan investor nonresiden juga masih membukukan net buy di pasar modal domestik. Penguatan ini turut didukung oleh membaiknya prospek ekonomi domestik serta meningkatnya kepercayaan global.*

Perkembangan pasar keuangan sepanjang triwulan IV-2017 menunjukkan tren penguatan dengan volatilitas yang relatif rendah, sejalan dengan prospek ekonomi dalam negeri yang membaik serta kebijakan ekonomi yang akomodatif terhadap pertumbuhan investasi.

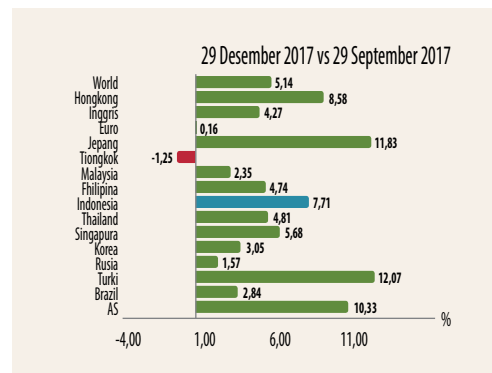
Persepsi positif terhadap pasar domestik juga didorong oleh kenaikan peringkat Indonesia oleh Fitch Ratings (dari BBB- menjadi BBB dengan outlook stabil) serta membaiknya posisi Indonesia dalam beberapa peringkat dunia seperti *Global Competitiveness Index* dan *Ease of Doing Business*.

### Pasar Saham

Pada triwulan IV-2017, IHSG membukukan pertumbuhan yang cukup cukup signifikan, yaitu sebesar 7,71% *qtoq*, dan mencetak rekor tertingginya pada level 6.355,65. Penguatan IHSG sejalan dengan penguatan indeks-indeks saham regional. Secara *yoy*, IHSG menguat sebesar 19,99% dan termasuk dalam jajaran indeks saham berkinerja terbaik di kawasan Asia-Pasifik.

Investor nonresiden pada triwulan ini membukukan *net sell* di pasar saham domestik yaitu Rp29,1 triliun (triwulan III-2017: *net sell* Rp28,1 triliun). Hal ini lebih dipengaruhi oleh *downside risk* eksternal, terutama ekspektasi pengetatan kebijakan moneter di negara-negara maju. Namun demikian, tekanan di pasar saham sepanjang triwulan IV-2017. terpantau relatif moderat. Pasar masih bergerak menguat ditopang oleh masuknya investor domestik.

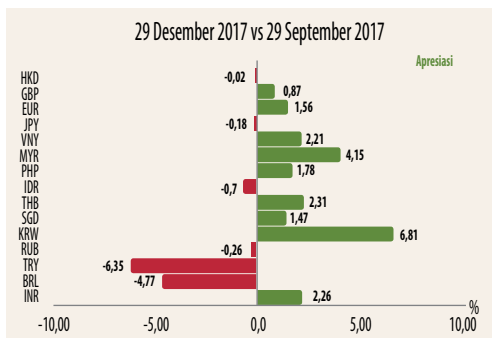
**Grafik I - 10** Perkembangan Indeks Saham Global dan Regional



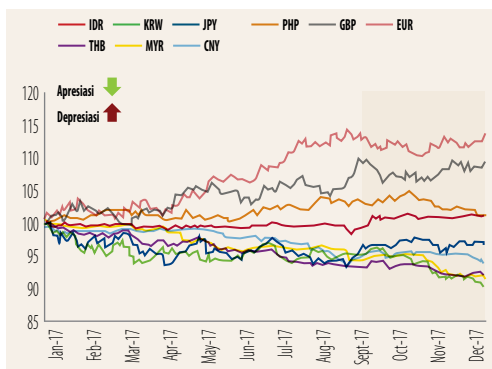
### Nilai Tukar Rupiah

Pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS (USD) relatif stabil sepanjang triwulan IV-2017, namun sedikit melemah secara poin *qtq* sebesar 0,7%. Pelemahan ini turut dipengaruhi oleh kebijakan normalisasi neraca The Fed serta kenaikan suku bunga FFR pada rapat FOMC The Fed Desember 2017. Selain itu, surplus Neraca Pembayaran Indonesia yang ditopang oleh investasi langsung dan investasi portofolio juga turut menambah pasokan USD di pasar Indonesia.

**Grafik I - 11** Perkembangan Nilai Tukar Global dan Regional



**Grafik I - 12** Pergerakan Nilai Tukar Global dan Regional



### Pasar Surat Berharga Negara

Pasar surat utang dalam negeri terpantau masih melanjutkan tren penguatan pada triwulan IV-

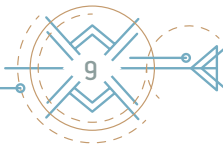
2017. Sejalan dengan perkembangan tersebut, rata-rata *yield* SBN mengalami penurunan dan *Credit Default Swap* (CDS) relatif terjaga. Dibandingkan akhir triwulan sebelumnya, imbal hasil (*yield*) SBN turun rata-rata sebesar 12 bps. Penurunan *yield* terjadi di semua tenor jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Secara keseluruhan, selama 2017 *yield* SBN membukukan penurunan rata-rata sebesar 141 bps.

Arah penguatan pasar SBN diiringi oleh peningkatan aksi beli investor nonresiden. Investor nonresiden membukukan *net buy* di pasar SBN sebesar Rp16,8 triliun, setelah pada triwulan sebelumnya mencatat *net buy* sebesar Rp53,9triliun. Perbaikan pada pasar utang Indonesia diperkirakan akan masih terus berlanjut seiring membaiknya prospek ekonomi domestik dan meningkatnya kepercayaan global.

## 1.2 PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN

### 1.2.1 Perkembangan Bank Umum

Ketahanan perbankan pada triwulan IV-2017 masih secara umum cukup solid, tercermin dari menguatnya permodalan dengan CAR yang naik 17 bps (*qtq*) menjadi 23,18%. Menguatnya permodalan tersebut didukung oleh meningkatnya rentabilitas dan efisiensi bank umum dengan ROA dan BOPO masing-masing sebesar 2,38% dan 79,27%. Fungsi intermediasi perbankan juga berjalan baik terlihat dari pertumbuhan kredit dan DPK bank umum masing-masing sebesar 4,28% (*yoy*) dan 2,85% (*yoy*), sehingga turut menopang pertumbuhan aset sebesar 3,31% (*yoy*). Kualitas kredit bank umum juga membaik dengan turunnya NPL *gross* menjadi 2,60%.



Tabel I - 2 Kinerja Bank Umum Triwulan IV-2017

Rasio	2016	2017		qtq		yoy	
	Desember	September	Desember	Triwulan III-2017	Triwulan IV-2017	Triwulan IV-2016	Triwulan IV-2017
Total Aset (dalam miliar rupiah)	6.729.700	7.150.388	7.387.144	↑ 1,77%	↑ 3,31%	↑ 9,74%	↑ 9,77%
Kredit (dalam miliar rupiah)	4.377.195	4.543.588	4.737.972	↑ 1,17%	↑ 4,28%	↑ 7,87%	↑ 8,24%
Dana Pihak Ketiga (dalam miliar rupiah)	4.836.758	5.142.891	5.289.209	↑ 1,92%	↑ 2,85%	↑ 9,60%	↑ 9,35%
- Giro (dalam miliar rupiah)	1.124.235	1.199.374	1.233.337	↑ 0,49%	↑ 2,83%	↑ 13,84%	↑ 9,70%
- Tabungan (dalam miliar rupiah)	1.551.809	1.574.694	1.701.175	↑ 1,30%	↑ 8,03%	↑ 11,16%	↑ 9,63%
- Deposito (dalam miliar rupiah)	2.160.714	2.368.823	2.354.697	↑ 3,08%	↓ -0,60%	↑ 6,46%	↑ 8,98%
CAR (%)	22,69	23,01	23,18	↑ 49	↑ 17	↑ 153	↑ 49
ROA (%)	2,17	2,42	2,38	↓ (0,2)	↓ (4)	↓ (9)	↑ 21
NIM/NOM (%)	5,47	5,19	5,15	↓ (2)	↓ (4)	↑ 24	↓ (32)
BOPO (%)	82,85	79,22	79,28	↓ (26)	↑ 6	↑ 68	↓ (357)
NPL/NPF Gross (%)	2,93	2,93	2,60	↓ (3)	↓ (34)	↑ 44	↓ (33)
NPL/NPF Net (%)	1,24	1,30	1,17	↓ (11)	↓ (13)	↑ 3	↓ (7)
LDR/LFR (%)	90,50	88,35	89,56	↓ (67)	↑ 121	↓ (145)	↓ (94)

## 1.2.2 Perkembangan Bank Umum Konvensional

Pada triwulan IV-2017, kondisi ketahanan BUK cukup solid tercermin dari CAR mencapai 23,36%. Kuatnya permodalan tersebut didorong oleh stabilnya rentabilitas (ROA) sebesar 2,45%

serta meningkatnya efisiensi yang tercermin dari penurunan rasio BOPO menjadi 78,64%. Aset, Kredit, dan DPK BUK tumbuh lebih baik dari tahun sebelumnya. Selain itu, risiko kredit makin terjaga dengan menurunnya NPL gross dan NPL net masing-masing menjadi 2,50% dan 1,11%.

Tabel I - 3 Kondisi Umum Perbankan Konvensional

Rasio	2016		2017		qtq		yoy	
	Septem-ber	Desember	Septem-ber	Desember	Triwulan III-2017	Triwulan IV-2017	Triwulan IV-2016	Triwulan IV-2017
<b>Bank Umum Konvensional</b>								
Total Aset (dalam miliar rupiah)	6.223.751	6.475.602	6.874.442	7.099.564	↑ 1,78%	↑ 3,27%	↑ 9,40%	↑ 9,64%
Kredit (dalam miliar rupiah)	4.040.397	4.199.713	4.357.435	4.548.155	↑ 1,20%	↑ 4,38%	↑ 7,58%	↑ 8,30%
Dana Pihak Ketiga (dalam miliar rupiah)	4.405.603	4.630.352	4.910.543	5.050.984	↑ 1,85%	↑ 2,86%	↑ 9,25%	↑ 9,08%
- Giro (dalam miliar rupiah)	1.047.140	1.104.583	1.171.457	1.207.069	↑ 0,49%	↑ 3,04%	↑ 13,56%	↑ 9,28%
- Tabungan (dalam miliar rupiah)	1.370.365	1.487.077	1.507.306	1.626.595	↑ 1,17%	↑ 7,91%	↑ 10,71%	↑ 9,38%
- Deposito (dalam miliar rupiah)	1.988.098	2.038.692	2.231.780	2.217.321	↑ 3,06%	↓ -0,65%	↑ 6,06%	↑ 8,76%
CAR (%)	22,60	22,93	23,27	23,36	↑ 53	↑ 9	↑ 155	↑ 43
ROA (%)	2,38	2,23	2,48	2,45	↑ 0,2	↓ (2)	↓ (10)	↑ 23
NIM (%)	5,65	5,63	5,34	5,32	↓ (2)	↓ (2)	↑ 24	↓ (32)
BOPO (%)	81,02	82,22	78,71	78,64	↓ (29)	↓ (7)	↑ 73	↓ (358)
NPL Gross (%)	3,04	2,86	2,87	2,50	↓ (3)	↓ (37)	↑ 37	↓ (36)
NPL Net (%)	1,37	1,20	1,23	1,11	↓ (11)	↓ (12)	↑ 6	↓ (9)
LDR (%)	91,71	90,70	88,74	90,04	↓ (57)	↑ 131	↓ (141)	↓ (65)

Ket : ↑ Menunjukkan peningkatan pertumbuhan dan berdampak baik ↓ Menunjukkan penurunan pertumbuhan dan berdampak kurang baik  
 ↓ Menunjukkan penurunan pertumbuhan dan berdampak baik ↑ Menunjukkan peningkatan pertumbuhan dan berdampak kurang baik

\* NPL gross merupakan rasio yang digunakan untuk menilai risiko kredit sebelum dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nila (CKPN). Rasio ini mengukur porsi kredit bermasalah terhadap total kredit perbankan.

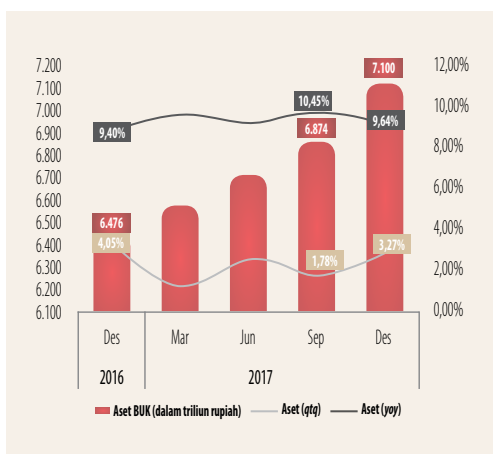
Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI) dan LBU, Desember 2017

### A. Aset

Total aset BUK pada triwulan IV-2017 tumbuh 9,64% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 9,40% (yoy). Peningkatan tersebut didorong oleh meningkatnya kredit sebagai komponen aset terbesar. Dari sisi pasiva, peningkatan pada DPK dan modal juga turut mempengaruhi meningkatnya aset. Seiring dengan tren tahunannya, secara triwulan aset juga tumbuh 3,27% (qtq) meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,78% (qtq), yang tercermin dari meningkatnya pertumbuhan Kredit dan DPK masing-masing tumbuh 4,38% (qtq) dan 2,86% (qtq).

Secara umum, aset perbankan Indonesia terindikasi memiliki tingkat konsentrasi yang cukup tinggi. Hal tersebut tercermin dari *Concentration Ratio* (CR) aset 4 BUK terbesar yang mencapai 48,81% sedangkan CR aset 20 BUK terbesar bahkan mencapai 79,87% dari aset perbankan.

Grafik I - 13 Perkembangan Aset BUK



Sumber: SPI, September 2017

Tabel I - 4 Tingkat Konsentrasi Aset BUK

Tahun	Aset	
	CR4 (%)	CR20 (%)
2014	45,94	79,70
2015	46,24	79,47
2016	48,18	80,14
Triwulan I-2017	47,52	79,37
Triwulan II-2017	47,96	79,42
Triwulan III-2017	47,84	79,28
Triwulan III-2017	48,81	79,87

Sumber: OJK, olahan

### B. Dana Pihak Ketiga

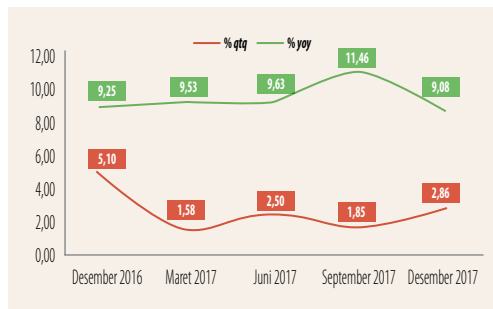
Di tengah tren penurunan suku bunga, DPK BUK tumbuh 9,08% (yoy) sedikit melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh 9,25% (yoy). Perlambatan utamanya dipengaruhi oleh melambatnya giro dan tabungan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya masing-masing tumbuh 9,28% (yoy) dan 9,38% (yoy), sementara deposito tumbuh meningkat 8,76% (yoy). Namun demikian, secara triwulanan DPK tumbuh meningkat sebesar 2,86% (qtq) dibandingkan triwulan III-2017 yang hanya tumbuh 1,85% (qtq).

### C. Kredit

Pada triwulan IV-2017, kredit BUK tumbuh 8,30% (yoy), meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (7,58%, yoy). Berdasarkan jenis penggunaan, KMK dan KI tumbuh masing-masing 8,58%



Grafik I - 14 Tren Pertumbuhan DPK

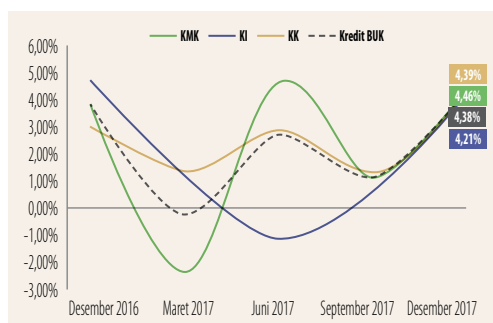


Sumber: SPI, September 2017

(yoy) dan 4,87% (yoy), yang menunjukkan adanya ekspansi kegiatan usaha meskipun kredit investasi melambat. Sementara itu, KK tumbuh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya dari 7,93% (yoy) menjadi 11,05% (yoy). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan permintaan masyarakat di dukung dengan tingkat inflasi yang relatif rendah.

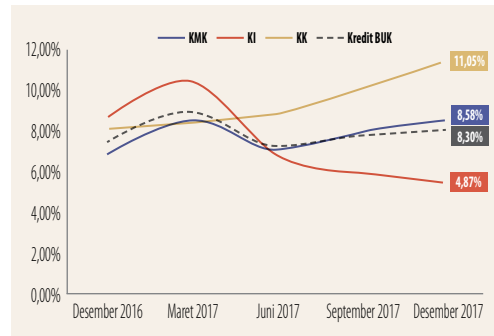
Seiring dengan pergerakan tahunannya, secara triwulanan kredit juga tumbuh 4,38% (qta), meningkat dari triwulan sebelumnya yang hanya tumbuh 1,20% (qta). Hal tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya pencairan kredit baru yang tercermin dari turunnya *undisbursed loan* sebesar 7,97% (qta), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 9,62% (qta).

Grafik I - 15 Tren Pertumbuhan Kredit (qta)



Sumber: SPI, Desember 2017

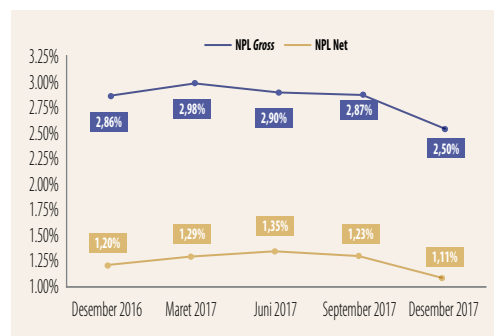
Grafik I - 16 Tren Pertumbuhan Kredit (yoy)



Sumber: SPI, Desember 2017

Di tengah meningkatnya pertumbuhan kredit, kualitas kredit juga menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. NPL gross BUK turun 36 bps (yoy) menjadi 2,50% dibandingkan tahun sebelumnya 2,87%. Selain itu, pencadangan yang dilakukan oleh bank juga memadai sehingga NPL net relatif rendah sebesar 1,11%. Dari ketiga jenis penggunaan, KMK dan KI memiliki NPL tertinggi sebesar 3,09% dan 2,44%, namun masih terjaga di bawah *threshold* 5%. Sementara itu, NPL KK masih cukup rendah sebesar 1,56%.

Grafik I - 17 Tren NPL (%)



Sumber: SPI, Desember 2017

#### D. Rentabilitas

Rentabilitas BUK pada triwulan IV-2017 meningkat 23 bps (yoy) dengan ROA sebesar 2,45% yang didorong oleh meningkatnya laba sebesar 21,43% (yoy). Efisiensi BUK juga meningkat tercermin dari turunnya rasio BOPO sebesar 358 bps (yoy) menjadi 78,64% yang turut mendorong meningkatnya rentabilitas. Peningkatan efisiensi didukung oleh meningkatnya pendapatan operasional serta turunnya beban non bunga yang utamanya berasal dari penurunan nilai wajar dan kerugian penjualan aset keuangan lainnya serta penurunan nilai wajar dan kerugian penjualan surat berharga.

#### D. Permodalan

Pada triwulan IV-2017 kondisi permodalan BUK masih solid tercermin dari CAR yang naik 43 bps (yoy) menjadi 23,36%. Hal tersebut antara lain dipengaruhi adanya tambahan modal disetor dan kenaikan laba sehingga mendorong pertumbuhan modal BUK sebesar 20,75% (yoy) yang lebih tinggi dari pertumbuhan ATMR sebesar 9,50% (yoy).

### 1.2.3 Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

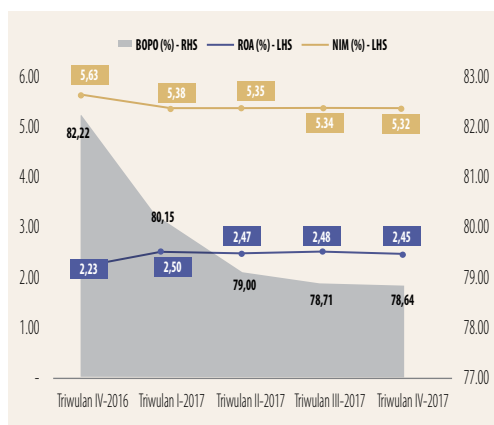
Pada triwulan IV-2017, industri BPR menunjukkan kondisi yang cukup baik dengan pertumbuhan kredit yang tumbuh lebih baik dari tahun sebelumnya. Ketahanan BPR juga cukup solid didukung dengan perbaikan tingkat efisiensi, meskipun masih dibayangi dengan peningkatan risiko kredit.

#### A. Aset

Aset BPR pada triwulan IV-2017 tumbuh 10,96% (yoy). Pertumbuhan aset salah satunya dipengaruhi oleh meningkatnya DPK BPR. Di samping itu, fungsi intermediasi BPR masih cukup baik tercermin dari meningkatnya penyaluran kredit.

Berdasarkan lokasi, aset BPR mayoritas berada di Pulau Jawa (56,85%) dengan Jawa Tengah memiliki porsi terbesar yaitu 22,49%. Berdasarkan pertumbuhannya, aset BPR di Banten tumbuh tertinggi sebesar 34,93% (yoy), meskipun memiliki porsi yang rendah yaitu 2,82% dari total aset BPR. Sementara peningkatan nominal aset BPR tertinggi berada di Jawa Tengah yang tumbuh 13,87% (yoy).

Grifik I - 18 Tren Rentabilitas dan Efisiensi



Sumber: SPI, Desember 2017

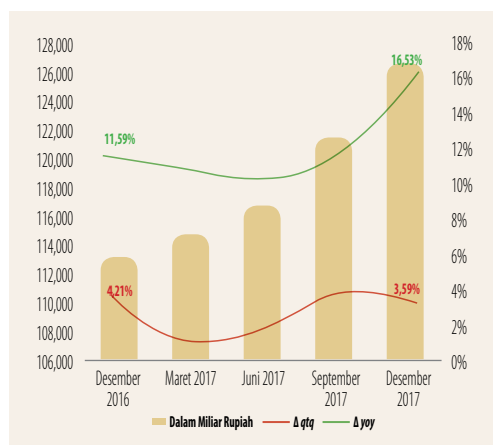
Tabel I - 5 Kondisi Umum BPR

Rasio	2016		2017		qtq		yoy	
	Septem-ber	Desember	Septem-ber	Desember	Triwulan III-2017	Triwulan IV-2017	Triwulan IV-2016	Triwulan IV-2017
<b>Total Aset</b> (dalam miliar rupiah)	108.921	113.501	121.583	125.945	↑ 4,24%	↑ 3,59%	↑ 11,59%	↑ 10,96%
<b>Kredit</b> (dalam miliar rupiah)	80.083	81.684	87.938	89.482	↑ 0,63%	↑ 1,76%	↑ 9,19%	↑ 9,55%
<b>Dana Pihak Ketiga</b> (dalam miliar rupiah)	72.756	75.725	81.597	84.861	↑ 4,81%	↑ 4,00%	↑ 12,58%	↑ 12,06%
- Tabungan (dalam miliar rupiah)	22.013	23.748	24.892	26.723	↑ 6,43%	↑ 7,36%	↑ 13,31%	↑ 12,53%
- Deposito (dalam miliar rupiah)	50.743	51.977	56.705	58.137	↑ 4,11%	↑ 2,53%	↑ 12,24%	↑ 11,85%
<b>NPL Gross (%)</b>	6,58	5,83	7,00	6,15	↓ 7	↓ (85)	↓ 46	↓ 32
<b>NPL Net (%)</b>	4,17	4,20	5,17	4,52	↓ 58	↓ (65)	↓ 86	↓ 32
<b>ROA (%)</b>	2,58	2,59	2,56	2,55	↓ (5)	↓ (1)	↓ (12)	↓ (4)
<b>LDR (%)</b>	77,71	76,24	76,59	75,36	↓ (244)	↓ (123)	↓ (157)	↓ (88)
<b>CR (%)</b>	15,93	19,01	17,14	19,86	204	273	(13)	85
<b>BOPO (%)</b>	82,04	81,19	81,07	80,50	↓ (32)	↓ (57)	↓ (40)	↓ (69)
<b>CAR (%)</b>	22,45	22,77	22,69	22,95	↑ 20	↑ 26	↑ 84	↑ 18

Ket : ↑ Menunjukkan peningkatan pertumbuhan dan berdampak baik ↓ Menunjukkan penurunan pertumbuhan dan berdampak kurang baik  
 ↓ Menunjukkan penurunan pertumbuhan dan berdampak baik ↑ Menunjukkan peningkatan pertumbuhan dan berdampak kurang baik

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI) Desember 2017

Grafik I - 19 Tren Aset BPR



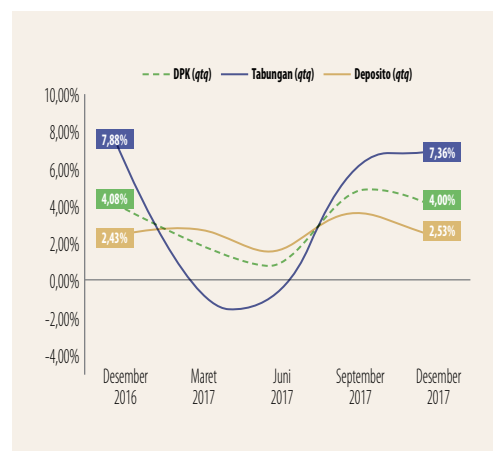
Sumber: SPI BPR, Desember 2017

## B. Dana Pihak Ketiga (DPK)

DPK BPR pada triwulan IV-2017 tumbuh 12,06% (yoy) menjadi Rp84,86 triliun, melambat dibandingkan pertumbuhan triwulan IV-2016 sebesar 12,58% (yoy). Perlambatan pertumbuhan antara lain tercermin pada melambatnya deposito dan tabungan yang masing-masing tumbuh 11,85% (yoy) dan 12,53% (yoy).

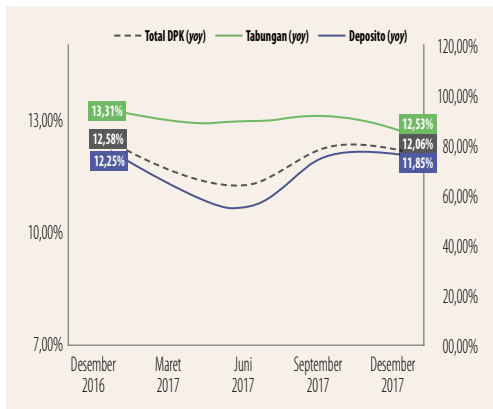
Secara triwulan, DPK BPR juga tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu sebesar 4,00% (qtq) yang disebabkan oleh turunnya pertumbuhan deposito yang hanya tumbuh sebesar 2,53% (qtq), meskipun tabungan tumbuh meningkat sebesar 7,36% (qtq). Deposito masih merupakan komponen DPK tertinggi dengan porsi 68,51%, diikuti tabungan sebesar 31,49%.

Grafik I - 20 Tren Pertumbuhan DPK (qtq)



Sumber: SPI BPR, Desember 2017

**Grafik I - 21** Tren Pertumbuhan DPK (yoy)



Sumber: SPI BPR, Desember 2017

### C. Kredit

Penyaluran kredit BPR pada triwulan IV-2017 tumbuh 9,55% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 9,19% (yoy). Kredit BPR sebagian besar disalurkan untuk tujuan konsumsi yang tercermin dari porsi KK sebesar 48,32%. Pertumbuhan KK dan KI menurun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu masing-masing sebesar 7,87% (yoy) dan 14,64% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan KMK mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu sebesar 10,61% dibanding tahun sebelumnya sebesar 7,29% (yoy).

**Tabel I - 6** Pertumbuhan Kredit BPR Berdasarkan Jenis Penggunaan

Jenis Penggunaan	2016			2017			Porsi	$\Delta$ qtq		$\Delta$ yoy	
	Desember	Sepember	Desember	Desember	Sepember	Desember		Triwulan III-2017	Triwulan IV-2017	Triwulan IV-2016	Triwulan IV-2017
Modal Kerja	35.958	39.116	39.773	44,45%	0,38%	1,68%	7,29%	10,61%			
Investasi	5.641	6.183	6.467	7,23%	1,25%	4,59%	15,14%	14,64%			
Konsumsi	40.085	42.639	43.241	48,32%	0,76%	1,41%	10,14%	7,87%			
<b>Total</b>	<b>81.684</b>	<b>87.938</b>	<b>89.482</b>	<b>100%</b>	<b>0,63%</b>	<b>1,76%</b>	<b>9,19%</b>	<b>9,55%</b>			

Sumber: SPI, Desember 2017

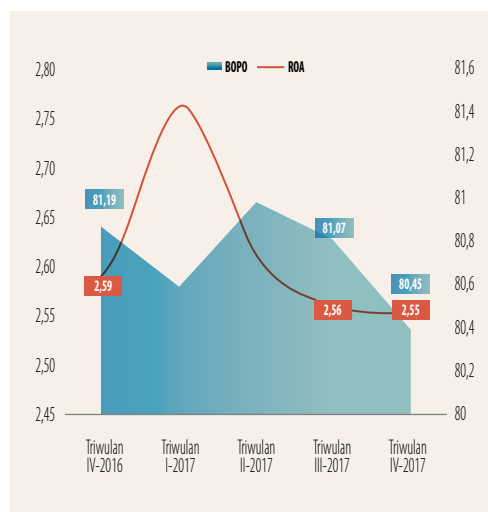
Peningkatan kredit produktif BPR juga tercermin pada meningkatnya kredit di sektor perdagangan besar dan eceran

yang tumbuh moderat sebesar 8,05% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan kredit BPR tertinggi terdapat pada sektor Pertambangan dan Penggalian, yaitu sebesar 30,96% (yoy), meskipun hanya memiliki porsi 0,24% terhadap total kredit BPR.

### D. Rentabilitas

Rentabilitas BPR pada triwulan IV-2017 relatif stabil dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercermin dari ROA sebesar 2,55%. Hal tersebut didukung oleh peningkatan efisiensi BPR yang tercermin dari penurunan BOPO sebesar 69 bps (yoy) menjadi 80,50% serta laba yang tumbuh stabil sebesar 9,33% (yoy).

**Grafik I - 22** ROA dan BOPO BPR



Sumber: SPI, Desember 2017

### E. Permodalan

Permodalan masih terjaga dengan CAR sebesar 22,95%, meningkat 18 bps (yoy) dibandingkan Desember 2016 sebesar 22,45%. Peningkatan tersebut didorong oleh meningkatnya laba sehingga turut memperkuat permodalan BPR. Tingginya permodalan BPR tersebut relatif memadai untuk menyerap risiko yang dihadapi.

### 1.2.4 Perkembangan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Porsi kredit UMKM tercatat sebesar 18,64% dari total kredit perbankan. Porsi tersebut sudah mencapai target minimal 15% terhadap total kredit pada akhir tahun 2017 sebagaimana diatur dalam PBI No.14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Berdasarkan sektor ekonomi, sebagian besar kredit UMKM terkonsentrasi pada sektor perdagangan besar dan eceran (52,41%), diikuti oleh industri pengolahan (10,55%), serta pertanian, perburuan dan kehutanan (8,92%). Pada triwulan IV-2017, kredit UMKM tumbuh 10,08% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 8,42% (yoy). Peningkatan kredit UMKM terbesar utamanya terdapat pada sektor perdagangan besar dan eceran serta pertanian yang masing-masing tumbuh 6,97% (yoy) dan 17,48% (yoy) yang seiring dengan meningkatnya penyaluran KUR pada sektor tersebut. Sementara itu, pertumbuhan kredit

UMKM tertinggi terdapat pada sektor listrik, gas, dan air yang tumbuh 43% (yoy).

Secara triwulan, kredit UMKM tumbuh 4,34% (qtq) menjadi Rp883 triliun, meningkat dari pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 1,86% (qtq). Peningkatan tersebut sejalan dengan pertumbuhan tahunnya yang utamanya dipengaruhi oleh meningkatnya kredit UMKM sektor listrik, gas, dan water yang tumbuh tertinggi sebesar 17,82% (qtq) serta besarnya peningkatan kredit UMKM pada sektor perdagangan besar dan eceran yang tumbuh 3,41% (qtq).

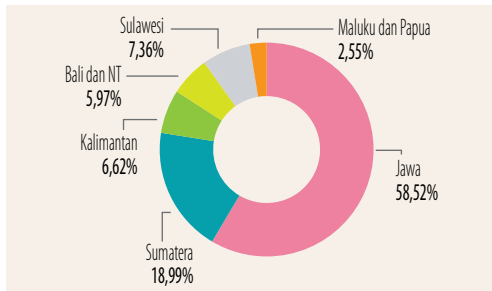
Secara spasial, sebagian besar kredit UMKM masih terpusat di pulau Jawa dan Sumatera, di mana total porsi kredit UMKM lima provinsi terbesar (DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara) yaitu 58,46%. Sementara itu, kredit UMKM di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Maluku, dan Papua) masih sebesar 22,49%. Rendahnya penyaluran kredit UMKM di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur antara lain disebabkan jumlah penduduk yang relatif lebih sedikit, jumlah *bankable entrepreneurs* yang relatif terbatas, serta jangkauan bank yang lebih terbatas karena infrastruktur yang belum memadai.

**Tabel I - 7** Konsentrasi Penyaluran UMKM

Sektor Ekonomi	Nominal (dalam miliar rupiah)			Porsi		$\Delta$ qdq		$\Delta$ yoy		
	Desember 2016	September 2017	Desember 2017	Desember 2016	Desember 2017	September 2017	Desember 2017	Desember 2016	September 2017	Desember 2017
<b>Pertanian, Perburuan dan Kehutanan</b>										
Baki Debet	67.014	74.983	78.731	8,35%	8,92%	2,57%	5,00%	9,71%	17,09%	17,48%
NPL	2.587	2.562	2.424	3,86%	3,08%	-4,86%	-5,39%	2,68%	-5,81%	-6,31%
<b>Industri Pengolahan</b>										
Baki Debet	84.196	89.868	93.175	10,50%	10,55%	-0,03%	3,68%	10,03%	13,46%	10,66%
NPL	3.177	3.278	3.122	3,77%	3,35%	-3,81%	-4,76%	15,17%	-5,16%	-1,74%
<b>Perdagangan Besar dan Eceran</b>										
Baki Debet	432.560	447.458	462.729	53,93%	52,41%	0,91%	3,41%	9,28%	5,73%	6,97%
NPL	16.555	18.895	17.498	3,83%	3,78%	-2,58%	-7,39%	9,46%	5,38%	5,70%
<b>Lainnya</b>										
Baki Debet	218.344	233.985	248.347	27,22%	28,13%	4,27%	6,14%	5,81%	8,61%	13,74%
NPL	9.415	12.173	12.134	4,31%	4,89%	-0,38%	-0,32%	0,28%	21,39%	28,88%
<b>Baki Debet UMKM</b>	<b>802.113</b>	<b>846.294</b>	<b>882.982</b>			<b>1,86%</b>	<b>4,34%</b>	<b>8,42%</b>	<b>8,23%</b>	<b>10,08%</b>
<b>NPL UMKM</b>	<b>31.734</b>	<b>36.908</b>	<b>35.178</b>	<b>3,96%</b>	<b>3,98%</b>	<b>-2,14%</b>	<b>-4,69%</b>	<b>6,52%</b>	<b>8,13%</b>	<b>10,85%</b>

Ket: Shaded area merupakan rasio NPL

Sumber: SPI, Desember 2017

**Grafik I - 23** Penyebaran UMKM berdasarkan Wilayah


Sumber: SPI, Desember 2017

Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar kredit UMKM disalurkan oleh BUMN (56,08%) dan BUSN (35,13%). Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kredit UMKM BPD tumbuh tertinggi sebesar 16,37% (yoy), diikuti kredit UMKM BUMN dan BUSN. Sementara penurunan kredit UMKM terdapat pada kelompok KCBA dan Bank Campuran yang antara lain dipengaruhi oleh adanya pelunasan kredit.

**Tabel I - 8** Kredit UMKM berdasarkan Kelompok Bank (dalam miliar rupiah)

Kelompok Bank	Baki Debet (dalam miliar rupiah)			Porsi	Δ		
	Desember 2016	September 2017	Desember 2017		Triwulan IV-2017	Triwulan IV-2016	Triwulan IV-2017
BUMN	446.774	476.073	495.186	56,08%	4,01%	16,60%	10,84%
BPD	60.466	66.444	70.366	7,97%	5,90%	16,60%	16,37%
BUSN	280.379	295.490	310.222	35,13%	4,99%	-3,18%	10,64%
KCBA dan Campuran	14.494	8.286	7.208	0,82%	-13,01%	-4,64%	-50,27%
<b>Total UMKM</b>	<b>802.113</b>	<b>846.294</b>	<b>882.982</b>	<b>100%</b>	<b>4,34%</b>	<b>8,42%</b>	<b>10,08%</b>

Sumber: SPI Desember 2017

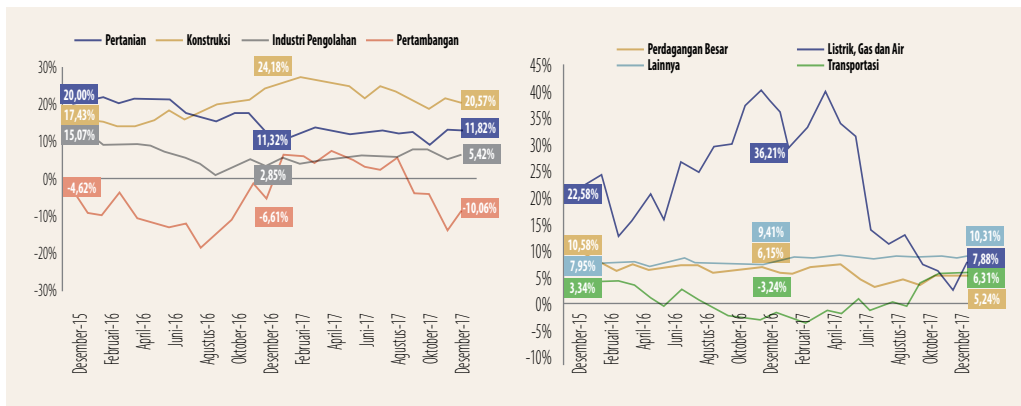
## 1.2.5 Penguatan Sektor Riil Melalui Penyaluran Kredit Produktif

Berdasarkan program Nawacita, terdapat enam sektor lapangan usaha yang menjadi fokus/prioritas pemerintah, yaitu sektor pertanian,

**Tabel I - 9** Konsentrasi Kredit Perbankan Menurut Sektor Ekonomi (%)

No.	Sektor Ekonomi	Kredit (dalam triliun rupiah)				Δ qtq Triwulan III-2017	Δ qtq Triwulan IV-2017	Δ yoy Triwulan IV-2016	Δ yoy Triwulan IV-2017	Porsi
		Sep-tember 2016	Desember 2016	Sep-tember 2017	Desember 2017					
<b>Lapangan Usaha</b>										
1	Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	272,95	283,83	304,07	317,38	2,50%	4,38%	11,32%	11,82%	6,70%
2	Perikanan	9,39	9,48	10,42	11,27	5,14%	8,17%	7,18%	18,93%	0,24%
3	Pertambangan dan Penggalian	116,09	126,34	110,11	113,62	-10,09%	3,19%	-6,61%	-10,06%	2,40%
4	Industri Pengolahan	743,52	781,76	791,85	824,11	0,91%	4,07%	2,86%	5,42%	17,39%
5	Listrik, Gas, dan Air	121,52	135,46	130,10	146,13	2,83%	12,32%	36,21%	7,88%	3,08%
6	Konstruksi	205,04	214,76	248,10	258,93	5,96%	4,37%	24,18%	20,57%	5,47%
7	Perdagangan Besar dan Eceran	831,02	841,38	856,05	885,45	1,27%	3,44%	6,17%	5,24%	18,69%
8	Penyediaan Akomodasi dan PMM	92,39	93,39	95,86	97,89	-0,89%	2,11%	8,77%	4,81%	2,07%
9	Transportasi	168,31	171,80	174,53	182,63	0,31%	4,64%	-3,24%	6,31%	3,85%
10	Perantara Keuangan	176,86	193,95	208,69	214,19	-1,58%	2,63%	17,77%	10,44%	4,52%
11	Real Estate	200,84	210,00	215,65	221,92	2,04%	2,91%	13,66%	5,68%	4,68%
12	Administrasi Pemerintahan	14,54	14,70	23,00	21,82	3,62%	-5,11%	13,85%	48,43%	0,46%
13	Jasa Pendidikan	8,48	8,55	9,53	10,10	3,06%	6,03%	5,22%	18,14%	0,21%
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	16,18	16,97	17,64	19,09	1,11%	8,23%	-21,05%	12,53%	0,40%
15	Jasa Kemasyarakatan	56,89	58,71	62,17	72,38	3,24%	16,42%	1,24%	23,29%	1,53%
16	Jasa Perorangan	2,58	2,64	2,65	2,74	-1,19%	3,69%	-2,38%	3,80%	0,06%
17	Badan Internasional	0,10	0,23	0,16	0,16	-2,88%	-1,27%	109,54%	-32,67%	0,00%
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	10,14	10,61	3,07	2,75	-5,52%	-10,38%	-11,28%	-74,07%	0,06%
<b>Bukan Lapangan Usaha</b>										
19	Rumah Tangga	955,44	980	1.051	1.102	1,62%	4,86%	6,99%	12,42%	23,26%
20	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	210,09	222,31	228,98	233,32	0,85%	1,90%	17,31%	4,95%	4,92%
<b>Total Industri</b>		<b>4.212</b>	<b>4.377</b>	<b>4.544</b>	<b>4.738</b>	<b>1,17%</b>	<b>4,28%</b>	<b>7,87%</b>	<b>8,24%</b>	<b>100%</b>

Sumber: SPI, Desember 2017

**Grafik I - 24** Pertumbuhan Kredit Menurut Sektor Ekonomi (yoy)


Sumber: SPI, Desember 2017

perikanan, pertambangan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, serta industri pengolahan. Keenam sektor ini dianggap mampu menyerap tenaga kerja, menciptakan dampak lanjutan bagi aktivitas di sektor ekonomi lainnya sehingga menjadi kontributor yang cukup signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari keenam sektor di atas, sektor industri pengolahan serta sektor perdagangan besar dan eceran merupakan sektor ekonomi lapangan usaha yang paling banyak menerima kredit perbankan dengan porsi masing-masing sebesar 17,39% dan 18,69%, sementara untuk sektor ekonomi bukan lapangan usaha porsi terbesar terdapat pada sektor rumah tangga yaitu 23,26% terhadap total kredit.

Penyaluran kredit bank umum triwulan IV-2017 tumbuh 8,24% (yoy), lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 7,87% (yoy). Peningkatan utamanya dipengaruhi oleh meningkatnya kredit ke sektor konstruksi yang tumbuh 20,57% (yoy), meskipun sedikit melambat dari tahun sebelumnya sebesar 24,18% (yoy). Tingginya kredit pada sektor konstruksi masih sejalan dengan berlanjutnya proyek pembangunan infrastruktur pemerintah yang utamanya disalurkan untuk konstruksi gedung dan bangunan sipil sebesar Rp43,74 triliun atau tumbuh 21,67% (yoy).

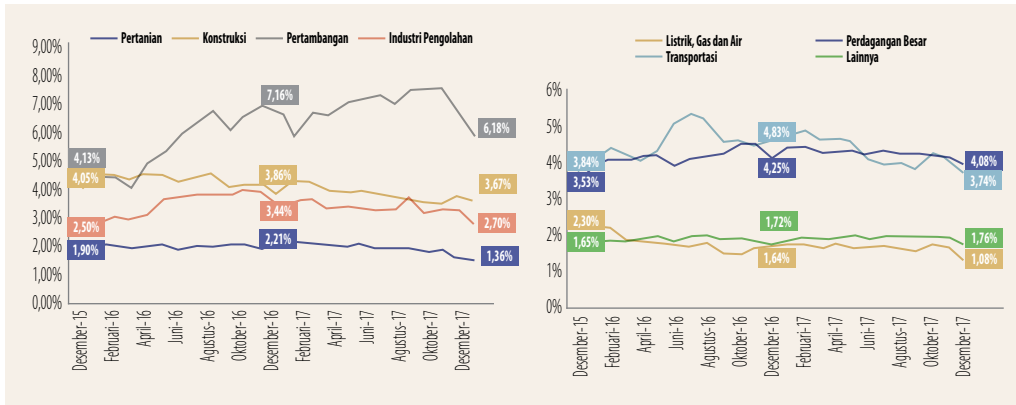
Kredit sektor perdagangan besar dan eceran dalam tren perlambatan dibandingkan tahun

sebelumnya yaitu tumbuh 5,24% (yoy), namun sudah lebih baik apabila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Meningkatnya kredit pada sektor ini sebagian besar disalurkan kepada subsektor perdagangan besar dalam negeri yang tumbuh 13,55% (yoy) utamanya pada perdagangan makanan, minuman dan tembakau yang dipengaruhi oleh peningkatan permintaan menjelang natal dan tahun baru.

Kredit sektor industri pengolahan/manufaktur tumbuh 5,42% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 2,86% (yoy). Sejalan dengan sektor perdagangan, peningkatan tertinggi kredit pada sektor ini utamanya disalurkan pada subsektor makanan dan minuman seiring dengan peningkatan permintaan menjelang natal dan tahun baru. Selain itu, kredit ke industri pengolahan tembakau juga tumbuh sebesar 13,91% (yoy) yang disebabkan adanya pembayaran cukai tembakau kepada pemerintah yang di tangguhkan sampai akhir tahun.

Kredit sektor pertanian tumbuh 11,82% (yoy), meningkat dibanding triwulan IV-2016 yang tumbuh 11,32 (yoy). Peningkatan tersebut terkait dengan meningkatnya penyaluran KUR ke sektor pertanian yang mencapai Rp20 triliun. Penyaluran kredit pertanian sebagian besar disalurkan pada subsektor pertanian buah-buahan termasuk perkebunan kelapa sawit sebesar Rp24 triliun atau tumbuh 10,86% (yoy).

Grafik I - 25 NPL Gross Sektor Ekonomi



Kredit ke sektor pertambangan masih terkonsentrasi meskipun proses pemulihan harga komoditas global mulai membaik. Kredit ke sektor ini turun 10,06% (yoy), terkonsentrasi lebih dalam dibandingkan triwulan IV-2016. Masih terkonsentrasinya sektor ini utamanya didorong oleh penurunan kredit pada subsektor pertambangan minyak dan gas bumi yang turun 20,40% (yoy).

Risiko kredit industri perbankan pada triwulan IV-2017 membaik yang tercermin dari turunnya NPL gross menjadi 2,59%. Hampir semua sektor ekonomi mengalami perbaikan rasio NPL yang utamanya terdapat pada sektor transportasi dan sektor badan internasional. Meskipun masih berada di atas *threshold*, risiko kredit sektor pertambangan relatif membaik dengan turunnya NPL menjadi 6,18%. Sementara itu, sektor perikanan, penyediaan akomodasi makan dan minum, serta jasa kesehatan mengalami peningkatan NPL, namun masih terjaga dibawah *threshold* 5%.

### 1.3 PERKEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL

#### 1.3.1 Perkembangan Perdagangan Efek

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada akhir triwulan IV-2017 berada pada posisi 6.355,65 atau mengalami kenaikan sebesar 7,71%

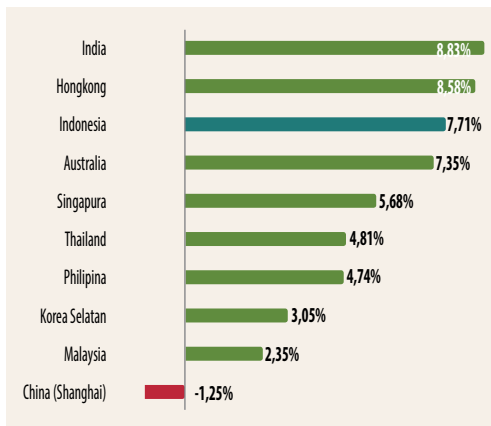
jika dibandingkan dengan triwulan III-2017. Secara regional, IHSG menempati peringkat ketiga setelah Hongkong. Perdagangan Efek pada triwulan IV-2017, berdasarkan nilai dan volume transaksi didominasi oleh investor lokal. Adapun perilaku investor asing pada periode ini menunjukkan adanya *outflow (net sell)* di pasar saham yaitu sebesar Rp29,13 triliun (ytd, Rp39,87 triliun).

Faktor domestik yang mempengaruhi kinerja Pasar Modal di antaranya Bank Indonesia kembali mempertahankan BI 7-days *Repo Rate* di level 4,25%, dengan suku bunga *Deposit Facility* turun di level 3,50% dan *Lending Facility* turun di 5,00%, Lembaga pemeringkat surat utang *Fitch Rating* menaikkan utang Indonesia dari BBB- ke BBB. Selain itu IMF menaikkan proyeksi ekonomi Indonesia tahun ini sebesar 5,2%.

Faktor eksternal dipengaruhi oleh keputusan The Fed menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 bps menjadi 1,25%-1,5% pada *FOMC Meeting* Desember 2017. Pertemuan tahunan IMF dan bank Dunia memberikan optimisme pada prospek pertumbuhan ekonomi global diyakini mencapai 3,6% di 2017 dan 3,7% di 2018. Perbaikan pertumbuhan ekonomi tersebut terjadi secara merata di negara maju maupun negara berkembang. Adapun Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS menunjukkan pelemahan sebesar Rp56,- atau 0,42% menjadi Rp 13.548,-/USD dibandingkan triwulan sebelumnya.

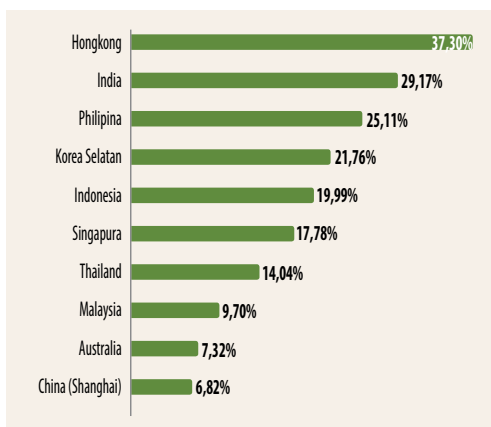


**Grafik I - 26** Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama (*qtq*)



Sumber: Bloomberg

**Grafik I - 27** Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama (*ytd*)



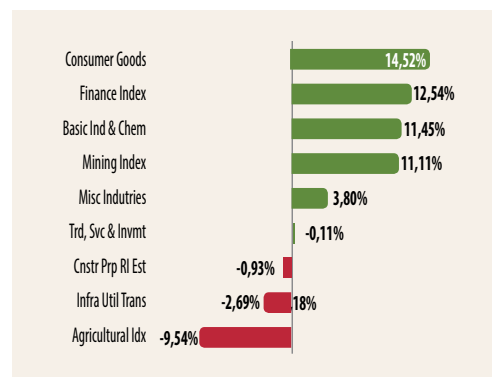
Sumber: Bloomberg

Nilai kapitalisasi pasar saham mengalami kenaikan sebesar 8,94% (*qtq*) menjadi Rp 7.052,39 triliun. Rata-rata nilai, volume, dan frekuensi perdagangan per hari mengalami kenaikan masing-masing sebesar 36,21%, 46,24% dan 9,25% menjadi sebesar Rp8.714,81 miliar, Rp12.246,50 juta dan 319 ribu kali transaksi. Secara regional, IHSG menempati

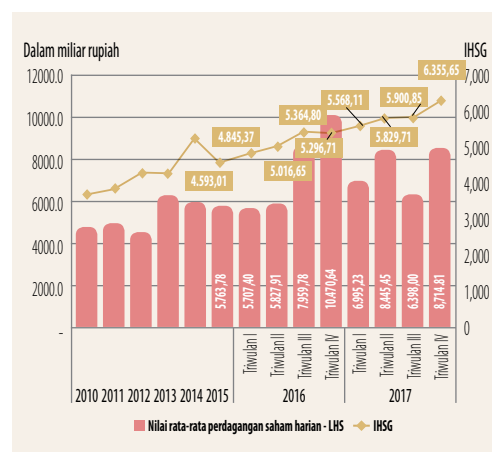
posisi ketiga setelah Hongkong dan India dengan pertumbuhan sebesar 7,71% (*qtq*) dan 19,99% (*ytd*).

Sebagian besar kinerja indeks sektoral pada triwulan IV-2017 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kenaikan tertinggi terdapat pada indeks sektor barang konsumsi sebesar 14,52%. Sementara itu, indeks yang mengalami penurunan terbesar terdapat pada indeks pertanian sebesar -9,54%.

**Grafik I - 28** Perkembangan Indeks Industri (*qtq*)



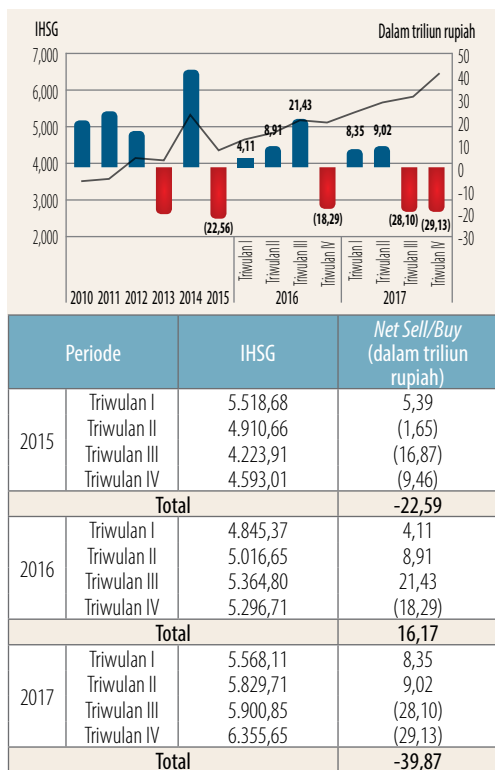
**Grafik I - 29** Perkembangan IHSG dan Nilai Rata-rata Perdagangan Saham Harian



**Tabel I - 10** Perkembangan Transaksi Perdagangan Saham

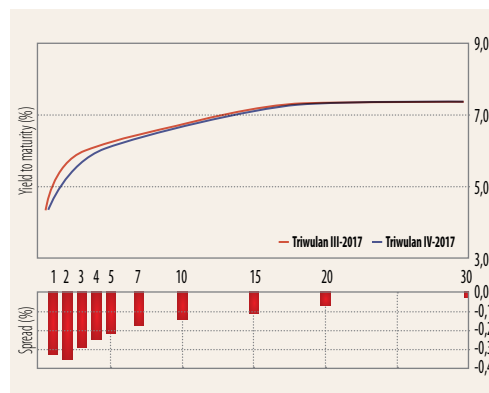
Indikator (Rata-rata harian)	2016				2017			
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Nilai perdagangan saham harian (Rp miliar)	5,707.40	5,827.91	7,959.78	10,470.64	6,995.23	8,445.45	6,397.99	8,714.81
Investor Asing (Rp miliar)								
	Beli	2,682.89	2,528.81	3,451.13	2,596.91	2,411.95	3,365.73	2,167.99
Jual	2,615.57	2,387.30	3,087.85	2,860.15	2,227.32	3,195.46	2,621.32	3,438.38
Investor Domestik (Rp miliar)								
	Beli	3,024.52	3,299.11	4,508.65	7,900.73	4,583.28	5,079.71	4,230.00
Jual	3,091.84	3,440.61	4,871.92	7,610.49	4,717.91	5,249.99	3,776.68	5,276.43
Frekuensi Perdagangan Saham Harian	236.976	242.989	282.768	294.098	336.568	301.152	291.847	318.829

**Grafik I - 30** Perkembangan IHSG dan Net Asing



Selama triwulan IV-2017 transaksi investor asing membukukan *net sell* sejumlah Rp29,13 triliun dan secara tahunan membukukan *net sell* sebesar Rp39,87 triliun.

**Grafik I - 31** Indonesia Government Securities Yield Curve (IBPA-IGSYC)



Secara umum kinerja pasar Obligasi mengalami peningkatan dibanding periode sebelumnya. Hal ini terlihat dari *yield* Obligasi Pemerintah menunjukkan tren penurunan dengan rata-rata *yield* untuk seluruh tenor turun sebesar -12,5 bps. Rata-rata *yield* tenor pendek, menengah, dan panjang mengalami penurunan masing-masing sebesar -30,2 bps, -18,6 bps, dan -8,6 bps.

**Tabel I - 11** Perkembangan Transaksi Perdagangan Surat Utang

Jenis Transaksi	Triwulan III 2017			Triwulan IV 2017		
	Volume (dalam triliun rupiah)	Nilai (dalam triliun rupiah)	Frek. (Kali)	Volume (dalam triliun rupiah)	Nilai (dalam triliun rupiah)	Frek. (Kali)
Obligasi:						
- Korporasi	89,03	89,35	8.360	108,79	109,33	9.518
- SBN	1.175,89	1.223,64	71.244	896,30	937,71	49.654
<b>Total</b>	<b>1.264,93</b>	<b>1.312,99</b>	<b>79.604</b>	<b>1.005,09</b>	<b>1.047,03</b>	<b>59.172</b>
Repo	83,02	83,54	421	60,57	59,90	350

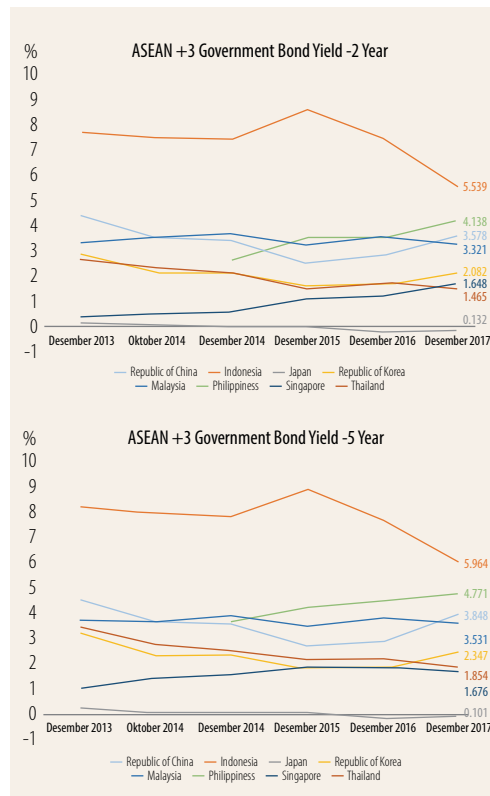
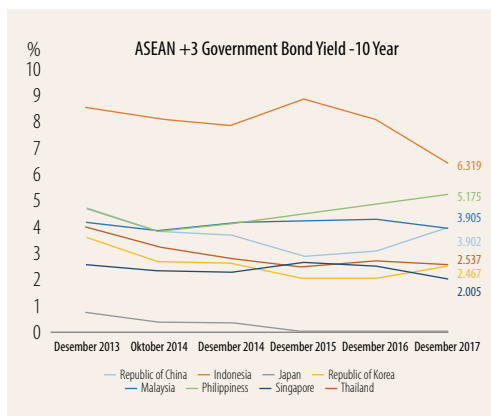
Secara total, aktivitas perdagangan Obligasi Pemerintah pada triwulan IV-2017 mengalami penurunan dibandingkan dengan pada triwulan III-2017. Volume, nilai dan frekuensi perdagangan Obligasi Pemerintah pada triwulan IV-2017 mengalami penurunan sebesar masing-masing -23,78% menjadi Rp896,30 triliun, -23,37% menjadi Rp937,71 triliun dan 30,3% menjadi 49.654 kali.

Adapun aktivitas perdagangan Obligasi Korporasi pada triwulan IV-2017 mengalami peningkatan dibandingkan dengan pada triwulan III-2017. Volume, nilai dan frekuensi perdagangan mengalami peningkatan masing-masing sebesar +22,19% menjadi Rp108,79 triliun, +22,36% menjadi Rp109,33 triliun dan +13,85% menjadi 9.518 kali.

Indonesia *Government Bond 10 Year* (GB – 10Y), pada 30 Desember 2017 mengalami penurunan yield sebesar 1654 bps jika dibandingkan dengan periode Desember 2016. Penurunan tersebut dikarenakan kebijakan Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga acuan (*BI 7-Day RR Rate*) sebanyak 2 kali selama tahun 2017, yaitu pada tanggal 22 Agustus 2017 dan 22 September 2017, dengan penurunan masing-masing sebesar 25 basis poin sehingga pada akhir tahun ini tingkat suku bunga acuan mencapai level 4,25%. Penurunan tersebut sejalan dengan negara Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Sedangkan negara lainnya mengalami kenaikan *yield*.

Kinerja pasar surat utang mayoritas negara ASEAN +3 pada 29 Desember 2017 dibandingkan 30 Desember 2016 mengalami kenaikan yang ditunjukkan dari penurunan *yield* GB – 10Y dan GB – 5Y.

**Grafik I - 32** Perkembangan Obligasi Negara Asean +3 2013 –2017



### 1.3.2 Perkembangan Perusahaan Efek

**Tabel I - 12** Jumlah Perusahaan Efek

No	Jenis Izin Usaha	Jumlah
1	Perantara Pedagang Efek	34
2	Penjamin Emisi Efek *)	4
3	Perantara Pedagang Efek + Penjamin Emisi Efek	86
4	Perantara Pedagang Efek + Manajer Investasi	2
5	Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi	-
6	Perantara Pedagang Efek + Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi	3
<b>Total</b>		<b>129</b>

\*) Khusus izin Penjamin Emisi Efek yang tidak melakukan aktivitas sebagai Perantara Pedagang Efek

Pada triwulan ini terdapat satu penerbitan izin baru Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek. Selain itu, terdapat satu pencabutan izin usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang

Efek, sehingga jumlah PE yang terdaftar di OJK sebanyak 129 PE. Terkait dengan kegiatan PE di berbagai lokasi selain Kantor Pusat, OJK mencatat pelaporan pembukaan sejumlah enam lokasi selain Kantor Pusat dan penutupan sejumlah 15 lokasi selain Kantor Pusat selama triwulan IV-2017.

**Tabel I - 13** Jumlah Lokasi Kegiatan PE Selain Kantor Pusat

Periode	2017	2017
	s.d Triwulan III	s.d Triwulan IV
Jumlah lokasi selain Kantor Pusat	699	690

Terkait izin Wakil Perusahaan Efek, pada periode laporan OJK telah menerbitkan izin orang perorangan sebanyak 145 izin dengan rincian 134 izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dan sebanyak 11 Izin Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) sehingga jumlah pemegang izin mencapai 9.500 WPPE dan 2.063 WPEE.

**Tabel I - 14** Proses Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek

Jenis Izin	Triwulan III-2017		Triwulan IV-2017		Izin Total s/d Triwulan III	Total Pemegang Izin
	Dokumen yang Masuk	Pemberian Ijin	Dokumen yang Masuk	Pemberian Ijin		
WPPE	224	197	156	134	535	9.500
WPEE	21	20	4	11	45	2.063
<b>Total</b>	<b>245</b>	<b>217</b>	<b>160</b>	<b>145</b>	<b>580</b>	<b>11.563</b>

Selama periode laporan, OJK menerbitkan 443 perpanjangan izin dengan rincian 402 perpanjangan izin WPPE dan 41 perpanjangan izin WPEE sehingga secara total OJK telah menerbitkan 5.355 perpanjangan izin dengan rincian 4.657 perpanjangan izin WPPE dan 698 perpanjangan izin WPEE.

**Tabel I - 15** Proses Perpanjangan Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek

Jenis Izin	Triwulan III-2017		Triwulan IV-2017		Izin Total s/d Triwulan IV	Total
	Dokumen yang Masuk	Pemberian Ijin	Dokumen yang Masuk	Pemberian Ijin		
WPPE	132	89	100	80	402	4.657
WPEE	10	10	15	11	41	698
<b>Total</b>	<b>142</b>	<b>99</b>	<b>115</b>	<b>91</b>	<b>443</b>	<b>5.355</b>

Pada periode laporan, OJK menerima 203 dokumen perizinan dengan rincian 196 dokumen permohonan izin WPPEP dan 7 permohonan WPPEPT. OJK juga menerbitkan 209 izin WPPEP dan 55 untuk izin WPPEPT. Sehingga sampai periode laporan total izin WPPEP sebanyak 249 dan WPPEPT sebanyak 57.

**Tabel I - 16** Proses Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran dan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas

Jenis Izin	Triwulan III 2017		Triwulan IV		Izin Total s/d Triwulan IV	Total
	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin	Dokumen yang Masuk	Pemberian Ijin		
WPPEP	193	209	196	229	438	438
WPPEPT	73	55	7	8	63	63
<b>Total</b>	<b>266</b>	<b>264</b>	<b>203</b>	<b>237</b>	<b>501</b>	<b>501</b>

### 1.3.3 Perkembangan Pengelolaan Investasi

Kinerja Reksa Dana menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan. Pertumbuhan Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana pada triwulan IV-2017 meningkat sebesar Rp43,47 triliun (10,50%) menjadi Rp457,51 triliun. NAB Reksa Dana Pendapatan Tetap menunjukkan kenaikan jumlah NAB terbesar yaitu Rp16,11 triliun (17,63%), diikuti oleh Reksa Dana Terproteksi sebesar Rp12,79 triliun (12,89%), Reksa Dana Syariah sebesar Rp6,88 triliun (32,13%), Reksa Dana Saham sebesar Rp5,62 triliun (4,88%), Reksa Dana Campuran sebesar Rp2,27 triliun (9,23%), dan Reksa Dana Indeks sebesar Rp2,04 triliun (104,57%), ETF sebesar Rp0,03 triliun (0,39%). Namun demikian, Reksa Dana Pasar Uang menjadi satu-satunya jenis Reksa Dana yang mengalami penurunan sebesar Rp2,29 triliun (-4,40%).

Dana kelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) menurun sebesar 6,58% menjadi Rp18,30 triliun pada triwulan IV-2017. Selain itu, jumlah kontrak RDPT juga mengalami penurunan

**Tabel I - 17** Perkembangan NAB per Jenis Reksa Dana

Nab Per Jenis Reksa Dana	2016 (dalam triliun rupiah)		2017 (dalam triliun rupiah)			
	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
RD Pasar Uang	30,51	28,54	40,89	45,59	52,11	49,82
RD Pendapatan Tetap	68,67	69,56	76,54	83,44	91,43	107,55
RD Saham	101,89	113,10	109,73	108,16	115,23	120,85
RD Campuran	22,16	21,05	22,75	24,00	24,66	26,94
RD Terproteksi	75,40	84,92	88,86	94,29	99,27	107,55
RD Indeks	0,51	0,60	0,87	1,00	1,95	3,99
ETF	5,49	6,06	7,46	7,44	7,94	7,97
RD Syariah*	12,09	14,91	17,31	18,91	21,43	28,31
<b>Total</b>	<b>316,72</b>	<b>338,75</b>	<b>364,42</b>	<b>382,84</b>	<b>414,03</b>	<b>457,51</b>

\*) termasuk ETF Saham Syariah

menjadi 54 RDPT dari sebelumnya 73 RDPT. Penurunan jumlah RDPT tersebut dikarenakan pada akhir Desember 2017 seluruh RDPT Non Proyek wajib dibubarkan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 37/POJK.04/2014 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas.

**Tabel I - 18** Perkembangan Reksa Dana Dan Produk Investasi Lainnya

Jenis Investasi	2016		2017			
	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
<b>Reksa Dana</b>						
Jumlah	1.347	1.425	1.491	1.552	1.667	1.777
Total NAB	316,72	338,75	364,42	382,84	414,03	457,51
<b>RDPT</b>						
Jumlah	69	73	77	76	73	54
Total NAB	19,19	17,64	16,22	20,08	19,59	18,30
<b>EBA</b>						
Jumlah	7	7	7	7	8	7
Nilai Sekuritisasi	1,96	1,79	1,63	1,56	7,32	6,98
<b>EBA-SP</b>						
Jumlah	2	3	3	4	4	4
Nilai Sekuritisasi	0,70	1,70	1,43	2,47	2,36	2,23
<b>DIRE</b>						
Jumlah	2	2	3	3	4	3
Total Nilai	0,56	0,56	0,56	0,59	0,59	0,59
<b>KPD</b>						
Jumlah	317	372	372	377	385	X
Total Nilai	165,62	164,01	177,89	187,09	192,65	X

\*) Dalam Rp triliun

OJK menerbitkan satu surat pembubaran Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) dan satu surat pembubaran Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estat (KIK-DIRE), sehingga jumlah KIK-EBA menjadi tujuh KIK dengan dana kelolaan sebesar Rp6,98 triliun atau turun sebesar 4,64% dan jumlah KIK-DIRE menjadi tiga KIK dengan dana kelolaan Rp0,59 triliun.

Selama periode laporan OJK tidak menerbitkan izin baru dan surat pembubaran Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset-Surat Partisipasi (EBA-SP), sehingga jumlah EBA-SP tetap berjumlah empat KIK dengan dana kelolaan sebesar Rp2,23 triliun atau menurun 5,51% (*qtq*).

Pada triwulan IV-2017, nilai Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) meningkat sebesar 2,97% menjadi Rp192,65 triliun. Selain itu, jumlah kontrak KPD juga meningkat sebesar 2,12% menjadi 385 KPD.

Sampai dengan triwulan IV-2017 telah menerbitkan 480 Surat Efektif pernyataan pendaftaran Reksa Dana yang unit penyertaannya ditawarkan melalui penawaran umum.

**Tabel I - 19** Jenis Reksa Dana Yang Mendapat Surat Efektif

Jenis Reksa Dana	Jumlah Surat Efektif
Reksa Dana Saham	47
Reksa Dana Campuran	31
Reksa Dana Pendapatan Tetap	54
Reksa Dana Pasar Uang	34
Reksa Dana Terproteksi	255
Reksa Dana Indeks	5
ETF-Pendapatan Tetap	1
ETF-Saham	2
Reksa Dana Syariah Campuran	4
Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap	7
Reksa Dana Syariah Saham	9
Reksa Dana Syariah Indeks	4
Reksa Dana Syariah Terproteksi	10
Reksa Dana Syariah Pasar Uang	11
Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Luar Negeri	1
Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk	4
ETF-Syariah Saham	1
<b>Total</b>	<b>480</b>

OJK juga menerbitkan 128 surat pembubaran Reksa Dana yang terdiri dari 123 Reksa Dana Konvensional dan lima Reksa Dana Syariah. Adapun rincian pembubaran Reksa Dana tersebut terdiri dari :

- 86 Reksa Dana Terproteksi terdiri dari 74 Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK dan 12 Reksa Dana tidak terpenuhinya minimum dana kelolaan;
- 10 Reksa Dana Campuran terdiri dari empat Reksa Dana dibubarkan karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari berturut-turut, tiga Reksa Dana dibubarkan karena tidak dapat memenuhi minimum dana kelolaan, dua Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK, dan satu Reksa Dana dibubarkan karena diperintahkan oleh OJK;
- 11 Reksa Dana Saham terdiri dari delapan Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK, dua Reksa Dana tidak terpenuhinya minimum dana kelolaan, dan satu Reksa Dana dibubarkan karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari berturut-turut;
- Tiga Reksa Dana Pendapatan Tetap terdiri dari dua Reksa Dana dibubarkan karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari berturut-turut dan satu Reksa Dana dibubarkan karena tidak dapat memenuhi minimum dana kelolaan;
- 13 Reksa Dana Pasar Uang terdiri dari delapan Reksa Dana Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK, empat Reksa Dana karena tidak dapat memenuhi minimum dana kelolaan, dan satu Reksa Dana karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari berturut-turut;
- Tiga Reksa Dana Syariah Saham terdiri dari dua Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK dan satu Reksa Dana dibubarkan karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari berturut-turut.
- Satu Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK.

Tabel I - 20

Perkembangan Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin

	2016		2017			
	Triwu- lan III	Triwu- lan IV	Triwu- lan I	Triwu- lan II	Triwu- lan III	Triwu- lan IV
<b>Individu</b>						
Wakil Manajer Investasi (WMI)	2.959	3.043	3.136	1.856	1.967	2.031
Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD)	21.672	22.271	23.182	23.300	24.149	24.972
Penasehat Investasi (PI)	4	4	4	4	4	4
<b>Institusi</b>						
Manajer Investasi (MI)	84	85	85	87	87	90
Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)	30	32	32	34	35	36
Penasehat Investasi (PI)	2	3	3	3	3	4

Selama triwulan IV-2017, OJK memberikan tiga izin Manajer Investasi, satu Surat Tanda Terdaftar APERD, dan satu izin PI institusi. Sehingga jumlah MI, APERD dan PI Institusi masing-masing berjumlah 90 MI, 36 APERD, dan empat PI institusi.

Adapun pelaku individu industri pengelolaan investasi mengalami peningkatan pada WAPERD sebesar 3,41% dan WMI sebesar 3,25% (*qtq*).

### 1.3.4 Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik

Selama triwulan I-IV 2017, jumlah emisi Penawaran Umum mengalami peningkatan sebesar 32% dibanding triwulan I-IV 2016. Dilihat dari nilai emisi pun mengalami kenaikan sebesar 31% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Terdapat peningkatan jumlah Penawaran Umum Perdana Saham sebesar 171% meskipun jumlah emisi Penawaran Umum perdana saham menurun sebesar 26%. Penawaran Umum Terbatas mengalami kenaikan jumlah emisi sebesar 3% dan kenaikan nilai emisinya sebesar 22%. Adapun untuk jumlah emisi Penawaran Umum Efek bersifat Hutang mengalami peningkatan sebesar 19% bersamaan peningkatan nilai emisi Penawaran Umum Efek bersifat Hutang sebesar 27%.

Tabel I - 21 Perkembangan Penawaran Umum (Emisi)

Jenis Penawaran Efek	Triwulan I-IV 2016		Triwulan I-IV 2017		Δ (%) Jumlah Emisi	Δ % Nilai Emisi
	Jumlah Emisi	Nilai Emisi (dalam miliar rupiah)	Jumlah Emisi	Nilai Emisi (dalam miliar rupiah)		
Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)	14	12.074	38	9.599	171%	-26%
Penawaran Umum Terbatas (PUT/ <i>Rights Issue</i> )	34	68.663	35	88.185	3%	22%
Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang	74	114.381	88	156.712	19%	27%
a. Obligasi/ Sukuk + Subordinasi	15	13.690	12	12.360	-20%	-10%
b. PUB Obligasi/ Sukuk Tahap I	28	43.495	26	48.120	-7%	11%
c. PUB Obligasi/ Sukuk Tahap II dst	31	57.196	50	96.232	61%	68%
<b>Total Emisi</b>	<b>122</b>	<b>194.514</b>	<b>161</b>	<b>254.496</b>	<b>32%</b>	<b>31%</b>

Selama 2017, jumlah penambahan Emiten baru Penawaran Umum sebanyak 46, di mana telah mencapai target OJK sebanyak 21. Penambahan Emiten baru melalui Penawaran Umum dimaksud terdiri dari 38 Penawaran Umum Perdana Saham dan delapan Penawaran Umum Obligasi.

#### A. Penawaran Umum Perdana Saham

Selama 2017, terdapat 41 perusahaan yang mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, di mana sebanyak 38 Perusahaan telah mendapat surat efektif dan tiga Perusahaan masih dalam proses. Nilai emisi dari enam Emiten tersebut sebesar Rp9,6triliun.

Tabel I - 22 Perkembangan Nilai Emisi Berdasarkan Sektor Industri pada Triwulan IV-2017 (dalam jutaan rupiah)

No	Sektor Industri	Penawaran Umum Perdana	Penawaran Umum Terbatas	Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang
1	Perbankan	-	9.744.351	47.462.000
2	Asuransi dan Pembiayaan	167.430	706.364	47.381.870
3	Sekuritas dan Investasi	-	5.814.447	1.500.000
4	Perdagangan	874.752	7.869.472	9.590.000
5	Perhubungan dan Telekomunikasi	2.118.162	6.323.367	14.300.000
6	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata dan Perusahaan Jasa Lainnya	639.230	4.484.000	1.000.000
7	Properti dan Perhotelan	896.563	4.834.886	800.000
8	Real Estate dan Konstruksi	2.422.465	3.860.313	13.657.000
9	Tekstil, Garmen, dan Alas Kaki	45.000	-	-
10	Barang Konsumsi	932.379	1.433.978	3.050.000
11	Aneka Industri Lainnya	1.171.572	355.648	800.000
12	Industri Dasar	-	-	3.000.000
13	Industri Logam	-	-	-
14	Industri Kimia	184.350	5.035.347	9.445.000
15	Agrobisnis	70.000	-	1.000.000
16	Pertambangan dan Kehutanan	77.000	37.723.167	3.726.000
	<b>Total</b>	<b>9.598.903</b>	<b>88.185.339</b>	<b>156.711.870</b>

**Tabel I - 23 Perusahaan Yang Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham**

No.	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Tanggal Efektif	Nilai Emisi (dalam jutaan rupiah)
1	PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk	Perhubungan dan Telekomunikasi	06 Maret 2017	308.619.083.500
2	PT Bintraco Dharma Tbk.	Perdagangan	30 Maret 2017	262.500.000.000
3	PT Forzaland Indonesia Tbk	Properti dan Perhotelan	18 April 2017	68.750.000.000
4	PT Sanurhasta Tbk	Properti dan Perhotelan	20 April 2017	27.562.500.000
5	PT Sariguna Primatirta Tbk.	Barang dan Konsumsi	21 April 2017	51.750.000.000
6	PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk	Real Estate dan Konstruksi	28 April 2017	62.100.000.000
7	PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk.	Perhubungan dan Telekomunikasi	28 April 2017	82.500.000.000
8	PT Terrega Asia Energy Tbk.	Perdagangan	28 April 2017	110.000.000.000
9	PT Alfa Energi Investama Tbk	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata, dan Perusahaan Jasa Lainnya	29 Mei 2017	150.000.000.000
10	PT First Indo American Leasting Tbk	Asuransi dan Pembiayaan	30 Mei 2017	80.430.000.000
11	PT Totalindo Eka Persada Tbk.	Real Estate dan Konstruksi	09 Juni 2017	516.460.000.000
12	PT Hartadinata Abadi Tbk	Barang dan Konsumsi	12 Juni 2017	331.578.720.000
13	PT Kirana Megatara Tbk	Aneka Industri Lainnya	12 Juni 2017	527.822.100.000
14	PT Buyung Poetra Sembada Tbk	Barang dan Konsumsi	14 Juni 2017	217.000.000.000
15	PT Megapower Makmur Tbk.	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata, dan Perusahaan Jasa Lainnya	16 Juni 2017	49.020.000.000
16	PT Integra Indocabinet Tbk.	Aneka Industri Lainnya	14 Juni 2017	325.000.000.000
17	PT Armidian Karyatama Tbk	Properti dan Perhotelan	14 Juni 2017	491.250.000.000
18	PT MAP Boga Adiperkasa Tbk.	Perdagangan	14 Juni 2017	37.252.320.000
19	PT Marga Abhinaya Abadi Tbk.	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata, dan Perusahaan Jasa Lainnya	16 Juni 2017	53.088.000.000
20	PT Mark Dynamics Indonesia Tbk.	Barang dan Konsumsi	21 Juni 2017	40.000.000.000
21	PT Ayana Land International Tbk.	Properti dan Perhotelan	31 Juli 2017	309.000.000.000
22	PT Emdeki Utama Tbk	Industri Kimia	12 September 2017	184.350.000.000
23	PT Trisula Textile Industries Tbk.	Tekstil, Garmen, dan Alas Kaki	25 September 2017	45.000.000.000
24	PT Kioson Komersial Indonesia Tbk	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata, Perusahaan Jasa Lainnya	25 September 2017	45.000.000.000
25	PT Mallaca Trust Wuwungan Insurance Tbk	Asuransi dan Pembiayaan	29 September 2017	31.000.000.000
26	PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	Perhubungan dan Telekomunikasi	29 September 2017	1.129.340.440.000
27	PT Kapuas Prima Coal Tbk	Pertambangan dan Kehutanan	10 Oktober 2017	77.000.000.000
28	PT M Cash Integrasi Tbk.	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata, Perusahaan Jasa Lainnya	24 Oktober 2017	300.521.870.500
29	PT PP Presisi	Real Estate dan Konstruksi	16 November 2017	1.011.025.030.000
30	PT Wika Gedung Tbk	Real Estate dan Konstruksi	20 November 2017	832.880.000.000
31	PT Pelita Samudera Shipping Tbk	Perhubungan dan Telekomunikasi	23 November 2017	135.810.000.000
32	PT Dwi Guna Laksana Tbk	Perdagangan	30 November 2017	465.000.000.000
33	PT Panca Budi Idaman Tbk.	Aneka Industri Lainnya	04 Desember 2017	318.750.000.000
34	PT Campina Ice Cream Industry Tbk.	Barang dan Konsumsi	06 Desember 2017	292.050.000.000
35	PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk	Asuransi dan Pembiayaan	11 Desember 2017	56.000.000.000
36	PT Jasa Armada Indonesia Tbk	Perhubungan dan Telekomunikasi	14 Desember 2017	461.892.470.000
37	PT Prima Cakrawala Abadi Tbk	Agrobisnis	21 Desember 2017	70.000.005.000
38	PT LCK Global Kedaton Tbk.	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata, dan Perusahaan Jasa Lainnya	29 Desember 2017	41.600.000.000
<b>TOTAL</b>				<b>9.598.902.539.000</b>



## B. Penawaran Umum Terbatas (*Right issue*)

Selama 2017, terdapat 38 perusahaan yang menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Terbatas dan 35 perusahaan telah mendapatkan

Pernyataan Efektif. Nilai emisi Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") atau *right issue* dari perusahaan tersebut sebesar Rp88,2triliun.

Tabel I - 24 Perusahaan yang telah Melakukan Penawaran Umum Terbatas (*Right issue*)

No.	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Nilai Emisi (dalam jutaan rupiah)
1	PT Bank Ina Perdana Tbk	Perbankan	703.050.000.000
2	PT Red Planet Indonesia Tbk	Properti dan Perhotelan	408.933.020.100
3	PT Buana Listya Tama Tbk	Perhubungan dan Telekomunikasi	242.689.567.700
4	PT Pool Advista Indonesia Tbk	Sekuritas dan Investasi	112.497.002.000
5	PT Rimo International Lestari Tbk	Perdagangan	4.100.196.000.000
6	PT Batavia Prosperindo Finance Tbk	Asuransi dan Pembiayaan	63.037.208.000
7	PT Sentul City Tbk	Real Estate dan Konstruksi	2.320.859.218.272
8	PT PP Properti Tbk	Real Estate dan Konstruksi	1.539.453.407.240
9	PT Verena Multi Finance Tbk	Asuransi dan Pembiayaan	177.313.982.272
10	PT Bank Permata Tbk.	Perbankan	2.999.677.612.900
11	PT Intraco Penta Tbk	Perdagangan	232.618.531.200
12	PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	Perbankan	1.319.998.394.750
13	PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	Perbankan	1.006.222.282.800
14	PT Bank QNB Indonesia Tbk	Perbankan	2.058.929.813.000
15	PT Bumi Resources Tbk	Pertambangan dan Kehutanan	35.083.696.284.320
16	PT Logindo Samudramakmur Tbk	Perhubungan dan Telekomunikasi	95.718.204.140
17	PT MNC Sky Vision Tbk	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata, dan Perusahaan Jasa Lainnya	1.295.045.766.000
18	PT Chandra Asri Petrochemical Tbk	Industri Kimia	5.035.346.892.000
19	PT Nippon Indosari Corpindo Tbk.	Barang konsumsi	1.433.978.332.200
20	PT Bank Mayapada Internasional Tbk	Perbankan	1.000.264.933.800
21	PT Siloam International Hospitals Tbk.	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata, Perusahaan Jasa Lainnya	3.088.954.687.500
22	PT Mega Manunggal Property Tbk.	Properti dan Perhotelan	1.077.142.722.500
23	PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk	Asuransi dan Pembiayaan	466.012.512.000
24	PT Millennium Pharmacon International Tbk	Perdagangan	60.060.000.000
25	PT Rimau Multi Putra Pratama Tbk	Perdagangan	3.411.596.816.750
26	PT Trada Alam Mineral Tbk.	Perhubungan dan Telekomunikasi	5.984.959.673.700
27	PT Medco Energi Internasional Tbk	Pertambangan dan Kehutanan	2.639.470.600.200
28	PT Indomobil Multi Jasa Tbk	Sekuritas dan Investasi	346.000.000.000
29	PT Yulie Sekuritas Indonesia Tbk	Sekuritas dan Investasi	306.000.000.000
30	PT Duta Intidaya Tbk.	Perdagangan	65.000.524.750
31	PT Marga Abhinaya Abadi Tbk.	Properti dan Perhotelan	3.348.810.000.000
32	PT Bank Of India Indonesia Tbk	Perbankan	656.208.000.000
33	PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk.	Aneka Industri Lainnya	355.647.873.407
34	PT Tempo Inti Media Tbk	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata, Perusahaan Jasa Lainnya	99.999.975.000
35	PT Capital Financial Indonesia Tbk	Sekuritas dan Investasi	5.049.949.500.000
<b>Total</b>			<b>88.185.339.338.501</b>

### C. Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang

Selama 2017, terdapat 12 Perusahaan yang melakukan Penawaran Umum Obligasi, 26 Perusahaan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi (PUB

Obligasi) Tahap I dan 50 Perusahaan yang telah melakukan PUB Obligasi Tahap II dan seterusnya. Total nilai emisi Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang tersebut sebesar Rp156, triliun.

**Tabel I - 25** Perusahaan yang telah Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang

PUB Obligasi				
No	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Jenis PUB	Nilai Emisi (dalam jutaan rupiah)
1	PT Indofood Sukses Makmur Tbk	Barang Konsumsi	Obligasi	2.000.000.000.000
2	PT Oto Multiartha	Asuransi dan Pembiayaan	Obligasi	1.000.000.000.000
3	PT Chandra Sakti Utama Leasing	Asuransi dan Pembiayaan	Obligasi	500.000.000.000
4	PT Bank Mandiri Taspen Pos	Perbankan	Obligasi	2.000.000.000.000
5	PT Bank Pembangunan Daerah Lampung	Perbankan	Obligasi	610.000.000.000
6	PT Bank Capital Indonesia Tbk	Perbankan	Obligasi Subordinasi	250.000.000.000
7	PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk.	Perbankan	Obligasi	500.000.000.000
8	PT Bussan Auto Finance	Asuransi dan Pembiayaan	Obligasi	500.000.000.000
9	PT Marga Lingkar Jakarta	Perhubungan dan Telekomunikasi	Obligasi	1.500.000.000.000
10	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Perhubungan dan Telekomunikasi	Obligasi	2.000.000.000.000
11	PT Mora Telematika Indonesia	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata, Perusahaan Jasa Lainnya	Obligasi	1.000.000.000.000
12	PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara	Perbankan		500.000.000.000
<b>Total</b>				<b>12.360.000.000.000</b>

PUB Obligasi I				
No	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Jenis PUB	Nilai Emisi (dalam jutaan rupiah)
1	PT Mayora Indah Tbk	Barang Konsumsi	Obligasi Berkelanjutan I Mayora Indah Tahap I Tahun 2017	500.000.000.000
2	PT Federal International Finance	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi III Tahap I	3.500.000.000.000
3	PT Aneka Gas Industri Tbk	Aneka Industri Lainnya	PUB Obligasi I Tahap I dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I	100.000.000.000
				300.000.000.000
4	PT Indosat Tbk.	Perhubungan dan Telekomunikasi	PUB II Tahap I	2.700.000.000.000
			Sukuk Ijarah II Tahap I	300.000.000.000
5	PT Sumber Alfaria Trijaya	Perdagangan	PUB II Tahap I	1.000.000.000.000
6	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.	Industri Dasar		3.000.000.000.000
7	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi IV Tahap I	1.000.000.000.000
8	PT Lautan Luas Tbk	Perdagangan	PUB Obligasi II Tahap I	200.000.000.000
9	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Real Estate dan Konstruksi	PUB Obligasi II Tahap I	3.500.000.000.000
10	PT AKR Corporindo Tbk.	Industri Kimia	PUB Obligasi I Tahap I	1.000.000.000.000
11	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Perdagangan	PUB Obligasi I Tahap I dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I	1.600.000.000.000
				400.000.000.000
12	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Perbankan	PUB Obligasi I Tahap I	3.000.000.000.000
13	PT Global Mediacom Tbk	Sekuritas dan Investasi	PUB Obligasi I Tahap I	850.000.000.000
			PUB Sukuk Ijarah I Tahap I	250.000.000.000
14	PT Bank Victoria International Tbk.	Perbankan	PUB Obligasi I Tahap I	300.000.000.000
			Subordinasi I Tahap I	50.000.000.000

15	PT Bank Maybank Indonesia Tbk	Perbankan	PUB Obligasi II Tahap I	1.000.000.000.000
			Sukuk Mudharabah II Tahap I	500.000.000.000
16	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi II Tahap I	1.500.000.000.000
17	PT Indomobil Finance Indonesia Tbk	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi II Tahap I	500.000.000.000
18	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Perbankan	PUB Obligasi II Tahap I	5.000.000.000.000
19	PT Pupuk Indonesia (Persero)	Industri Kimia	PUB Tahap I Tahun 2017	3.569.500.000.000
20	PT Timah (Persero) Tbk.	Pertambangan dan Kehutanan	PUB Obligasi I Tahap I dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I	1.200.000.000.000
				300.000.000.000
21	PT Pegadaian (Persero)	Perdagangan	PUB Obligasi III Tahap I	2.500.000.000.000
22	PT Bank Mayapada Internasional Tbk	Perbankan	PUB Obligasi Subordinasi I Tahap I	1.000.000.000.000
23	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Real Estate dan Konstruksi	PUB Obligasi III Tahap I	3.000.000.000.000
24	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	Perbankan	PUB Obligasi I Tahap I	1.500.000.000.000
			PUB Obligasi Subordinasi I	1.000.000.000.000
25	PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi IV Tahap I	1.300.000.000.000,00
			PUB Sukuk Mudharabah III tahap I	200.000.000.000,00
26	PT Chandra Asri Petrochemical Tbk	Industri Kimia	PUB Obligasi I Tahap I	500.000.000.000,00
<b>Total</b>				<b>48.119.500.000.000</b>

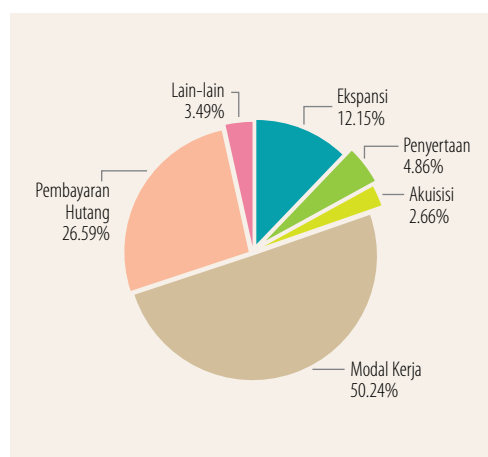
PUB Obligasi Tahap II dst				
No	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Jenis PUB	Nilai Emisi (dalam jutaan rupiah)
1	PT Toyota Astra Financial Services	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi II Tahap II	1.555.370.000.000
2	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Real Estate dan Konstruksi	PUB Obligasi II Tahap III	1.657.000.000.000
3	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi II Tahap IV	5.221.000.000.000
4	PT Bank Bukopin Tbk	Perbankan	PUB Obligasi Subordinasi II Tahap II	1.600.000.000.000
5	PT Sarana Multigraya Finansial (Persero)	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi III Tahap VII	1.677.000.000.000
6	PT BFI Finance Indonesia Tbk	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi III Tahap II	1.000.000.000.000
7	PT Astra Sedaya Finance	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi III Tahap III	2.500.000.000.000
8	PT Bank Pan Indonesia Tbk	Perbankan	PUB Obligasi Subordinasi II Tahap II	2.400.000.000.000
9	PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi III Tahap V	2.014.000.000.000
			PUB Sukuk II Tahap III	386.000.000.000
10	PT Indomobil Finance Indonesia	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi II Tahap IV	410.000.000.000
11	PT Surya Artha Nusantara Finance	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi II Tahap II	1.272.000.000.000
12	PT Medco Energi Indonesia Tbk	Pertambangan dan Kehutanan	PUB Obligasi II Tahap IV	900.000.000.000
13	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Perbankan	PUB Obligasi II Tahap II	5.100.000.000.000
14	PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	Agrobisnis	PUB Obligasi II Tahap II	1.000.000.000.000
15	PT XL Axiata Tbk.	Perhubungan dan Telekomunikasi	PUB Obligasi II Tahap II	2.180.000.000.000
16	PT Tower Bersama Infrastrucutre Tbk.	Perhubungan dan Telekomunikasi	PUB Obligasi II Tahap II	700.000.000.000
17	PT Batavia Prosperindo Finance Tbk	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi I Tahap II	300.000.000.000
18	PT Mandiri Tunas Finance	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi III Tahap II	850.000.000.000
19	PT Hutama Karya (Persero)	Real Estate dan Konstruksi	PUB Obligasi I Tahap II	1.968.000.000.000
20	PT Medco Energi Internasional Tbk.	Pertambangan dan Kehutanan	PUB Obligasi II Tahap V	1.300.000.000.000
21	PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk	Perhubungan dan Telekomunikasi	PUB I Tahap III	800.000.000.000
22	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Perbankan	PUB Obligasi I Tahap II	6.000.000.000.000
23	PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk.	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi III Tahap VI	769.000.000.000
24	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Asuransi dan Pembiayaan	Obligasi PUB Obligasi II Tahap V	3.222.000.000.000
25	PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi II Tahap II	720.500.000.000
26	PT Bank CIMB Niaga Tbk	Perbankan	PUB Obligasi II Tahap II	2.000.000.000.000

27	PT Bank OCBC NISP Tbk	Perbankan	PUB Obligasi II Tahap II	2.002.000.000.000
28	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Perbankan	PUB Obligasi II Tahap III	5.150.000.000.000
29	PT Tower Bersama Infrastructure	Perhubungan dan Telekomunikasi	PUB II Tahap III	700.000.000.000
30	PT Global Mediacom Tbk	Sekuritas dan Investasi	PUB Obligasi I Tahap II	250.000.000.000
			PUB Sukuk Ijarah I Tahap II	150.000.000.000
31	PT Hutama Karya (Persero)	Real Estate dan Konstruksi	Obligasi	3.532.000.000.000
32	PT Medco Energi International Tbk	Pertambangan dan Kehutanan	PUB II Tahap VI	566.500.000.000
33	PT Federal International Finance	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi III Tahap II	2.650.000.000.000
34	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi IV Tahap II	1.000.000.000.000
35	PT Bank UOB Indonesia	Perbankan	PUB Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Tahap II	500.000.000.000
36	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	Perbankan	PUB Obligasi III Tahap II	1.500.000.000.000
37	PT Astra Sedaya Finance	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi III Tahap IV	1.800.000.000.000
38	PT Bank CIMB Niaga Tbk	Perbankan	PUB Obligasi II Tahap III	2.000.000.000.000
39	PT PLN (Persero)	Perdagangan	PUB Obligasi II Tahap II	2.545.500.000.000
			PUB Sukuk Ijarah II Tahap II	694.500.000.000
40	PT BFI Finance Indonesia Tbk	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi III Tahap III	835.000.000.000
41	PT Pupuk Indonesia (Persero)	Industri Kimia	PUB Tahap II Tahun 2017	4.375.500.000.000
42	PT Indosat Tbk	Perhubungan dan Telekomunikasi	PUB Obligasi II Tahap II Tahun 2017	2.720.000.000.000
			PUB Sukuk Ijarah II Tahap II Tahun 2017	700.000.000.000
43	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi I Tahap II	7.000.000.000.000
44	PT Maybank Indonesia Finance	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi I Tahap IV	1.200.000.000.000
45	PT Summarecon Agung Tbk	Properti dan Perhotelan	PUB Obligasi II Tahap II	800.000.000.000
46	PT Lautan Luas Tbk.	Perdagangan	PUB Obligasi II Tahap II	650.000.000.000
47	PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi II Tahap III	1.000.000.000.000
48	PT Aneka Gas Industri Tbk	Aneka Industri Lainnya	PUB I Tahap I	256.000.000.000
			Sukuk Ijarah	144.000.000.000
49	PT Bank OCBC NISP Tbk	Perbankan	PUB Obligasi II Tahap II	2.000.000.000.000
50	PT Mayora Indah Tbk.	Barang Konsumsi	PUB Obligasi Berkelanjutan I Mayora Indah Tahap II Tahun 2017	550.000.000.000
<b>Total</b>				<b>96.232.370.000.000</b>

#### D. Rencana Penggunaan Dana

Persentase terbesar penggunaan dana Penawaran Umum yang dilakukan di selama triwulan I-IV 2017 adalah untuk modal kerja yaitu sebanyak 50,24% atau sekitar Rp127,4triliun. Rincian porsi penggunaan dana lainnya adalah 26,59% atau sekitar Rp67,41triliun untuk pembayaran hutang; 12,15% atau sekitar Rp30,82triliun untuk ekspansi; 4,86% atau sekitar Rp12,33triliun untuk penyertaan; 3,49% atau sekitar Rp8,86triliun untuk lain-lain; dan 2,66% atau sekitar Rp6,75triliun untuk akuisisi.

Grafik I - 33 Rencana Penggunaan Dana



Tabel I - 26

Rencana Penggunaan Dana Atas EPP yang Melakukan Aksi Korporasi Pada Triwulan IV-2017 Berdasarkan Sektor Industri (dalam jutaan rupiah)

No	Sektor Industri	Ekspansi	Penyertaan	Akuisisi	Modal Kerja	Restruk. Hutang	Lain-Lain
1	Perbankan	5.482.253	-	-	46.225.347	5.295.751	-
2	Asuransi dan Pembiayaan	1.067.251	-	-	48.022.322	2.584.088	-
3	Sekuritas dan Investasi	280.000	5.047.436	-	861.134	1.107.600	-
4	Perdagangan	941.480	50.000	4.367.685	6.527.565	3.645.616	82.453
5	Perhubungan dan Telekomunikasi	1.083.942	2.935.941	-	6.679.079	9.564.617	119.492
6	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata dan Perusahaan Jasa Lainnya	3.922.957	-	100.879	1.487.777	71.234	750.226
7	Properti dan Perhotelan	796.904	3.700.733	-	403.363	1.124.412	-
8	Real Estate dan Konstruksi	4.148.503	300.000	2.073.499	10.456.296	707.690	-
9	Tekstil, Garmen, dan Alas Kaki	29.937	-	-	12.228	-	-
10	Barang Konsumsi	1.816.619	-	-	1.168.433	2.804.059	-
11	Aneka Industri Lainnya	319.508	300.688	149.200	288.023	930.643	22.951
12	Industri Dasar	-	-	-	1.622.947	1.370.000	-
13	Industri Logam	-	-	-	-	-	-
14	Industri Kimia	4.956.877	-	-	1.164.198	1.063.960	7.365.561
15	Agrobisnis	-	-	-	492.682	563.875	-
16	Pertambangan dan Kehutanan	5.969.511	-	54.319	1.987.197	36.581.133	517.306
	<b>Total</b>	<b>30.815.742</b>	<b>12.334.797</b>	<b>6.745.582</b>	<b>127.398.592</b>	<b>67.414.679</b>	<b>8.857.990</b>

\*Data berdasarkan penggunaan dana setelah dikurangi oleh biaya Emisi

### 1.3.5 Perkembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

#### A. Lembaga Penunjang Pasar Modal Serta Pemingkat Efek

Lembaga Penunjang Pasar Modal merupakan Lembaga yang memberikan jasa pada satu pihak atau lebih sesuai izin kegiatan usahanya di Pasar Modal, terdiri dari Biro Administrasi Efek (BAE), Bank Kustodian, Wali Amanat, Pemingkat Efek, dan Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM). Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal yang tercatat di OJK adalah sebagai berikut:

Tabel I - 27

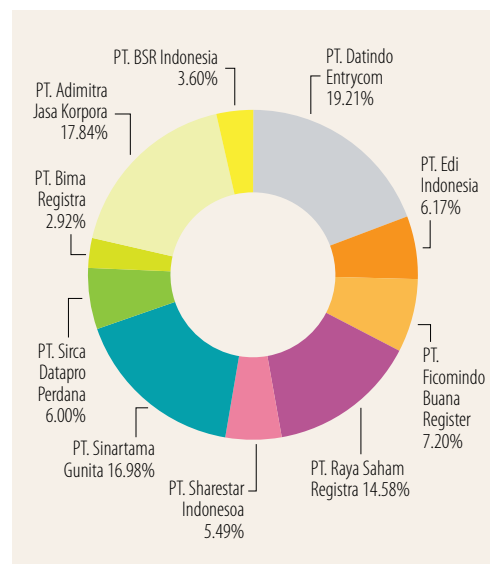
Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal

Lembaga Penunjang	2017	2017	Jenis
	Triwulan III	Triwulan IV	
Biro Administrasi Efek	10	10	Surat Perizinan
Bank Kustodian	20	20	Surat Persetujuan
Wali Amanat	12	12	Surat Tanda Terdaftar
Pemingkat Efek	2	2	Surat Perizinan
Ahli Syariah Pasar Modal	0	0	Surat Perizinan

#### B. Biro Administrasi Efek (BAE)

Berdasarkan jumlah klien yang dimiliki oleh BAE, pangsa pasar BAE didominasi oleh PT Datindo Entrycom yang mencapai 19.21%, PT Adimitra Jasa Korpora sebanyak 17.84%, PT Sinartama Gunita sebanyak 16.98% dari

Grafik I - 34 Market Share BAE Berdasarkan Jumlah Klien Sampai Triwulan IV-2017

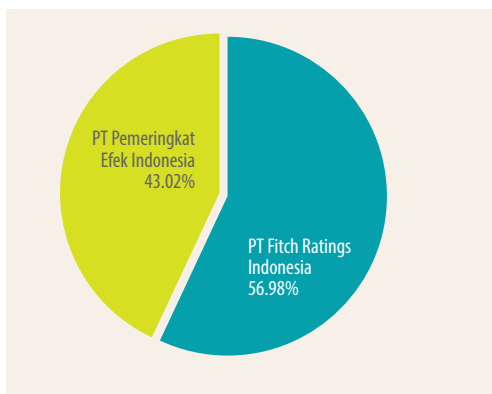


keseluruhan pengguna jasa BAE. Sementara, BAE dengan jumlah klien paling sedikit adalah PT Bima Registra sebanyak 2,92%, PT BSR Indonesia sebanyak 3,60% dan PT Sharestar Indonesia sebanyak 5,49%.

### C. Pemeringkat Efek

Sampai dengan triwulan IV-2017, total perusahaan yang diperingkat oleh dua Pemeringkat Efek sebanyak 172 Perusahaan yang sebelumnya 165 Perusahaan per triwulan III-2017. Pangsa pasar berdasarkan jumlah perusahaan yang diperingkat masing-masing Pemeringkat Efek adalah PT Pemeringkat Efek Indonesia sebanyak 74 Perusahaan yang sebelumnya 71 Perusahaan per triwulan III-2017. Selanjutnya PT Fitch Ratings Indonesia sebanyak 98 Perusahaan yang sebelumnya 94 Perusahaan per triwulan III-2017. Berikut *market share company rating* (%) berdasarkan jumlah perusahaan yang diperingkat oleh Perusahaan Pemeringkat Efek Triwulan IV-2017:

Grafik I - 35 Market Share Company Rating Triwulan IV-2017



Dari 172 Perusahaan yang diperingkat oleh Perusahaan Pemeringkat Efek, sebanyak 161 Perusahaan masuk kategori *Investment Grade* dan sebanyak 11 Perusahaan masuk dalam kategori *Non Investment Grade*. Berikut data lengkap komposisi peringkat perusahaan yang masuk kategori *Investment Grade* dan *Non Investment Grade* per triwulan IV-2017:

Tabel I - 28 Jumlah Perusahaan Berdasarkan Hasil Pemeringkat Efek

Perusahaan Pemeringkat Efek	<i>Investment Grade</i> (Perusahaan)		<i>Non Investment Grade</i> (Perusahaan)	
	Triwulan III-2017	Triwulan IV-2017	Triwulan III-2017	Triwulan IV-2017
PT Pemeringkat Efek Indonesia	66	64	5	10
PT Fitch Ratings Indonesia	93	97	1	1
<b>Total</b>	<b>159</b>	<b>161</b>	<b>6</b>	<b>11</b>

### D. Profesi Penunjang Pasar Modal

Selama periode triwulan IV-2017, OJK melakukan serangkaian kegiatan dalam rangka pengawasan Profesi Penunjang Pasar Modal, yaitu:

- OJK menerbitkan sebanyak 12 Surat Tanda Terdaftar (STTD) dan 17 Surat Keputusan Pemberian Izin Perorangan, terdiri dari:
  - Akuntan : satu STTD
  - Konsultan Hukum : enam STTD
  - Penilai : satu STTD
  - Notaris : empat STTD
  - ASPM : 17 Surat Keputusan Pemberian Izin Perorangan
- OJK menetapkan sebanyak 13 Keputusan Dewan Komisiner terkait pembatalan STTD yang terdiri dari:
  - Konsultan Hukum: empat pembatalan STTD
  - Notaris: sembilan pembatalan STTD
- Terdapat satu Notaris memasuki usia Pensiun, serta satu Akuntan dan satu Notaris meninggal dunia.
- Terdapat 13 Akuntan yang izinnya dicabut dari Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK).

Berikut merupakan hasil pemetaan profesi Penunjang Pasar Modal:

**Tabel I - 29** Perkembangan Profesi Penunjang Pasar Modal

Profesi	Aktif	
	Triwulan III-2017	Triwulan IV-2017
Akuntan	607	594
Konsultan Hukum	722	724
Penilai	218	219
Notaris	1.323	1.316
Penilai Pemerintah	251	251
ASPM	45	62

Untuk meningkatkan profesionalisme Profesi Penunjang Pasar Modal, selama triwulan IV-2017 OJK bekerja sama dengan asosiasi menyelenggarakan lima Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) dan satu kali Pendidikan Dasar dengan rincian sebagai berikut:

- Akuntan**  
Penyelenggaraan dua kali Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) di Medan dengan tema "Isu Terkini Penyusunan Laporan Keuangan Emiten Sektor Perkebunan Beserta Aspek Auditnya" dan di Bandung dengan tema "Year End Reminder Laporan Auditor Independen Untuk Emiten"
- Konsultan Hukum**  
Penyelenggaraan PPL sebanyak dua kali di Jakarta dengan tema "Peran Konsultan Hukum dalam Pengembangan Pasar Surat Berharga Komersial (SBK)" dan di Pontianak dengan tema "Perlindungan Investor atas Pembelian Produk Pasar Modal Syariah"
- Penilai**  
Penyelenggaraan PPL sebanyak satu kali di Surabaya dengan tema "Penilaian Properti, Bisnis dan Reviu Laporan Proforma Dalam Rangka Akuisisi Emiten Di Pasar Modal".

## 1.4 PERKEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN NON BANK

Sepanjang triwulan IV-2017, kinerja Industri Keuangan Non Bank (IKNB) bergerak positif. Hal tersebut tercermin dari meningkatnya total aset IKNB sebesar 3,88% menjadi Rp2.165,40 triliun. Adapun penyumbang terbesar kenaikan aset IKNB adalah pada industri Asuransi Konvensional dan BPJS, Lembaga Pembiayaan, dan Dana Pensiun.

**Tabel I - 30** Total Aset IKNB (dalam triliun rupiah)

No	Industri	Triwulan				
		Triwulan IV-2016	Triwulan I-2017	Triwulan II-2017	Triwulan III-2017	Triwulan IV-2017
1	Asuransi Konvensional dan BPJS	944.58	981.14	1.012.34	1.079,00	1.132,60
2	Dana Pensiun	238.30	246.80	254.13	258,94	260,96
3	Lembaga Pembiayaan*)	509.22	516.69	532.84	537,17	556,57
4	Lembaga Jasa Keuangan Khusus **)	184.81	193.18	193.77	200.73	206,79
5	Industri Jasa Penunjang IKNB ***)	7.25	7.30	7.30	8.26	8,07
6	Lembaga Keuangan Mikro *****)	0.28	0.29	0.30	0.35	0,41
<b>Total Aset</b>		<b>1884.44</b>	<b>1945.4</b>	<b>2000.68</b>	<b>2084.45</b>	<b>2165.40</b>

\*) Aset Lembaga Pembiayaan tidak termasuk PMV syariah

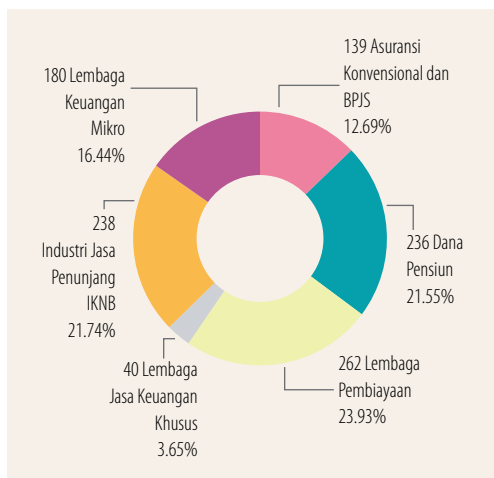
\*\*) Revisi data LKK dengan menambahkan aset PT PNM dan PT Danareksa dan tidak termasuk Lembaga Penjaminan syariah

\*\*\*) Aset Industri Jasa Penunjang IKNB adalah per Semester I 2017

\*\*\*\*) Aset LKM termasuk syariah

Sementara itu, bila dilihat berdasarkan jumlah Pelaku, industri Lembaga Pembiayaan merupakan jumlah pelaku IKNB terbesar dengan jumlah 262 pelaku, diikuti oleh Industri Jasa Penunjang IKNB, Dana Pensiun, Lembaga Keuangan Mikro, Asuransi Konvensional dan BPJS dan serta Lembaga Jasa Keuangan Khusus.

**Grafik I - 36** Komposisi Jumlah Pelaku IKNB Triwulan IV-2017



### 1.4.1 Perkembangan Perasuransian Konvensional dan BPJS

Sampai dengan periode laporan, aset industri Asuransi dan BPJS tumbuh 4,97% (*qta*) menjadi Rp1.132,60 triliun. Peningkatan aset tersebut seiring dengan peningkatan jumlah investasi yang naik 5,7% menjadi Rp972,08 triliun. Peningkatan investasi terbesar terdapat pada jenis investasi Reksadana, Saham, dan obligasi. Sementara itu, berdasarkan jenis industri asuransi, kenaikan nilai investasi terbesar didominasi oleh asuransi jiwa dan asuransi sosial (BPJS) dengan total kenaikan investasi sebesar Rp52,46 triliun.

**Tabel I - 31** Indikator Perusahaan Perasuransian Konvensional dan BPJS (dalam triliun rupiah)

No.	Jenis Indikator	Triwulan IV 2016	Triwulan I 2017	Triwulan II 2017	Triwulan III 2017	Triwulan IV 2017
1	<b>Total Aset</b>					
	Asuransi Jiwa	395,11	419,50	434,76	486,66	512,95
	Asuransi Umum dan Reasuransi	139,47	140,70	140,34	142,03	146,17
	Asuransi Wajib	120,01	123,01	124,36	126,15	132,40
	BPJS	289,98	297,93	312,89	324,16	341,09
	<b>Jumlah</b>	<b>944,58</b>	<b>981,14</b>	<b>1.012,34</b>	<b>1.079,00</b>	<b>1.132,60</b>
2	<b>Total Investasi</b>					
	Asuransi Jiwa	343,27	365,22	378,89	430,14	458,59
	Asuransi Umum dan Reasuransi	69,71	71,80	71,97	75,43	77,08
	Asuransi Wajib	94,28	102,60	103,52	106,13	111,90
	BPJS	273,16	276,52	295,65	307,92	324,50
	<b>Jumlah</b>	<b>780,42</b>	<b>816,14</b>	<b>850,03</b>	<b>919,62</b>	<b>972,08</b>
3	<b>Total Pendapatan Premi</b>					
	Asuransi Jiwa	137,79	35,19	73,79	131,85	183,85
	Asuransi Umum dan Reasuransi	74,93	18,77	37,47	56,39	79,65
	Asuransi Wajib	11,73	2,88	5,74	8,79	11,90
	BPJS	116,28	29,26	61,60	95,13	130,49
	<b>Jumlah</b>	<b>340,73</b>	<b>86,11</b>	<b>178,61</b>	<b>292,16</b>	<b>405,88</b>
4	<b>Total Klaim Bruto</b>					
	Asuransi Jiwa	79,05	20,39	43,93	80,98	115,77
	Asuransi Umum dan Reasuransi	32,61	7,74	15,50	23,60	33,51
	Asuransi Wajib	9,91	2,64	5,21	8,53	11,79
	BPJS	86,80	25,70	52,63	80,11	109,81
	<b>Jumlah</b>	<b>208,37</b>	<b>56,47</b>	<b>117,26</b>	<b>193,22</b>	<b>270,88</b>
5	<b>Total Liabilitas</b>					
	Asuransi Jiwa	317,53	336,43	349,37	396,50	421,96
	Asuransi Umum dan Reasuransi	85,86	85,03	84,14	84,32	85,82
	Asuransi Wajib	97,96	99,05	100,24	101,79	105,49
	BPJS	40,56	40,37	44,78	49,23	51,20
	<b>Jumlah</b>	<b>541,91</b>	<b>560,88</b>	<b>578,53</b>	<b>631,84</b>	<b>664,47</b>



**Tabel I - 32** Portofolio Investasi Perasuransian Konvensional dan BPJS  
(dalam triliun rupiah)

No.	Jenis Aset Investasi	Triwulan IV 2016	Triwulan I 2017	Triwulan II 2017	Triwulan III 2017	Triwulan IV 2017
1	Deposito Berjangka	120,07	129,41	141,35	133,1	133,1
2	Sertifikat Deposito				0,3	0,3
3	Saham	177,29	177,75	181,30	217,0	217,0
4	Obligasi	98,61	101,15	105,10	111,1	111,1
5	MTN				2,0	2,0
6	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI	220,67	231,79	240,03	246,4	246,4
7	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI	0,83	0,83	0,86	0,9	0,9
8	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	-	-	-	-	-
9	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	-	-	0,01	-	-
10	Reksa Dana	132,87	144,70	150,54	225,8	225,8
11	Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset	1,17	1,16	1,49	2,6	2,6
12	Dana Investasi Real Estat	0,18	0,20	0,21	0,2	0,2
13	REPO				-	-
14	Penyertaan Langsung	13,57	13,67	13,74	15,2	15,2
15	Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Investasi	13,78	13,58	13,49	13,9	13,9
16	Pembelian Piutang untuk Perusahaan Pembiayaan dan/atau Bank	0,19	0,34	0,39	0,6	0,6
17	Emas Murni	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
18	Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan	0,24	0,18	0,18	0,2	0,2
19	Pinjaman Polis				2,0	2,0
20	Investasi Lain	0,93	1,40	1,34	0,9	0,9
	<b>Total</b>	<b>780,42</b>	<b>816,14</b>	<b>850,03</b>	<b>919,62</b>	<b>972,1</b>

Peningkatan aset dan investasi industri Asuransi dan BPJS didukung juga dengan peningkatan kinerja industri yaitu dari sisi pendapatan premi yang meningkat sebesar 19,12% (yoy) menjadi Rp405,88 triliun. Komposisi pendapatan premi masih didominasi Asuransi Jiwa dengan porsi sebesar 45,30%, diikuti oleh BPJS sebesar 32,15%, Asuransi Umum dan Reasuransi sebesar 19,62%, serta Asuransi Wajib sebesar 2,93%.

Sampai triwulan IV-2017, terdapat empat jenis investasi yang mendominasi industri perasuransian konvensional dan BPJS, yaitu Surat Berharga Negara (25,3%), Reksa dana (23,2%), Saham (22,3%) dan Deposito Berjangka (13,7%).

Sampai dengan periode laporan, jumlah pelaku industri perusahaan Perasuransian dan BPJS berjumlah 139 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel I - 33** Jumlah Industri Perusahaan Perasuransian Konvensional dan BPJS

No	Perusahaan Perasuransian	Triwulan IV 2016	Triwulan I 2017	Triwulan II 2017	Triwulan III 2017	Triwulan IV 2017
1	Asuransi Jiwa					
	a. BUMN	1	1	1	1	1
	b. Swasta Nasional	28	28	28	30	30
	c. Patungan	23	23	23	23	23
	<b>Sub Total</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>54</b>	<b>54</b>
2	Asuransi Kerugian					
	a. BUMN	2	2	2	2	2
	b. Swasta Nasional	53	51	51	50	50
	c. Patungan	21	23	23	23	22
	<b>Sub Total</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>75</b>	<b>74</b>
3	Reasuransi	5	5	5	6	6
4	BPJS	2	2	2	2	2
5	Penyelenggara Asuransi Wajib	3	3	3	3	3
	<b>Total Asuransi dan Reasuransi</b>	<b>138</b>	<b>138</b>	<b>138</b>	<b>140</b>	<b>139</b>

**Tabel I - 34** Densitas dan Penetrasi Industri Perasuransian Konvensional dan BPJS

Uraian	Triwulan IV 2016	Triwulan I 2017	Triwulan II 2017	Triwulan III 2017	Triwulan IV 2017
GDP (dalam miliar rupiah)	12.406.800	12.406.800	12.406.800	12.406.800	12.406.800
Premi Bruto (dalam miliar rupiah)	323.564	335.199	340.656	371.139	385.809
Jumlah Penduduk (dalam jutaan rupiah)	257	257	257	257	257
Penetrasi	2,61%	2,70%	2,75%	2,99%	3,11%
Densitas (dalam ribu rupiah)	1.259,00	1.304,28	1.325,51	1.444,12	1.501,20

Catatan:

- 1) Angka Premi Bruto merupakan premi bulan Desember 2017 disetahunkan
- 2) Angka GDP merupakan angka sementara dari Indikator Ekonomi BPS per Februari 2016.
- 3) Penetrasi: Premi Bruto/GDP
- 4) Densitas: Premi Bruto/Jumlah penduduk

Selama periode laporan, densitas asuransi yang menggambarkan rata-rata pengeluaran tiap penduduk untuk pembayaran premi asuransi naik sebesar 3,95% menjadi Rp1,5

juta. Adapun tingkat penetrasi asuransi yang menggambarkan kontribusi premi bruto terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) adalah sebesar 3,11% atau naik 0,12%.

**Tabel I - 35** RBC Industri Asuransi

Uraian	Triwulan IV 2016	Triwulan I 2017	Triwulan II 2017	Triwulan III 2017	Triwulan IV 2017
Asuransi Jiwa	497,4%	428,8%	414,0%	491,5%	521,0%
Asuransi Umum dan Reasuransi	266,7%	279,7%	278,6%	294,1%	321,0%

Di samping itu, RBC kedua jenis industri asuransi tersebut masih memenuhi batas ketentuan RBC minimal yaitu 120%. Permodalan industri asuransi jiwa masih terjaga dengan rata-rata RBC untuk meningkat menjadi 521,0%, atau naik 29,5% dibanding periode sebelumnya. Begitu juga dengan RBC Asuransi Umum yang mengalami peningkatan sebesar 26,9% menjadi 321,0% dibanding periode sebelumnya.

**Tabel I - 36** Distribusi Aset Industri Dana Pensiun (triliun Rupiah)

Jenis Program	Triwulan IV 2016	Triwulan I 2017	Triwulan II 2017	Triwulan III 2017	Triwulan IV 2017
DPPK-PPMP	147,81	150,49	152,65	152,37	154,50
<i>Growth</i>	-0,34%	1,81%	1,44%	-0,19%	1,40%
DPPK-PPIP	26,65	27,45	28,34	30,91	30,95
<i>Growth</i>	0,33%	3,00%	3,23%	9,08%	0,15%
DPLK	63,84	68,86	73,14	75,66	75,50
<i>Growth</i>	5,29%	7,86%	6,21%	3,45%	-0,21%
<b>Total Aset (dalam triliun rupiah)</b>	<b>238,30</b>	<b>246,80</b>	<b>254,13</b>	<b>258,94</b>	<b>260,96</b>
<i>Growth</i>	<b>1,19%</b>	<b>3,57%</b>	<b>2,97%</b>	<b>1,9%</b>	<b>0,8%</b>

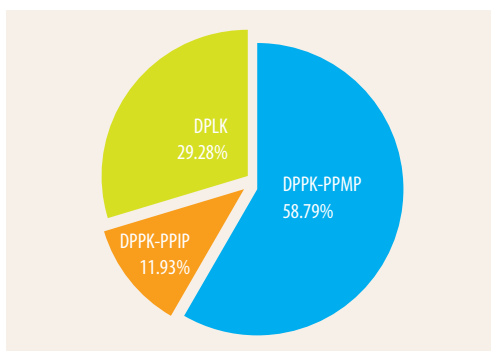
**Tabel I - 37** Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun (triliun Rupiah)

Jenis Program	Triwulan IV 2016	Triwulan I 2017	Triwulan II 2017	Triwulan III 2017	Triwulan IV 2017
DPPK-PPMP	139,87	145,04	146,19	146,73	149,61
<i>Growth</i>	-0,85%	3,70%	0,80%	0,37%	1,96%
DPPK-PPIP	26,07	26,82	27,49	30,20	30,36
<i>Growth</i>	0,54%	2,87%	2,49%	9,88%	0,53%
DPLK	62,83	67,44	71,62	74,59	74,52
<i>Growth</i>	7,34%	6,19%	4,16%	-0,10%	7,34%
<b>Total Investasi (dalam triliun rupiah)</b>	<b>228,77</b>	<b>239,30</b>	<b>245,30</b>	<b>251,52</b>	<b>254,48</b>
<i>Growth</i>	<b>4,60%</b>	<b>2,51%</b>	<b>2,5%</b>	<b>1,2%</b>	<b>4,60%</b>

## 1.4.2 Perkembangan Industri Dana Pensiun

Sampai dengan periode laporan, terjadi peningkatan aset Dana Pensiun sebesar 0,8% menjadi Rp260,96 triliun bila dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan aset ini sejalan dengan meningkatnya nilai investasi sebanyak 4,6% (*qta*) menjadi Rp254,48 triliun.

**Grafik I - 37** Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun



**Tabel I - 38** Portofolio Investasi Dana Pensiun (triliun Rupiah)

No.	Jenis Aset Investasi	Triwulan IV 2016	Triwulan I 2017	Triwulan II 2017	Triwulan III 2017	Triwulan IV 2017
1	Surat Berharga Negara	54,33	56,10	57,08	57,70	58,36
2	Tabungan	0,19	0,21	0,19	0,57	0,29
3	Deposito On Call	1,09	1,71	2,04	1,25	1,17
4	Deposito Berjangka	57,35	62,80	65,59	68,34	67,00
5	Sertifikat Deposito	1,07	1,51	1,56	1,57	1,59
6	Sertifikat Bank Indonesia	0,44	0,004	-	-	-
7	Saham	28,71	29,93	30,29	29,60	31,61
8	Obligasi	48,39	48,54	49,18	51,55	52,70
9	Sukuk	1,95	2,12	2,37	2,61	3,02
10	Unit Penyertaan Reksadana/	13,94	14,50	14,59	15,07	15,92
11	Medium Term Note	0,07	0,13	0,19	0,12	0,20
12	Efek Beragun Aset dari KIK EBA	0,50	0,49	0,56	1,20	1,14
13	Unit Penyertaan berbentuk KIK	0,14	0,13	0,12	0,12	0,12
14	Kontrak Opsi Saham	-	-	-	-	-
15	Repurchase Agreement	-	-	-	-	-
16	Penempatan Langsung pada Saham	7,47	7,60	7,77	7,77	8,18
17	Tanah	4,42	4,69	4,75	4,85	4,71
18	Bangunan	1,99	2,08	2,10	2,12	1,98
19	Tanah dan Bangunan	6,70	6,76	6,91	7,06	6,48
	<b>Total</b>	<b>228,77</b>	<b>239,30</b>	<b>245,30</b>	<b>251,52</b>	<b>254,48</b>

Di antara jenis investasi yang diperkenankan tersebut, terdapat empat jenis investasi yang mendominasi yaitu Deposito Berjangka (26,33%), Surat Berharga Negara (22,93%), Obligasi (20,71%), dan Saham (12,42%).

Selanjutnya, jumlah Dana Pensiun sampai dengan periode laporan adalah 236 pelaku dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel I - 39** Jumlah Dana Pensiun

Jenis Dana Pensiun	Triwulan IV 2016	Triwulan I 2017	Triwulan II 2017	Triwulan III 2017	Triwulan IV 2017
DPPK PPMP	180	177	175	171	169
DPPK PPIP	44	43	43	43	44
DPLK	25	25	24	24	23
<b>Jumlah</b>	<b>249</b>	<b>245</b>	<b>242</b>	<b>238</b>	<b>236</b>

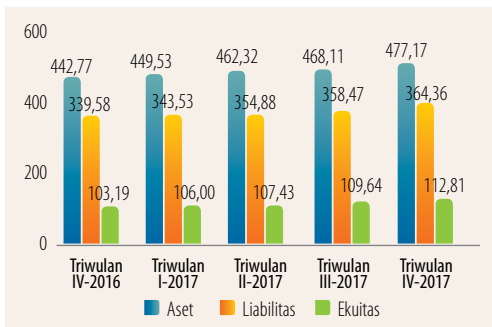
Selama triwulan IV-2017, terdapat satu dana pensiun pemberi kerja yang bubar yaitu DPPK Merck Indonesia dan satu dana pensiun yang melakukan perubahan program pensiun dari manfaat pasti ke iuran pasti yaitu DPPK Yadapen, satu dana pensiun lembaga keuangan yang melakukan konversi menjadi dana pensiun lembaga keuangan syariah yaitu PT Bank Muamalat Indonesia.

## 1.4.3 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan

### A. Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan

Sampai dengan periode laporan, total aset dan liabilitas Perusahaan Pembiayaan mengalami kenaikan, masing-masing sebesar 1,93% dan 1,64% dibandingkan triwulan sebelumnya. Ekuitas Perusahaan Pembiayaan juga meningkat sebesar 2,89% dibandingkan triwulan sebelumnya.

**Grafik I - 38** Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan (triliun rupiah)



Catatan: Data sudah termasuk Pembiayaan Syariah

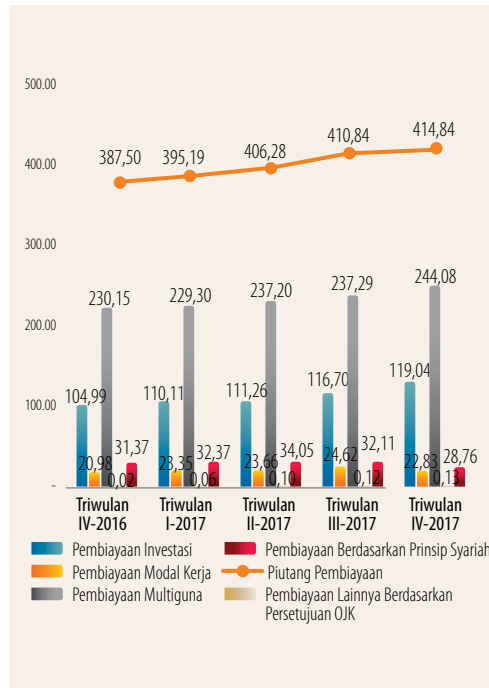
### B. Jumlah dan Pangsa Pasar Perusahaan Pembiayaan

Pada triwulan IV-2017 terdapat lima pencabutan izin Perusahaan Pembiayaan sehingga jumlah Perusahaan Pembiayaan pada triwulan IV-2017 menjadi 193 perusahaan. Berdasarkan total aset, sebanyak 74 perusahaan pembiayaan menguasai aset industri dengan porsi sebesar 92% sedangkan 119 perusahaan pembiayaan hanya menguasai aset industri sebesar 8%.

### C. Piutang Perusahaan Pembiayaan

Kinerja kegiatan industri Perusahaan Pembiayaan dalam melakukan penyaluran

**Grafik I - 39** Piutang Perusahaan Pembiayaan (dalam triliun rupiah)



piutang mengalami peningkatan sebesar Rp3,99 triliun atau 0,97% dibandingkan triwulan sebelumnya, dengan komposisi piutang pembiayaan didominasi oleh Pembiayaan Multiguna dan Pembiayaan Investasi dengan proporsi masing-masing sebesar 58,84% dan 28,70%.

**Tabel I - 40** Piutang Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan sektor Ekonomi (triliun Rupiah)

Sektor Ekonomi	Triwulan IV 2016	Triwulan I 2017	Triwulan II 2017	Triwulan III 2017	Triwulan IV 2017
<b>A. Sektor Ekonomi Lapangan Usaha</b>	<b>241,13</b>	<b>250,79</b>	<b>315,30</b>	<b>320,26</b>	<b>331,67</b>
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	19,40	15,77	19,00	19,12	20,40
2. Pertambangan dan Penggalian	19,04	20,11	22,24	22,97	23,74
3. Industri Pengolahan	30,43	32,42	35,71	36,39	38,34
4. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	22,02	23,77	21,21	22,07	19,26
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah	0,30	0,31	0,33	0,34	0,35
6. Konstruksi	10,39	11,39	12,90	13,61	14,50
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	40,04	46,61	65,47	68,18	71,82
8. Transportasi dan Pergudangan	22,09	20,95	24,10	25,04	26,25
9. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	5,13	5,37	9,84	10,02	9,85
10. Informasi dan Komunikasi	3,31	3,07	4,04	3,57	3,55
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,63	2,84	4,27	4,14	4,35
12. Real Estat	1,52	1,80	1,91	1,83	1,83
13. Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis	1,27	1,57	2,44	2,41	2,62
14. Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	23,38	23,96	36,88	37,30	39,23

15. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,26	3,57	6,90	6,94	7,18
16. Jasa Pendidikan	3,10	3,17	4,37	4,71	4,84
17. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,67	7,17	9,01	9,27	9,41
18. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	0,40	0,43	2,05	2,04	2,13
19. Kegiatan Jasa Lainnya	17,15	16,95	22,90	20,81	22,05
20. Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri untuk Memenuhi Kebutuhan	9,59	9,56	9,72	9,48	9,90
21. Kegiatan Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	0,01	0,01	0,01	0,01	0,06
<b>B. Sektor Ekonomi Bukan Lapangan Usaha</b>	<b>159,11</b>	<b>157,15</b>	<b>104,61</b>	<b>104,34</b>	<b>97,87</b>
1. Rumah Tangga	53,31	52,75	58,46	56,61	61,45
2. Bukan Lapangan Usaha Lainnya	105,79	104,39	46,15	47,73	36,42
<b>Jumlah</b>	<b>400,24</b>	<b>407,93</b>	<b>419,91</b>	<b>424,60</b>	<b>429,54</b>

Bila dilihat dari proporsi pembiayaan yang disalurkan berdasarkan sektor ekonomi, maka Sektor Ekonomi Lapangan Usaha mendominasi piutang dengan proporsi sebesar 77,22% (Rp331,67 triliun).

#### D. Indikator Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan

Seiring dengan pertumbuhan piutang pembiayaan, rasio FAR (*Financing to Asset Ratio*) masih terjaga pada rasio 86,94% atau masih dalam batas ketentuan, yaitu minimum 40%. Kualitas piutang pembiayaan (NPF) masih berada pada level 2,96% atau dalam batas ketentuan (maksimal 5%). Selain itu, *Gearing Ratio* pada periode laporan tercatat 2,99 kali (maksimal 10 kali).

**Tabel I - 41** Indikator Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan

Uraian	Triwulan IV 2016	Triwulan I 2017	Triwulan II 2017	Triwulan III 2017	Triwulan IV 2017
FAR (%)	87,52%	87,91%	87,88%	87,77%	86,94%
NPF (%)	3,26%	3,16%	3,47%	3,18%	2,96%
<i>Gearing Ratio</i> (kali)	3,03	2,98	3,05	3,00	2,99

#### E. Laba (Rugi) Perusahaan Pembiayaan

Seiring peningkatan jumlah piutang pembiayaan, maka berdampak pada laba bersih industri perusahaan pembiayaan yang mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp13,27 triliun pada triwulan IV-2017

#### F. Jenis Valuta Pinjaman

Dalam rangka mendukung kegiatan bisnis operasional perusahaan pembiayaan dalam menyalurkan piutang pembiayaan, maka perusahaan pembiayaan menerima sumber pendanaan yang berasal dari pinjaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Dari jumlah pinjaman sebesar Rp260,88 triliun yang diterima perusahaan pembiayaan pada triwulan IV-2017, 55,53% berdenominasi Rupiah, diikuti oleh Dolar Amerika Serikat 34,72%, Yen Jepang 9,75%, dan Dolar Singapura 0,002%. Untuk melindungi perusahaan dari fluktuasi nilai tukar valas, maka seluruh pinjaman berdenominasi mata uang asing tersebut telah dilakukan lindung nilai (*hedging*).

Tabel I - 42 NPF Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan sektor Ekonomi

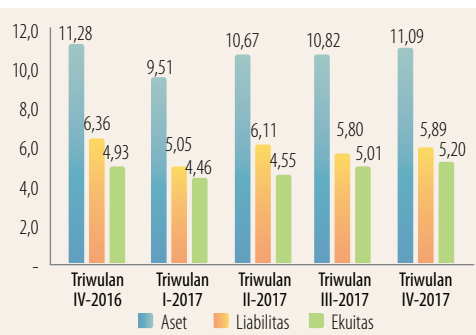
Sektor Ekonomi	Triwulan IV 2016	Triwulan I 2017	Triwulan II 2017	Triwulan III 2017	Triwulan IV 2017
<b>A. Sektor Ekonomi Lapangan Usaha</b>	<b>3,85%</b>	<b>3,79%</b>	<b>3,49%</b>	<b>3,20%</b>	<b>3,10%</b>
1. Pertanian, kehutanan dan perikanan	2,50%	2,53%	2,46%	2,22%	1,87%
2. Pertambangan dan penggalian	7,26%	7,65%	7,17%	6,75%	6,22%
3. Industri pengolahan	2,00%	2,59%	2,44%	2,38%	2,04%
4. Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin	0,03%	0,03%	0,04%	0,11%	0,13%
5. Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang, pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah	2,81%	2,69%	2,19%	1,96%	1,98%
6. Konstruksi	3,09%	3,64%	3,01%	3,13%	2,95%
7. Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	2,02%	2,14%	2,30%	1,76%	2,35%
8. Transportasi dan pergudangan	16,97%	15,09%	14,01%	13,32%	12,27%
9. Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	9,03%	8,46%	5,28%	5,00%	5,10%
10. Informasi dan komunikasi	1,83%	1,49%	5,10%	6,52%	1,18%
11. Jasa keuangan dan asuransi	0,98%	1,68%	1,81%	1,54%	3,04%
12. Real Estat	3,75%	4,50%	4,49%	3,72%	3,61%
13. Jasa profesional, ilmiah dan teknis	1,18%	2,51%	2,26%	1,55%	1,57%
14. Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya	2,20%	2,62%	1,99%	1,73%	1,53%
15. Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	1,77%	2,05%	1,88%	1,34%	1,35%
16. Jasa pendidikan	1,32%	1,88%	1,93%	1,39%	1,30%
17. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	1,58%	2,13%	2,51%	1,60%	1,67%
18. Kesenian, hiburan dan rekreasi	1,34%	1,66%	1,13%	1,40%	1,20%
19. Kegiatan jasa lainnya	2,15%	2,40%	2,05%	1,72%	1,59%
20. Jasa perorangan yang melayani rumah tangga; kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan	2,10%	1,58%	1,81%	1,89%	1,79%
21. Kegiatan badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	1,47%	0,07%	2,66%	0,64%	1,13%
<b>B. Sektor Ekonomi Bukan Lapangan Usaha</b>	<b>2,37%</b>	<b>2,15%</b>	<b>3,40%</b>	<b>3,12%</b>	<b>2,48%</b>
1. Rumah tangga	1,75%	2,12%	2,37%	2,30%	2,17%
2. Bukan Lapangan Usaha Lainnya	2,68%	2,16%	4,71%	4,09%	3,01%
<b>Jumlah</b>	<b>3,26%</b>	<b>3,16%</b>	<b>3,47%</b>	<b>3,18%</b>	<b>2,96%</b>

#### 1.4.4 Perkembangan Industri Perusahaan Modal Ventura

##### A. Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Modal Ventura

Total aset, liabilitas ekuitas Perusahaan Modal Ventura mengalami kenaikan, masing-masing sebesar 2,51%, 1,48%, dan 3,70% menjadi Rp11,09 triliun, Rp5,89 triliun, Rp5,20 triliun bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Grafik I - 40 Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas (dalam triliun Rupiah)



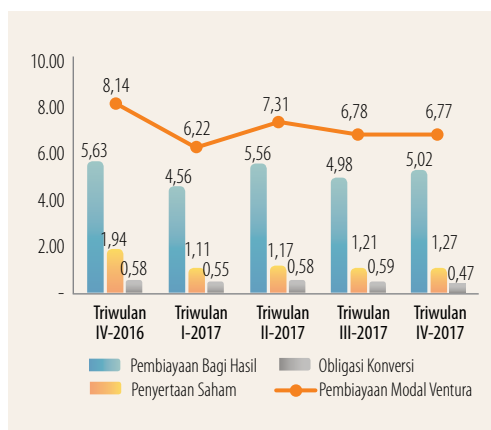
##### B. Jumlah Perusahaan Modal Ventura

Sampai dengan triwulan IV-2017, jumlah Perusahaan Modal Ventura adalah 63 perusahaan.

### C. Pembiayaan/Penyertaan Perusahaan Modal Ventura

Total pembiayaan/penyertaan Perusahaan Modal Ventura mengalami penurunan sebesar 0,13% menjadi Rp6,77 triliun bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dengan proporsi pembiayaan/penyertaan terbesar berasal dari pembiayaan bagi hasil dengan proporsi sebesar 74,17% dari total pembiayaan/penyertaan dengan nilai pembiayaan yang disalurkan

**Grafik I - 41** Pertumbuhan Pembiayaan/Penyertaan Modal (dalam triliun Rupiah)



**Tabel I - 43** Pembiayaan/Penyertaan Berdasarkan sektor Ekonomi (dalam miliar rupiah)

Sektor Ekonomi	Triwulan IV 2016	Triwulan I 2017	Triwulan II 2017	Triwulan III 2017	Triwulan IV 2017
1. Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	658	727	766	730	742
2. Pertambangan	581	538	980	602	463
3. Perindustrian	490	528	575	552	554
4. Konstruksi	505	498	516	493	436
5. Perdagangan, Restoran, dan Hotel	2.772	2.874	3.276	3.037	3.094
6. Pengangkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	286	168	159	153	153
7. Jasa Pendukung Bisnis	319	375	422	537	578
8. Jasa Sosial dan Masyarakat	999	138	160	155	163
9. Lain-Lain	1.715	549	633	701	787
<b>Jumlah</b>	<b>8.325</b>	<b>6.397</b>	<b>7.488</b>	<b>6.960</b>	<b>6.970</b>

sebesar Rp5,02 triliun. Sementara itu, bila dilihat berdasarkan jenis sektor ekonomi, maka sektor perdagangan, restoran, dan hotel mendominasi keseluruhan total pembiayaan/penyertaan yang disalurkan industri PMV dengan total pembiayaan/penyertaan sebesar Rp3,09 triliun atau dengan proporsi sebesar 44,39%.

### D. Rasio Keuangan

Indikator Kinerja Perusahaan Modal Ventura yang terdiri dari Beban Operasi terhadap Pendapatan Operasi (BOPO), rasio Investasi Terhadap Total Aset (IFAR), *Return on Asset* (ROA), dan *Return on Equity* (ROE) pada triwulan IV-2017 masing-masing sebesar 92,46%, 61,05%, 1,92%, 4,10%.

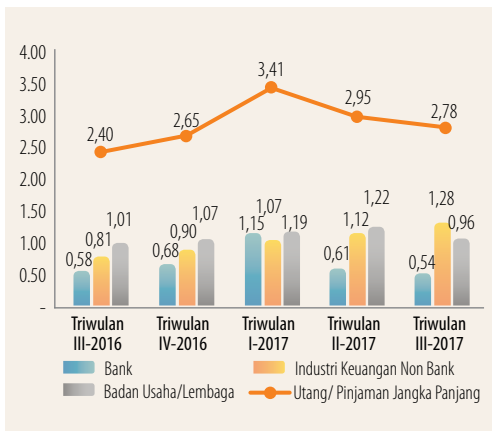
Kinerja Perusahaan Modal Ventura menunjukkan perbaikan ditandai oleh Penurunan BOPO dari 96,49% pada triwulan III-2017 menjadi 92,46% pada triwulan IV-2017 menunjukkan adanya kenaikan efisiensi dalam pengelolaan operasional Perusahaan Modal Ventura. IFAR juga mengalami penurunan dari 62,66% pada triwulan III-2017 menjadi 61,05% triwulan IV-2017. Hal ini disebabkan penurunan jumlah pembiayaan/penyertaan sebesar 0,13% atau dari Rp6,78 triliun menjadi Rp6,77 triliun.

Selain itu ROA dan ROE mengalami kenaikan masing-masing dari 1,70% pada Triwulan III 2017 menjadi 1,92% pada Triwulan IV 2017 dan dari 3,66% pada Triwulan III 2017 menjadi 4,10% pada Triwulan IV 2017.

### E. Sumber Pendanaan

Selain menggunakan modal sendiri, untuk membiayai kegiatan usahanya, Perusahaan Modal Ventura menerima pinjaman jangka panjang yang berasal dari bank atau badan usaha lainnya dengan total pinjaman pada triwulan IV-2017 adalah sebesar Rp2,78 triliun atau turun sebesar 5,68% dibandingkan triwulan sebelumnya.

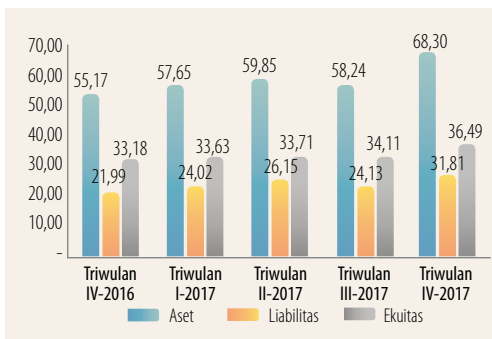
**Grafik I - 42** Sumber Pendanaan Perusahaan Modal Ventura (dalam triliun Rupiah)



### 1.4.5 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Terdapat dua Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yaitu Indonesia Infrastructure Finance (IIF) dan Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan total aset sebesar Rp 68,30 triliun dan total liabilitas sebesar Rp 31,81 triliun pada triwulan IV-2017. Total aset mengalami kenaikan sebesar 17,28% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pinjaman yang diberikan juga mengalami kenaikan sebesar 10,51% menjadi Rp39,59 triliun.

**Grafik I - 43** Tren Aset, Liabilitas dan Ekuitas (dalam triliun Rupiah)



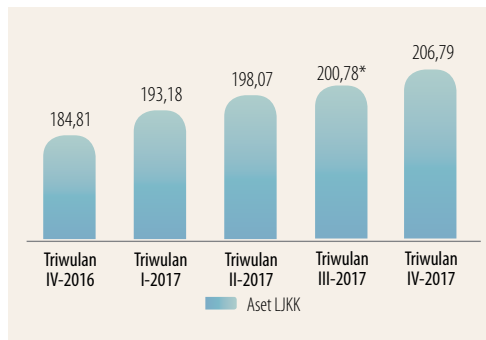
**Tabel I - 44** Pembiayaan Berdasarkan Jenis Infrastruktur (dalam triliun rupiah)

Jenis Infrastuktur	Triwulan IV 2016	Triwulan I 2017	Triwulan II 2017	Triwulan III 2017	Triwulan IV 2017
Infrastruktur Air Minum	0,31	0,32	0,45	0,31	0,62
Infrastruktur Jalan	7,26	8,08	7,53	8,15	9,07
Infrastruktur Ketenagalistrikan	12,97	12,98	13,44	13,06	15,54
Infrastruktur Lainnya	6,93	6,94	6,07	4,64	4,48
Infrastruktur Minyak & Gas Bumi	3,14	3,18	3,17	3,20	3,19
Infrastruktur Telekomunikasi	1,53	1,53	2,31	2,11	2,25
Infrastruktur Transportasi	5,34	5,45	3,18	4,36	4,43
<b>Total</b>	<b>37,47</b>	<b>38,47</b>	<b>36,15</b>	<b>35,83</b>	<b>39,59</b>

### 1.4.6 Perkembangan Industri Jasa Keuangan Khusus

Pada triwulan IV-2017 Total Aset LJKK naik 3,00% menjadi Rp206,79 triliun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

**Grafik I - 44** Pertumbuhan Aset LJKK (dalam triliun Rupiah)

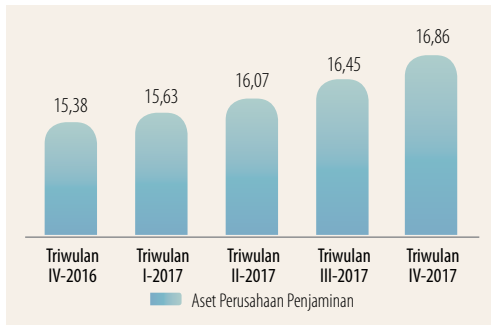


#### A. Perusahaan Penjaminan

Pada periode laporan, tercatat total aset perusahaan penjaminan naik 2,50% menjadi Rp16,86 triliun.



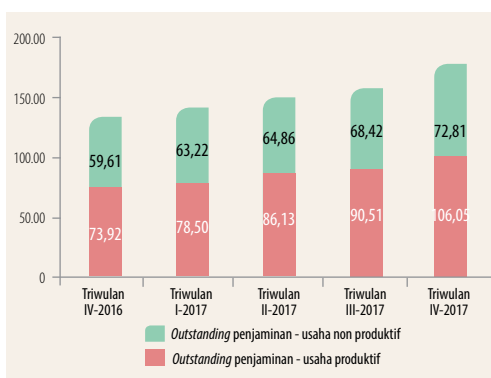
**Grafik I - 45** Pertumbuhan Aset Perusahaan Penjaminan (dalam triliun Rupiah)



Pada periode pelaporan, penjaminan yang disalurkan oleh lembaga penjamin didominasi oleh penjaminan usaha produktif.

*Outstanding* penjaminan selama triwulan IV-2017 naik 12,54% (*qtq*) menjadi Rp178,87 triliun. Peningkatan nilai *outstanding* penjaminan tersebut didorong oleh nilai *outstanding* usaha produktif dan non produktif yang masing-masing meningkat sebesar 17,17% (*qtq*) dan 6,42% (*qtq*). Pertumbuhan *outstanding* penjaminan tersebut seiring dengan misi pemerintah untuk mendorong peningkatan kemampuan akses UMKM melalui penjaminan kredit.

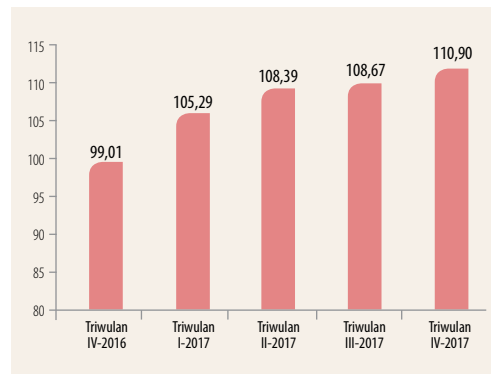
**Grafik I - 46** *Outstanding* Penjaminan (dalam triliun Rupiah)



## B. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

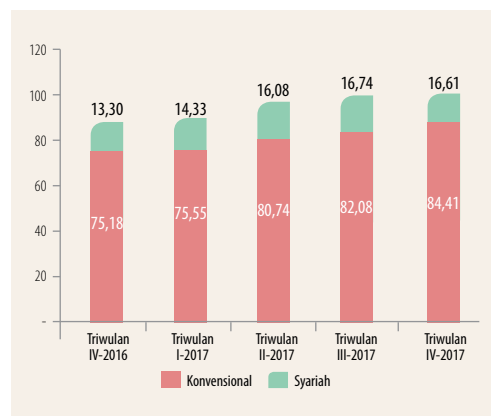
Pendirian Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekspor nasional. Total aset LPEI naik 2,05% (*qtq*) menjadi Rp110,90 triliun.

**Grafik I - 47** Pertumbuhan Aset Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (dalam triliun Rupiah)



Kenaikan aset tersebut seiring dengan naiknya penyaluran pembiayaan dan piutang yang dilakukan oleh LPEI. Sampai dengan periode laporan, LPEI mencatat total pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp101,02 triliun atau naik 2,22%. Kenaikan tersebut terdiri dari naiknya pembiayaan melalui sistem konvensional sebesar 2,83% sementara piutang melalui sistem syariah turun 0,80% dari triwulan sebelumnya.

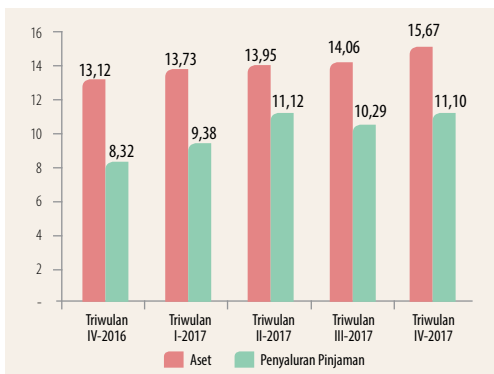
**Grafik I - 48** Pertumbuhan Nilai Pembiayaan Ekspor Indonesia (dalam triliun Rupiah)



## C. Sarana Multigriya Finansial

Aset PT SMF (Persero) pada triwulan IV-2017 naik 11,44% (*qtq*) menjadi Rp15,67 triliun. Kenaikan aset tersebut seiring dengan kenaikan nilai pinjaman yang disalurkan sebesar 7,90% (*qtq*) menjadi Rp11,10 triliun.

**Grafik I - 49** Aset dan *Outstanding* Penyaluran Pinjaman PT SMF (Persero) (dalam triliun Rupiah)

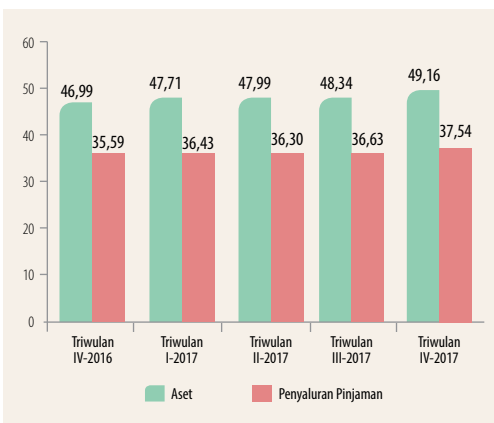


#### D. Pergadaian

Sampai dengan triwulan IV-2017, terdapat 11 perusahaan pergadaian swasta yang mendaftarkan diri (10 perusahaan pergadaian swasta konvensional dan satu perusahaan pergadaian swasta syariah) serta lima perusahaan pergadaian swasta yang telah memperoleh ijin dari OJK (empat perusahaan pergadaian swasta konvensional dan satu perusahaan pergadaian swasta syariah).

Pada periode laporan, total aset pergadaian tercatat naik 1,69% (*qtq*) menjadi Rp49,16 triliun. Seiring dengan kenaikan tersebut, pinjaman yang disalurkan pergadaian pada triwulan IV-2017 sebesar Rp37,54 triliun, atau naik 2,49% (*qtq*).

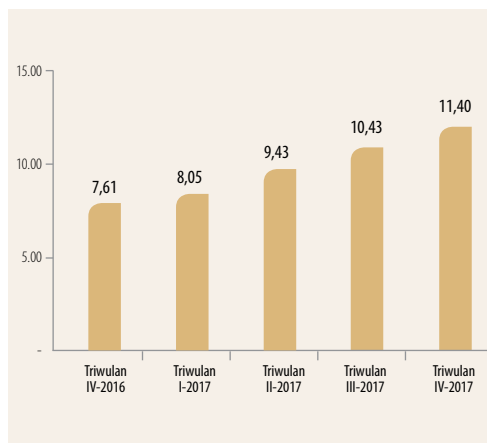
**Grafik I - 50** Aset dan *Outstanding* Penyaluran Pinjaman Pergadaian (dalam triliun Rupiah)



#### E. PT. PNM (Persero)

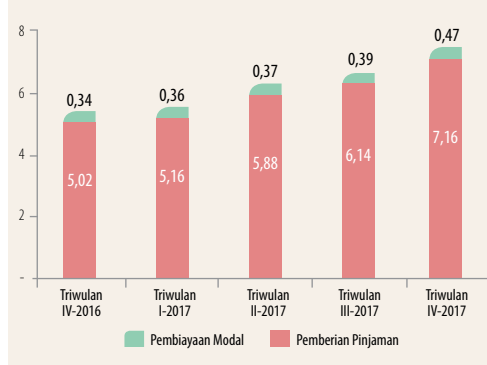
Aset PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau disingkat PNM pada periode laporan tercatat sebesar Rp11,40 triliun, naik 9,23% (*qtq*).

**Grafik I - 51** Pertumbuhan Aset PT PNM (Persero) (dalam triliun Rupiah)



Sesuai tujuan pendiriannya, kegiatan usaha utama PNM adalah pemberian pinjaman dan modal untuk pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah. Pada triwulan IV-2017, pemberian pinjaman maupun pemberian modal mengalami kenaikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang masing-masing sebesar 16,74% dan 20,43%.

**Grafik I - 52** Pertumbuhan Pemberian Pinjaman dan Pembiayaan Modal PT PNM (Persero) (dalam triliun Rupiah)



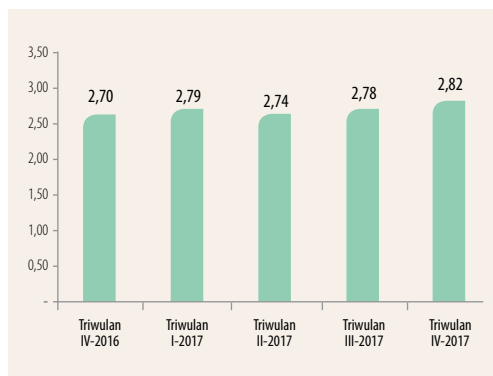
**F. PT Danareksa (Persero)**

PT Danareksa (Persero) merupakan entitas induk yang memiliki 3 entitas anak, yaitu:

1. PT Danareksa Sekuritas yang bergerak di bidang penjaminan emisi, penasihat keuangan dan perantara perdagangan efek;
2. PT Danareksa Investment Management yang bergerak di bidang pengelolaan dana (Reksa Dana); dan
3. PT Danareksa Finance yang bergerak di bidang pembiayaan.

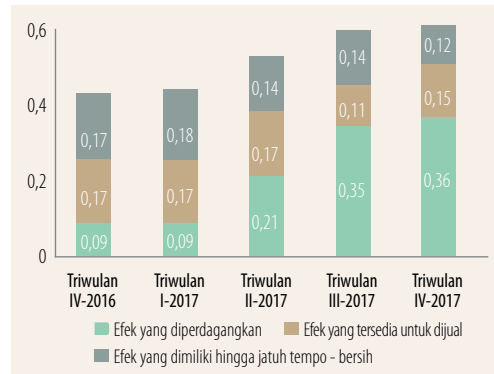
Aset PT Danareksa pada triwulan IV-2017 sebesar Rp2,82 triliun, naik 1,28% (*qtq*) dan 4,22% (*yoy*).

**Grafik I - 53** Pertumbuhan Aset PT Danareksa (Persero) (dalam triliun Rupiah)



Portofolio efek PT Danareksa terdiri dari efek yang diperdagangkan, efek yang tersedia untuk dijual, dan efek yang dimiliki hingga jatuh tempo. Total portofolio efek PT Danareksa pada triwulan IV-2017 tercatat sebesar Rp0,64 triliun, naik 6,20% (*qtq*) dan 48,03% (*yoy*).

**Grafik I - 54** Pertumbuhan Portofolio PT Danareksa (Persero) (dalam triliun Rupiah)



**1.4.7 Perkembangan Industri Jasa Penunjang IKNB**

Aset Industri Jasa Penunjang IKNB semester II-2017 menurun 2,38% menjadi Rp8,07 triliun dibandingkan semester sebelumnya. Pendapatan jasa keperantaraan mengalami kenaikan 130,63% menjadi Rp2,54 triliun dibandingkan semester sebelumnya.

**Tabel I - 45** Indikator Keuangan Industri Jasa Penunjang IKNB (dalam triliun rupiah)

No	Jenis Indikator	Semester II 2015	Semester I 2016	Semester II 2016	Semester I 2017	Semester II 2017
1.	Aset	6,81	7,25	7,30	8,26	8,07
2.	Liabilitas	4,84	5,12	5,00	5,78	5,67
3.	Modal Sendiri	1,97	2,13	2,30	5,06	2,41
4.	Pendapatan Jasa Keperantaraan	1,14	1,06	1,11	0,92	2,54
5.	Laba/ (Rugi)	0,24	0,26	0,21	0,21	0,58

Selama periode pelaporan, terdapat pencabutan izin kepada perusahaan pialang asuransi IKNB dan satu izin baru perusahaan Pialang Reasuransi sehingga sampai dengan periode laporan Jumlah Perusahaan Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Penilai Kerugian sampai akhir periode pelaporan adalah 238 perusahaan.

**Tabel I - 46** Jumlah Perusahaan Jasa Penunjang IKNB

No.	Jenis Perusahaan	Triwulan IV-2016	Triwulan I-2017	Triwulan II-2017	Triwulan III-2017	Triwulan IV-2017
1.	Pialang Asuransi	169	169	169	169	168
2.	Piala5g Reasuransi	40	40	42	42	43
3.	Jasa Penilai Kerugian Asuransi	28	27	27	27	27
<b>Jumlah</b>		<b>237</b>	<b>236</b>	<b>238</b>	<b>238</b>	<b>238</b>

### 1.4.8 Perkembangan Industri Lembaga Keuangan Mikro Konvensional

Jumlah Lembaga Keuangan Mikro yang telah mendapatkan izin usaha sampai akhir triwulan IV-2017 adalah sebanyak 180 LKM dengan 151 LKM Konvensional dan 29 full syariah. Total aset LKM Konvensional adalah sebesar Rp314,20 miliar.

**Tabel I - 47** Jumlah LKM

No.	Jenis Badan Usaha	Triwulan IV-2016	Triwulan I-2017	Triwulan II-2017	Triwulan III-2017	Triwulan IV-2017
<b>1.</b>	<b>Konvensional</b>	<b>115</b>	<b>141</b>	<b>147</b>	<b>147</b>	<b>151</b>
	Koperasi	98	124	129	129	132
	PT	17	17	18	18	19
<b>2.</b>	<b>Syariah</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>29</b>
	Koperasi	14	17	18	20	29
	PT	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>129</b>	<b>158</b>	<b>165</b>	<b>167</b>	<b>180</b>

**Tabel I - 48** Indikator Keuangan Lembaga Keuangan Mikro Konvensional

No.	Jenis Indikator	Triwulan IV 2016	Triwulan I 2017	Triwulan II 2017	Triwulan III 2017	Triwulan IV 2017
1.	Aset	220,38	292,22	317,78	304,77	314,20
2.	Liabilitas	140,27	180,61	200,67	191,30	196,45
3.	Ekuitas	80,11	111,61	117,12	113,47	117,75
4.	Pinjaman Yang Diberikan	158,22	201,55	221,01	213,81	218,22
5.	Simpanan	124,02	157,04	173,25	160,76	165,43

### 1.4.9 Perkembangan Industri Fintech (*Financial Technology*)

Sejak diterbitkannya POJK nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pada bulan Desember 2016, perkembangan jumlah Perusahaan yang bergerak pada industri Fintech khususnya *peer-to-peer lending* terus mengalami pertumbuhan. Jumlah Penyelenggara yang terdaftar sampai dengan periode laporan sebanyak 29 entitas, dengan jumlah pinjaman tersalurkan sebesar Rp 2,5 triliun atau naik 802,3% dari periode sebelumnya sebesar Rp 0,185 triliun.

**Tabel I - 49** Perkembangan Industri Fintech (*Peer To Peer Lending*)

No.	Keterangan	Triwulan IV 2016	Triwulan I 2017	Triwulan II 2017	Triwulan III 2017	Triwulan IV 2017
1.	Jumlah Penyelenggara Terdaftar	0	N/A	N/A	22	29
2.	Jumlah Pemberi Pinjaman	12.145	N/A	N/A	63.867	100.940
3.	Jumlah Penerima	37.967	N/A	N/A	119.857	259.635
4.	Jumlah Pinjaman Tersalurkan (dalam triliun rupiah)	0.185	N/A	N/A	1.6	2.5

## 1.5 PERKEMBANGAN PROGRAM PRIORITAS OJK

### 1.5.1 Layanan Keuangan Tanpa Kantor (Laku Pandai)

Pada triwulan IV-2017, terdapat tambahan empat BUK yang menjadi penyelenggara Laku Pandai sehingga secara total bank penyelenggara Laku Pandai berjumlah 27 bank, yang terdiri dari 25 BUK (termasuk 13 BPD) dan dua BUS.

Jumlah agen Laku Pandai sampai dengan triwulan IV-2017 mencapai 740.121 agen (722.329 agen perorangan dan 17.792 outlet badan hukum) yang tersebar di 34 Provinsi dan 512 Kota/Kabupaten. Sementara itu, jumlah nominal dan nasabah tabungan berkarakteristik *basic saving account* (BSA) yang berhasil dihimpun masing-masing sebesar Rp1,03 Triliun dan 13.645.396 nasabah. Nominal tabungan BSA tersebut menurun 19,53% (qto) dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp1,26 Triliun, yang dipengaruhi oleh adanya penarikan dana bantuan melalui program Bansos Non Tunai.

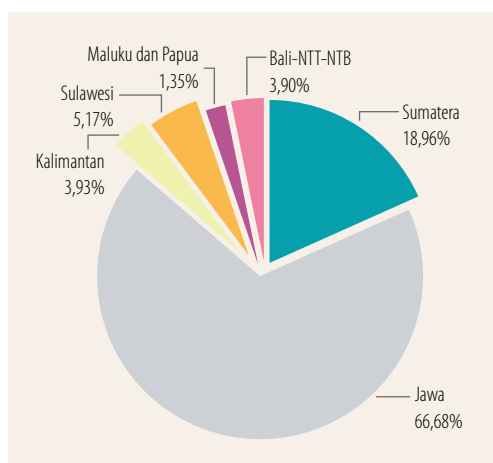
**Tabel I - 50** Realisasi Laku Pandai Triwulan IV-2017

Agen Laku Pandai	
Perorangan	Badan Hukum
722.329	17.792
Nasabah Laku Pandai	
Jumlah Rekening	Outstanding Tabungan BSA
13.645.396	Rp1,3 triliun

Sumber: OJK

Sebagian besar agen Laku Pandai masih terkonsentrasi di pulau Jawa (66,68%); sementara sebesar 18,96% tersebar di pulau Sumatera; 5,17% di pulau Sulawesi; 3,90% di pulau Bali-NTB-NTT; 3,93% di pulau Kalimantan; dan sisanya sebesar 1,35% berada di pulau Maluku dan Papua. Tidak jauh berbeda dengan persebaran agen, sebagian besar nasabah BSA juga tersebar di pulau Jawa (72,21%); sementara sebesar

**Grafik I - 55** Wilayah Penyebaran Agen LAKU PANDAI Triwulan IV-2017



Sumber: OJK

15,97% tersebar di pulau Sumatera; 4,34% di pulau Bali-NTB-NTT; 4,19% di pulau Sulawesi; 2,11% di pulau Kalimantan; dan sisanya sebesar 1,18% berada di pulau Maluku dan Papua.

Selain tabungan berkarakteristik BSA, agen Laku Pandai dapat melayani pengajuan kredit mikro, pembelian asuransi mikro, dan produk/layanan keuangan lainnya seperti uang elektronik sepanjang agen Laku Pandai telah memenuhi klasifikasi tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Laku Pandai. Sampai saat ini telah terdapat satu bank yang memiliki agen yang dapat melayani pengajuan kredit mikro berupa KUR Mikro dan pembelian asuransi mikro, sementara beberapa bank lainnya sedang dalam tahap persiapan untuk dapat memasarkan kredit mikro dan asuransi mikro melalui agen Laku Pandai.

Jaringan agen Laku Pandai yang telah tersebar di 34 Provinsi dan 512 kabupaten/kota mendorong beberapa kementerian/lembaga memanfaatkan keberadaan agen Laku Pandai untuk mendukung program yang diusungnya seperti Bantuan Sosial Non Tunai dan Inklusi Zakat (*zakat inclusion*) yang memerlukan jangkauan layanan sampai ke daerah pelosok. Selain didayagunakan untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan pemerintah, agen Laku Pandai dapat dimanfaatkan untuk mendorong penciptaan ekosistem ekonomi digital. Terkait hal ini, beberapa bank penyelenggara telah berencana untuk bekerjasama dengan perusahaan *e-commerce/marketplace*.

Mengingat implementasi program Laku Pandai masih tergolong baru di industri perbankan, masih terdapat beberapa kendala dalam implementasi Laku Pandai. Adapun kendala yang dihadapi antara lain: (i) belum memadainya ketersediaan jaringan telekomunikasi dalam menunjang penggunaan perangkat elektronis untuk Laku Pandai; serta (ii) kurangnya pemahaman baik masyarakat maupun pemerintah daerah terhadap program Laku Pandai dan manfaat keberadaan agen Laku Pandai untuk membantu transaksi keuangan di daerah.

### 1.5.2 Jangkau, Sinergi, dan Guideline (JARING)

Sampai dengan triwulan IV-2017, penyaluran kredit program JARING tumbuh 17,71% (yoy) atau 6,81% (qtq) menjadi Rp28,5 triliun. Pertumbuhan tersebut meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya (14,85% yoy) maupun triwulan yang sama tahun sebelumnya (13,30%, yoy). Secara nominal, hal tersebut dipengaruhi oleh besarnya penyaluran pada subsektor perdagangan, budidaya, dan industri pengolahan. Sementara, pertumbuhan tertinggi kredit JARING disalurkan kepada subsektor budidaya, utamanya budidaya udang.

Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan kredit JARING, kualitas kredit JARING meningkat

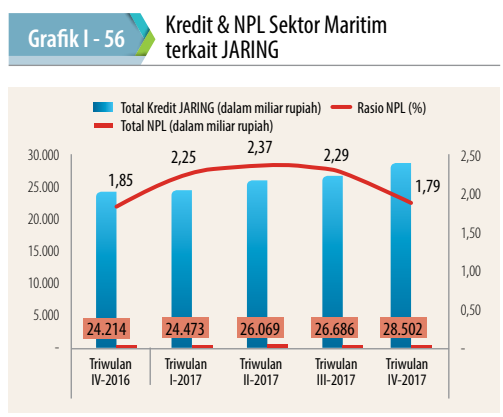
yang tercermin dari NPL *gross* yang turun 2,29% (qtq) maupun 1,85% (yoy) menjadi 1,79%. Perbaikan kualitas kredit utamanya terjadi pada subsektor industri pengolahan, budidaya, dan penangkapan. Namun demikian, perlu diwaspadai naiknya risiko kredit pada subsektor jasa sarana produksi.

### 1.5.3 Simpanan Pelajar (SIMPEL)

#### Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB)

SimPel/SimPel iB merupakan program inklusi keuangan yang bertujuan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Hingga triwulan IV tahun 2017, terdapat 279 bank yang menjadi peserta dalam program SimPel/SimPel iB. Jumlah rekening SimPel/SimPel iB mencapai 8.045.226 dengan nilai nominal sebesar Rp 1,63 Triliun. Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang sudah terjalin antara bank dan sekolah sebanyak 199.819.

Dalam rangka penguatan serta akselerasi program inklusi keuangan, telah dilakukan penyesuaian *generic model* SimPel/SimPel iB yang digunakan sebagai panduan oleh bank peserta. Penyesuaian dimaksud dilakukan berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi secara *onsite* serta masukan dari industri perbankan dan *stakeholders* terkait. Penyesuaian *generic model* tersebut telah disosialisasikan kepada bank peserta. Sosialisasi dimaksud dihadiri oleh 83 peserta yang terdiri dari perwakilan Bank Umum, Bank Syariah, Bank Pembangunan Daerah, dan Bank Perkreditan Rakyat/ Syariah. Pada kesempatan dimaksud, telah diinformasikan pula kepada bank peserta terkait hasil *rejuvenation marketing collateral* SimPel/ SimPel iB yang akan digunakan oleh bank peserta dalam kegiatan sosialisasi dan promosi produk SimPel/SimPel iB. Selain itu, mekanisme penyampaian laporan perkembangan dan laporan edukasi SimPel/SimPel iB melalui *web based system* akan dilakukan oleh bank peserta pada bulan Januari 2018 untuk pelaporan data periode Desember 2017.



Sumber: OJK, Desember 2017

**Tabel I - 51 NPL Kegiatan Usaha Kredit Maritim (%)**

Kegiatan Usaha	2016	2017	
	Desember	September	Desember
Penangkapan	3,05	4,13	3,00
Budidaya	1,96	2,10	1,70
Jasa Sarana Produksi	2,21	5,34	5,83
Industri Pengolahan	0,84	0,79	0,23
Perdagangan	1,93	2,32	2,13
<b>NPL JARING</b>	<b>1,85</b>	<b>2,29</b>	<b>1,79</b>

Sumber: OJK, Desember 2017

\*Program JARING (Jangkau, Sinergi, dan Guideline) merupakan program inisiatif OJK dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam pembiayaan sektor Kelautan dan Perikanan.

#### 1.5.4 Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pasar Modal

Berbagai inisiatif juga telah kami luncurkan untuk mendukung peningkatan kapasitas pembiayaan pada sektor-sektor prioritas pemerintah dan juga untuk meningkatkan inklusi keuangan serta memperkuat aspek perlindungan konsumen, diantaranya mendorong pembiayaan infrastruktur melalui pasar modal, dengan rincian:

- a. Tercatat 20 Emiten sektor infrastruktur yang melakukan *fund raising* melalui Pasar Modal dengan total nilai emisi Rp38,9 triliun dalam tahun 2017 ini.
- b. Dalam rangka untuk menyediakan alternatif sumber pendanaan dunia usaha untuk mendukung pembangunan di bidang infrastruktur melalui penerbitan instrumen investasi di pasar modal, OJK selama 2017 telah memberikan izin untuk 2 KIK-EBA terkait infrastruktur dengan nilai sekuritisasi sebesar Rp6 triliun. Kedua KIK-EBA tersebut terdiri dari KIK EBA Mandiri JSMR01 dengan nilai sekuritisasi sebesar Rp 2,00 triliun dan KIK-EBA Danareksa Indonesia Power PLN 1 - Piutang Usaha dengan nilai sekuritisasi sebesar Rp 6,00 triliun.
- c. Dalam rangka untuk menunjang pembiayaan sekunder perumahan, OJK selama 2017 telah memberikan izin untuk 1 Efek Beragun Aset – Surat Partisipasi (EBA-SP), yaitu EBA-SP SMF-BTN03 dengan nilai sekuritisasi sebesar Rp 1,00 triliun. Adapun sampai dengan Desember 2017 telah diterbitkan 4 izin EBA-SP dengan total nilai sekuritisasi akhir sebesar Rp2,23 triliun.

#### 1.5.5 Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) bertujuan untuk memberikan perlindungan dalam bentuk bantuan modal kerja kepada petani apabila terjadi kerusakan pertanian, serangan hama padi yang menyebabkan gagal panen. AUTP diberikan untuk areal tanam padi seluas 1 juta Ha lahan pertanian, dengan harga pertanggungan sebesar Rp 6.000.000/ha. Suku premi asuransi diperkirakan sebesar 3% dari harga pertanggungan atau Rp 180.000/ha/MT. Premi AUTP 80% ditanggung pemerintah dan 20% menjadi tanggungan petani. Porsi premi AUTP beban pemerintah sebesar Rp150 miliar bersumber dari dana APBN.

Sampai dengan triwulan IV-2017, jumlah lahan pertanian yang terdaftar adalah 997.960,55 (ha) atau 99,80% dari target 1 juta Ha. Jumlah ini meningkat 9,21% dari jumlah lahan pertanian yang ditanggung AUTP pada akhir September 2017 sebesar 988.232,28 Ha.

#### 1.5.6 Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)

Sampai dengan triwulan IV-2017, sebanyak 92.176 ekor sapi telah dilindungi. Realisasi premi Asuransi Usaha Ternak Sapi adalah sebesar Rp18.435.200.000,00 dengan rincian premi subsidi (80%) sebesar Rp14.748.160.000,00 dan premi non subsidi (20%) sebesar Rp3.687.040.000,00.

#### 1.5.7 Asuransi Nelayan

Sampai dengan triwulan IV-2017, capaian Asuransi Nelayan mencapai 500.000 orang nelayan atau 100% dari target dan total premi mencapai Rp87.500.000.000.

### 1.5.8 Asuransi Kerangka Kapal

Sampai dengan Desember 2017, realisasi jumlah kapal yang ditanggung asuransi penyingkiran kerangka kapal (*wreck removal*) meningkat dengan rincian sebagai berikut:

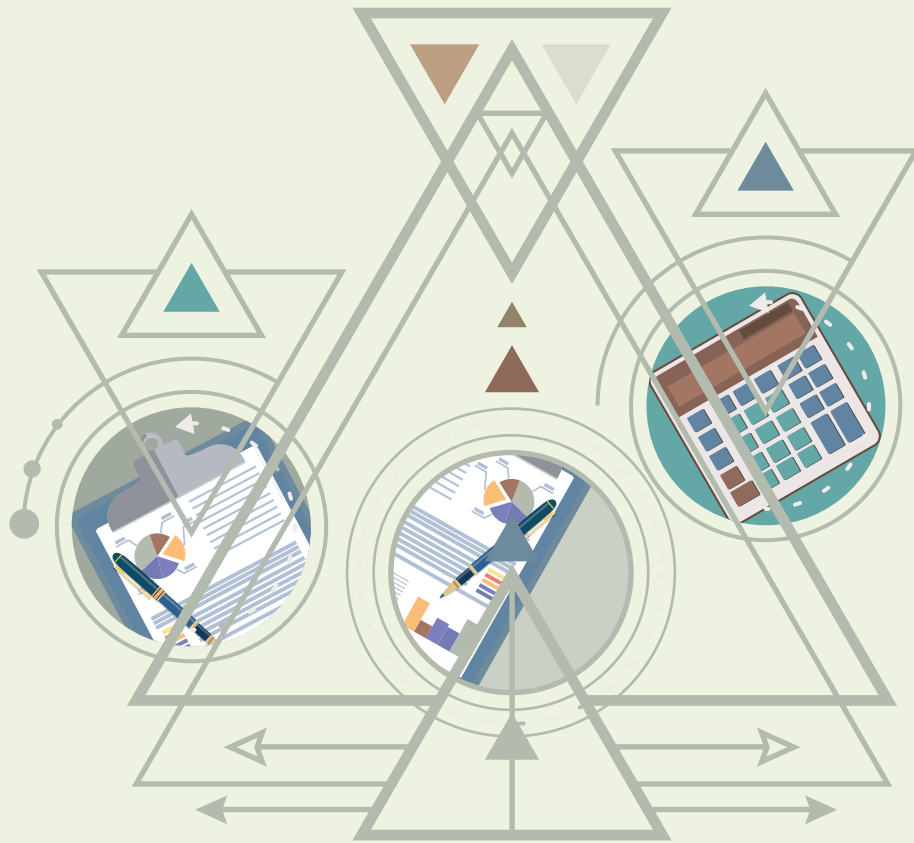
**Tabel I - 52** Jumlah Kapal yang Ditanggung Asuransi Penyingkiran Kapal

Bulan	Jumlah Kapal	
	2016	2017
Januari	174	89
Februari	215	177
Maret	216	115
April	323	200
Mei	163	279
Juni	126	197
Juli	74	82
Agustus	151	105
September	167	112
Oktober	182	218
November	164	72
Desember	266	290
Total	2.221	1.646

### 1.5.9 Program Pembiayaan Ekonomi Kreatif

Dalam rangka meningkatkan penyaluran pembiayaan perbankan pada Sektor Produktif khususnya pada sektor industri kreatif berorientasi ekspor dan UMKM serta mendukung Program Pemerintah dalam rangka meningkatkan pembiayaan ekspor pada ekonomi kreatif dan UMKM sebagai sumber pertumbuhan baru ekonomi Indonesia dalam jangka panjang, program pembiayaan ekonomi kreatif tetap dilanjutkan di tahun 2017 dengan target sebesar Rp 6 triliun-Rp 6,5 triliun. Sampai dengan triwulan IV-2017, total penyaluran pembiayaan di sektor ekonomi kreatif sebesar Rp4,5 triliun.





# Tinjauan Operasional Sektor Jasa Keuangan



Penerbitan 22 POJK dan 2 SEOJK yang mengatur Pengawasan Perbankan, Pasar Modal dan IKNB

Penerbitan Keputusan Dewan Komisiner tentang Penetapan Kabupaten Karangasem Bali sebagai Daerah yang Memerlukan Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank akibat Bencana Alam Erupsi Gunung Agung



Penerbitan *Roadmap* Pengawasan Terintegrasi

Penyempurnaan Sistem Kliring dan Penyelesaian Pasar Modal

Penandatanganan *MoU* dan *LoI* dengan 2 lembaga domestik dan 3 lembaga internasional



Penerbitan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (*Revisit* 2017)

Pelaksanaan Bulan Inklusi Keuangan dan Kompetisi Inklusi Keuangan (KOINKU)



Penghargaan *Gold* dalam kategori *The Best Technology Innovation* bagi *Corporate* dalam *The Best Contact Center Indonesia 2017*

Edukasi keuangan komunitas Nelayan (Nias), Calon Tenaga Kerja Indonesia (Sumbawa), Ibu Rumah Tangga (Jakarta dan Bandung), serta UMKM (Palu)

# Tinjauan Operasional Sektor Jasa Keuangan



## 2.1 AKTIVITAS PENGATURAN

### 2.1.1 Pengaturan Pengawasan Terintegrasi

Pada triwulan IV-2017, OJK menerbitkan *Roadmap* Pengawasan Terintegrasi. *Roadmap* disusun dengan tujuan memberikan arah kebijakan, pengembangan sistem/metodologi pengawasan, dan penguatan implementasi pengawasan terintegrasi terhadap Konglomerasi Keuangan (KK), sejalan dengan kebijakan umum pengawasan yang tertuang dalam *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2015-2019. *Roadmap* Pengawasan Terintegrasi 2017-2019 mencakup tiga aspek yaitu:

- a) Kebijakan Pengawasan Terintegrasi terhadap KK;
- b) Sistem dan Metodologi Pengawasan Terintegrasi terhadap KK; dan
- c) Implementasi Pengawasan Terintegrasi terhadap KK.

### 2.1.2 Pengaturan Bank

Pada triwulan IV-2017, OJK menerbitkan KDK 20/KDK.03/2017 tentang Penetapan Kabupaten Karangasem Bali sebagai Daerah yang Memerlukan Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank. Kebijakan ini bertujuan memberikan kelonggaran dalam penetapan kualitas kredit baik terhadap kredit secara keseluruhan maupun kredit yang direstrukturisasi kepada debitur yang terkena dampak bencana alam erupsi Gunung Agung di Kabupaten Karangasem, Bali. Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari kebijakan OJK yang memberikan perlakuan khusus terhadap kredit yang disalurkan untuk debitur atau proyek yang berada di lokasi "*distressed area*"

yang disebabkan karena bencana alam dan bersifat sementara (*temporary measures*). Perlakuan khusus ini mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Penilaian Kualitas Kredit
  - 1) Penetapan Kualitas Kredit Bank Umum dengan plafon maksimal Rp 5 milyar hanya didasarkan atas ketepatan membayar. Sementara itu, bagi Kredit dengan plafon di atas Rp 5 milyar, penetapan Kualitas Aset tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.
  - 2) Penetapan Kualitas Kredit bagi BPR didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga.
- b. Kualitas Kredit yang direstrukturisasi
  - 1) Kualitas Kredit bagi Bank Umum maupun BPR yang direstrukturisasi akibat bencana alam ditetapkan Lancar sejak restrukturisasi sampai dengan jangka waktu sesuai Keputusan Dewan Komisiner.
  - 2) Restrukturisasi Kredit tersebut di atas dapat dilakukan terhadap Kredit yang disalurkan baik sebelum maupun sesudah terjadinya bencana.

### 2.1.3 Pengaturan Pasar Modal

Selama triwulan IV-2017, OJK menerbitkan 11 POJK yang mengatur industri Pasar Modal dengan detail sebagai berikut:

- a. POJK Nomor 58/POJK.04/2017 tentang Penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau Pengajuan Aksi Korporasi Secara Elektronik Peraturan ini diterbitkan bertujuan untuk mengatur antara lain:
  - 1) Penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau pengajuan aksi korporasi kepada OJK harus dilakukan secara elektronik melalui sistem perizinan OJK;
  - 2) Jenis Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan secara elektronik,
  - 3) Jenis aksi korporasi yang disampaikan secara elektronik;
- b. POJK Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) Peraturan ini diterbitkan bertujuan untuk mengatur antara lain:
  - 1) Tujuan penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*).
  - 2) Jenis Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) yang dapat dibiayai dari penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*).
  - 3) Kewajiban Emiten untuk memperoleh pendapat atau penilaian dari Ahli Lingkungan.
  - 4) Komposisi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan wajib paling sedikit 70% digunakan untuk membiayai KUBL
- c. POJK Nomor 61/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah Peraturan ini diterbitkan bertujuan untuk mengatur antara lain:
  - 1) Jenis dokumen Pernyataan yang wajib disampaikan;
  - 2) Cakupan laporan pemeriksaan dan pendapat dari segi hukum;
  - 3) Jangka waktu antara tanggal efektif Pernyataan Pendaftaran dan tanggal laporan keuangan Pemerintah Daerah tidak lebih dari 12 bulan;
  - 4) Jangka waktu ketersediaan LKPD di situs web Emiten paling lambat sebelum OJK memberikan pernyataan bahwa Emiten dapat mengumumkan Prospektus Ringkas; dan
  - 5) Kewenangan OJK untuk meminta informasi dan/atau dokumen lain yang tidak dimaksudkan untuk diumumkan kepada masyarakat.
- d. POJK Nomor 62/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah Peraturan ini diterbitkan bertujuan mengatur antara lain:
  - 1) Bagian-bagian yang harus dimuat dalam Prospektus, antara lain ringkasan Prospektus, Penawaran Umum, penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, pernyataan utang, ikhtisar data keuangan penting, dan analisis dan pembahasan oleh Pemerintah Daerah
  - 2) Informasi yang harus dimuat dalam bagian-bagian pada Prospektus
- e. POJK Nomor 63/POJK.04/2017 tentang Laporan dan Pengumuman Emiten Penerbit Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah Peraturan ini diterbitkan bertujuan untuk mengatur antara lain:
  - 1) Kewajiban bagi Emiten untuk memiliki unit yang melaksanakan fungsi pengelolaan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.
  - 2) Tugas dari Unit pengelola Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.
  - 3) Penyampaian salinan dokumen elektronik wajib disampaikan melalui sistem pelaporan elektronik Otoritas Jasa Keuangan
- f. POJK Nomor 64/POJK.04/2017 tentang Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Peraturan ini diterbitkan bertujuan untuk mengatur pokok-pokok perubahan



ketentuan dalam POJK DIRE antara lain sebagai berikut:

- 1) Dimungkinkannya akuisisi real estat melalui *share acquisition*.
- 2) Perluasan aset dalam portofolio investasi DIRE.
- 3) Dimungkinkannya penerbitan Efek bersifat utang oleh DIRE berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
- 4) Pemasaran DIRE melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana.
- 5) Simplifikasi dokumen pernyataan pendaftaran Penawaran Umum DIRE.

- g. POJK Nomor 65/POJK.04/2017 tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

Pokok-pokok Perubahan RPOJK dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Penambahan kriteria dan jenis aset keuangan
- 2) Distribusi penawaran umum KIK EBA melalui APERD
- 3) Simplifikasi dokumen pernyataan pendaftaran Penawaran Umum KIK EBA

- h. POJK Nomor 66/POJK.04/2017 tentang Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal

Adapun susbtansi perubahan yang pokok pada POJK ini antara lain:

- 1) Pemberian masa berlaku STTD selama 5 tahun
- 2) Menghilangkan kewajiban penyampaian laporan PPL
- 3) Pengaturan daftar ulang bagi Konsultan Hukum yang sebelumnya telah terdaftar di OJK
- 4) Penambahan kewajiban laporan berkala kegiatan Konsultan Hukum
- 5) Skema pengenaan sanksi yang disesuaikan dengan POJK Nomor 13/POJK.03/2017 mengenai AP/KAP

- i. POJK Nomor 67/POJK.04/2017 tentang Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal

Adapun susbtansi perubahan yang pokok pada POJK ini antara lain:

- 1) Pemberian masa berlaku STTD selama 5 tahun
- 2) Penambahan kewajiban yang sebelumnya belum diatur terhadap Notaris, antara lain: mengikuti PPL, menyampaikan laporan berkala kegiatan Notaris
- 3) Pengaturan daftar ulang bagi Notaris yang sebelumnya telah terdaftar di OJK Skema pengenaan sanksi yang disesuaikan dengan POJK Nomor 13/POJK.03/2017 mengenai AP/KAP

- j. POJK Nomor 68/POJK.04/2017 tentang Penilai yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal

Adapun susbtansi perubahan yang pokok pada POJK ini antara lain:

- 1) Pemberian masa berlaku STTD selama 5 tahun
- 2) Penghilangan kewajiban penyampaian laporan PPL
- 3) Pengaturan daftar ulang bagi Penilai yang sebelumnya telah terdaftar di OJK

- k. POJK Nomor 79/POJK.04/2017 tentang Pendaftaran Lembaga Sertifikasi Profesi di Bidang Pasar Modal

POJK ini diterbitkan dengan tujuan untuk memberikan landasan hukum bagi OJK dan bagi pihak yang melakukan sertifikasi profesi di bidang pasar modal. Peraturan ini mengatur antara lain:

- 1) Ruang lingkup dan persyaratan Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang pasar modal.
- 2) Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) wajib terdaftar di OJK dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan selama melaksanakan program Sertifikasi Kompetensi Kerja.
- 3) LSP yang terdaftar di OJK adalah LSP yang telah memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 4) Standar yang digunakan LSP dalam pelaksanaan uji kompetensi kerja adalah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Selama triwulan IV-2017, OJK juga melakukan konversi 10 peraturan dari Peraturan Bapepam menjadi Peraturan OJK dengan detail sebagai berikut :

- a. POJK Nomor 69/POJK.04/2017 tentang Pemeliharaan Dokumen oleh Bursa Efek
- b. POJK Nomor 70/POJK.04/2017 tentang Pemeliharaan Dokumen oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan
- c. POJK Nomor 71/POJK.04/2017 tentang Pemeliharaan Dokumen oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
- d. POJK Nomor 72/POJK.04/2017 tentang Pokok-Pokok Ketentuan Perjanjian Pinjaman Sub Ordinasi Perusahaan Efek
- e. POJK Nomor 73/POJK.04/2017 tentang Kegiatan Perusahaan Efek di Berbagai Lokasi
- f. POJK Nomor 74/POJK.04/2017 tentang Sub Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
- g. POJK Nomor 75/POJK.04/2017 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan
- h. POJK Nomor 76/POJK.04/2017 tentang Penawaran Umum oleh Pemegang Saham
- i. POJK Nomor 77/POJK.04/2017 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Perusahaan Publik
- j. POJK Nomor 78/POJK.04/2017 tentang Transaksi Efek Yang Tidak Dilarang Bagi Orang Dalam

#### 2.1.4 Pengaturan IKNB

Pada triwulan IV-2017, terdapat satu SEOJK yang ditetapkan, yaitu:

1. SEOJK nomor 54/SEOJK.05/2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Lembaga Penjamin

Peraturan ini merupakan pelaksana dari POJK nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga

Penjamin. Secara garis besar SEOJK nomor 54/SEOJK.05/2017 merupakan serangkaian pedoman yang mengatur mengenai bentuk, susunan dan tata cara penyampaian laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi lembaga penjamin.

## 2.2 AKTIVITAS PENGAWASAN

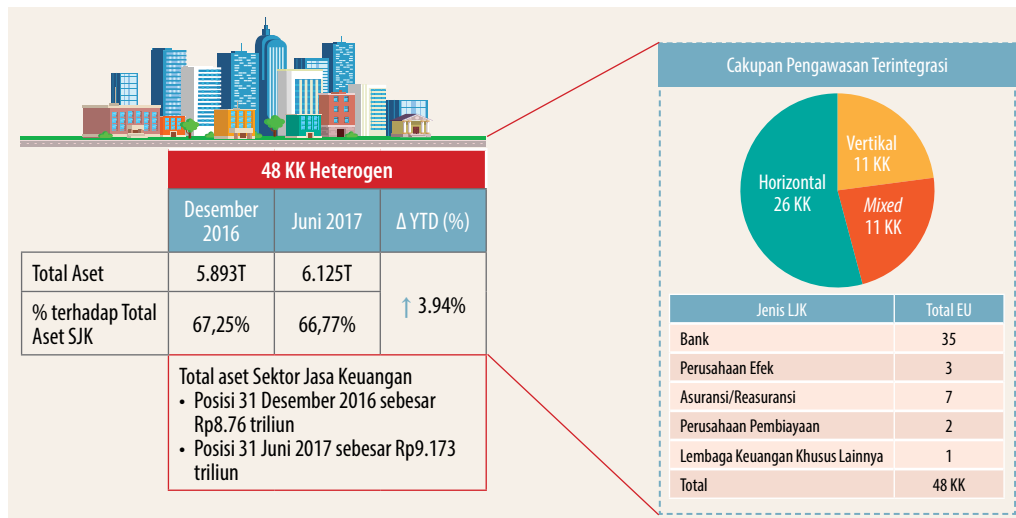
### 2.2.1 Pengawasan Terintegrasi

#### A. Aktivitas Pengawasan

Sampai dengan triwulan IV-2017, OJK menyelesaikan *Integrated Supervisory Plan* (ISP) Tahun 2017 terhadap 42 Konglomerasi Keuangan (KK). ISP bertujuan untuk mempersiapkan seluruh kegiatan/aktivitas pengawasan yang akan dilakukan terhadap suatu KK guna mendukung efisiensi dan efektifitas pengawasan terintegrasi terhadap KK. Selain itu, OJK juga telah menyelesaikan *Know Your Financial Conglomerate* (KYFC) dan *Integrated Risk Rating* (IRR) posisi Desember 2017 untuk 48 KK yang bertujuan untuk menghasilkan agregasi dari risiko secara keseluruhan atas KK yang digunakan untuk menetapkan peringkat dari KK sebagai gambaran mengenai kondisi usahanya dan menjadi landasan bagi Pengawas Terintegrasi untuk menetapkan strategi dan perencanaan pengawasan.

Selama triwulan IV-2017, telah dilaksanakan Forum Panel Pengawasan Terintegrasi (FPPT) terhadap 10 KK yang merupakan bagian dari proses pengendalian Kualitas Pengawasan Terintegrasi melalui *peer review* terhadap input, proses, dan output kegiatan pengawasan KK berdasarkan risiko (*Risk Based Supervision*) agar memenuhi standar kualitas tertentu, antara lain penggunaan informasi secara komprehensif, ketajaman dan kedalaman analisis, signifikansi, kualitas pengambilan kesimpulan atas kondisi Konglomerasi Keuangan, dan tindakan pengawasan yang dilakukan.

Grafik II - 1 Profil Konglomerasi Keuangan



## B. Profil Konglomerasi Keuangan

Total aset dari 48 Grup KK pada triwulan IV-2017 sebesar Rp6.125 triliun, sementara itu, total aset industri jasa keuangan Indonesia sebesar Rp9.173 triliun. Dengan demikian, persentase perbandingan total aset 48 grup KK terhadap total aset industri jasa keuangan cukup signifikan yaitu 66,77%.

### 2.2.2 Pengawasan Perbankan

#### A. Pemeriksaan Umum dan Pemeriksaan Khusus

Berdasarkan *Standard Operating Procedure* (SOP) pengawasan terhadap bank wajib dilakukan pemeriksaan umum setahun sekali secara berkala. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan dilakukan pemeriksaan umum sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Sampai dengan triwulan IV-2017, telah direalisasikan pemeriksaan terhadap 2.498 kantor bank yang terdiri dari 2.007 Kantor Pusat (KP) dan 491 Kantor Cabang (KC). Dari 2.498 kantor bank tersebut, 526 diantaranya merupakan kantor Bank Umum dan 1.972 kantor BPR dan BPRS.

Tabel II - 1 Pemeriksaan Bank Umum

Jenis Bank	Rencana			Realisasi		
	Triwulan I-IV 2017			Triwulan I-IV 2017		
	KP	KC	Jumlah Kantor	KP	KC	Jumlah Kantor
BUK	98	351	449	95	348	443
BUS	11	20	31	11	20	31
UUS	36	16	52	36	16	52
BPR	1.734	89	1.823	1.698	91	1.789
BPRS	203	22	225	167	16	183
<b>Total</b>	<b>2.082</b>	<b>498</b>	<b>2.580</b>	<b>2.007</b>	<b>491</b>	<b>2.498</b>

Sumber: OJK

\*Ket: Belum termasuk bank syariah

Pengawas selain melakukan pemeriksaan umum juga melaksanakan pemeriksaan khusus. Pemeriksaan khusus merupakan pemeriksaan yang dilakukan secara insidental dan berkaitan dengan aspek tertentu dari bank seperti produk bank, aktivitas atau kegiatan usaha tertentu, indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh bank, ataupun hal-hal lainnya yang dirasakan diperlukan untuk didalami dan diperiksa lebih jauh. Pelaksanaan pemeriksaan khusus ini dapat berdiri sendiri/tersendiri ataupun merupakan lanjutan dari pemeriksaan umum yang dilakukan secara bersamaan.

Sampai dengan triwulan IV-2017, telah dilakukan 488 subjek pemeriksaan khusus terhadap bank umum dengan cakupan pemeriksaan antara lain pemeriksaan setoran modal, aktivitas operasional, *joint audit*, GCG, teknologi dan informasi, *fraud*, penetapan pencabutan, serta lainnya. Untuk pemeriksaan khusus terkait Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) telah dilakukan oleh pengawas bersamaan dengan pemeriksaan umum.

**Tabel II - 2** Pemeriksaan Khusus Bank

Subjek Pemeriksaan	Triwulan I-IV 2017
Suku Bunga	-
Setoran Modal	134
Aktivitas Operasional	230
Teknologi dan Informasi	23
Aktivitas Treasuri	1
<i>Join Audit</i>	4
GCG	2
<i>Fraud</i>	28
Penetapan Pencabutan	2
Pemeriksaan Kesiapan Rencana Bank	-
Devisa	-
Lainnya	64
<b>Total</b>	<b>488</b>

Sumber: OJK

\*Ket: Belum termasuk bank syariah

## B. Perizinan Produk dan Aktivitas Bank

Dalam rangka memberikan panduan kepada Bank dalam menerbitkan dan mengeluarkan produk dan aktifitas baru, OJK mensyaratkan agar perbankan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh BI sebelumnya. Hal ini mengingat produk dan aktivitas yang ditawarkan perbankan khususnya terkait dengan produk dan aktivitas baru, berkembang menjadi semakin kompleks dan bervariasi, sehingga eksposur risiko yang ditanggung bank dari penerbitan produk dan pelaksanaan aktivitas tersebut menjadi semakin tinggi.

Sampai dengan triwulan IV-2017, variasi produk dan aktivitas baru yang diterbitkan oleh Bank dan telah disetujui OJK cukup

beragam. Produk dan aktivitas baru yang telah diterbitkan mencapai 618 produk yang sebagian besar terkait dengan reksadana dan *bancassurance*.

**Tabel II - 3** Produk dan Aktivitas Baru Perbankan

Prdoduk/Aktivitas Baru	Triwulan I-IV 2017
Reksa Dana	211
<i>Bancassurance</i>	184
<i>E-Banking</i>	40
Perkreditan/Pembiayaan	23
Surat Berharga (Obligasi/MTN/Sukuk)	28
Pendanaan	19
APMK	16
<i>Structured Product</i>	14
Aktivitas Call Center	3
LC	3
<i>Cash Management</i>	19
Fitur SMS Notifikasi	1
<i>e-Commerce</i>	4
Kepemilikan Logam Mulia	2
<i>Refferal Retail Brokerage</i>	1
Lainnya	50
<b>Total</b>	<b>618</b>

Sumber: OJK

\*Ket: belum termasuk bank syariah

## C. Penegakan Kepatuhan Bank

- 1) Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Existing*)  
 Dalam rangka melindungi industri bank dari pihak-pihak yang diindikasikan tidak memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan, secara berkesinambungan terhadap pihak-pihak yang telah mendapat persetujuan untuk menjadi Direksi, Komisaris, Pemegang Saham Pengendali (PSP), dan Pejabat Eksekutif, dilakukan penilaian kembali atas kemampuan dan kepatutannya sebagai pemilik dan pengelola Bank (*Fit and Proper Existing*). Penilaian kembali dilakukan dalam hal terdapat indikasi permasalahan integritas, reputasi keuangan dan/atau kompetensi.

Pada triwulan IV-2017, tidak terdapat tambahan pengurus/pengelola dan pegawai bank yang menjalani proses *Fit and Proper Test Existing*. Selain itu,



untuk database *track record* (TR), selama triwulan IV-2017 terdapat penambahan 41 pelaku yang dilakukan oleh pihak-pihak yang telah mendapat persetujuan untuk menjadi Direksi, Pejabat Eksekutif, dan Pejabat Non Eksekutif untuk pelanggaran yang terjadi pada periode sebelumnya. Adapun modus yang dilakukan antara lain terkait penyalahgunaan wewenang, melanggar prinsip kehati-hatian, penyimpangan atau melakukan kredit fiktif, dan lainnya.

**Tabel II - 4** Track Record Tindak Tipibank Triwulan IV-2017

Objek Track Record	Jumlah Input TR
Kepala Kantor Perwakilan	1
Direksi	-
Pejabat Eksekutif	2
Non Pejabat Eksekutif	38
<b>TOTAL</b>	<b>41</b>

Sumber: OJK

## 2) Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan

Selama triwulan IV-2017, terdapat 7 Penyimpangan Ketentuan Perbankan (PKP) pada 4 kantor bank. PKP tersebut selanjutnya dianalisis dan dikoordinasikan untuk memastikan apakah dapat ditindaklanjuti dengan investigasi. Apabila akan ditindaklanjuti dengan investigasi, maka dilakukan pembahasan dalam forum *Quality Assurance* yang bertujuan antara lain untuk memastikan langkah-langkah investigasi yang akan dilakukan dalam mengungkap penyimpangan yang terjadi.

Sebagai tindak lanjut dari PKP yang telah diterima, telah dilakukan investigasi pada 4 PKP pada 3 kantor bank (1 kantor bank umum dan 2 kantor BPR). Dari investigasi yang dilakukan tersebut, 3 PKP pada 2 kantor BPR ditindaklanjuti dengan pelimpahan kepada DPJK, sedangkan 1 PKP pada 1 kantor bank umum

**Tabel II - 5** Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan

Tahapan Kegiatan	Triwulan IV 2017 (Oktober - Desember 2017)					
	Kantor Bank		Kasus (PKP)		Total	
	BU	BPR	BU	BPR	Kantor Bank	Kasus (PKP)
1. PKP yang diterima dan ditindaklanjuti	2	2	2	5	4	7
2. PKP yang dikembalikan sebelum investigasi	1	0	1	0	1	1
a. Atas dasar analisis tim	1	0	1	0	1	1
b. Atas dasar QA 1	0	0	0	0	0	0
3. PKP yang diinvestigasi	1	2	1	3	3	4
a. Tindak Lanjut dengan Pelimpahan ke DPJK	0	2	0	3	2	3
b. Tindak Lanjut oleh Satker Pengawasan Bank (Pengembalian PKP setelah Investigasi)	1	0	1	0	1	1
4. Pelimpahan kepada DPJK	2	5	3	6	7	9
5. Pengambilalihan kasus oleh DPJK (tanpa melalui Proses Pelimpahan)	0	1	0	1	1	1

Sumber: OJK

ditindaklanjuti dengan pengembalian kepada Satker Pengawasan Bank.

Selama triwulan IV-2017, telah dilimpahkan sebanyak 9 PKP pada 7 kantor bank (2 kantor bank umum dan 5 kantor BPR), selain itu juga terdapat 1 PKP pada 1 kantor BPR yang diambilalih oleh satuan kerja penyidikan OJK. Selama triwulan IV-2017, terdapat tujuh Penyimpangan Ketentuan Perbankan (PKP) pada empat kantor bank. PKP tersebut selanjutnya dianalisis dan dikoordinasikan untuk memastikan apakah dapat ditindaklanjuti dengan investigasi. Sebagai tindak lanjut dari PKP yang telah diterima, telah dilakukan investigasi pada empat PKP pada tiga kantor bank (satu kantor bank umum dan dua kantor BPR). Dari investigasi yang dilakukan tersebut, tiga PKP pada

**Tabel II - 6** Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan

Tahapan Kegiatan	Triwulan IV 2017					
	Kantor Bank		Kasus (PKP)		Total	
	BU	BPR	BU	BPR	Kantor Bank	Kasus (PKP)
1. PKP yang diterima dan ditindaklanjuti	2	2	2	5	4	7
2. PKP yang dikembalikan sebelum investigasi	1	0	1	0	1	1
a. Atas dasar analisis tim	1	0	1	0	1	1
b. Atas dasar QA 1	0	0	0	0	0	0
3. PKP yang diinvestigasi	1	2	1	3	3	4
a. Tindak Lanjut dengan Pelimpahan Ke Satuan Kerja Penyidikan	0	2	0	3	2	3
b. Tindak Lanjut oleh Satker Pengawasan Bank (Pengembalian PKP setelah Investigasi)	1	0	1	0	1	1
4. Pelimpahan Kepada Satuan Kerja Penyidikan	2	5	3	6	7	9
5. Pengambilalihan kasus Satuan Kerja Penyidikan (tanpa melalui Proses Pelimpahan)	0	1	0	1	1	1

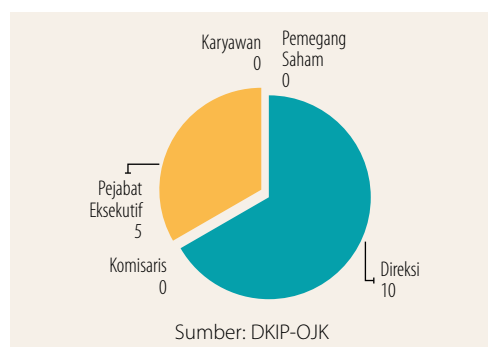
Sumber: OJK

dua kantor BPR ditindaklanjuti dengan pelimpahan kepada satuan kerja penyidikan. Sementara itu, satu PKP pada satu kantor bank umum ditindaklanjuti dengan pengembalian kepada satuan kerja Pengawasan Bank. Selama triwulan IV-2017, telah dilimpahkan sebanyak

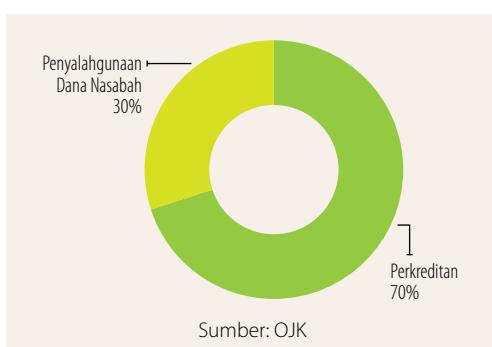
sembilan PKP pada tujuh kantor bank (dua kantor bank umum dan dua kantor BPR) serta terdapat satu PKP pada satu kantor BPR yang diambil alih oleh satuan kerja penyidikan

Berdasarkan hasil investigasi selama triwulan IV-2017, sebagian besar kasus dugaan tipibank (75%) terkait dengan perkreditan dan 25% sisanya terkait dengan penyalahgunaan dana nasabah. Adapun pelaku dugaan tipibank didominasi oleh Direksi yang mencapai 10 orang (67%) serta Pejabat Eksekutif sebanyak 5 orang (33%).

**Grafik II - 3** Sebaran Pelaku Dugaan Tipibank Triwulan IV-2017



**Grafik II - 2** Sebaran Jenis Dugaan Tipibank Triwulan IV-2017



3) Pemberian Keterangan Ahli atau Saksi

Selama triwulan IV-2017 terdapat 15 pemberian keterangan ahli. Pemberian keterangan ahli tersebut berasal dari Kepolisian Negara RI (Polri) sebanyak 11 permintaan dan Kejaksaan RI sebanyak 4 permintaan.

**Tabel II - 7** Pemberian Keterangan Ahli/Saksi

No.	APH	Permintaan		
		Saksi	Ahli	Total
1.	Polri	0	11	11
2.	Kejaksaan RI	0	4	4
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>

Sumber: OJK

Keterangan ahli yang diberikan antara lain meliputi kasus-kasus yang pernah ditangani OJK maupun terhadap kasus-kasus yang dilaporkan oleh pihak bank atau pihak lainnya kepada Polri, Kejaksaan RI, ataupun OJK. Pemberian keterangan ahli dilakukan sesuai dengan kompetensi terkait ketentuan perbankan dan pengawasan bank serta

pengalaman pegawai dalam menangani kasus dugaan tipibank.

#### D. Kelembagaan Bank Umum

##### 1) Perizinan

Pada triwulan IV-2017 telah diselesaikan 121 perizinan perubahan jaringan kantor BU yang terdiri dari pembukaan kantor, penutupan kantor, pemindahan alamat kantor, dan perubahan status. Perizinan tersebut sebagian besar berupa pemindahan alamat KCP (22,31% - 27 perizinan) dan penutupan Kantor Cabang (KC) (19,01% - 23 perizinan).

Selain itu, terdapat perubahan izin badan hukum BPD Kaltim menjadi PT BPD Kalimantan Timur dan perubahan izin usaha PT Bank Mandiri Taspen Pos menjadi PT Bank Mandiri Taspen.

##### 2) Jaringan Kantor

**Tabel II - 8** Perizinan Perubahan Jaringan Kantor BU\*

No	Jenis Kegiatan	Triwulan III-2017	Triwulan IV-2017
1	Pembukaan Bank Umum		
a.	Kantor Wilayah (Kanwil)	1	-
b.	Kantor Cabang (KC)	9	7
c.	Kantor Cabang Pembantu (KCP)	6	11
d.	Kantor Fungsional (KF)	1	2
e.	Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar Negeri	-	-
2	Penutupan Bank Umum		
a.	Izin Usaha	-	-
b.	Kantor Perwakilan	-	-
c.	Kantor Cabang (KC)	11	23
d.	Kantor Cabang Pembantu (KCP)	44	7
e.	Kantor Fungsional (KF)	2	7
3	Pemindahan Alamat Bank Umum		
a.	Kantor Pusat (KP)	1	1
b.	Kantor Wilayah (Kanwil)	-	-
c.	Kantor Cabang (KC)	2	5
d.	Kantor Cabang Pembantu (KCP)	23	27
e.	Kantor Fungsional (KF)	-	1
f.	Kantor Perwakilan Bank	-	-
4	Perubahan Status Bank Umum		
a.	Peningkatan Status		
	- KCP menjadi KC	4	14
	- KK menjadi KCP	7	10
	- KF menjadi KCP	-	-
	- KK menjadi KC	-	-
b.	Penurunan Status Bank Umum		
	- KP menjadi KC	-	-
	- KC menjadi KCP	7	2
	- KCP ke KF/KK	1	2
5	Perubahan Penggunaan Izin Usaha (Perubahan Nama)	2	1
6	Perubahan Badan Hukum	1	1
7	Merger Bank Umum		
8	Izin Bank Devisa	-	-
9	Pembukaan Kantor Perwakilan Bank Luar Negeri di Indonesia	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>122</b>	<b>121</b>

Sumber: LKPBU, Desember 2017

\*)Keterangan: Hanya mencakup perubahan perizinan jaringan kantor di wilayah Jabodetabek

**Tabel II - 9** Jaringan Kantor Bank Umum

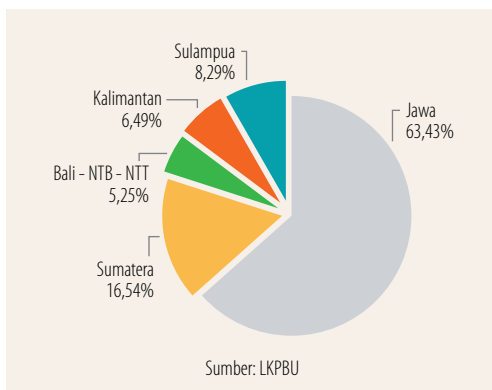
Status Kantor	Triwulan III-2017	Triwulan IV-2017	Perubahan Δ
Kantor Pusat Operasional	50	50	-
Kantor Pusat Non Operasional	55	55	-
Kantor Cabang Bank Asing	9	9	-
Kantor Wilayah Bank Umum (Konvensional+Syariah)	174	167	(7)
Kantor Cabang (Dalam Negeri)	2.879	2.882	3
Kantor Cabang (Luar Negeri)	1	-	(1)
Kantor Cabang Pembantu Bank Asing	27	27	-
Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri)	16.762	16.403	(359)
Kantor Cabang Pembantu (Luar Negeri)	-	-	-
Kantor Kas	10.726	10.785	59
Kantor Fungsional (Konvensional+Syariah)	1.578	1.575	(3)
Payment Point	1.758	1.996	238
Kas Keliling/Kas Mobil/Kas Terapung	1.567	1.607	40
Kantor di bawah KCP KCBA yang Tidak Termasuk 11,12,13,14 *)	13	13	-
Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar negeri	2	-	(2)
ATM/ADM	102.682	103.918	1.236
<b>TOTAL</b>	<b>138.283</b>	<b>139.487</b>	<b>1.204</b>

Sumber: LKPBU, Desember 2017

Pada triwulan IV-2017, jaringan kantor Bank Umum meningkat 1.204 jaringan kantor menjadi 139.487 jaringan kantor. Peningkatan terbesar terjadi pada ATM/ADM yang bertambah 1.236 unit, sementara pengurangan terbesar terdapat pada KCP dalam negeri yang berkurang 359 kantor.

Berdasarkan pembagian wilayah, sebaran jaringan kantor BUK sebagian besar berada di pulau Jawa dengan jumlah sebanyak 88.482 jaringan kantor (63,43%), diikuti pulau Sumatera 23.068 (16,54%), Sulampua 11.570 (8,29%), Kalimantan 9.046 (6,49%), dan Bali-NTB-NTT 7.321 (5,25%). Peningkatan jumlah jaringan kantor terjadi pada seluruh wilayah dengan peningkatan terbesar berada di pulau Jawa yang bertambah sebanyak 784 jaringan kantor.

**Grafik II - 4** Penyebaran Jaringan Kantor BUK Pada Triwulan IV-2017



### 3) Uji Kemampuan dan Kematangan (*New Entry*)

Pada triwulan IV-2017, terdapat 42 pemohon FPT *New Entry* yang lulus mengikuti proses wawancara, terdiri dari 19 Direksi dan 23 Dewan Komisaris. Selain itu, terdapat 17 calon pengurus yang mendapat surat keterangan lulus, disertai dengan *carry over* periode sebelumnya.

**Tabel II - 10** FPT Calon Pengurus dan PSP Bank Umum selama Triwulan IV-2017

New Entry	Wawancara		Surat Keputusan (SK) FPT		Jumlah Tidak ditindak-lanjuti	Triwulan IV-2017
	Lulus	Tidak Lulus	Lulus	Tidak Lulus		
PSP/PSPT	0	0	0	0	0	0
Dewan Komisaris	23	1	5	2	0	31
Direksi	19	3	12	1	0	35
<b>Total</b>	<b>42</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>66</b>

Sumber: OJK

## E. Kelembagaan BPR

### 1) Perizinan

Pada triwulan IV-2017, terdapat tiga proses perizinan pendirian usaha BPR, dua proses merger BPR, delapan BPR dalam pengawasan khusus, dan tiga pencabutan izin usaha BPR yang telah diselesaikan.

Tiga perizinan pendirian BPR diberikan kepada PT BPR Asli Dana Mandiri, PT BPR Dana Mulia Sejahtera, dan PT BPR Modern Kupang. Dua proses merger terdapat pada (i) penggabungan PD BPR LPK Leuwiliang, PD BPR LPK Sawangan, PD BPR LPK dan PD BPR LPK Citeureup ke dalam PD BPR LPK Pancoran Mas, dan (ii) penggabungan PT BPR Mandiri Adiyatra ke dalam PT BPR Sum Adiyatra. Sementara untuk pencabutan izin usaha dilakukan terhadap PT BPR KS Bali Agung Sedana dikarenakan adanya *Fraud*, serta terhadap BPR LPN Kampung Manggis dan PT BPR Sinar Baru Perkasa karena pengelolaan manajemen yang tidak berjalan dengan baik.

**Tabel II - 11** Perizinan BPR

Perizinan BPR	Triwulan III-2017	Triwulan IV-2017
Pendirian BPR	7	3
Merger BPR	-	2
BPR dalam Pengawasan Khusus	11	8
Pencabutan Izin Usaha	1	3
<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>16</b>

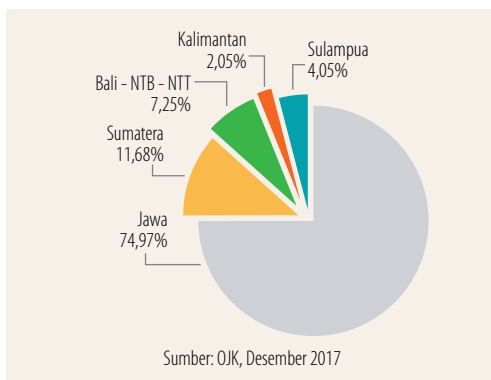
Sumber: OJK, Desember 2017

2) Jaringan Kantor

Jumlah BPR pada triwulan IV-2017 berkurang tiga bank dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi 1.619 BPR. Sementara, jumlah jaringan kantor dari 1.619 BPR tersebut berjumlah 6.192, bertambah 35 kantor dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu 6.157 jaringan kantor.

Penyebaran jaringan kantor pada lima wilayah di Indonesia masih belum merata, yaitu masih terpusat di wilayah Jawa (74,97% atau 4.642 kantor), diikuti wilayah Sumatera (11,68% atau 723 kantor), wilayah Bali-NTB-NTT (7,25% atau 449 kantor), wilayah Sulampua (4,05% atau 251 kantor), dan wilayah Kalimantan (2,05% atau 127 kantor).

**Grafik II - 5** Penyebaran Jaringan Kantor BPR Triwulan IV-2017



3) Uji Kemampuan dan Kepatutan (*New Entry*)

Pada triwulan IV-2017, telah dilakukan *FPT New Entry* kepada 203 calon Direksi, Komisaris dan PSP BPR, dengan hasil terdapat 186 calon (91,63% dari total pelamar) yang mendapatkan persetujuan (lulus) untuk menjadi Direksi, Komisaris dan PSP, serta 17 calon yang ditolak.

**Tabel II - 12** Daftar Hasil *Fit and Proper Test New Entry BPR*

New Entry	2017		
	Triwulan IV		
	Lulus	Tidak Lulus	Total
Direksi	127	11	138
Komisaris	52	6	58
PSP	7	0	7
<b>Jumlah</b>	<b>186</b>	<b>17</b>	<b>203</b>

Sumber: OJK

## 2.2.3 Pengawasan Pasar Modal

### A. Pengawasan Lembaga dan Transaksi Efek

1) Pengawasan Transaksi Surat Utang dan Efek Lainnya.

Selama triwulan IV-2017, OJK melakukan pengawasan transaksi Surat Utang dan Efek lainnya melalui penelaahan atas laporan dari Penerima Laporan Transaksi Efek (PLTE) bulan Oktober dan November berupa keterlambatan pelaporan transaksi Efek masing-masing oleh 19 dan 18 partisipan dengan total frekuensi keterlambatan pelaporan masing-masing sebanyak 374 dan 542 kali.

OJK juga melakukan *review alert* pada bulan Oktober dan November yang menghasilkan 1.563 *alert* Obligasi Pemerintah, 2.087 *alert* Obligasi Korporasi dan 265 *alert* waran.

OJK juga menganalisis transaksi repo Obligasi bulan Oktober, November dan Desember 2017 dan penelaahan atas laporan bulanan mengenai kecenderungan Pasar Surat Utang dari Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA).

2) Pengawasan *Self Regulatory Organization*, Lembaga Penilai harga Efek dan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal

Pengawasan terhadap *Self Regulatory Organization* (SRO), Lembaga Penilai Harga Efek (LPHE) dan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP), dilakukan OJK dengan melaksanakan beberapa kegiatan pengawasan, antara lain:

1. Persetujuan revisi RKAT PT BEI tahun 2017
  2. Persetujuan revisi RKAT PT KPEI tahun 2017
  3. Persetujuan revisi RKAT PT KSEI tahun 2017
  4. Persetujuan RKAT PT KPEI tahun 2018;
  5. Persetujuan RKAT PT KSEI tahun 2018;
  6. Persetujuan RKAT PT P3IEI tahun 2018;
- 3) Pengawasan Perusahaan Efek
- Terkait pelaksanaan tugas dan fungsi OJK dalam pengawasan Perusahaan Efek pada triwulan IV-2017 telah dilakukan beberapa hal antara lain persetujuan terhadap 22 perubahan susunan direksi, 11 perubahan susunan komisaris, dan lima proses persetujuan perubahan pemegang saham serta persetujuan peningkatan modal disetor terhadap empat Perusahaan Efek.

Selama periode Laporan, OJK melakukan analisis dan pemantauan atas laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) terhadap 129 Perusahaan Efek. Rata-rata total MKBD sampai pada akhir triwulan IV-2017 sebesar Rp22,29 triliun atau naik sebesar 2,49% dari rata-rata triwulan III-2017. Kenaikan rata-rata total MKBD tersebut disebabkan oleh kenaikan nilai aset lancar industri yang lebih besar dari pada kenaikan liabilitas industri. Pada periode laporan, dari 108 Perusahaan Efek Anggota Bursa, terdapat 2 Perusahaan Efek yang mempunyai nilai MKBD di bawah MKBD yang dipersyaratkan.

OJK melakukan analisis dan pemantauan atas 45 Perusahaan Efek yang melakukan Penjaminan Emisi Efek terhadap 37 Emiten. Analisis dan pemantauan tersebut dilakukan dalam rangka menilai kemampuan Perusahaan Efek dalam pemenuhan nilai MKBD pada saat melakukan kegiatan Penjaminan. Dari analisis yang sudah dilakukan, seluruh Perusahaan Efek tersebut dinilai memiliki MKBD yang cukup dalam melakukan tugasnya sebagai Penjamin Emisi Efek. OJK juga melakukan pemantauan terhadap laporan bulanan atas Laporan Kegiatan Perantara Pedagang Efek (LKPPE) dalam triwulan IV-2017 yaitu periode bulan September 2017 sampai dengan November 2017. Dalam periode tersebut, terdapat enam Perusahaan Efek yang belum menyampaikan LKPPE dan satu Perusahaan Efek yang terlambat menyampaikan LKPPE periode bulan Oktober 2017.

- 4) Pemeriksaan Kepatuhan Perusahaan Efek
- Selama periode laporan, OJK menyelesaikan penyusunan laporan hasil pemeriksaan terhadap 16 Perusahaan Efek Kantor Pusat yang diperiksa pada triwulan III. Laporan hasil pemeriksaan telah disampaikan kepada Perusahaan Efek. Pada periode yang sama, telah dilakukan pemeriksaan kepatuhan atas kegiatan operasional terhadap delapan Kantor Cabang Perusahaan Efek. Dari hasil pemeriksaan tersebut, terdapat lima Kantor Cabang Perusahaan Efek diminta untuk melakukan langkah-langkah perbaikan guna pemenuhan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku dan tiga Kantor Cabang Perusahaan Efek disimpulkan tidak terdapat hal-hal yang perlu ditindaklanjuti.

## 5) Pemeriksaan Teknis

Selama periode laporan, OJK tidak menerima pengaduan dari Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen. Di samping itu, pada periode yang sama, telah diselesaikan satu Laporan Hasil Pemeriksaan Teknis terhadap Perusahaan Efek yang diterima pada periode sebelumnya.

### B. Pengawasan terhadap Pengelolaan Investasi

Selama periode laporan, OJK melakukan pemeriksaan kepatuhan pelaku industri pengelolaan investasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap 34 kantor pusat MI, enam Perusahaan Efek sebagai APERD, 31 kantor cabang APERD, tujuh Bank Kustodian, dua KIK EBA, dan satu DIRE. Sampai dengan triwulan IV-2017, berdasarkan pemeriksaan tersebut sebanyak 34 MI telah selesai Laporan Hasil Pemeriksaannya (LHP). Pemeriksaan kepatuhan terhadap APERD dan PE APERD, sebanyak 29 APERD telah selesai LHP nya, tujuh APERD dalam proses finalisasi LHP, dan satu APERD masih dalam proses permintaan konfirmasi ke APERD. Untuk pemeriksaan kepatuhan terhadap BK, empat BK sudah selesai LHP nya dan tiga BK dalam proses pemeriksaan. Adapun untuk pemeriksaan kepatuhan terhadap dua KIK EBA dan satu KIK DIRE, saat ini seluruhnya telah selesai LHP nya.

Dalam rangka aktivitas pengawasan atas laporan berkala, OJK melakukan pemantauan terhadap laporan bulanan Manajer Investasi, di mana terdapat dua MI yang tidak menyampaikan laporan X.N.1 bulan Oktober, November, dan Desember 2017 serta satu MI yang terlambat menyampaikan laporan X.N.1 bulan November 2017. Sementara itu, OJK juga mewajibkan MI untuk menyampaikan untuk penyampaian laporan MKBD setiap bulan. Pada periode triwulan IV-2017, tidak terdapat MI yang terlambat menyampaikan laporan MKBD.

### C. Pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik

Selama periode laporan, OJK melakukan pengawasan atas berbagai aksi korporasi yang dilakukan oleh Emiten dan Perusahaan Publik, yaitu sebagai berikut:

**Tabel II - 13** Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik

No	Aksi Korporasi	Jumlah
1	Transaksi afiliasi	201
2	Transaksi afiliasi bersamaan dengan transaksi material	4
3	Transaksi material tidak memerlukan RUPS	29
4	Transaksi material yang harus terlebih dahulu mendapat persetujuan RUPS	29
5	Transaksi perubahan kegiatan usaha utama	4
6	Pembagian saham bonus	1
7	Pembagian dividen berupa kas	60
8	Pembagian dividen saham	4
9	Laporan <i>buyback</i> saham	14
10	Laporan <i>buyback</i> saham dalam kondisi pasar yang berpotensi krisis	0
11	Pembelian kembali Obligasi	5
12	Penelaahan terhadap program ESOP/MSOP	8
13	Penelaahan atas rencana penggabungan usaha	0
14	Penelaahan atas penawaran tender	5
15	Penelaahan atas penawaran tender sukarela	2
16	Penelaahan atas rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD	20
17	Penelaahan <i>go private</i>	1

OJK juga melakukan pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik juga dilakukan melalui pemantauan atas penyampaian laporan berkala, antara lain sebagai berikut:

**Tabel II - 14** Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik

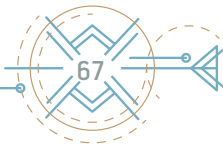
No	Laporan Berkala	LKTT 2017		LKT 2016		LT 2016	
		EPP	%	EPP	%	EPP	%
1	Tepat Waktu	571	92,7%	532	86,4%	479	77,8%
2	Terlambat	37	6,0%	62	10,1%	109	17,7%
3	Belum Menyampaikan	18	2,9%	10	1,6%	17	2,8%
4	Beda Tahun Buku dan Belum Menyampaikan	5	0,8%	0	0,0%	1	0,2%
5	Belum Wajib Menyampaikan	22	3,6%	45	7,3%	44	7,1%

Berdasarkan pengawasan OJK selama triwulan I - IV 2017 terdapat 266 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. OJK juga pemantauan atas kesesuaian dengan ketentuan Pasar Modal terhadap 806 laporan keterbukaan atas informasi atau fakta material, 184 laporan hasil pemeringkatan efek, 591 hasil RUPS, serta 101 laporan penjabatan Penawaran Umum. OJK juga melakukan rekapitulasi terhadap laporan hutang valas yang disampaikan setiap bulan oleh Emiten dan Perusahaan Publik, dengan jumlah total laporan selama 2017 sebanyak 2332 laporan dengan tujuan untuk melihat exposure hutang valas terhadap Emiten dan Perusahaan Publik.

Selama triwulan I - IV 2017, OJK melakukan Pemeriksaan Teknis terhadap 45 Emiten dan Perusahaan Publik yaitu:

- a. Lima Emiten untuk memastikan pemenuhan Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu;
- b. Delapan Emiten untuk memastikan pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
- c. Delapan Emiten untuk memastikan pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal;
- d. Dua Emiten untuk memastikan pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
- e. Satu Emiten untuk memastikan pemenuhan Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Penyajian Dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten Atau Perusahaan Publik dan Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu;
- f. Satu Emiten untuk memastikan pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik, dan Peraturan





- Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
- g. Satu Emiten untuk memastikan pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama
- h. Satu Emiten untuk memastikan kelangsungan usaha (dikarenakan pailit)
- i. Satu Emiten untuk memastikan pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka, dan meminta keterangan lebih lanjut terkait pengaduan terhadap Emiten tersebut.
- j. Satu Emiten untuk memastikan pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal;
- k. Satu Emiten untuk memastikan pemenuhan Peraturan Nomor X.K.2 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
- l. Satu Emiten untuk memastikan pemenuhan atas ketentuan-ketentuan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan No. IX.E.2 terkait dengan transaksi penerimaan pinjaman Perseroan dari PT Sinar Surya Steel, memastikan pemenuhan atas ketentuan-ketentuan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam POJK No. 31/POJK.04/2015 terkait dengan perjanjian kerja sama dalam hal penunjukan PT Sinar Surya Steel sebagai distributor utama Perseroan, memastikan pemenuhan atas peraturan-peraturan OJK khususnya penerapan atas peraturan terkait tata kelola perseroan; memahami dan melihat langsung proses bisnis Perseroan, dan melihat kemampuan Perseroan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya;
- m. Satu Emiten untuk memastikan pemenuhan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan No. VIII.G.7 atas pengakuan pendapatan yang disajikan dalam laporan keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 60/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu atas kepemilikan saham Perseroan oleh ASABRI, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik atas pemberitaan di media;

- n. Satu Emiten untuk memastikan pemutakhiran informasi terkini atas kelangsungan usaha dan restrukturisasi Grup Texmaco serta rencana Perseroan ke depan, dan memahami dan melihat langsung bisnis proses dan kondisi Perseroan;
- o. Satu Emiten untuk memastikan kepatuhan terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 23 tentang Pendapatan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, kepatuhan Perseroan terhadap Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
- p. Satu Emiten untuk memastikan kepatuhan terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 28, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
- q. Satu Emiten untuk memastikan Kepatuhan terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 22 tentang Kombinasi Bisnis, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik, dan Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Penyajian Dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten Atau Perusahaan Publik;
- r. Satu Emiten untuk memastikan pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
- s. Satu Emiten untuk memastikan pemenuhan Peraturan Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama;
- t. Satu Emiten untuk memastikan pemenuhan Peraturan Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu;
- u. Satu Emiten untuk memastikan pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan, dan kelangsungan usaha Perseroan;
- v. Satu Emiten dalam rangka menyelesaikan Pembatalan Homologasi dan informasi kelangsungan usaha;
- w. Satu Emiten untuk memastikan pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
- x. Satu Emiten untuk memastikan Kepatuhan terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 22 tentang Kombinasi Bisnis, Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
- y. Satu Emiten untuk memastikan pemenuhan Peraturan Nomor X.K.2 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;

- z. Satu Emiten untuk memastikan pemenuhan Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.

#### D. Pengawasan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

Selama periode laporan, OJK melakukan penelaahan atas 68 laporan perubahan data dan informasi Profesi Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari 46 laporan dari Akuntan, 13 laporan dari Konsultan Hukum, 8 laporan dari Penilai dan satu laporan dari Notaris. Dari awal tahun sampai dengan triwulan IV-2017, OJK melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap 2 dua Biro Administrasi Efek (BAE), 2 (dua) Perusahaan Pemeringkat Efek (PPE), dua Bank Kustodian (BK), dan 2 (dua) Wali Amanat (WA). Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap seluruh pemeriksaan tersebut telah diselesaikan. Kegiatan monitoring (onsite) sampai dengan triwulan IV-2017 telah dilakukan terhadap 1 (satu) BAE dan 1 (satu) BK dan Laporan Hasil Monitoring (LHM) atas seluruh monitoring (onsite) tersebut telah diselesaikan.

Dari awal tahun sampai dengan triwulan IV-2017, OJK melakukan pemeriksaan kepatuhan (*onsite*) terhadap enam profesi Penilai dengan ruang lingkup pendalaman Pedoman Pengendalian Mutu (PPM) KJPP dan penerapan Peraturan Bapepam-LK Nomor VIII.C.3 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal dan Peraturan Bapepam-LK Nomor VIII.C.4 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal. OJK juga telah melakukan pemeriksaan insidental terhadap satu profesi Penilai. LHP terhadap seluruh pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan insidental tersebut telah diselesaikan.

Pemeriksaan kepatuhan dilakukan terhadap lima Konsultan Hukum dengan ruang lingkup kesesuaian pelaksanaan penugasan profesional oleh Konsultan Hukum dengan kode etik, standar profesi dan penerapan/pelaksanaan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dan sistem pengendalian mutu dalam melakukan uji tuntas hukum dan memberikan pendapat hukum. LHP telah diselesaikan untuk seluruh kegiatan pemeriksaan kepatuhan terhadap profesi tersebut. Selanjutnya telah dilakukan pemetaan (*mapping*) terhadap tiga Notaris Pasar Modal dengan ruang lingkup pendalaman terhadap kegiatan Notaris sebagai Notaris Pasar Modal khususnya dalam penyusunan Akta Notariil dan penerapan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal. Laporan Hasil *Mapping* untuk seluruh pemeriksaan kepatuhan dan/atau pemetaan (*mapping*) tersebut telah diselesaikan.

Sehubungan dengan Pelaksanaan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Akuntan, OJK melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap 12 KAP dengan ruang lingkup Pendalaman Sistem Pengendalian Mutu (SPM) KAP. Selain hal tersebut, Laporan Hasil Pendalaman (LHP) SPM untuk 12 KAP dimaksud telah selesai disusun pada triwulan IV-2017.

Selama triwulan IV-2017, OJK melakukan penelaahan atas 18 permohonan izin perorangan sebagai Ahli Syariah Pasar Modal. OJK juga mengeluarkan 17 Surat Keputusan Izin ASPM dan satu Surat Kekurangan Dokumen Atas Permohonan Izin Sebagai ASPM.

#### E. Penegakan Hukum Industri Pasar Modal

##### 1) Pemeriksaan Pasar Modal

Salah satu tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah mengawasi kegiatan di Pasar Modal, baik melalui upaya preventif maupun represif dalam bentuk penegakan hukum. Efektivitas

penegakan hukum akan sangat mempengaruhi kredibilitas OJK. Dari sisi industri, penegakan hukum yang efektif merupakan faktor krusial dalam membentuk tingkat kepercayaan serta kepastian hukum di pasar keuangan.

Sampai dengan triwulan IV-2017, jumlah OJK melakukan pemeriksaan Pasar Modal yang ditangani oleh OJK yaitu sebanyak 41 pemeriksaan yang terdiri dari 13 Pemeriksaan terkait Emiten dan Perusahaan Publik, 26 Pemeriksaan terkait Transaksi dan Lembaga Efek dan dua Pemeriksaan terkait Pengelolaan Investasi. Sampai akhir Desember 2017, terdapat dua pemeriksaan yang ditingkatkan ke Penyidikan.

## 2. Penetapan Sanksi dan Penanganan Keberatan Pada Industri Pasar Modal

### a) Penetapan Sanksi Administratif

Selama periode triwulan IV-2017, OJK menetapkan 218 sanksi administratif kepada para pelaku industri Pasar Modal, yakni sebanyak: dari 82 sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis, 130 Sanksi Administratif Berupa Denda, empat sanksi administratif berupa Pembekuan dan dua sanksi administratif berupa Pencabutan Izin dengan detail antara lain sebagai berikut :

- a. 82 sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis, dengan rincian 45 sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis dikenakan terkait keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman, serta 37 sanksi dikenakan terkait pelanggaran selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen lain, dan keterlambatan pengumuman.
- b. 127 Sanksi Administratif Berupa Denda dengan rincian 124 Sanksi Administratif Berupa Denda kepada para pelaku di bidang

Pasar Modal terkait dengan keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan dengan total nilai Sanksi Administratif Berupa Denda yang dikenakan sebesar Rp1.316.890.000,- dan tiga Sanksi Administratif Berupa Denda dikenakan kepada para pelaku di bidang Pasar Modal terkait pelanggaran selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen lain, dan keterlambatan pengumuman dengan total nilai Sanksi Administratif Berupa Denda sebesar Rp156.000.000,-

- c. Empat sanksi administratif berupa Pembekuan Surat Tanda Terdaftar kepada Konsultan Hukum Pasar Modal terkait dengan pelanggaran ketidakikutsertaan Pendidikan Profesi Lanjutan.
- d. Dua sanksi administratif berupa Pencabutan Izin.
- e. Dua Sanksi Administratif berupa Pencabutan Izin Usaha Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek kepada Perusahaan Efek.

Sebagai tindak lanjut atas penetapan Sanksi Administratif Berupa Denda di tahun 2017, OJK menetapkan 40 Surat Teguran Pertama dan 22 Surat Teguran Kedua terkait dengan keterlambatan pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda. Selanjutnya terdapat 8 piutang macet atas Sanksi Administratif Berupa Denda yang telah diproses pelimpahannya ke Panitia Urusan Piutang Negara. OJK juga memproses pengenaan sanksi administratif terkait keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman sebanyak 21 rekomendasi sanksi administratif

serta dua rekomendasi atas kasus pelanggaran ketentuan di sektor Pasar Modal selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman.

b) Penanganan Keberatan Atas Sanksi Administratif

Selama periode triwulan IV-2017, terkait penanganan keberatan atas Sanksi Administratif, OJK menindaklanjuti 36 Permohonan Keberatan di mana 20 Keberatan telah ditanggapi dan 16 Keberatan masih dalam proses.

## 2.2.4 Pengawasan IKNB

### A. Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan

1) Analisis Laporan (*off-site supervision*)

Pada triwulan IV-2017, OJK melakukan analisis terhadap 18 laporan keuangan berkala, yang terdiri dari 13 laporan perusahaan asuransi umum dan lima laporan perusahaan asuransi jiwa. Rincian kegiatan analisis laporan berdasarkan periode laporan yang dianalisis adalah sebagai berikut:

**Tabel II - 15** Jumlah Laporan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi yang Dianalisis

Periode Laporan	Asuransi Jiwa	Asuransi Umum	Reasuransi	Asuransi Wajib
Oktober 2017	1	4	-	-
November 2017	-	-	-	-
Desember 2017	4	9	-	-

2) Pemeriksaan (*on-site supervision*)

Pada periode triwulan IV-2017, OJK melakukan pemeriksaan terhadap 5 perusahaan asuransi umum, 4 perusahaan asuransi jiwa, dan 1 asuransi wajib. Pada periode yang sama, OJK menerbitkan 13 LHP yang terdiri dari 8 LHP Sementara dan 5 LHP Final.

3) Pemantauan Tindak Lanjut, Penegakan Kepatuhan, dan Pengenaan Sanksi

Pada triwulan IV-2017, OJK mengenakan sanksi peringatan pertama kepada 19

perusahaan, sanksi peringatan kedua kepada dua perusahaan, dan sanksi peringatan ketiga kepada tiga perusahaan. Selain menerbitkan pengenaan sanksi, OJK juga melakukan pencabutan sanksi yang terdiri dari dua surat pencabutan sanksi peringatan pertama dan satu surat pencabutan sanksi peringatan kedua.

4) Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan

Pada triwulan IV-2017, OJK menindaklanjuti sebanyak 10 pengaduan yang berkaitan dengan klaim asuransi.

5) Kegiatan Lain

a. Penatausahaan Dana Jaminan

Dana Jaminan merupakan bagian dari aset perusahaan asuransi dan reasuransi yang dimaksudkan sebagai jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan para pemegang polis. Seluruh dana jaminan perusahaan wajib ditatausahakan di bank kustodian yang bukan merupakan afiliasi dari perusahaan, kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Negara Republik Indonesia. Pada triwulan IV-2017 OJK telah memproses 14 permohonan pencairan/penggantian dana jaminan.

b. Surat Keterangan Tingkat Kesehatan Keuangan

Pada triwulan IV-2017 OJK menerima 15 permohonan surat keterangan tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan telah diselesaikan seluruhnya.

c. Pengesahan Cadangan

Selama periode triwulan IV-2017, terdapat 5 permohonan pengesahan cadangan premi yang diajukan oleh perusahaan. Seluruh permohonan tersebut telah dianalisis dan ditindaklanjuti.

### B. Pengawasan Dana Pensiun

1) Analisis Laporan (*off-site supervision*)

Terkait dengan Pengawasan Dana Pensiun,

OJK melakukan pengawasan secara tidak langsung (*off-site supervision*) dan secara langsung (*on-site supervision*) Berdasarkan peraturan perundangan di bidang Dana Pensiun, Dana Pensiun wajib menyampaikan laporan berkala berupa laporan keuangan dan laporan lainnya kepada OJK. Rekapitulasi penyampaian laporan bulanan Dana Pensiun pada triwulan IV-2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel II - 16** Penyampaian Laporan Bulanan Dana Pensiun

Jenis Dana Pensiun	Telah Menyampaikan			Belum Menyampaikan		
	Okt 2017	Nov 2017	Des 2017	Okt 2017	Nov 2017	Des 2017
Dana Pensiun Pemberi Kerja	213	206	206	18	24	24
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	25	24	24	0	1	1
<b>Total</b>	<b>238</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>18</b>	<b>25</b>	<b>25</b>

2) Pemeriksaan (*on-site supervision*)

Pada triwulan IV-2017, OJK melakukan pemeriksaan langsung terhadap 10 Dana Pensiun. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, OJK telah menerbitkan enam LHP Sementara dan empat LHP Final Dana Pensiun.

Sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan final yang dilakukan OJK, OJK memberikan rekomendasi kepada Dana Pensiun. Untuk memantau pelaksanaan rekomendasi oleh Dana Pensiun, OJK dapat mengundang pengurus Dana Pensiun ke Kantor OJK atau sebaliknya, OJK dapat pula langsung mengunjungi kantor Dana Pensiun. Dalam periode triwulan IV-2017, OJK telah melakukan pemantauan tindak lanjut secara langsung terhadap 14 Dana Pensiun

**C. Pengawasan BPJS Ketenagakerjaan**

1) Analisis Laporan (*off-site supervision*)

Terkait pengawasan BPJS Ketenagakerjaan, selama triwulan IV-2017, OJK menerima laporan berkala dari BPJS Ketenagakerjaan sebanyak enam laporan berkala yang terdiri

dari dua laporan pengelolaan program Dana Jaminan Sosial periode September, Oktober dan November 2017 dan empat laporan keuangan bulanan periode Agustus dan September 2017 masing-masing untuk Badan dan Dana Jaminan Sosial.

2) Pemeriksaan (*on-site supervision*)

Pada triwulan IV-2017, telah dilakukan penyusunan laporan hasil pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan dengan aspek yang diperiksa yaitu terkait dengan pembayaran manfaat klaim dan perlindungan konsumen untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan telah dilaksanakan pada akhir desember. Atas kegiatan tersebut, diperoleh keputusan bahwa seluruh rekomendasi yang terdapat dalam pemeriksaan telah diselesaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

**D. Pengawasan Lembaga Pembiayaan**

1) Analisis Laporan Berkala (*off-site supervision*)

Selama triwulan IV-2017, OJK melakukan pengawasan *off-site* lembaga pembiayaan dengan rincian dilakukan dengan cara menganalisis laporan bulanan perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur untuk periode September - November 2017. Rekapitulasi penyampaian laporan bulanan lembaga pembiayaan untuk bulan September - November 2017 yang disampaikan paling lambat pada tanggal 10 di bulan berikutnya adalah sebagai berikut:

**Tabel II - 17** Penyampaian Laporan Bulanan Lembaga Pembiayaan

Jenis Laporan	Terlambat			Tidak Terlambat		
	Sept 2017	Okt 2017	Nov 2017	Sept 2017	Okt 2017	Nov 2017
LBPP	10	14	16	187	182	179
LBPMV	3	3	4	59	59	58
LBPPI	0	0	0	2	2	2

\* LBPP: Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan, LBPMV: Laporan Bulanan Perusahaan Modal Ventura, LBPPI: Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, Perusahaan yang terlambat atau tidak menyampaikan laporan bulanan akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

- 2) Pemeriksaan Langsung (*On-site Supervision*)  
Pada triwulan IV-2017, OJK melakukan pemeriksaan langsung terhadap sembilan Lembaga Pembiayaan, yang terdiri dari dua Perusahaan Modal Ventura dan tujuh Perusahaan Pembiayaan. Pemeriksaan terhadap perusahaan pembiayaan dilakukan dengan menerapkan *Risk Based Supervision* (RBS). Berdasarkan pemeriksaan tersebut, perkembangan penyusunan laporan pemeriksaan selama triwulan IV-2017 dapat dirincikan sebagai berikut, yaitu:

**Tabel II - 18** Penerbitan LHP Lembaga Pembiayaan

Kegiatan	Jumlah
LHPS telah dikirimkan	13
LHPF telah dikirimkan	16

- 3) Pemantauan Tindak Lanjut dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan  
Selama triwulan IV-2017, telah dilakukan rapat pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan di tahun 2016 dan awal 2017 dengan perusahaan pembiayaan dan perusahaan modal ventura di kantor OJK. Kegiatan ini dilakukan agar lembaga pembiayaan yang telah diperiksa melaksanakan rekomendasi dan saran yang telah disampaikan.
- 4) Perkembangan Penerapan Risk Based Supervision  
Selama triwulan IV-2017, OJK melakukan pemeriksaan langsung dengan menerapkan *risk based supervision* (RBS) terhadap tujuh Perusahaan Pembiayaan. Kewajiban penyampaian laporan *self assessment* atas tingkat risiko perusahaan pembiayaan telah disampaikan oleh Perusahaan Pembiayaan

Sampai batas waktu tersebut, terdapat 174 Perusahaan Pembiayaan yang telah menyampaikan laporan *self assessment* atas tingkat risiko, sedangkan sebanyak 26 perusahaan belum menyampaikan.

- 5) Penanganan Pengaduan  
Pelayanan pengaduan merupakan kegiatan penanganan pengaduan secara teknis terhadap pengaduan yang diterima secara langsung dari pihak ketiga atau melalui surat baik dari satuan kerja internal maupun satuan kerja eksternal. Pada triwulan IV-2017, OJK menangani dan menindaklanjuti beberapa pengaduan yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan usaha perusahaan pembiayaan.
- 6) Penyampaian Rencana Bisnis Tahunan Perusahaan Pembiayaan  
Berdasarkan ketentuan Pasal 52 POJK Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan wajib menyusun rencana bisnis tahunan dan wajib disampaikan kepada OJK paling lambat pada tanggal 30 Januari tahun berikutnya. Sampai dengan batas penyampaian laporan, terdapat 159 Perusahaan Pembiayaan dan 32 Perusahaan Modal Ventura yang telah menyampaikan Rencana Bisnis Tahunan. Sementara itu, terhadap 41 Perusahaan Pembiayaan dan 30 Perusahaan Modal Ventura yang tidak menyampaikan rencana bisnis telah dikenakan sanksi administratif.

#### E. Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro

- 1) Sosialisasi  
Dalam rangka mensosialisasikan UU LKM dan peraturan pelaksanaannya, serta pengembangan LKM, selama triwulan IV-2017 OJK memenuhi undangan pihak internal dan eksternal dalam berbagai acara, antara lain:
- Sosialisasi Program Dana Bergulir (Sorong, Papua Barat dan di Raja Ampat, Papua).
  - Rapat koordinasi Transformasi BKD menjadi LKM

- c. Narasumber pada kegiatan apresiasi LKMA
  - d. Seminar mengenai Fungsi dan Peran LKM di Jakarta.
  - e. Penyusunan Model Bisnis dan Studi Kelayakan Pendirian LKM atau Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Melalui Pemberdayaan Bumdes dan Bumades pada FGD Pembiayaan Inklusif Petani dari Kementerian Pertanian
- 2) Pelaksanaan Pendampingan Secara Langsung dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan LKM
- Selama triwulan IV-2017, OJK melakukan pelatihan penyusunan laporan keuangan kepada LKM yang memperoleh izin usaha untuk mendukung pelaksanaan penyampaian laporan keuangan LKM kepada OJK. Namun, pada perkembangannya masih banyak LKM yang belum menyampaikan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan OJK. Agar LKM dapat menyampaikan laporan keuangan secara benar, OJK melakukan pendampingan secara langsung. Pendampingan ini dilakukan juga untuk melihat profil dan proses bisnis LKM yang telah memperoleh izin usaha dan berkewajiban untuk menyerahkan Laporan Keuangan kepada OJK. Selama triwulan IV-2017, OJK melakukan pendampingan pada beberapa LKM di beberapa daerah, antara lain:

**Tabel II - 19** Pelaksanaan Pendampingan LKM selama triwulan IV-2017

No	Lokasi	Nama LKM
1.	Wonogiri	1. Koperasi LKMA Bulu Makmur 2. Koperasi LKM Sido Mulyo 3. Koperasi LKM Amanah Sumber Baru Eromoko 4. Koperasi LKM Pondok Subur
2.	Semarang	5. LKMA Gapoktan Setya Mandiri
3.	Grobogan	6. Koperasi LKMA Tarub Raharjo 7. Koperasi LKMA Sumber Rejeki
4.	Agam	8. LKMSA Panampuang Prima 9. Koperasi LKMA Batu Taba Sepakat
5.	Bengkulu	10. Koperasi LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani 11. LKMS MM Sejahtera 12. Koperasi LKM Kemala Aman
6.	Lima Puluh Kota	13. Koperasi LKMA Tigo Sajaringan 14. Koperasi LKMA Lembah Sarang Olang 15. Koperasi LKMA Lubuak Simato

No	Lokasi	Nama LKM
7.	Pesisir Selatan	16. Koperasi LKMA Damar Rumput Jaya
8.	Magelang	17. Koperasi LKMA Gapoktan Sumber Tani 18. LKMA Tani Merapi Sejahtera 19. Koperasi LKM Ngudi Luhur 20. Koperasi LKM Randu Makmur
9.	Banyumas	21. Koperasi LKMS BTM Banyumas di Patik- raja
10.	Purbalingga	22. Koperasi LKMA PUAP Subur
11.	Polewali Mandar	23. Koperasi LKM Gapoktan Tanah Bahagia 24. Koperasi LKM Gapoktan Resta 25. Koperasi LKM Sumber Makmur 26. Koperasi LKM Gapoktan Assama Leb- uang 27. Koperasi LKM Gapoktan Karya Tani 28. Koperasi LKM Gapoktan Bunga Padi 29. Koperasi LKM Gapoktan Reski Tunas Semi 30. Koperasi LKM Gapoktan Mataram
12.	Pemalang	31. Koperasi LKM Gapoktan Tani Mandiri 32. Koperasi LKM Gapoktan Ragil Jaya 33. Koperasi LKM Gapoktan Tani Karya 34. Koperasi LKM Gapoktan Sarwo Akur Tani
13.	Sragen	35. Koperasi LKM Desa Bendo 36. Koperasi LKM Sumber Makmur 37. Koperasi LKM Murih Raharjo
14.	Lombok Timur	38. PT LKM Kalijaga di Kabupaten Lombok Timur 39. PT LKM Lenek Daya
15.	Kendal	40. Koperasi LKMA Sendang Mulyo 41. Koperasi LKMA Mojo Agung Sejahtera 42. Koperasi LKMA Mustika Karya Makmur 43. Koperasi LKMA Karang Sari Sejahtera Gapoktan Tani Mandiri 44. Koperasi LKMA Sido Rukun 45. Koperasi LKMA Wisma Tani Makmur 46. Koperasi LKMA Sumber Rejeki Makmur 47. Koperasi LKMA Gapoktan Ngudi Rejeki

Pelaksanaan pendampingan secara langsung dalam rangka penyusunan laporan keuangan LKM akan dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu LKM yang memiliki nilai *Non Performing Loan* (NPL) yang tinggi dan/atau LKM yang belum menyampaikan Laporan keuangan. Pelaksanaan Asistensi Perizinan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan LKM dan membantu proses perizinan usaha LKM, maka OJK melakukan asistensi perizinan usaha LKM di berbagai kota. Pelaksanaan asistensi perizinan usaha ini ditujukan kepada pelaku LKM yang belum memiliki izin usaha dari OJK. Dalam mengadakan asistensi, OJK bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Setempat untuk



mengundang pelaku LKM yang berada di wilayah Pemerintah Daerah tersebut. Selama triwulan IV-2017, OJK telah melaksanakan asistensi perizinan usaha di beberapa kota atau kabupaten, antara lain:

**Tabel II - 20** Pelaksanaan Asistensi Perizinan Usaha LKM selama triwulan IV-2017

No.	Lokasi Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan
1.	BKD	Ponorogo
2.	LKMA	Purworejo
		Grobogan
		Kabupaten Semarang (Ungaran)
		Sragen
		Kendari
		Bone
3.	LSPBM	Tanah Laut

### 3) Pelaksanaan Pelatihan Proses Bisnis dan Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Mikro

Dalam rangka meningkatkan kapasitas LKM yang mendapat izin usaha dari OJK terkait kewajiban penyampaian laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku, OJK menyelenggarakan Pelatihan Proses Bisnis dan Laporan Keuangan LKM bagi pelaku LKM yang telah memperoleh izin usaha. Dalam pelaksanaan pelatihan, OJK memaparkan beberapa materi terkait dengan pokok-pokok peraturan LKM, penyelenggaraan usaha, serta Laporan keuangan LKM. Selama triwulan IV-2017, OJK mengadakan tiga kali pelatihan, yaitu di Kota Bukittinggi, Bengkulu, dan Makassar dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel II - 21** Pelatihan Proses Bisnis dan Laporan Keuangan LKM selama triwulan IV-2017

No	Lokasi Pelaksanaan	Jumlah Peserta
1.	Bukittinggi	5 LKM
2.	Bengkulu	6 LKM
3.	Makassar	8 LKM

### F. Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus

Pada triwulan IV-2017, OJK melakukan pemeriksaan langsung terhadap Perusahaan

Penjaminan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), PT Pegadaian (Persero), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), PT Danareksa (Persero), dan PT PNM (Persero). OJK juga melakukan analisis laporan keuangan (pengawasan *off-site*) terhadap 21 Perusahaan Penjaminan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), PT Pegadaian (Persero), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), PT Danareksa (Persero), dan PT PNM (Persero).

### G. Pengawasan Perusahaan Jasa Penunjang IKNB

Kegiatan pengawasan di sektor jasa penunjang IKNB dilaksanakan sejak pemberian izin usaha. Pemberian izin usaha dilakukan secara terseleksi hanya kepada pihak-pihak yang telah memenuhi persyaratan. Hingga Selama triwulan IV-2017, pengawasan atas perusahaan jasa penunjang yang telah beroperasi dilakukan dengan:

- Pemeriksaan rutin dan pemeriksaan khusus sebanyak 49 perusahaan yang terdiri dari 41 Perusahaan Pialang Asuransi, lima Perusahaan Pialang Reasuransi, dan tiga Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dengan telah menerbitkan 48 Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara (LHPS) dan 36 di antaranya sudah diterbitkan menjadi Laporan Hasil Pemeriksaan Final (LHPF);
- Pengenaan sanksi atas pelanggaran ketentuan yang dilakukan perusahaan jasa penunjang sebanyak 139 sanksi yang terdiri dari 107 Sanksi Peringatan Pertama (SP1), 11 Sanksi Peringatan Kedua (SP2), delapan Sanksi Peringatan Ketiga (SP3), 11 Sanksi Administratif berupa Denda pada triwulan III-2017, dan 2 Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (SPKU); serta
- Tindak lanjut penanganan pengaduan yang diterima oleh pengawas sebanyak satu pengaduan pada triwulan IV-2017.

## H. Pelayanan Kelembagaan dan Produk IKNB

Pada triwulan IV-2017, OJK menerima 1.426 permohonan dan pelaporan kelembagaan IKNB. Permohonan dan pelaporan kelembagaan IKNB meliputi industri asuransi dan reasuransi, industri dan pensiun, industri lembaga pembiayaan, industri penjaminan, industri pergadaian, dan lembaga pinjam meminjam berbasis teknologi (*peer to peer lending*). Adapun jumlah permohonan dan pelaporan kelembagaan IKNB selama triwulan I-IV 2017 yang telah diproses oleh OJK sebanyak 6.296. Dari jumlah tersebut, sejumlah 5.510 permohonan dan pelaporan kelembagaan IKNB telah selesai diberikan izin/persetujuan/pencatatan, 769 permohonan dan pelaporan dimaksud telah ditanggapi serta masih dalam proses

analisis sementara 17 permohonan lainnya dibatalkan/dikembalikan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 1) Pemberian Izin Usaha

Pada periode triwulan IV-2017, OJK menerima satu permohonan izin usaha perusahaan asuransi, dua permohonan izin usaha dana pensiun, satu permohonan izin usaha perusahaan pembiayaan, tiga permohonan izin usaha perusahaan pergadaian, empat pendaftaran pergadaian dan 13 pendaftaran lembaga *peer to peer lending*. Dengan demikian, selama periode triwulan I-IV 2017, terdapat 47 permohonan izin usaha IKNB yang telah diselesaikan. Adapun rincian pemberian izin usaha IKNB disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel II - 22** Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Kelembagaan dan Produk IKNB sampai dengan triwulan IV-2017

Kegiatan	Permohonan			Selesai	Telah Dianalisis & Ditanggapi <sup>*)</sup>	Dalam Proses Analisis	Dokumen Dikembalikan
	Out-standing Triwulan Sebelumnya	Triwulan IV-2017	Jumlah				
Pemberian Izin Usaha	93	24	117	47	55	9	6
Pencabutan Izin Usaha	24	6	30	24	1	3	2
Likuidasi	22	6	28	18	10	-	-
Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan	34	6	40	19	12	4	5
Perubahan Kepemilikan/AD/Modal/PS/PDP	424	68	492	338	140	10	4
Perubahan Nama	11	3	14	13	-	1	-
Kantor Cabang	683	222	905	773	42	90	-
Kantor Pemasaran dan Kantor Selain Kantor Cabang	396	134	530	455	24	51	-
Produk	1.373	466	1.839	1.723	94	22	-
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan	919	240	1.159	997	126	36	-
Pelaporan Pengurus	422	157	579	558	2	19	-
Pelaporan Syarat Keberlanjutan	282	25	307	294	2	11	-
Pelaporan Pengangkatan Tenaga Ahli, Aktuaris, dan Auditor Internal	92	28	120	117	3	-	-
Pelaporan Pengangkatan Tenaga Kerja Asing	95	41	136	134	2	-	-
<b>Total</b>	<b>4.870</b>	<b>1.426</b>	<b>6.296</b>	<b>5.510</b>	<b>513</b>	<b>256</b>	<b>17</b>

\*) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap dan menunggu penjadwalan, atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB


**Tabel II - 23** Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Kelembagaan dan Produk IKNB Sampai dengan Triwulan IV-2017

IKNB	Permohonan		Total	Selesai	Telah Ditanggapi <sup>*)</sup>	Proses Analisis	Dokumen Dikembalikan
	Outstanding triwulan Sebelumnya	triwulan IV-2017					
Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	4	1	5	3	-	1	1
Dana Pensiun	2	2	4	-	4	-	-
Perusahaan Pembiayaan	1	1	2	1	-	-	1
Perusahaan Modal Ventura	4	-	4	3	1	-	-
Perusahaan Penjaminan	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pergadaian - Izin Usaha	12	3	15	3	8	2	2
Perusahaan Pergadaian - Pendaftaran	10	4	14	8	6	-	-
LPMBTI (P2P Lending) - Izin Usaha	4	-	4	1	2	1	-
LPMBTI (P2P Lending) - Pendaftaran	56	13	69	28	34	5	2
<b>Total</b>	<b>93</b>	<b>24</b>	<b>117</b>	<b>47</b>	<b>55</b>	<b>9</b>	<b>6</b>

\*) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB.

**Tabel II - 24** Lembaga Keuangan Non Bank Terdaftar Triwulan IV-2017

No	Nama Perusahaan	Jenis Industri
1.	PT Qreditt Indonesia Satu	P2P Lending
2.	PT Ciciel Solusi Mitra Teknologi	P2P Lending
3.	PT Persada Arihta Mandiri	Pergadaian
4.	Sdr. Liu Agus Deny	Pergadaian
5.	PT Intekno Raya	P2P Lending
6.	PT Kas Wagon Indonesia	P2P Lending
7.	PT Esta Kapital Fintek	P2P Lending
8.	CV. Soverino Ekasakti	Pergadaian
9.	PT Gradana Teknoruci Indonesia	P2P Lending

\*) PT Pasar Dana Pinjaman telah meningkatkan statusnya dari telah memperoleh pendaftaran menjadi izin usaha sebagaimana ketentuan POJK 77/POJK.05/2016.

Selama triwulan IV-2017, OJK memberikan izin usaha terhadap sembilan lembaga keuangan non bank yang telah diberikan pernyataan terdaftar, dengan rincian sebagai berikut:

2) Pencabutan Izin Usaha

Selama periode triwulan IV-2017, OJK melakukan pencabutan izin terhadap lima perusahaan pembiayaan, yaitu PT Rukun Raharjo Sedoyo, PT Arjuna Finance, PT Maestro Prima Finance, PT Adira Quantum Multifinance, dan PT Patra Multifinance. Rincian pencabutan izin usaha IKNB disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel II - 25** Rekapitulasi Pencabutan Izin Usaha IKNB sampai dengan triwulan IV-2017

IKNB	Permohonan		Total	Selesai	Telah Ditanggapi <sup>*)</sup>	Proses Analisis	Dokumen Dikembalikan
	Outstanding Triwulan Sebelumnya	Triwulan IV-2017					
Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	2	1	3	3	-	-	-
Dana Pensiun	11	1	12	11	1	-	-
Perusahaan Pembiayaan	7	4	11	8	-	2	1
Perusahaan Modal Ventura	3	-	3	2	-	1	-
Perusahaan Penjaminan	1	-	1	-	-	-	1
<b>Total</b>	<b>24</b>	<b>6</b>	<b>30</b>	<b>24</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>

\*) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB

**Tabel II - 26** Pencabutan Izin Usaha IKNB selama triwulan IV-2017

No	Nama Perusahaan	Jenis Industri
1.	PT Sarana Sumsel Ventura	Perusahaan Modal Ventura
2.	PT JA Mitsui Leasing	Perusahaan Pembiayaan
3.	PT Fairfax Insurance Indonesia	Asuransi Umum
4.	PT Rukun Raharjo Sedoyo	Perusahaan Pembiayaan
5.	PT Arjuna Finance	Perusahaan Pembiayaan
6.	PT Maestro Prima Finance	Perusahaan Pembiayaan
7.	Dana Pensiun Merck Indonesia	DPPK PPMP
8.	PT Adira Quantum Multifinance	Perusahaan Pembiayaan
9.	PT Patra Multifinance	Perusahaan Pembiayaan

Sampai akhir periode laporan jumlah IKNB konvensional adalah sebanyak 695 lembaga dengan rincian, yaitu:

**Tabel II - 27** Jumlah IKNB Konvensional per 31 Desember 2017

No	Jenis Industri	Jumlah
<b>I</b>	<b>Asuransi dan Reasuransi *</b>	
1	Asuransi Jiwa	54
2	Asuransi Umum	74
3	Reasuransi	6
4	Penyelenggara Program Asuransi Sosial & BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan	2
5	Penyelenggara Asuransi untuk PNS, TNI dan POLRI	3
<b>Total Asuransi dan Reasuransi</b>		<b>139</b>
<b>II</b>	<b>Dana Pensiun</b>	
1	DPPK PPIP	44
2	DPPK PPMP	169
3	DPLK	22
<b>Total Dana Pensiun</b>		<b>235</b>
<b>III</b>	<b>Lembaga Pembiayaan*</b>	
1	Perusahaan Pembiayaan	191
2	Modal Ventura	63
3	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	2
<b>Total Lembaga Pembiayaan</b>		<b>256</b>
<b>IV</b>	<b>Lembaga Jasa Keuangan Lainnya*</b>	
1	Perusahaan Penjaminan	21
2	Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan / PT SMF	1
3	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia / Indonesia Eximbank	1
4	Perusahaan Pegadaian / PT Pegadaian (Perse-ro)- Izin usaha	5
5	Perusahaan Pegadaian –Pendaftaran	8
6	Penyelenggaraan P2P <i>Lending</i> – izin usaha	1
7	Penyelenggaraan P2P <i>Lending</i> – pendaftaran	28
<b>Total Lembaga Jasa Keuangan Lainnya</b>		<b>65</b>
<b>TOTAL LKKNB (Konvensional)</b>		<b>695</b>

### 3) Likuidasi

Selama periode laporan, OJK menerima enam permohonan terkait proses likuidasi dana pensiun yang terdiri dari tiga permohonan persetujuan rencana kerja likuidasi, satu permohonan persetujuan hasil penyelesaian likuidasi, dan dua permohonan persetujuan perubahan tim likuidasi. Adapun permohonan persetujuan yang diselesaikan pada periode laporan yaitu satu permohonan rencana kerja likuidasi, dua permohonan persetujuan hasil penyelesaian likuidasi, dan dua permohonan persetujuan perubahan tim likuidasi. rincian proses likuidasi IKNB disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel II - 28** Rekapitulasi Likuidasi IKNB sampai dengan triwulan IV-2017

IKNB	Permohonan		Total	Sele-sai	Telah di-tang-gapi*	Proses anali-sis
	<i>Out-stand-ing</i> tri-wulan Sebe-lumnya	tri-wulan IV-2017				
<b>Perusahaan Asuransi dan Reasuransi</b>						
a. Persetujuan rencana kerja likuidasi	1	-	1	1	-	-
b. Persetujuan hasil penyelesaian likuidasi	-	-	-	-	-	-
<b>Dana Pensiun</b>						
a. Persetujuan rencana kerja likuidasi	16	3	19	11	8	-
b. Persetujuan hasil penyelesaian likuidasi	4	1	5	3	2	-
c. Persetujuan Perubahan Tim Likuidasi	1	2	3	3	-	-
<b>Total</b>	<b>22</b>	<b>6</b>	<b>28</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>-</b>

\*) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB.

### 4) Penggabungan, Peleburan (*Merger*), dan Pengambilalihan (Akuisisi)

Selama periode triwulan IV-2017, terdapat empat permohonan pengambilalihan, namun tidak terdapat permohonan penggabungan dan peleburan. Rincian penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan IKNB disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II - 29

## Rekapitulasi Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan IKNB

IKNB	Permohonan		Total	Selesai	Telah ditanggapi*	Proses analisis	Dokumen Dikembalikan
	Out-standing triwulan Sebelumnya	triwulan IV-2017					
Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	9	1	10	8	-	2	-
Perusahaan Pembiayaan	25	5	30	11	12	2	5
<b>Total</b>	<b>34</b>	<b>6</b>	<b>40</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

\*) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB

5) Perubahan Kepemilikan Perusahaan/ Perubahan Anggaran Dasar/Perubahan Pemegang Saham/Perubahan Peraturan Dana Pensiun (PDP)

Sampai akhir triwulan IV-2017, OJK menyelesaikan sebanyak 338 permohonan/ pelaporan terkait proses perubahan kepemilikan perusahaan/perubahan anggaran dasar/perubahan pemegang saham/perubahan PDP, termasuk di dalamnya pelaporan penetapan pengendali serta pemenuhan ketentuan *single presence policy*, di mana pelaporan penetapan pengendali dan pemenuhan ketentuan *single presence policy* seluruhnya disampaikan oleh perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Jumlah tersebut termasuk empat permohonan perubahan PDP yang dikembalikan karena melewati batas waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Rincian perubahan kepemilikan perusahaan/perubahan anggaran dasar/ perubahan pemegang saham/perubahan PDP IKNB disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II - 30

## Rekapitulasi Perubahan Kepemilikan Perusahaan/ Perubahan Anggaran Dasar/Perubahan Pemegang Saham/Perubahan PDP IKNB

IKNB	Permohonan		Total	Selesai	Telah ditanggapi*	Proses analisis	Dokumen Dikembalikan
	Out-standing triwulan Sebelumnya	triwulan IV-2017					
Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	157	22	180	156	20	3	-
Dana Pensiun	79	20	99	60	38	1	4
Perusahaan Pembiayaan	126	17	143	80	58	5	-
Perusahaan Modal Ventura	40	7	47	28	19	-	-
Perusahaan Penjaminan	22	2	24	18	5	1	-
<b>Total</b>	<b>424</b>	<b>68</b>	<b>492</b>	<b>338</b>	<b>140</b>	<b>10</b>	<b>4</b>

\*) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB.

6) Perubahan Nama

Selama periode triwulan IV-2017, terdapat satu pelaporan perubahan nama perusahaan pembiayaan yang masih diproses OJK. Dengan demikian, tidak terdapat perubahan daftar IKNB yang telah ditetapkan perubahan namanya dari periode sebelumnya. Adapun 13 IKNB yang telah ditetapkan perubahan namanya yaitu sebagai berikut:

1. PT QBE General Insurance Indonesia (d/h PT QBE Pool General Insurance);
2. PT Heksa Solution Insurance (d/h PT Heksa Eka Life Insurance);
3. PT Shakti Top Finance (d/h PT Top Finance);
4. PT Mitra Dana Top Finance (d/h PT Mitra Dana Putra Utama Finance);
5. PT Emas Persada Finance (d/h PT Bumikusuma Multi Finance);
6. PT Asuransi BRI Life (d/h PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera);
7. PT Mitra Adipratama Sejati Finance (d/h PT Pan Pacific Oto Finance);
8. PT Proline Finance Indonesia (d/h PT Danpac Indonesia);
9. PT Dian Mandiri Multifinance (d/h PT Adhika Primadhana Multifinance);

10. PT First Indo American Leasing Tbk (d/h PT First Indo American Leasing);
  11. PT Mitra Gadai Sejahtera Kepri (d/h Pegadaian Mitra Kepri);
  12. PT Pool Advista Finance (d/h PT Indojasa Pratama Finance); dan
  13. PT Evolusi Finansial Indonesia (d/h PT Swadesi Finance)
- 7) Kantor Cabang dan Kantor Pemasaran
- Sampai dengan triwulan IV-2017, OJK menerima 905 pelaporan terkait kantor cabang perusahaan asuransi dan reasuransi serta lembaga pembiayaan (perusahaan pembiayaan dan perusahaan modal ventura) yang terdiri dari pembukaan, penutupan, dan perubahan alamat serta 18 pelaporan perubahan alamat kantor pusat untuk perusahaan asuransi dan reasuransi.

**Tabel II - 31** Rekapitulasi Pelaporan Kantor Cabang IKNB

IKNB	Permohonan		Total	Selesai	Telah ditang-gapi*	Proses analisis
	Out-standing triwulan Sebel-umnya	triwulan IV-2017				
Perusahaan Asuransi dan Reasuransi						
- Pembu-kaan kan-tor cabang	14	7	21	18	-	3
- Penutup-an kan-tor cabang	3	3	6	5	-	1
- Perubah-an alamat	40	3	43	43	-	-
Pencatatan perubahan alamat kan-tor pusat	15	3	18	15	3	-
Lembaga Pembiayaan dan LJKK						
- Pembu-kaan kan-tor cabang	229	69	298	274	10	14
- Penutup-an kan-tor cabang	37	10	47	31	4	12
- Perubah-an alamat	345	127	472	387	25	60
<b>Total</b>	<b>683</b>	<b>222</b>	<b>905</b>	<b>773</b>	<b>42</b>	<b>90</b>

\*) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB.

Rincian pelaporan kantor cabang disajikan dalam tabel berikut:

Sementara itu, terkait kantor selain kantor pusat yang tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggung-janaan dan/atau klaim (kantor pemasaran), sampai dengan triwulan IV-2017, OJK menerima 455 pelaporan yang mencakup pelaporan pembukaan, penutupan, dan perubahan alamat yang disampaikan oleh perusahaan asuransi dan reasuransi serta perusahaan pembiayaan. Rincian pelaporan kantor selain kantor cabang disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel II - 32** Rekapitulasi Pelaporan Kantor selain Kantor Cabang IKNB

IKNB	Permohonan		Total	Selesai	Telah ditang-gapi*	Proses analisis
	Out-standing triwulan Sebel-umnya	triwulan IV-2017				
Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	197	63	260	243	15	2
Perusahaan Pembiayaan	199	71	270	212	9	49
<b>Total</b>	<b>396</b>	<b>134</b>	<b>530</b>	<b>455</b>	<b>24</b>	<b>51</b>

\*) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB

#### 8) Pelaporan Produk

Pada periode triwulan IV-2017, terdapat 466 permohonan pelaporan/persetujuan produk. Secara akumulasi sejak triwulan I-IV 2017, OJK menyelesaikan sebanyak 1.839 pelaporan/persetujuan produk. Rincian pelaporan/persetujuan produk disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II - 33

Rekapitulasi Pelaporan Produk  
sampai dengan triwulan IV-2017

IKNB	Permohonan		Total	Selesai	Telah ditang-gapi*	Proses analisis
	Out-standing triwulan Sebel-umnya	triwulan IV-2017				
Pencatatan Nama Lain	20	7	27	25	2	-
Pencatatan Perubahan Produk	354	85	439	430	9	-
Pencatatan Produk Baru	70	17	87	81	6	-
Persetujuan Perubahan Produk	320	168	488	473	1	14
Persetujuan Produk Baru	107	14	121	117	4	-
Persetujuan Bancas-surance	502	175	677	597	72	8
<b>Jumlah</b>	<b>1.373</b>	<b>466</b>	<b>1.839</b>	<b>1.723</b>	<b>94</b>	<b>2</b>

\*) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB.

9) Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama IKNB

Pada triwulan IV-2017, terdapat 240 permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan disertai dengan 919 yang merupakan *outstanding* dari triwulan sebelumnya. Sebanyak 997 permohonan telah diselesaikan dan sebanyak 162 sisanya masih menunggu penetapan, penjadwalan, dan kelengkapan dokumen. Rincian penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama IKNB disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II - 34

Rekapitulasi Permohonan Penilaian  
Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak  
Utama IKNB

Perusahaan	Permohonan		Total	Selesai	Telah ditang-gapi*	Proses analisis
	Out-standing triwulan Sebel-umnya	triwulan IV-2017				
Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	304	72	376	351	25	-
Dana Pensiun	220	73	293	257	-	36
Perusahaan Pembiayaan	359	75	434	351	83	-
Perusahaan Modal Ventura	23	16	39	22	17	-
Perusahaan Penjaminan	13	4	17	16	1	-
<b>Total</b>	<b>919</b>	<b>240</b>	<b>1.159</b>	<b>997</b>	<b>126</b>	<b>36</b>

\*) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap dan menunggu penjadwalan, atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB.

Selama periode laporan, dari sejumlah 997 penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama IKNB yang telah diselesaikan, terdapat 814 permohonan telah ditetapkan hasilnya.

Adapun dari 814 permohonan yang telah ditetapkan hasilnya tersebut terdiri dari 93 komisaris utama/ketua dewan pengawas, 152 komisaris/dewan pengawas, 77 komisaris independen, 108 direktur utama/ketua pengurus, 277 direktur/anggota pengurus, 48 pemegang saham pengendali, 24 aktuaris, dan 35 auditor internal. Jumlah kelulusan proses penilaian kemampuan dan kepatutan pihak utama dimaksud tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel II - 35** Rekapitulasi Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama IKNB

Jabatan	Perusahaan Asuransi dan Reasuransi		Dana Pensiun		Perusahaan Pembiayaan		Perusahaan Modal Ventura		Perusahaan Penjaminan	
	Lulus	Tidak Lulus	Lulus	Tidak Lulus	Lulus	Tidak Lulus	Lulus	Tidak Lulus	Lulus	Tidak Lulus
Komisaris Utama/ Ketua Dewan Pengawas	26	-	23	3	31	1	5	-	4	-
Komisaris/Dewan Pengawas	26	1	66	4	41	-	10	-	4	-
Komisaris Independen	36	-	-	-	36	3	2	-	-	-
Direktur Utama/Ketua Pengurus	33	-	30	2	32	3	7	-	1	-
Direktur/Anggota Pengurus	101	1	63	9	78	9	13	-	3	-
Pemegang Saham Pengendali	26	-	-	-	14	2	6	-	-	-
Aktuaris	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auditor Internal	33	2	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>305</b>	<b>4</b>	<b>182</b>	<b>18</b>	<b>232</b>	<b>18</b>	<b>43</b>	<b>-</b>	<b>12</b>	<b>-</b>

10) Pelaporan Perubahan Pengurus IKNB

Selama triwulan IV-2017, terdapat 157 pelaporan perubahan pengurus IKNB, disertai dengan sebanyak 422 pelaporan yang merupakan *outstanding* dari triwulan sebelumnya. Dari jumlah dimaksud, sebanyak 558 telah dicatat dan sebanyak 21 sisanya telah ditanggapi dan dalam proses analisis. Rincian pelaporan perubahan pengurus IKNB dari masing-masing industri disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel II - 36** Rekapitulasi Pelaporan Perubahan Pengurus IKNB

IKNB	Permohonan		Total	Selesai	Telah ditanggapi*	Proses analisis
	Out-standing triwulan Sebelumnya	triwulan IV-2017				
Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	111	24	135	133	2	-
Dana Pensiun	177	68	245	226	-	19
Perusahaan Pembiayaan	110	60	170	170	-	-
Perusahaan Modal Ventura	18	1	19	19	-	-
Perusahaan Penjaminan	6	4	10	10	-	-
<b>Total</b>	<b>422</b>	<b>157</b>	<b>579</b>	<b>558</b>	<b>2</b>	<b>19</b>

\*) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB.

11) Pelaporan Syarat Keberlanjutan Pengurus IKNB

Pada periode laporan, terdapat 25 pelaporan syarat keberlanjutan pengurus IKNB disertai dengan sebanyak 282 pelaporan yang merupakan *carry over* dari triwulan sebelumnya. Rincian pelaporan syarat keberlanjutan pengurus IKNB dari masing-masing industri disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel II - 37** Rekapitulasi Pelaporan Syarat Keberlanjutan Pengurus IKNB

IKNB	Permohonan		Total	Selesai	Telah ditanggapi*	Proses analisis
	Out-standing triwulan Sebelumnya	triwulan IV-2017				
Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	78	6	84	82	2	-
Dana Pensiun	96	5	101	90	-	11
Perusahaan Pembiayaan	108	14	122	122	-	-
<b>Total</b>	<b>282</b>	<b>25</b>	<b>307</b>	<b>294</b>	<b>2</b>	<b>11</b>

\*) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB.



### 12) Pelaporan Tenaga Ahli, Aktuaris, dan Auditor Internal

Selama triwulan IV-2017, terdapat 28 pelaporan aktuaris dan auditor internal yang seluruhnya merupakan tenaga ahli dari perusahaan asuransi aktuaris dan auditor internal. Sejak triwulan I-IV 2017 telah diselesaikan pelaporan sebanyak 117 pelaporan dan sebanyak tiga pelaporan sisanya telah ditanggapi.

### 13) Pelaporan Tenaga Kerja Asing

Pada periode laporan, terdapat 41 pelaporan penggunaan tenaga kerja asing dari perusahaan asuransi dan perusahaan pembiayaan. Adapun rincian pelaporan tenaga kerja asing dari masing-masing industri disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II - 38

#### Rekapitulasi Pelaporan Tenaga Kerja Asing IKNB sampai dengan triwulan IV-2017

IKNB	Permohonan		Total	Selesai	Telah ditanggapi*	Proses analisis
	Out-standing triwulan Sebelumnya	triwulan IV-2017				
Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	60	24	84	82	2	-
Perusahaan Pembiayaan	33	16	49	49	-	-
Perusahaan Modal Ventura	2	1	3	3	-	-
<b>Total</b>	<b>95</b>	<b>41</b>	<b>136</b>	<b>134</b>	<b>2</b>	<b>-</b>

\*) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB

### I. Pelayanan Kelembagaan Jasa Penunjang IKNB

OJK melaksanakan fungsi pelayanan kepada perusahaan dan profesi penunjang IKNB seperti perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi. Berikut detail pelayanan selama triwulan IV-2017 meliputi :

Tabel II - 39

#### Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Kelembagaan Jasa Penunjang IKNB

No	Jenis Layanan	Permohonan triwulan IV-2017	Out-standing triwulan III 2017	Status		
				Selesai	Proses*	Batal
1	Pemberian Izin Usaha	2	3	1	4	0
2	Perubahan Kepemilikan	16	45	13	36	12
3	Penambahan Modal	4	15	2	15	2
4	Perubahan Pengurus	35	42	19	53	5
5	Perubahan Alamat	13	12	7	18	0
6	Pembukaan Kantor Cabang	5	3	1	7	0
7	Perubahan Nama	3	2	0	5	0
8	Pendaftaran Tenaga Ahli	22	26	12	36	0
9	Rekomendasi Tenaga Kerja Asing	1	1	0	2	0

\*) Dalam proses meliputi permintaan kelengkapan dokumen, menunggu penjadwalan penilaian kemampuan dan kepatutan (PKK) atau masih proses analisis.

Tabel II - 40

#### Pendaftaran Profesi yang melaksanakan kegiatan di IKNB

Jenis Profesi	Jumlah Profesi yang Terdaftar	Total Jumlah Pendaftaran Profesi)
Akuntan Publik	1	242
Konsultan Aktuaria	1	26
Penilai	13	111
<b>Jumlah</b>	<b>15</b>	<b>379</b>

Berdasarkan POJK Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin, agen penjamin sebagai salah satu lembaga penunjang penjaminan harus terdaftar di OJK. Sementara itu, berdasarkan POJK Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, agen asuransi harus terdaftar di OJK. Sehingga sejak triwulan IV-2017, terdapat pemrosesan pendaftaran agen asuransi dan agen penjamin sebagai berikut:

**Tabel II - 41** Pendaftaran Agen yang melaksanakan kegiatan di IKNB

Jenis Agen	Jumlah Agen yang Terdaftar pada triwulan IV-2017	Total Jumlah Pendaftaran Agen sampai dengan triwulan IV-2017
Agen Asuransi Berbadan Hukum	-	-
Agen Penjamin	1	1
<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

- 1) Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Direksi, Komisaris, Pemegang Saham Pengandali, dan Tenaga Ahli  
Berdasarkan Pasal 21 Ayat (2) POJK Nomor 27 tahun 2016 tersebut, penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan paling lama 30 hari kerja setelah seluruh dokumen permohonan diterima secara lengkap. Penetapan hasil Pengujian Kemampuan dan Kepatutan sepanjang triwulan IV-2017 terlampir sebagaimana pada tabel berikut.

**Tabel II - 42** Jumlah Penetapan Hasil Pengujian Kemampuan dan Kepatutan (PKK)

Jabatan	Pelaksanaan PKK triwulan IV-2017		Jumlah
	Direkomendasikan	Tidak Direkomendasikan	
Pemegang Saham Pengandali	9	1	10
Komisaris	31	1	32
Direksi	29	1	30
Auditor Internal	1	-	1
<b>Jumlah</b>	<b>70</b>	<b>3</b>	<b>73</b>

Jumlah perusahaan penunjang usaha perasuransian pada triwulan IV-2017 adalah 238 perusahaan dengan rincian seperti pada tabel berikut:

**Tabel II - 43** Jumlah Perusahaan Penunjang Berdasarkan Jenis Usaha

No	Jenis Perusahaan	Sampai dengan triwulan IV-2017	triwulan IV-2017		Jumlah
			Pemberian Izin	Pencabutan Izin	
1.	Pialang Asuransi	169	-	1	168
2.	Pialang Reasuransi	42	1	-	43
3.	Jasa Penilai Kerugian	27	-	-	27
	<b>Jumlah</b>	<b>238</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>238</b>

## 2.3 AKTIVITAS PENGEMBANGAN

### 2.3.1 Pengembangan Pengawasan Terintegrasi

Selama periode laporan, OJK menyelesaikan beberapa kajian dan melakukan pengembangan sistem dengan detail sebagai berikut :

- 1) *Roadmap* Pengawasan Terintegrasi.  
*Roadmap* tersebut disusun dengan tujuan untuk memberikan arah kebijakan, pengembangan sistem/metodologi pengawasan, dan penguatan implementasi pengawasan terintegrasi terhadap Konglomerasi Keuangan (KK), sejalan dengan kebijakan umum pengawasan terhadap Sektor Jasa Keuangan yang tertuang dalam *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia Tahun 2015 - 2019. *Roadmap* Pengawasan Terintegrasi 2017-2019 mencakup 3 (tiga) aspek utama, yaitu:
  - a) Kebijakan Pengawasan Terintegrasi terhadap KK;
  - b) Sistem dan Metodologi Pengawasan Terintegrasi terhadap KK; dan
  - c) Implementasi Pengawasan Terintegrasi terhadap KK.
- 2) Penyelesaian lima kajian terkait pengawasan terintegrasi:
  - a) Kajian Manajemen Risiko Likuiditas;
  - b) Kajian *Equity Risk (Market Risk)*;
  - c) Kajian Manajemen Permodalan Terintegrasi;
  - d) Kajian Risiko Konsentrasi; dan
  - e) Kajian Risiko Kredit.

- 3) *Enhancement* Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi (SIPT)

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pengawasan terintegrasi, OJK menyelesaikan pengembangan aplikasi SIPT Tahap III, yaitu modul data keuangan dan FICOR.



Tujuan utama pengembangan aplikasi SIPT adalah untuk membantu Pengawas Terintegrasi dalam melakukan analisis dan menentukan keputusan terkait pengawasan KK. Selanjutnya tujuan spesifik yang ingin dicapai dalam pengembangan aplikasi SIPT modul data dan rasio keuangan ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pengawasan.
- b) Menciptakan keseragaman (standardisasi) dalam pelaksanaan tugas pengawasan.
- c) Mengoptimalkan pengawas dalam menganalisis kondisi konglomerasi keuangan sehingga dapat meningkatkan mutu pengawasan.
- d) Menyediakan informasi untuk kepentingan penelitian dan pengaturan.
- e) Memudahkan audit trail oleh pihak yang berkepentingan.
- f) Meningkatkan keamanan dan integritas data serta informasi.

### 2.3.2 Pengembangan Industri Perbankan

#### A. Pengembangan Pengawasan Bank Umum

Pada triwulan IV-2017, OJK memperkuat proses pengawasan dengan menerbitkan beberapa ketentuan internal panduan Pengawas seiring dengan perkembangan ragam dan kompleksitas bisnis bank. Selain itu, proses konversi ketentuan Pengawasan Bank yang semula masih dalam bentuk ketentuan Bank Indonesia dikonversi menjadi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Proses konversi tersebut perlu dilakukan untuk memperkuat dasar hukum bagi Pengawas Bank dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya seiring dengan beralihnya kewenangan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, proses bisnis pengawasan dan sistem informasi pendukung pengawasan sedang dalam evaluasi untuk meningkatkan kualitas dan membantu proses pengawasan Bank Umum.

#### B. Pengembangan Pengawasan BPR/BPRS

Pada triwulan IV-2017, OJK menyelesaikan dua kajian pengembangan pengawasan BPR yaitu:

1. Kajian *Early Warning System* (EWS)
 

EWS adalah instrumen yang mendukung pelaksanaan proses pengawasan untuk mendeteksi secara dini adanya perkembangan yang tidak diinginkan atau bahkan membahayakan kelangsungan usaha BPR secara dini sesuai dengan panduan. Faktor-faktor yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR diantaranya dapat disebabkan oleh permasalahan likuiditas, tingginya kegagalan kredit atau kinerja yang buruk. EWS merupakan alat bantu bagi Pengawas BPR dalam mengambil keputusan pengawasan dan dalam melihat kondisi BPR melalui rasio-rasio yang terdapat dalam sistem EWS. Berdasarkan hasil kajian, penggunaan EWS yang paling optimal adalah dengan memadukan analisis keterkaitan antar rasio dengan pemahaman dan pengalaman dari Pengawas BPR, sehingga tindak pencegahan permasalahan pada BPR dapat dilakukan dengan baik.
2. Kajian Sistem Informasi Pengawasan (SIP) BPR untuk Modul Pemahaman Terhadap BPR (KYBPR)
 

Kajian ini bertujuan sebagai *user requirement* pengembangan Sistem Informasi Pengawasan (SIP) BPR modul KYBPR. SIP dimaksudkan untuk membantu pengawas BPR serta meminimalisir *human error* dalam penyusunan KYBPR. Selain itu, SIP juga dapat menjadi media penyimpanan dokumen KYBPR yang terstruktur dan terorganisir untuk kesinambungan proses pengawasan serta memudahkan *audit trail*.

### 2.3.3 Pengembangan Industri Pasar Modal

Tim Pengembangan Pasar Surat Utang (TPPSU) yang merupakan koordinasi pengembangan pasar Surat Utang antara OJK dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan PT Penilai Harga Efek Indonesia guna membenah untuk memperkuat performa Pasar Surat Utang melalui perbaikan infrastruktur berkelanjutan.

Program TPPSU yang sedang berjalan saat ini adalah:

- 1) Pengembangan *Electronic Trading Platform* Surat Utang (ETP)
- 2) Pengembangan Pasar Surat Utang Regional
- 3) Pengembangan Pasar dan Produk Surat Utang Indonesia Government Bond Futures (IGBF).

Pada triwulan IV-2017, OJK melakukan Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu di Politeknik Ambon. Berdasarkan hasil survei dari 195 responden, sebanyak 195 responden atau sebesar 100% yang semakin paham terhadap produk dan layanan Pasar Modal. OJK juga melaksanakan sosialisasi terkait POJK Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek di Jakarta. Sosialisasi ini dilaksanakan di Jakarta. Berdasarkan hasil survei dari 102 responden, sebanyak 96 responden atau sebesar 94,10% yang semakin paham terhadap materi yang disampaikan oleh Narasumber.

Dalam rangka pengembangan infrastruktur Pasar Modal (TPIP) yang merupakan koordinasi pengembangan, baik disisi regulasi maupun sistem, antara OJK dengan PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia guna membenah untuk memperkuat performa

Pasar Modal OJK melaksanakan beberapa program, antara lain:

- a. Penyempurnaan Sistem Kliring dan Penyelesaian Pasar Modal:
  - 1) *Enhancement C-Best Next Generation*
  - 2) *Enhancement e-Clears* (Juni 2017)
  - 3) Pengembangan Infrastruktur Pasar REPO, Third Party Repo
  - 4) Implementasi *General Clearing Member* (GCM)
- b. Kegiatan Pendukung:
  - 1) Percepatan Siklus Penyelesaian Transaksi Bursa Dari T+3 ke T+2
  - 2) *Securities Financing*
  - 3) Implementasi *E-Voting* (Desember 2017)
  - 4) Studi Penggunaan Bank Sentral Dalam Penyelesaian Dana di Pasar Modal Secara Penuh (*Full Central Bank Maney*)
  - 5) Studi Layanan Sentralisasi Kliring OTC *Derivatives*.

### 2.3.4 Pengembangan IKNB

#### A. Program 1000 Aktuaris

Program 1000 Aktuaris merupakan program yang dicanangkan OJK pada pertengahan 2013. Program ini bertujuan mempercepat jumlah aktuaris sehingga perkiraan kebutuhan profesional aktuaris untuk IKNB dapat terpenuhi. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam program ini adalah sosialisasi dan promosi, perkuliahan singkat sertifikasi aktuaris yang bekerjasama dengan Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI), serta pendidikan dan pelatihan aktuaris keahlian khusus asuransi umum. Pada triwulan IV-2017, dilakukan monitoring atas kegiatan Program 1000 Aktuaris. Jumlah aktuaris per Desember 2017, yaitu Ajun Aktuaris/tingkatan Associate (ASAI) sebanyak 255 orang dan Aktuaris/tingkatan Fellowship (FSAI) sebanyak 259 orang.

#### B. Standar Kompetensi Kinerja Nasional Indonesia Bidang Asuransi (SKKNI)

Dalam rangka mendukung penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan Kompetensi Kerja Nasional Indonesia serta pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, dibentuk suatu Tim Perumus dan Tim Verifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Perasuransian. Adapun kegiatan yang telah dilakukan terkait SKKNI selama triwulan IV-2017, yaitu pembahasan draf Keputusan Dewan Komisiner mengenai Penetapan Jenjang Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia di Sektor Jasa Keuangan.

## 2.4 STABILITAS SISTEM KEUANGAN

*Pada triwulan IV-2017, stabilitas sistem keuangan nasional terjaga dengan baik, didukung oleh kinerja industri jasa keuangan yang solid serta profil risiko lembaga jasa keuangan yang terkendali. Sejalan dengan outlook perekonomian domestik yang membaik ke depan, OJK terus mendorong agar sektor jasa keuangan berkontribusi semakin optimal dalam mendorong pertumbuhan, dengan tetap memastikan terjaganya stabilitas sistem keuangan.*

### 2.4.1 Pasar Keuangan dan Lembaga Jasa Keuangan

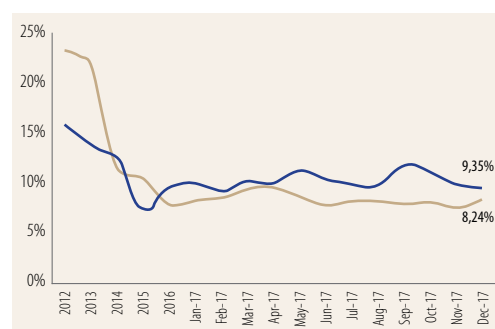
OJK menilai bahwa secara umum stabilitas sektor jasa keuangan dalam negeri pada triwulan IV-2017 dalam kondisi terjaga. Indikator lembaga jasa keuangan terpantau stabil dengan kinerja intermediasi yang mencatat sejumlah perbaikan. Meskipun masih terdapat beberapa *downside risk* dari eksternal, seperti rencana pengetatan kebijakan moneter negara-negara utama dan meningkatnya ketegangan geopolitik. Secara keseluruhan tingkat risiko

sektor jasa keuangan di triwulan terakhir tahun 2017 ini terpantau menurun dibandingkan kondisi awal tahun.

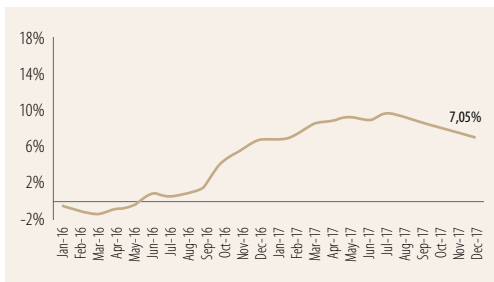
Kinerja pasar keuangan domestik terus melanjutkan penguatan. Pada triwulan IV-2017, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia ditutup pada level 6.355,65 atau menguat 7,71% *qta*. Investor nonresiden masih mencatatkan *net sell* di pasar saham sebesar Rp29,1 triliun. Namun demikian, *net sell* tersebut terkompensasi dengan semakin besarnya peran investor domestik yang porsinya meningkat menjadi 48,70% pada triwulan IV-2017 (triwulan III-2017: 47,77%). Sementara itu, di pasar Surat Berharga Negara (SBN), imbal hasil SBN menunjukkan tren penurunan pada triwulan IV-2017 dan investor nonresiden membukukan *net buy* signifikan sebesar Rp16,8 triliun.

Kinerja intermediasi sektor jasa keuangan pada triwulan IV-2017 mencatat sejumlah perkembangan positif sejalan dengan mulai terlihatnya arah perbaikan ekonomi domestik pada paruh kedua 2017. Kredit yang disalurkan perbankan tercatat tumbuh sebesar 8,24% *yoy*. Angka ini meningkat dibandingkan 7,87% pada akhir tahun sebelumnya. Sementara itu, di industri pembiayaan, pertumbuhan piutang pembiayaan tercatat sebesar 7,05% *yoy*, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,53%.

**Grafik II - 6** Pertumbuhan Kredit dan Dana Pihak Ketiga Perbankan



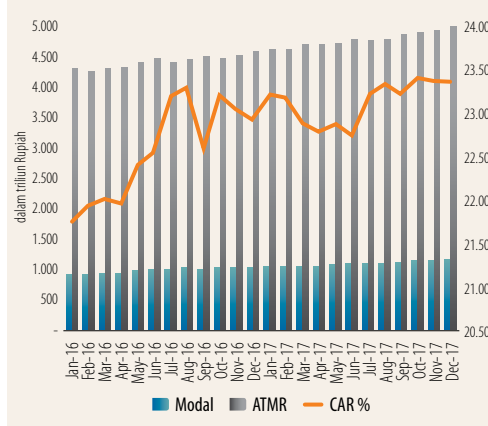
**Grafik II - 7** Pertumbuhan Piutang Pembiayaan Perusahaan Pembiayaan



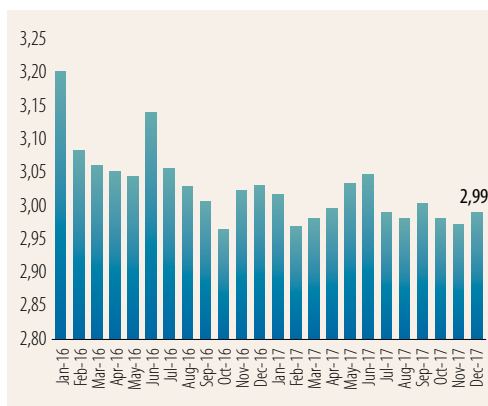
Pemanfaatan pasar modal Indonesia sebagai sumber dana korporasi melanjutkan peningkatan. Kondisi ini turut didukung oleh meningkatnya kepercayaan pasar seiring kenaikan *credit rating* Indonesia oleh Standard & Poor's dan Fitch Ratings pada tahun 2017. Sepanjang 2017, penghimpunan dana di pasar modal telah mencapai Rp254,5 triliun, atau meningkat sebesar 30,19% dibandingkan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan terdapat 161 penawaran umum 2017, meningkat signifikan dibandingkan 126 penawaran umum tahun 2016. Dari nilai penghimpunan dana di pasar modal tersebut, proporsi lembaga jasa keuangan menurun dari 45,03% menjadi 43,68%. Hal ini mengindikasikan peningkatan efektivitas intermediasi keuangan oleh pasar modal domestik.

Permodalan industri jasa keuangan terpantau pada level yang memadai untuk mendukung ekspansi kredit/pembiayaan sekaligus mengantisipasi potensi peningkatan risiko di masa yang akan datang. Hal ini tercermin

**Grafik II - 9** Capital Adequacy Ratio (CAR) Perbankan

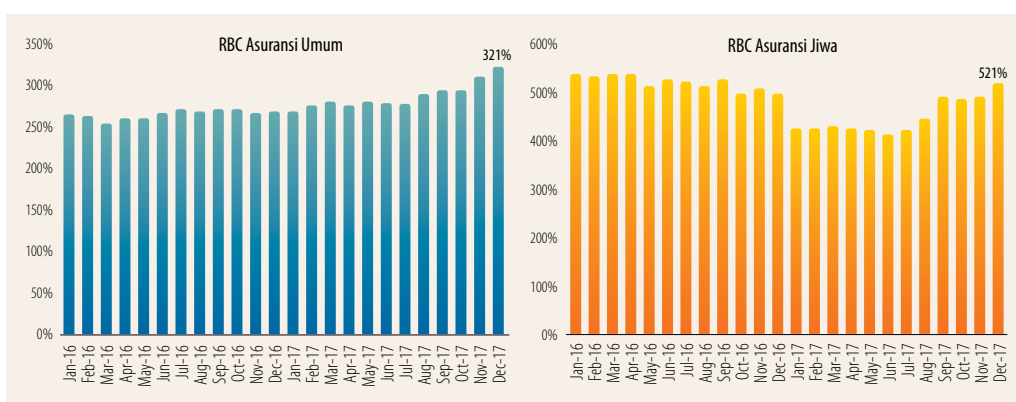


**Grafik II - 10** Gearing Ratio Perusahaan Pembiayaan



dari *Capital Adequacy Ratio* (CAR) perbankan serta *Risk-Based Capital* (RBC) industri asuransi umum dan asuransi jiwa yang jauh berada di atas ketentuan minimum. CAR tercatat sebesar 23,36%. Sementara itu, RBC asuransi umum dan

**Grafik II - 8** Risk-Based Capital (RBC) Industri Perasuransian

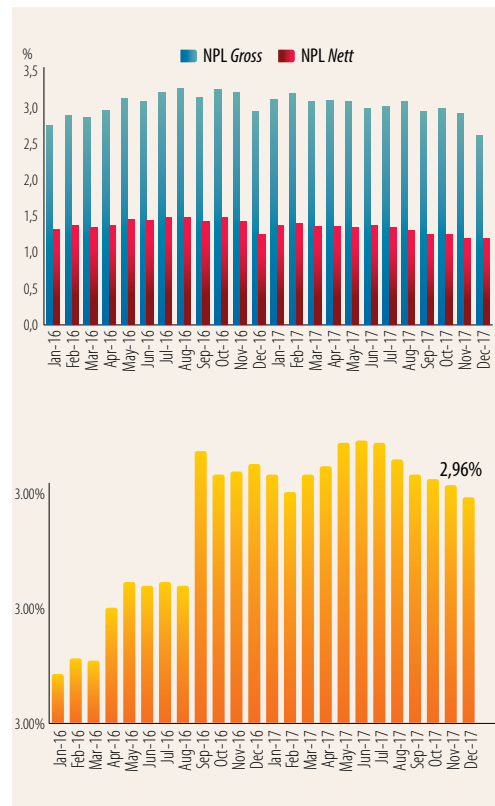


asuransi jiwa masing-masing tercatat sebesar 321% dan 521%. *Gearing ratio* perusahaan pembiayaan sebesar 2,99 kali, jauh di bawah ketentuan maksimum 10 kali.

Dari sisi likuiditas lembaga jasa keuangan, alat likuid perbankan dinilai memadai untuk mengantisipasi potensi risiko likuiditas. Pada akhir triwulan-IV 2017, rasio Alat Likuid terhadap *Non-Core Deposit* (AL/NCD) tercatat sebesar 103,06% dan rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) tercatat masih tinggi pada level 18,09%. Sesuai siklusnya, terdapat kecenderungan penurunan tingkat likuiditas dibandingkan triwulan III-2017, di mana penyaluran kredit pada akhir tahun cenderung meningkat signifikan.

Pada triwulan IV-2017, rasio kredit/pembiayaan bermasalah lembaga jasa keuangan terpantau menurun sejalan dengan konsolidasi yang dilakukan oleh perbankan dalam mengelola risiko kredit. Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) *gross* dan *net* perbankan per Desember 2017 tercatat masing-masing sebesar 2,59% dan 1,11% (September 2017: 2,93% *gross* dan 1,23% *net*). Nilai nominal restrukturisasi kredit dan hapus buku di industri perbankan masih melanjutkan peningkatan, namun dengan pertumbuhan yang semakin melambat. Sejalan dengan penurunan NPL, tingkat *Non-Performing Financing* (NPF) perusahaan pembiayaan juga menunjukkan arah penurunan dan pada akhir Desember 2017 tercatat pada level 2,96% (September 2017: 3,18%).

**Grafik II - 11** Rasio NPL Perbankan dan NPF Perusahaan Pembiayaan



Pada triwulan IV-2017, risiko pasar lembaga jasa keuangan terpantau relatif rendah seiring berlanjutnya penguatan di pasar keuangan domestik. Posisi Devisa Neto (PDN) sektor perbankan per Desember 2017 tercatat sebesar 2,10%, jauh di bawah ambang batas maksimum sebesar 20%. Sementara itu, nilai investasi industri reksa dana, perasuransian, dan dana pensiun juga melanjutkan peningkatan. Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana pada triwulan IV-2017 tumbuh sebesar 10,50% dibandingkan akhir triwulan sebelumnya. Sementara itu, nilai investasi industri perasuransian dan dana pensiun masing-masing meningkat sebesar 5,69% dan 1,18% pada periode yang sama.

#### 2.4.2 Arah Kebijakan dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

OJK senantiasa memantau perkembangan terkini di perekonomian dan pasar keuangan,

baik di lingkup global maupun domestik, sehingga potensi risiko di sektor jasa keuangan domestik dapat diidentifikasi sedini mungkin dan langkah-langkah yang diperlukan dapat segera diambil. Kerjasama dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait juga terus diperkuat agar kinerja industri keuangan dan stabilitas sistem keuangan nasional tetap terjaga.

Penguatan di pasar keuangan domestik berpotensi akan terus berlanjut, didukung oleh membaiknya prospek ekonomi domestik maupun kepercayaan global. Meskipun demikian, OJK tetap memonitor pergerakan pasar, khususnya yang terkait dengan aliran modal investor nonresiden. Faktor-faktor risiko yang terutama berasal dari eksternal tetap perlu diwaspadai, antara lain terkait pengetatan kebijakan moneter di negara-negara maju, *rebalancing* perekonomian Tiongkok, dinamika konflik geopolitik di beberapa bagian dunia, dan pergerakan harga komoditas.

OJK memandang bahwa masih terdapat ruang bagi sektor jasa keuangan untuk berkontribusi lebih optimal lagi dalam memacu pertumbuhan ekonomi domestik, terlebih dengan tingkat permodalan dan likuiditas lembaga jasa keuangan yang sangat memadai. Kinerja intermediasi keuangan pada tahun 2018 diperkirakan mencatat perbaikan. OJK memproyeksikan pertumbuhan kredit dan DPK akan berada pada kisaran 10%-12%. Penghimpunan dana di pasar modal juga diperkirakan akan tetap tinggi.

OJK terus memantau perkembangan profil risiko lembaga jasa keuangan, serta memastikan bahwa lembaga jasa keuangan telah mengambil langkah-langkah yang memadai untuk memitigasi risiko. Ke depan, sejalan dengan membaiknya prospek dan kegiatan ekonomi dalam negeri serta konsolidasi kredit yang dilakukan oleh perbankan, risiko kredit diperkirakan akan tetap terkendali.

### 2.4.3 Koordinasi Antarlembaga dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Nasional

Pada triwulan IV-2017, OJK melanjutkan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait dalam upaya memastikan stabilitas sistem keuangan nasional tetap terjaga, termasuk melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Sepanjang triwulan IV-2017, keempat lembaga anggota KSSK (Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan) telah melaksanakan sejumlah agenda, yaitu Simulasi Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, Rapat Persiapan Rapat KSSK, dan Rapat KSSK. Di samping itu, telah dilaksanakan rapat persiapan koordinasi antarlembaga anggota KSSK terkait pembentukan *holding* Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lembaga keuangan.

## 2.5 EDUKASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

### 2.5.1 Inklusi Keuangan

#### Penyusunan *Generic Model* Tabungan Bagi Mahasiswa dan Pemuda

Program inklusi keuangan ini ditujukan bagi mahasiswa serta pemuda dengan golongan usia 18-30 tahun. Hal ini didasari oleh adanya potensi jumlah kelompok mahasiswa dan golongan usia muda yang besar. Data Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa aktif berdasarkan jenjang pendidikan D3, D4, S1, dan S2 pada tahun 2016 adalah sebanyak 6,58 juta. Selain itu, jumlah penduduk dengan rentang usia 16 s.d. 30 tahun berdasarkan Badan Pusat Statistik adalah sebanyak 64.308.600 jiwa atau sebesar 24,8% dari total penduduk Indonesia. Pada triwulan IV-2017, telah disusun *generic model* Tabungan Mahasiswa dan Pemuda (SiMuda) dengan melibatkan perwakilan dari Industri



Perbankan, Industri Keuangan Non Bank dan Pasar Modal.

### **Pusat Edukasi, Layanan Konsumen dan Akses Keuangan UMKM (PELAKU)**

PELAKU merupakan gerai informasi di kantor OJK di daerah sebagai sarana penyampaian informasi keuangan, penanganan pengaduan, serta peningkatan akses keuangan khususnya sektor UMKM. PELAKU secara resmi diluncurkan 22 Desember 2015 di Jakarta dengan tujuan: (1) Menyediakan sarana bagi konsumen dan masyarakat di daerah untuk memperoleh informasi mengenai Lembaga Jasa Keuangan (LJK) serta produk dan jasa keuangan; (2) Menyediakan sarana bagi konsumen dan masyarakat di daerah untuk menyampaikan informasi, pertanyaan, dan pengaduan di sektor jasa keuangan; serta (3) Fasilitasi dalam rangka pemberdayaan UMKM dan penyediaan akses ke sektor jasa keuangan.

Pada triwulan IV-2017, telah dilakukan *branding* Gerai PELAKU serta implementasi sistem PELAKU di lima KOJK, yaitu KOJK Provinsi Sulawesi Tenggara, KOJK Provinsi Aceh, KOJK Provinsi Kepulauan Riau, KOJK Jember dan KOJK Kediri. Adapun total Gerai PELAKU sampai dengan periode pelaporan yaitu sebanyak 19 gerai yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

### **Kegiatan Pengukuhan dan *Coaching Clinic* TPAKD**

Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) merupakan forum koordinasi antar instansi dan *stakeholders* terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Penyusunan program-program TPAKD dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal utama seperti karakteristik dan kebutuhan daerah, potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan dengan produk dan layanan jasa keuangan, peningkatan usaha sektor produktif, pengembangan UMKM serta usaha rintisan (*start-up business*) lainnya.

Selama triwulan IV-2017, telah dikukuhkan TPAKD Kota Sukabumi, TPAKD Kota Bitung, TPAKD Kota Tasikmalaya, TPAKD Kabupaten Katingan, TPAKD Kabupaten Gunung Kidul, TPAKD Kabupaten Kulon Progo, TPAKD Kota Pekanbaru, TPAKD Provinsi Gorontalo, TPAKD Kabupaten Kubu Raya, dan TPAKD Provinsi Maluku Utara. Jumlah TPAKD yang telah terbentuk sampai dengan triwulan IV-2017 sebanyak 61 TPAKD dengan rincian 30 TPAKD tingkat provinsi, 21 TPAKD tingkat kabupaten dan 10 TPAKD tingkat kota. Selain itu, pada periode triwulan IV-2017 telah dilaksanakan pula empat kali *coaching clinic* TPAKD yaitu Kota Bitung, Kota Pekanbaru, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Sulawesi Selatan (Makassar).

### **Perkembangan Program Layanan Keuangan Mikro (Laku Mikro)**

Layanan Keuangan Mikro (Laku Mikro) merupakan salah satu program inklusi keuangan yang bertujuan untuk membuka akses keuangan masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan mikro. Dalam rangka meningkatkan implementasi program Laku Mikro di masyarakat, telah dilakukan penyempurnaan konsep Laku Mikro, sebagaimana hasil diskusi bersama satuan kerja terkait di internal OJK dan perwakilan Lembaga Jasa Keuangan (LJK). Hasil penyempurnaan tersebut disampaikan kepada satuan kerja terkait di OJK serta LJK melalui sosialisasi penyesuaian skema program Laku Mikro. adapun penyesuaian skema sebagai berikut:

- |            |  |
|------------|--|
| Laku Mikro | <ul style="list-style-type: none"> <li>● suatu program pemasaran bersama produk keuangan mikro dari industri Perbankan, Non Bank, dan Pasar Modal berupa produk Simpanan, Pembiayaan, Investasi dan Asuransi yang disertai dengan Layanan Edukasi dan Konsultasi.</li> </ul>   |
| Konsep     | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Merupakan model pemasaran bersama untuk mempermudah penjualan berbagai produk keuangan mikro.</li> <li>● Masing-masing LJK bertanggung jawab atas produk keuangan yang diterbitkan.</li> <li>● Tidak mengubah ketentuan, pengaturan, dan pengawasan terkait produk keuangan.</li> </ul> |

Pada triwulan IV-2017, telah dilaksanakan kegiatan *capacity building* Laku Mikro. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan agen-agen Laku Mikro di daerah. Kegiatan *capacity building* dihadiri oleh 70 tenaga pemasar Laku Mikro dari 10 *entry gate* Laku Mikro. Dalam kegiatan ini, para agen Laku Mikro mendapatkan pembekalan mengenai program Laku Mikro, Laku Pandai, dan Asuransi Mikro. Dengan adanya penyesuaian konsep Laku Mikro, untuk pencapaian kinerja program Laku Mikro akan dinilai berdasarkan peningkatan jumlah *distribution channel* yang menjual produk mikro antara lain kantor, *outlet* atau agen.

#### Bantuan Sosial Non Tunai

Sebagai bentuk dukungan OJK terhadap program Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendagri), selama triwulan IV-2017 OJK terlibat dalam proses persiapan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang merupakan bagian dari BSNT. Adapun keterlibatan OJK dalam pembahasan dimaksud adalah terkait kesiapan jumlah agen dan mekanisme sosialisasi BPNT.

#### Forum Koordinasi Inklusi Keuangan (FKIK) OJK

Selama triwulan IV-2017, telah dilaksanakan rapat koordinasi FKIK OJK dengan agenda sebagai berikut:

- Evaluasi dan update realisasi rencana kerja inklusi keuangan.
- Sosialisasi POJK Nomor 76/POJK.07/2016 dan SEOJK Nomor 30/SEOJK.07/2017 dan 31/SEOJK.07/2017.
- Update program kerja terkait inklusi keuangan yang telah dilakukan oleh satker dalam keanggotaan FKIK.

- Penyampaian informasi terkait capaian pelaksanaan Program Bulan Inklusi Keuangan Oktober 2017.

#### Bulan Inklusi Keuangan

Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan serta akselerasi penambahan rekening produk dan jasa keuangan, OJK bersama dengan industri jasa keuangan menginisiasi "Bulan Inklusi Keuangan". Sebagai bentuk implementasi Peraturan Presiden (Perpres) No. 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dan sebagai lanjutan Bulan Inklusi Keuangan 2016, diselenggarakan kembali kegiatan "Bulan Inklusi Keuangan" selama bulan Oktober 2017 dengan tema "Akselerasi Inklusi Keuangan Melalui *Digital Financial Inclusion* (DFI)". Adapun kegiatan inklusi keuangan oleh industri Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, Dana Pensiun dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dilakukan dengan aktivitas dalam bentuk penjualan produk/jasa keuangan berinsentif (*discount*, bonus dan *reward*), kegiatan edukasi, dan kampanye program inklusi keuangan. Kegiatan ini juga dilakukan di Kantor Regional/Kantor OJK (KR/KOJK) bekerja sama dengan industri keuangan dalam bentuk *exhibition*, edukasi keuangan, sosialisasi, dan seminar nasional. Selama periode pelaksanaan Bulan Inklusi Keuangan, terdapat peningkatan pada partisipasi LJK, jumlah kegiatan, jumlah program, dan pembukaan rekening dari pelaksanaan Bulan Inklusi Keuangan 2017 sebagai berikut:

Tabel II - 44 Capaian Kegiatan Bulan Inklusi Keuangan

No.	Jenis	Capaian		Peningkatan
		2016	2017	
1.	Partisipasi LJK	83 LJK	340 LJK	309,6%
2.	Program	196	399	103,6%
3.	Kegiatan	633	1.113	75,8%
4.	Kota Pelaksanaan Kegiatan	111	171	54%
5.	Pembukaan Rekening	3.545.812	5.489.145	54,8%

Dengan adanya kegiatan Bulan Inklusi Keuangan sebagai agenda nasional yang dilakukan secara berkesinambungan pada bulan Oktober setiap tahunnya, diharapkan akan menumbuhkan budaya menabung melalui komitmen dan dukungan dari seluruh *stakeholders* dalam rangka implementasi Perpres tentang SNKI. Hal ini tentunya akan memberikan dampak yang positif khususnya dalam pemenuhan dan peningkatan akses keuangan bagi seluruh masyarakat Indonesia serta pencapaian target indeks inklusi keuangan sebagaimana tercantum dalam SNKI.

### Kompetisi Inklusi Keuangan (KOINKU)

KOINKU merupakan kompetisi yang terbuka untuk seluruh masyarakat dalam rangka mendapatkan model bisnis sektor jasa keuangan yang dapat menjadi barometer model bisnis akses keuangan serta dapat diimplementasikan di sektor jasa keuangan baik sektor perbankan, industri keuangan non bank, dan pasar modal. OJK menyelenggarakan Tema Kompetisi Inklusi Keuangan (KOINKU) 2017 dengan tema "Model Inklusi Keuangan Berbasis Digital dalam rangka Meningkatkan Akses Keuangan" dengan tujuan penyelenggaraan kompetisi ini adalah sebagai berikut (1) Mendorong adanya inovasi ide model bisnis akses keuangan yang bermanfaat bagi tumbuh kembangnya sektor jasa keuangan serta memberikan manfaat bagi peningkatan taraf hidup konsumen dan/atau masyarakat; (2) Mendapatkan model bisnis sektor akses keuangan baru yang dapat menjadi barometer model bisnis akses keuangan yang dapat diimplementasikan di sektor jasa keuangan baik sektor perbankan, industri keuangan non bank, dan pasar modal; dan (3) Mendorong adanya rekomendasi gagasan inovatif dan solutif dalam rangka meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat.

KOINKU 2017 mengundang seluruh unsur masyarakat untuk memberikan pemikiran dan ikut berpartisipasi guna membangun dan mengembangkan inklusi keuangan di Indonesia. Jumlah karya tulis yang diterima sampai dengan batas akhir penerimaan adalah

sebanyak 181 karya tulis. Berikut merupakan tiga pemenang dari masing-masing kategori sebagai berikut:

- a. Pemenang kategori umum adalah:

**Tabel II - 45** Pemenang Kategori Umum

No	Judul
1	Penerapan Teknologi Geospasial Dalam Bidang Perbankan dan Non Perbankan
2	Optimalisasi Fungsi Agen Laku Pandai, Sistem Aplikasi Laku Pandai Sebagai Solusi Akses Keuangan Rakyat
3	Dampak Penggunaan Simba dan Kualitas Layanan Elektronisnya Terhadap Peningkatan Akses Keuangan

- b. Pemenang kategori akademisi adalah:

**Tabel II - 46** Pemenang Kategori Akademisi

No	Judul
1	Optimalkan Kredit Usaha-Mengintegrasikan FinTech dengan Data Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan dalam Bentuk Aplikasi 'LOFIN' guna Membangun Kepercayaan Kepada Para Pelaku Usaha Mikro
2	Sistem Pusat Informasi Koperasi (S-PIK): Untuk Meningkatkan Kualitas Keputusan Investasi Masyarakat di Koperasi
3	Sistem <i>One Stop Postal Financial Service</i> sebagai <i>e-money</i>

- c. Pemenang kategori PUJK adalah:

**Tabel II - 47** Pemenang Kategori PUJK

No	Judul
1	Menyatukan Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia Menggunakan Laku Pandai Berbasis Desa
2	Solusi teknologi Hybrid BRISat: <i>Connecting the Unconnected</i>
3	Tyme Digital Inovasi Berbasis Digital Persembahkan PT Bank Commonwealth untuk Mendukung Inklusi Keuangan di Indonesia

### Workshop Pengembangan Model Bisnis Keagenan yang Berkelanjutan

Program Laku Pandai merupakan salah satu inisiatif OJK dalam rangka memperluas akses keuangan melalui kerja sama dengan pihak lain (agen bank) dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi. Tujuan program dimaksud adalah menyediakan produk-produk keuangan yang sederhana, mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang belum dapat menjangkau layanan keuangan. Dalam perkembangannya, Laku Pandai tidak hanya menjadi perpanjangan tangan bank untuk menyediakan akses bagi

masyarakat guna mendapatkan produk dan jasa keuangan, namun juga menjadi model bisnis baru bagi industri perbankan. Namun demikian, Dalam melaksanakan program Laku Pandai, beberapa kendala yang masih terjadi di lapangan, seperti tingkat pemahaman agen yang masih rendah, belum adanya struktur insentif yang menguntungkan bagi para agen dan pelaku industri jasa keuangan, serta jumlah dan volume transaksi yang masih rendah yang menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan keberlangsungan model bisnis keagenan dimaksud. Strategi yang kuat dan efektif dari model bisnis keagenan cukup penting untuk dikembangkan sehingga dapat digunakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan kondisi pasar di Indonesia. Dalam rangka mendukung pengembangan dan mendorong keberlangsungan bisnis keagenan, OJK bekerja sama dengan MicroSave melaksanakan *workshop* terkait model bisnis agen di Jakarta dengan total jumlah peserta 150 orang. Pelaksanaan *workshop* ini diharapkan semakin mendorong akses inklusi keuangan kepada seluruh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

## 2.5.2 Literasi dan Edukasi Keuangan

### Lokakarya Dalam Rangka Sinergi Pemerintah dan Lembaga Dalam Peningkatan Perekonomian Daerah dan Pencapaian Inklusi Keuangan

Lokakarya tersebut dilaksanakan bekerja sama dengan Bank Indonesia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI), dan satuan kerja terkait di Manado. Peserta sebanyak 136 orang yang terdiri dari perwakilan Pemerintah Daerah Sulawesi Utara, pelaku usaha jasa keuangan perbankan, IKNB, dan pasar modal, perwakilan SWI Pusat/Daerah, perwakilan Kementerian/Lembaga/Instansi, dan akademisi. Dasar pemilihan kota Manado, Sulawesi Utara sebagai lokasi penyelenggaraan lokakarya keuangan implementasi SNKI yaitu tingkat literasi keuangan masyarakat Sulawesi Utara (28,73%)

lebih rendah dari indeks literasi keuangan nasional (29,7%). Kegiatan lokakarya dilanjutkan dengan kunjungan kepada empat orang agen Laku Pandai di wilayah Sulawesi Utara dalam rangka monitoring efektivitas pelaksanaan Laku Pandai sebagai inisiatif Pilar 3 Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi Keuangan.

### Edukasi Keuangan bagi Komunitas

OJK melaksanakan kegiatan edukasi keuangan bagi komunitas Nelayan di Nias, Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) di Sumbawa, Ibu Rumah Tangga di Jakarta dan Bandung, serta UMKM di Palu dengan total peserta sebanyak 688 peserta. Para peserta edukasi tersebut diberikan materi mengenai Pengenalan OJK, IJK dan Waspada Investasi Ilegal, Pengenalan Kredit Usaha Rakyat, Pengenalan Laku Pandai, Asuransi Nelayan dan Perencanaan Keuangan serta Kewirausahaan.

### Edukasi Keuangan bagi Pelajar dan Mahasiswa

OJK melaksanakan kegiatan edukasi keuangan bagi Pelajar dan Mahasiswa di Civitas Akademika di Sekolah Bisnis Manajemen (SBM) ITB, Bandung; Ikatan Mahasiswa Hukum Ekonomi (IMAHMI) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (FH USU) di Medan; Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia di Banjarmasin serta rangkaian kegiatan OJK *Goes To Campus* di Bandung. Kegiatan edukasi tersebut dihadiri oleh sekitar 840 peserta. Para peserta edukasi tersebut diberikan materi mengenai Pengenalan OJK, IJK dan Waspada Investasi Ilegal, Pengenalan *Financial Technology* Pengenalan Produk dan Jasa Keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan serta Perencanaan Keuangan. Selain kegiatan tersebut dilaksanakan juga peluncuran Galeri Investasi Mobile (GIM) disertai dengan kegiatan Seminar Pasar Modal di Indonesia.

### Sinergi Edukasi Keuangan OJK Dengan Perguruan Tinggi di Wilayah Jakarta dan Sekitarnya

OJK melaksanakan kegiatan Sinergi Edukasi Keuangan OJK dengan Perguruan Tinggi (*Training of Trainers / ToT*) wilayah Jakarta



dan sekitarnya di Jakarta. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 55 dekan maupun dosen yang merupakan perwakilan dari 26 perguruan tinggi dengan kualifikasi minimal Sarjana Strata 2 dengan pengalaman mengajar sekurangnya lima tahun dan mengajar pada salah satu Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU). Tujuan pelaksanaan kegiatan ToT dosen tersebut adalah untuk memperkenalkan materi buku seri literasi keuangan tingkat perguruan tinggi kepada dosen perwakilan perguruan tinggi di wilayah Indonesia, agar materi dapat disampaikan kepada mahasiswa dan dosen lainnya untuk *multiplier effect* yang lebih luas dan menyelaraskan materi buku seri literasi keuangan tingkat perguruan tinggi ke dalam kurikulum mata kuliah dasar di perguruan tinggi. Peserta ToT menerima materi buku seri literasi keuangan tingkat perguruan tinggi dari para narasumber yaitu OJK dan Pengawasan Mikroprudensial, Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Lembaga Pembiayaan, Dana Pensiun, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Industri Jasa Keuangan Syariah, dan Perencanaan Keuangan.

#### Keikutsertaan dalam Rangkaian Kegiatan OECD/INFE di New Delhi

Sebagai *full member* pada Organisation for Economic Co-operation and Development/ International Network on Financial Education (OECD/INFE), OJK ikut serta dalam kegiatan OECD/INFE *Working Groups Meeting, Technical Committee Meeting, High-level Global Symposium on Implementing Effective Financial Literacy Policies in a Changing Financial Landscape, dan Roundtable on Financial Literacy and Inclusion in Asia and the Pacific*. Beberapa tindak lanjut yang diusulkan berdasarkan keikutsertaan tersebut terkait literasi dan inklusi keuangan serta pengaturan kebijakan di bidang edukasi dan perlindungan konsumen, yaitu:

- Program edukasi keuangan diarahkan untuk mendukung pengembangan usaha, tidak hanya pengelolaan keuangan individu. Metode dan materinya perlu mempertimbangkan peningkatan daya beli

peserta (peningkatan pendapatan sesuai mata pencaharian);

- Materi edukasi keuangan diarahkan untuk menghindarkan masyarakat dari *loan shark* atau rentenir dan investasi ilegal.
- Memasukkan materi literasi keuangan dalam kurikulum di sekolah untuk seluruh tingkat pendidikan formal.

Program inklusi perlu difokuskan untuk mendorong pemanfaatan produk keuangan oleh UMKM yang telah berjalan, bekerja sama dengan LJK dan pemerintah daerah. Pengembangan produk pinjaman yang tepat bagi UMKM (pinjaman cepat dan mekanisme yang mudah) perlu disertai pendampingan pengelolaan keuangan untuk meningkatkan kemampuan mengembalikan pinjaman. Diperlukan koordinasi yang lebih intensif dengan pengawas jasa keuangan di seluruh sektor untuk meningkatkan kepatuhan terhadap POJK dan SEOJK yang mewajibkan pelaksanaan dan pelaporan kegiatan peningkatan literasi dan inklusi keuangan.

#### World Investor Week (WIW) Tahun 2017

WIW 2017 merupakan pekan kampanye yang digagas oleh IOSCO C8 untuk meningkatkan edukasi dan perlindungan kepada investor pasar modal. Kampanye WIW ini dijalankan serentak di negara-negara anggota C8. OJK sebagai anggota C8 telah menyelenggarakan rangkaian kegiatan edukasi keuangan dalam menyemarakkan WIW tersebut dengan berkolaborasi bersama Bursa Efek Indonesia (BEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI). Kegiatan kampanye WIW 2017 terbagi ke dalam tiga tahap yaitu pra acara (kampanye media sosial), acara utama (Sekolah Pasar Modal bagi pegawai perbankan, Kumpul BESARR (Beli Saham Rame-Rame), dan kegiatan *fun walk* pada *Car Free Day*) dan setelah acara (penyelenggaraan *Investival/ Indonesia Investment Festival* dan penyusunan laporan evaluasi kegiatan). Rangkaian acara tersebut bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat untuk dapat berinvestasi di pasar modal.

### Sosialisasi Survei *Programme for International Student Assessment (PISA)*

OJK bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melaksanakan kegiatan sosialisasi survei PISA pada sekolah main survey PISA wilayah Sumatera di Medan dan Surabaya. Sosialisasi tersebut dihadiri oleh total peserta sebanyak 104 sekolah dari berbagai perwakilan wilayah yang diwakilkan oleh kepala sekolah dan guru proktor (guru IT) dari masing-masing sekolah. Adapun sosialisasi materi terkait PISA yang disajikan adalah pengenalan dan *framework* PISA, pengenalan aplikasi komputer untuk *main survey* PISA, praktik aplikasi komputer, sesi pengenalan dan simulasi aplikasi komputer, briefing persiapan *main survey* PISA, dan pendataan peserta *main survey* PISA.

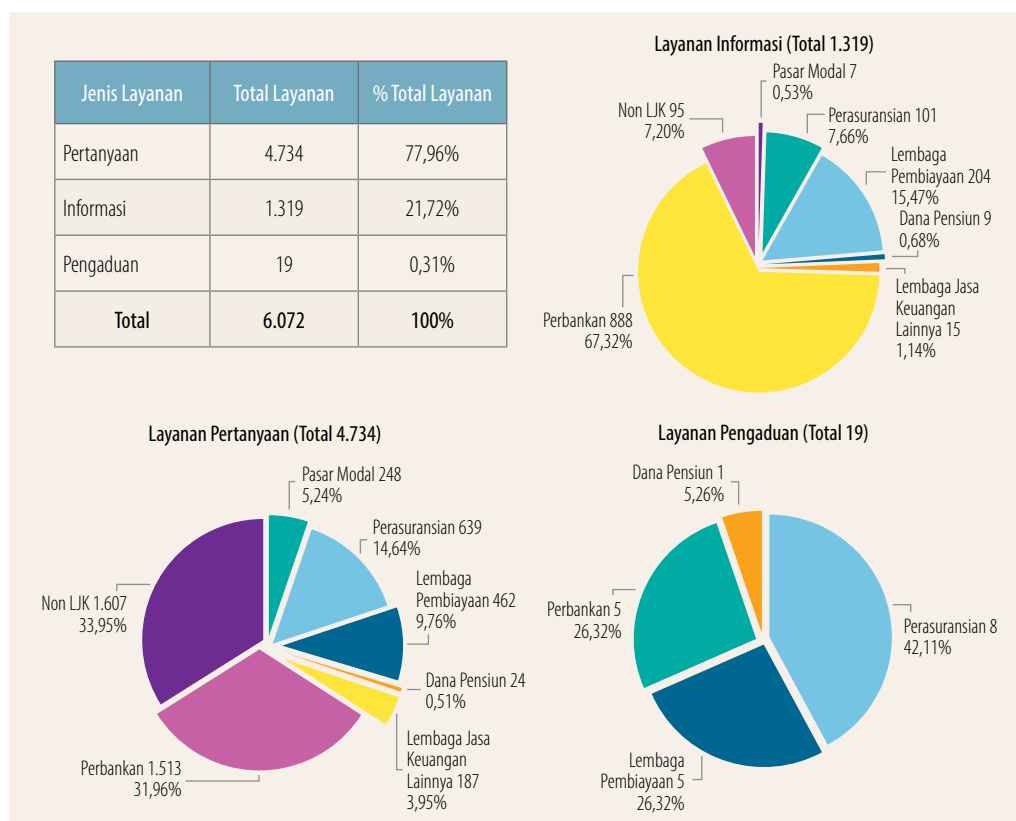
### 2.5.3 Perlindungan Konsumen

#### Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi

Pada triwulan IV-2017, layanan konsumen OJK menerima 6.072 layanan yang terdiri dari 1.319 penerimaan informasi, 4.734 pertanyaan dan 19 pengaduan. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 5,8% (372 layanan) dibandingkan triwulan sebelumnya yang berjumlah 6.444 layanan.

Berdasarkan sektornya, persentase layanan informasi terdiri dari sektor perbankan sebesar 67,3%, sektor IKNB sebesar 24,9%, dan sektor pasar modal sebesar 0,5%, serta lain-lain sebesar 7,2%. Secara substansi, layanan informasi terbanyak pada sektor perbankan terkait Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan yaitu sebesar 32,2%, pada sektor IKNB adalah terkait Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan pada lembaga pembiayaan sebesar 21,0%, dan pada sektor pasar modal terkait Peraturan Pasar Modal sebesar 28,6%. Sementara itu, pada sektor lain-lain, substansi informasi yang paling banyak disampaikan adalah mengenai Pelayanan Non LJK (24,2%) dan Legalitas Perusahaan non LJK (17,9%).

Grafik II - 12 Layanan Per Sektor (Triwulan IV-2017)



Sumber: OJK

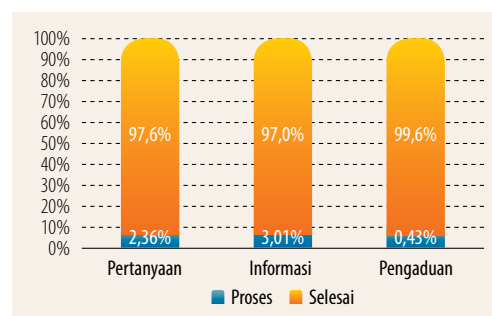
Persentase layanan pertanyaan, dari sektor perbankan sebesar 32,0%, sektor IKNB 28,9%, sektor pasar modal 5,2%, serta kategori lain-lain 33,9%. Pertanyaan terkait Peraturan Perbankan mendominasi layanan pertanyaan sektor perbankan yaitu sebesar 6,9%. Sementara itu, pada sektor IKNB dan Pasar Modal didominasi pertanyaan terkait Legalitas LJK dan Produk, berturut-turut sebesar 30,7%, dan 23,8%. Pada kategori lain-lain, pertanyaan yang paling banyak disampaikan mengenai Legalitas Non LJK sebesar 59,9%.

Persentase layanan pengaduan berdasarkan sektornya, dari sektor perbankan sebesar 26,3%, sektor IKNB sebesar 73,7%, serta nihil untuk pengaduan sektor pasar modal dan lain-lain. Jenis permasalahan pengaduan sektor perbankan yaitu mengenai Keberatan Biaya Tambahan/Denda, Keberatan, Penawaran Produk/ Layanan LJK, Pelunasan Kredit/ Pembiayaan Dipercepat, Pencairan Klaim

Asuransi, Perbedaan perhitungan Bunga atau Pokok. Sedangkan untuk sektor IKNB didominasi oleh permasalahan Penolakan Pencairan Klaim.

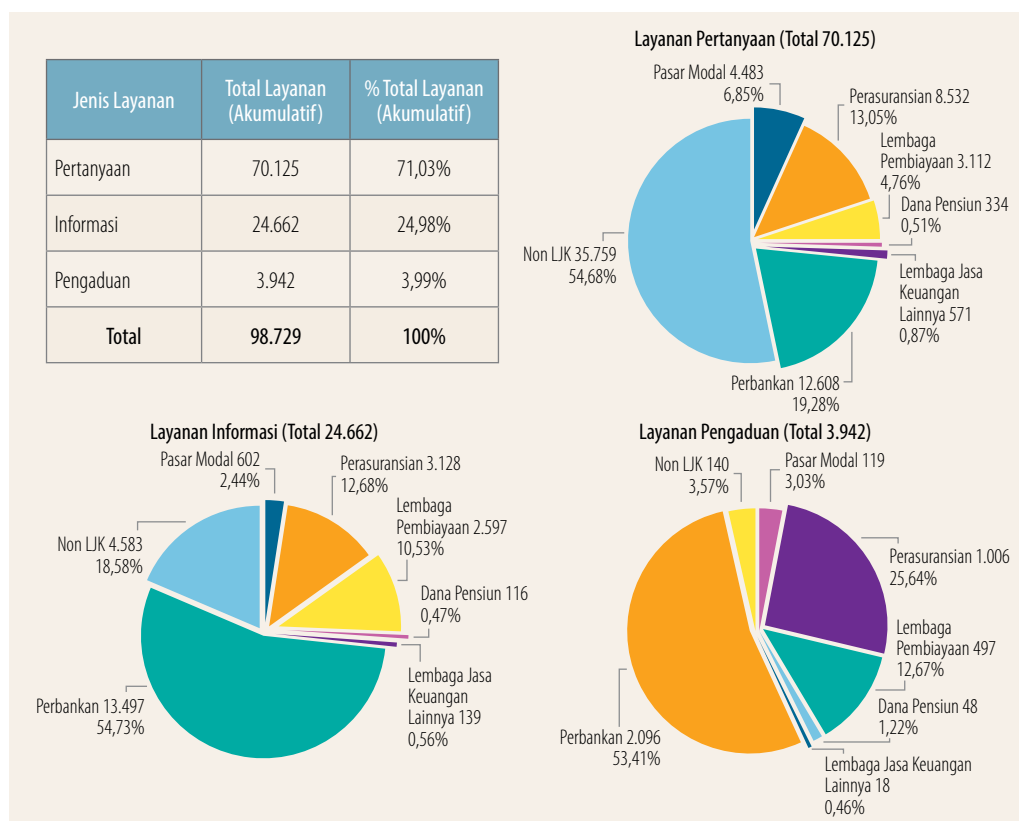
Secara akumulatif, sejak tahun 2013 sampai dengan triwulan IV-2017 jumlah layanan informasi sebesar 97,0% (23.920 layanan), layanan pertanyaan sebesar 97,6% (68.473 layanan), serta layanan pengaduan mencapai 99,6% (3.925 pengaduan).

**Grafik II - 13** Tingkat Penyelesaian Layanan (akumulasi 2013- Triwulan IV-2017)



Sumber: OJK

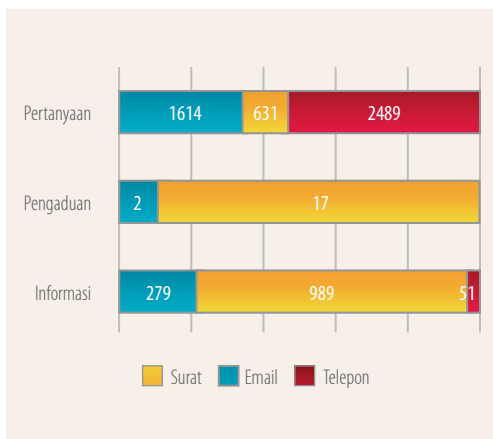
**Grafik II - 14** Layanan Per Sektor (akumulasi 2013- Triwulan IV-2017)



Sumber: OJK

Guna mempermudah konsumen dan/atau masyarakat dalam mengakses layanan konsumen, OJK menyediakan berbagai kanal penerimaan layanan antara lain melalui media email, telepon maupun surat. Adapun jumlah konsumen yang mengakses layanan konsumen sebagai berikut:

**Grafik II - 15** Kanal Layanan Triwulan IV-2017



Sumber: OJK

Berdasarkan grafik kanal layanan penerimaan triwulan IV-2017, konsumen dan/atau masyarakat paling banyak mengakses layanan konsumen OJK melalui kanal telepon disusul melalui kanal email kemudian surat.

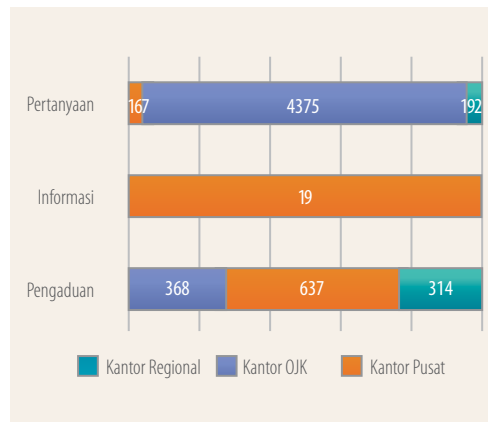
**Tabel II - 48** Penerimaan Layanan per Business Unit

Penginput	Total Layanan
Kantor Pusat	5.031
Kantor Regional	506
Kantor OJK	535
<b>Total</b>	<b>6.072</b>

Sumber: OJK

Guna meningkatkan aksesibilitas layanan konsumen, OJK juga melayani konsumen di KR dan KOJK yang tersebar di seluruh Indonesia untuk menerima dan menangani layanan konsumen.

**Grafik II - 16** Perbandingan Penerimaan Layanan Berdasarkan Satuan Kerja



Sumber: OJK

Berdasarkan tabel penerimaan layanan, secara total satuan kerja di Kantor Pusat menerima layanan konsumen terbanyak yaitu sebesar 82,9% dari total penerimaan layanan pada triwulan IV – 2017.

### Asistensi Layanan Konsumen OJK

Sepanjang triwulan IV-2017, OJK melakukan 2 (dua) kali asistensi Layanan Konsumen OJK yaitu di Makassar dan Jambi. Peserta yang hadir pada kegiatan ini merupakan perwakilan dari PUJK dan internal OJK. Materi yang disampaikan terkait statistik dan data mengenai perkembangan penanganan pengaduan secara keseluruhan serta proses penanganan pengaduan di wilayah Kantor Regional OJK, *refreshment* penggunaan Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi (Sistem *Customer Relationship Management* (CRM)). Selain itu terdapat sosialisasi yang terkait dengan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS), Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan (SPKK) 2013-2027 serta koordinasi dengan Ombudsman Republik Indonesia.

Pelaksanaan kegiatan Asistensi bertujuan untuk mensosialisasikan ketentuan penanganan Layanan Konsumen Terintegrasi OJK sesuai Perubahan PDK No.1/PDK.07/2016, mengembangkan kemampuan penanganan dan penyelesaian pengaduan bagi pegawai OJK guna mendukung percepatan penanganan





## **OJK Meraih Penghargaan Gold pada kegiatan The Best Contact Center Indonesia Tahun 2017**

OJK berhasil meraih penghargaan *Gold* dalam kategori *The Best Technology Innovation* bagi *Corporate* dalam ajang *The Best Contact Center* Indonesia. Penilaian dilakukan oleh 3 (tiga) juri yang berasal dari *Asian Pasific Contact Center Assosiaton Leaders* (APCAL).

Kategori *The Best Technology Innovation* dinilai berdasarkan kemampuan *contact center* untuk menunjukkan inovasi teknologinya pada kurun waktu tertentu,

serta memberikan dampak pada bisnis dan operasional *contact center*. Fitur *trackable* dan *traceable* dalam menangani pengaduan konsumen pada Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi (SLKT) membuat konsumen dapat memantau perkembangan pengaduannya secara *real-time* sedangkan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dapat memantau serta melakukan pembaharuan progress penanganan pengaduan yang disampaikan konsumen kepada OJK secara *online* pada alamat <http://konsumen.ojk.go.id>.



pengaduan dan meningkatkan pemahaman tentang tata cara penggunaan Sistem Layanan Konsumen OJK/CRM serta penyelesaian sengketa konsumen melalui LAPS.

#### **Kegiatan Komunikasi Dalam Rangka Penguatan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan**

Sepanjang triwulan IV-2017, OJK menyelenggarakan tiga kegiatan Sosialisasi di Universitas Padjajaran Bandung dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa serta akademisi mengenai Perlindungan Konsumen. Sosialisasi di Surabaya membahas pentingnya LAPS di sektor jasa keuangan sebagai forum penyelesaian sengketa antara konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). *Workshop* kepada petugas Layanan Konsumen di KR/KOJK dilakukan untuk meningkatkan wawasan serta pengetahuan terkait perlindungan Konsumen.

Selain kegiatan sosialisasi, OJK juga menyelenggarakan kegiatan tiga *Focus Group Discussion* (FGD). OJK bekerjasama dengan AIPEG menyelenggarakan FGD di Jakarta dengan tema "*Strengthening LAPS Efficiency Through Merger and Online Dispute Resolution (ODR)*" dengan tujuan untuk memperoleh masukan mengenai rencana *merger* LAPS serta rencana penerapan *Online Dispute Resolution (ODR)*. FGD dilanjutkan di Bogor dalam rangka penyusunan *Roadmap* Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan yang dihadiri oleh perwakilan LAPS dan beberapa perwakilan asosiasi sektor jasa keuangan.

OJK juga menyelenggarakan FGD hasil pelaksanaan pemeriksaan tematik *market conduct* secara *onsite* sebagai sarana publikasi terbatas dan konfirmasi atas hasil pemeriksaan yang dihadiri oleh Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA), satuan kerja pengawasan, serta akademisi dan praktisi perlindungan konsumen. Dari FGD dimaksud didapatkan kesimpulan bahwa terdapat *system legal risk* dalam implementasi perjanjian baku PUJK sehingga sehingga seluruh *stakeholder*

perlu untuk mengambil langkah nyata guna memitigasi risiko ini agar menghindarkan dari risiko kerugian besar bagi industri sektor jasa keuangan. Hasil FGD ini didistribusikan kepada seluruh pengawas agar menjadi *lesson learnt* di daerah lain khususnya dan industri jasa keuangan umumnya serta memberikan kontribusi dalam mendukung penguatan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, khususnya dalam penyusunan perjanjian baku.

OJK melaksanakan kegiatan koordinasi rutin dengan anggota *Working Group (WG) Internal Dispute Resolution (IDR)* dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Koordinasi dengan anggota WG IDR bertujuan meningkatkan koordinasi dalam melaksanakan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, serta peralihan layanan Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia menjadi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Selanjutnya, Koordinasi dengan ORI yang membahas mengenai permintaan klarifikasi berulang terhadap laporan/pengaduan yang telah ditutup, serta permintaan klarifikasi oleh ORI tidak melalui *focal point* dalam perjanjian kerjasama.

#### **2.5.4 Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan**

##### **Penilaian Kembali Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan**

Sesuai Surat Edaran OJK Nomor 54/SEOJK.07/2016 tentang Monitoring Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan, daftar LAPS sebagaimana ditetapkan OJK ditinjau kembali dan dilakukan penilaian berkala setiap dua tahun sekali. Pada periode laporan, OJK melakukan proses penilaian kembali LAPS yang telah ditetapkan dalam daftar LAPS pada akhir tahun 2015. Selanjutnya, berdasarkan hasil penilaian tersebut, OJK menerbitkan Daftar LAPS yang memuat enam LAPS, yaitu a) Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI); b) Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI);

c) Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP); d) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI); e) Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPPI); dan f) Badan Mediasi Pembiayaan, Pegadaian, dan Ventura Indonesia (BMPPVI).

#### **Benchmarking ke Securities Industry Dispute Resolution Center (SIDREC) dan Financial Industry Disputes Resolution Centre (FIDReC)**

Dalam rangka penguatan LAPS, OJK bersama pengurus LAPS melakukan kunjungan ke LAPS sektor jasa keuangan yaitu Securities Industry Dispute Resolution Center (SIDREC) di Malaysia dan Financial Industry Disputes Resolution Centre (FIDReC) di Singapura. Kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk kerja sama *Australia Indonesia Partnership for Economic Governance* (AIPEG). *Benchmarking* tersebut sarana untuk memperoleh informasi mengenai merger LAPS, regulasi, serta sistem pendanaan LAPS, yang selanjutnya dijadikan bahan *Roadmap* Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

### 2.5.5 Pengawasan *Market Conduct*

Selama triwulan IV-2017, OJK melakukan pengawasan *market conduct* melalui pemeriksaan tematik secara *onsite* dengan objek sampling tujuh Bank Pembangunan Daerah dengan tema “aspek perlindungan konsumen pada perjanjian baku”. Pemeriksaan tematik dilakukan dengan meninjau ada tidaknya eksonerasi/eksemsi dan penyalahgunaan keadaan atas klausula/konten dan lengkap tidaknya format perjanjian baku. Adapun aspek yang diperiksa meliputi aspek kebijakan, implementasi dan evaluasi terkait perjanjian baku.

#### **Pelaksanaan Asistensi Implementasi Pengawasan *Market Conduct***

Implementasi pengawasan *market conduct* merupakan upaya memperkuat pengawasan sektor jasa keuangan dalam mewujudkan

budaya *treat customer fairly* pelaku usaha jasa keuangan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan masyarakat (*market confidence*). Tujuan implementasi tersebut ialah untuk mengenalkan dan menerapkan konsepsi pengawasan *market conduct* melalui pendekatan tematik yang terdiri dari kegiatan asistensi pengawasan *market conduct* dan *onsite supervision*. Kegiatan asistensi implementasi pengawasan *market conduct* hingga akhir 2017 terlaksana di tiga kantor OJK di daerah, yaitu KOJK Nusa Tenggara Barat, KOJK Sulawesi Tenggara dan KOJK Papua.

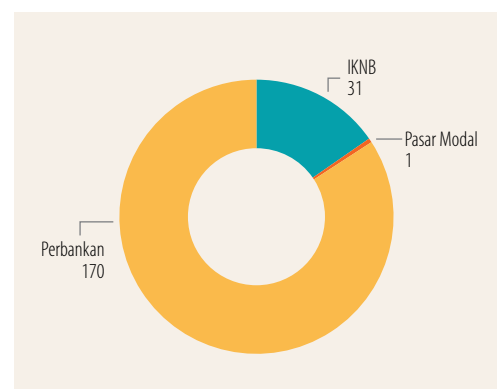
#### **Pemantauan Iklan Triwulanan**

Melalui Sistem Informasi Pelaporan Market Intelijen (SIPMI), OJK memantau iklan dan penawaran produk dan layanan jasa keuangan. Monitoring yang dilaporkan secara triwulanan ini mencakup iklan yang dipublikasikan melalui media cetak nasional dan lokal yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Selama periode laporan, OJK mencatat sebanyak 202 iklan berkaitan dengan produk/jasa keuangan, yang terdiri dari sektor Perbankan 84,2% (170 iklan), disusul oleh sektor IKNB sebesar 15,3% (31 iklan) dan Pasar Modal sebesar 0,5% (1 iklan). Lima besar produk yang banyak dipasarkan melalui iklan berturut-turut adalah tabungan, layanan digital, modal ventura, kartu kredit, dan *m-banking*.

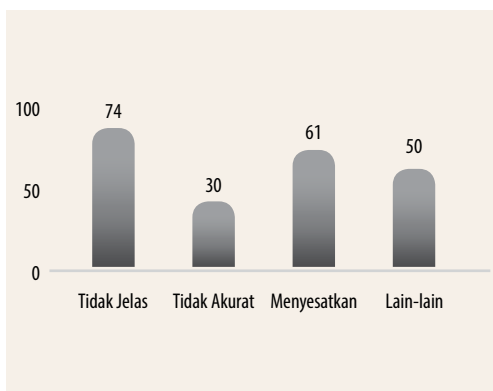
Dari data tersebut, 75% dari total iklan (151 iklan) patut diduga melanggar SEOJK Nomor 12 Tahun

**Grafik II - 17** Jumlah Iklan Per Sektor



2014 tentang Penyampaian Informasi dalam rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan. Dugaan pelanggaran iklan pada sektor IKNB sebesar 19% (29 iklan) sedangkan sektor perbankan sebesar 81% (122 iklan). Kriteria yang paling banyak dilanggar berturut-turut adalah tidak jelas (35%), menyesatkan (28%), lain-lain (23%), dan tidak akurat (14%).

**Grafik II - 18** Pelanggaran Berdasarkan Kategori Dugaan Pelanggaran



### 2.5.6 Investor Alert Portal

#### Investor Alert Portal

OJK melakukan *update* berkala terhadap daftar investasi yang tidak terdaftar dan tidak di bawah pengawasan OJK dalam *Investor Alert Portal* (IAP). IAP merupakan salah satu upaya preventif OJK untuk mencegah potensi kerugian konsumen dan masyarakat akibat praktik investasi yang tidak jelas legalitasnya. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan *awareness* dan pemahaman masyarakat dalam menyikapi penawaran investasi dengan keuntungan yang terlalu atraktif dan cenderung tidak masuk akal. Daftar entitas dalam IAP bersumber dari hasil identifikasi dan verifikasi atas informasi dan/atau pertanyaan masyarakat kepada OJK melalui layanan konsumen OJK *Financial Customer Care* (FCC). Di samping itu, IAP juga mencantumkan entitas yang secara resmi telah dihentikan kegiatannya oleh Satuan Tugas Waspada Investasi.

Selama triwulan IV-2017 terdapat 19 entitas baru yang diunggah dan empat entitas yang

dikeluarkan dari daftar IAP sehingga sampai Desember 2017 terdapat 129 entitas telah masuk dalam IAP. IAP dapat diakses melalui minisite [sikapiuangmu.ojk.go.id](http://sikapiuangmu.ojk.go.id) atau *mobile apps* Sikapiuangmu yang tersedia di *Playstore* dan *Apple Store*.

Masyarakat dihimbau agar tidak melakukan investasi pada entitas yang namanya tercantum dalam IAP tersebut. OJK juga mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk menyampaikan informasi terkait penawaran investasi sejenis melalui telepon 157, email [konsumen@ojk.go.id](mailto:konsumen@ojk.go.id), atau [waspadainvestasi@ojk.go.id](http://waspadainvestasi@ojk.go.id).

### 2.5.7 Penelitian Kebijakan dan Pengaturan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan terkait Edukasi dan Perlindungan Konsumen khususnya untuk memberikan pemahaman mengenai pokok-pokok pengaturan, persiapan implementasi POJK Literasi dan Inklusi Keuangan serta memberikan *awareness* akan pentingnya sinergi antara regulator, lembaga jasa keuangan dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan literasi dan akses keuangan masyarakat OJK melaksanakan beberapa kegiatan, antara lain:

1. Seminar Nasional "Sinergi dalam Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan";
2. FGD Kajian Tantangan dan Peluang Regulasi terkait Edukasi dan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Review terhadap POJK 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan;
3. Sosialisasi "Upaya Menyejahterakan Masyarakat Indonesia dengan Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan";
4. *Workshop "Good Practices for Financial Consumer Protection"*;
5. Sosialisasi "Layanan Pengaduan Konsumen dan Penyelesaian Sengketa Konsumen Sektor Jasa Keuangan"; dan
6. Sosialisasi "Upaya Menyejahterakan Masyarakat Indonesia dengan Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan"

Sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan Literasi dan Inklusi keuangan bagi OJK, Lembaga Jasa Keuangan dan pemangku kepentingan lainnya, OJK juga menerbitkan Buku Statistik Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan dan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (Revisit 2017).

## 2.6 PENYIDIKAN SEKTOR JASA KEUANGAN

Dalam rangka melaksanakan kegiatan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi penyidikan, pengembangan kebijakan penyidikan, pelaksanaan kerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penegakan hukum dan pemberian dukungan penyidikan tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan selama periode laporan, OJK secara berkesinambungan berupaya memenuhi infrastruktur baik dari segi sumber daya manusia sesuai dengan formasi efektif, penyempurnaan ketentuan pelaksanaan penyidikan, perumusan Nota Kesepakatan dan kebijakan di bidang tindak pidana sektor jasa keuangan.

### 2.6.1 Koordinasi dengan Instansi Terkait

Untuk memperkuat langkah penyidikan dan dalam rangka membangun sistem peradilan pidana yang kredibel OJK rutin menggelar koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait antara lain Kejaksaan RI, LPS, dan PPAK.

### 2.6.2 Penanganan Perkara

Fungsi penyidikan yang dilaksanakan oleh OJK dimulai sejak 2016 dengan mendasari pada ketentuan perundang-undangan, POJK, PDK, dan SEDK Penyidikan. Pada 2017, berdasarkan kriteria prioritas, OJK menerbitkan 17 Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang terdiri dari 12 perkara Perbankan, (10 perkara BPR

dan dua perkara BPD), empat perkara Pasar Modal dan satu perkara Asuransi di mana Berdasarkan hasil penyidikan dan gelar perkara, OJK selanjutnya telah mengirimkan lima berkas perkara telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan RI yang terdiri dari empat berkas perkara perbankan (tiga perkara BPR dan satu perkara BPD) dan satu perkara Pasar Modal. Dari pengiriman berkas tersebut, empat berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan RI. Atas pernyataan P-21 pada perkara tersebut, OJK melaksanakan fungsi penyidikan sebagaimana dimaksud pasal 49 dan pasal 50 UU No 21 tahun 2011 tentang OJK.

### 2.6.3 Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi/SWI)

Maraknya ajakan kepada masyarakat untuk menggunakan uangnya pada produk investasi yang didesain sedemikian rupa agar tidak termasuk dalam produk investasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. semakin bervariasi jenis dan bentuk serta sasarannya. Kesadaran akan semakin berkembangnya industri jasa keuangan saat ini, maka diperlukan pengawasan sehingga dapat menghasilkan deteksi dini terhadap kegiatan investasi yang diduga telah merugikan banyak masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi tanpa izin yang saat ini semakin marak terjadi di masyarakat, SWI melakukan perluasan keanggotaan dari tujuh Kementerian/Lembaga yaitu menjadi 13 Kementerian/Lembaga.

Sampai akhir Desember 2017, telah dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepakatan dimaksud oleh 11 Kementerian/Lembaga secara *circular letter*, yaitu:

## Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (Revisit 2017)

OJK mengeluarkan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (*Revisit 2017*) atau SNLKI (*Revisit 2017*). SNLKI (*Revisit 2017*) merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan Literasi dan Inklusi keuangan bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Jasa Keuangan dan pemangku kepentingan lainnya.

Tujuan dari SNLKI (*Revisit 2017*) adalah menyempurnakan SNLKI 2013, mengakomodasi perubahan dan perkembangan literasi dan inklusi keuangan, dan mengakselerasi pencapaian indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai hal antara lain hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi keuangan 2016, perubahan definisi Literasi Keuangan dalam *International Best Practises*, perkembangan teknologi informasi, perkembangan produk dan layanan jasa keuangan yang semakin kompleks, realisasi kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan selama periode 2013 hingga 2015 dan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

Penyesuaian tersebut dilakukan terhadap beberapa hal strategis, antara lain:

### 1. Kerangka Dasar

Pada strategi sebelumnya, terdapat 3 pilar utama yaitu (1) Edukasi dan Kampanye Nasional Literasi Keuangan, (2) Penguatan Infrastruktur Literasi Keuangan, dan (3) Pengembangan Produk dan Jasa Keuangan.



Pada SNLKI (*Revisit 2017*) diubah menjadi Program Strategis, yang terdiri dari (1) Cakap Keuangan, (2) Sikap dan Perilaku Keuangan Bijak, dan (3) Akses Keuangan.



## 2. Sasaran

Terdapat enam sasaran prioritas pada strategi sebelumnya, yaitu (1) Ibu Rumah Tangga, (2) UMKM, (3) Pelajar/Mahasiswa, (4) Profesi, (5) Karyawan, dan (6) Pensiunan.

Pada SNLKI (*Revisit* 2017) terdapat 10 sasaran prioritas dengan empat penambahan sasaran baru dan satu perubahan (ibu rumah tangga menjadi perempuan), sehingga menjadi (1) Perempuan, (2) UMKM, (3) Pelajar/Mahasiswa dan Pemuda, (4) Profesi, (5) karyawan, (6) Pensiunan, (7) Penyandang Disabilitas, (8) TKI & Calon TKI, (9) Petani & Nelayan, dan (10) Masyarakat Daerah tertinggal, terpencil.

## 3. Tema Prioritas

Pada strategi sebelumnya, tema prioritas ditentukan sedari awal untuk tiap tahunnya, seperti tahun 2015 Edukasi difokuskan pada Ibu Rumah Tangga dan UMKM.

Sementara pada SNLKI (*Revisit* 2017) tema prioritas tahunan akan ditentukan oleh OJK berkolaborasi dengan Lembaga Jasa Keuangan di akhir tahun sebelum tahun pelaksanaan Edukasi berjalan, contohnya tema prioritas 2019 akan ditentukan pada akhir 2018 dari hasil evaluasi kegiatan Edukasi 2018 dan diskusi dengan Lembaga Jasa Keuangan.

Beberapa hal baru yang sebelumnya tidak terdapat pada SNLKI tahun 2013 antara lain informasi terkait Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah, informasi terkait layanan keuangan digital dan perencanaan keuangan.

SNLKI (*Revisit* 2017) ini diharapkan menjadi acuan dalam menyusun rencana kegiatan literasi dan inklusi keuangan sebagaimana yang telah diatur dalam POJK Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat yang akan efektif berlaku 28 Desember 2017.

- 1) Otoritas Jasa Keuangan;
- 2) Kementerian Perdagangan Republik Indonesia;
- 3) Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;
- 4) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia;
- 5) Badan Koordinasi Penanaman Modal,
- 6) Kementerian Agama Republik Indonesia;
- 7) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- 8) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
- 9) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
- 10) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; dan
- 11) Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

#### 2.6.4 Sosialisasi Satgas Waspada Investasi dan Pembekalan Tim Kerja SWID

Dalam rangka upaya pencegahan terhadap kegiatan penawaran investasi yang diduga ilegal, Satgas Waspada Investasi memiliki program kerja melakukan kegiatan sosialisasi dan/atau *focus group discussion* mengenai tawaran penempatan dana dengan janji tingkat keuntungan yang tinggi dan perlu diwaspadai.

Kegiatan dilaksanakan di beberapa wilayah yang diprioritaskan dengan pertimbangan kegiatan investasi sedang marak di wilayah tersebut. Kegiatan sosialisasi di masing-masing wilayah dihadiri segenap unsur masyarakat, dalam hal ini antara lain adalah: tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, TNI dan mahasiswa.

Selama triwulan IV-2017, Satgas Waspada Investasi melaksanakan program sosialisasi waspada investasi yang diduga ilegal kepada masyarakat di tiga kota yaitu Surabaya, Yogyakarta dan Serang. Sehingga selama 2017, Satgas Waspada Investasi telah melaksanakan delapan kali kegiatan sosialisasi Satgas Waspada Investasi. Selanjutnya telah dilaksanakan juga kegiatan pembekalan Tim Kerja Satgas Waspada

Investasi Daerah di dua Kantor Regional OJK yaitu Serang dan Surabaya dan di satu Kantor OJK yaitu Solo. Sehingga selama 2017, Satgas Waspada Investasi telah melaksanakan kegiatan pembekalan Tim Kerja Satgas Waspada Investasi Daerah di 12 daerah.

Selain kegiatan Sosialisasi dan Pembekalan Tim Kerja SWI Daerah, pada triwulan IV-2017 Satgas Waspada Investasi juga melaksanakan kegiatan kuliah umum di lima universitas di Indonesia. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari edukasi mengenai investasi ilegal kepada masyarakat

#### 2.6.5 Penyampaian Informasi Melalui Media

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat yang sebelumnya telah dilakukan SWI melakukan analisis dan rapat pembahasan dengan anggota Satgas Waspada Investasi, Satgas Waspada Investasi menerbitkan melakukan siaran pers guna memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan kegiatan investasi ilegal yang merugikan masyarakat dan perkembangan penanganannya melalui media massa. Selama periode pelaporan, SWI melakukan kegiatan tersebut menerbitkan tiga siaran pers dengan tema "SWI Perintahkan Talk Fusion Segera Hentikan Kegiatan"; "Lindungi Masyarakat, Satgas Waspada Investasi Hentikan 14 Kegiatan Usaha"; dan "Di Penghujung Tahun, Satgas Waspada Investasi Imbau Masyarakat Waspada terhadap Kegiatan Usaha 21 Entitas". Sehingga selama 2017 Satgas Waspada Investasi telah melakukan 14 kali siaran pers.

#### 2.6.6 Penanganan Perkara Investasi oleh Satgas Waspada Investasi

Rekomendasi hasil rapat koordinasi Satgas Waspada Investasi terkait dengan pembahasan investasi ilegal ditindaklanjuti dengan pembahasan dan atau penanganan lebih lanjut oleh masing-masing kementerian dan/atau lembaga dan atau antar kementerian dan/atau





lembaga yang memiliki kewenangan terkait dengan kegiatan investasi yang diduga ilegal.

Selama periode triwulan IV-2017, OJK dan Satgas Waspada Investasi menghentikan kegiatan usaha sejumlah 35 Entitas. Dengan demikian selama 2017 sudah terdapat 80 Entitas yang telah dihentikan kegiatan usahanya. Selanjutnya yang telah berada dalam proses hukum oleh pihak Kepolisian di 2017 adalah sebanyak 12 Entitas.

## 2.7 PENANGANAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APU-PPT)

### 2.7.1 Pelaksanaan *Mutual Evaluation Review* (MER) Indonesia tahun 2017

OJK mengikuti pelaksanaan *on-site visit* MER untuk Indonesia. MER yang ditujukan untuk menilai pelaksanaan rezim APU PPT yang berjalan di Indonesia dan seberapa jauh efektivitas implementasi penerapan program APU PPT di Indonesia serta pemenuhan atas rekomendasi FATF. Pada rangkaian kegiatan *on-site visit* MER dimaksud, terdapat total 15 pertemuan yang melibatkan OJK, penyedia jasa keuangan (PJK) dan asosiasi dengan perwakilan sebagai berikut:

- a) OJK
- b) Empat PUJK di sektor jasa perbankan;
- c) Dua PUJK di sektor pasar modal;
- d) Satu PUJK di sektor IKNB; dan
- e) Tiga asosiasi pada sektor jasa keuangan.

Selama *on-site visit* MER berlangsung, OJK, perwakilan PJK dan perwakilan asosiasi telah menyampaikan informasi dan data secara komprehensif terkait perijinan, pengawasan, penegakan hukum dan pelaksanaan program APU PPT di sektor jasa keuangan yang telah dilakukan dengan menerapkan prinsip pendekatan berbasis risiko (*risk based approach/ RBA*).

Berdasarkan *exit report* yang disampaikan, secara umum tim assessor menilai bahwa pelaksanaan rezim APU PPT sangat meningkat dibandingkan pelaksanaan MER sebelumnya. Dari sisi OJK selaku otoritas pengatur dan pengawas APU PPT di sektor jasa keuangan, assessor menilai bahwa OJK telah memiliki mekanisme perizinan yang dapat mencegah pelaku kejahatan dan pihak terkait lainnya untuk masuk ke sektor jasa keuangan. OJK juga dinilai telah memahami, mengidentifikasi dan menerapkan penilaian risiko tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPU dan TPPT) terhadap PJK yang diawasinya. Dalam konteks fungsi pengawasan, pengawasan APU PPT yang dilakukan oleh OJK mencakup lima pilar yang menjadi fokus pengawasan baik *on-site* maupun *off-site*. Selanjutnya, OJK menerapkan pengawasan APU PPT berbasis risiko untuk sektor perbankan dan pasar modal. OJK juga memiliki sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi bagi konglomerasi keuangan yang dinilai sebagai fitur penting pada sektor jasa keuangan di Indonesia, namun masih terdapat tantangan dalam pengawasan APU PPT pada level konglomerasi keuangan.

Terkait dengan kerjasama internasional, OJK dinilai telah terlibat aktif melalui berbagai platform seperti MOU dan MMOU. Disamping itu, OJK dinilai mendukung upaya Indonesia untuk mendiseminasi *National Risk Assessment* (NRA) 2015, *Sectoral Risk Assessment* (SRA), serta *white papers* terkait pajak dan pendanaan terorisme sehingga PJK telah memahami dan melakukan mitigasi terkait hal tersebut. PJK juga dinilai memiliki pemahaman yang baik terhadap Peraturan OJK terkait APU PPT.

Dari sisi penerapan APU PPT di penyedia jasa keuangan (PJK), assessor menilai bahwa bank, perusahaan efek dan perusahaan asuransi dinilai telah menerapkan program APU PPT berbasis risiko yang mengacu pada NRA dan SRA. PJK juga dinilai telah memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur yang memadai sesuai dengan pendekatan berbasis risiko terkait dengan antara lain proses *customer due diligence* (CDD), *record keeping* dan *enhanced*

*due diligence* (EDD). Secara umum, tingkat kepatuhan PJK dalam melaksanakan kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan (TKM) telah baik. Secara khusus, bank telah mengembangkan *red flags*, skenario dan alerts untuk mengidentifikasi TKM. Selanjutnya, PJK yang berada pada pengawasan OJK juga dinilai telah memiliki dan menerapkan kebijakan pengendalian internal dengan baik.

Dalam rangka penerapan manajemen risiko terintegrasi dan mekanisme penerapan program APU PPT pada konglomerasi keuangan, beberapa konglomerasi keuangan dengan entitas Utama bank telah membentuk komite risiko untuk membahas isu terkait APU PPT. Keberhasilan pelaksanaan MER Indonesia tidak hanya didukung oleh peran OJK selaku Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP), namun juga didukung oleh peran penting dari PJK dalam menerapkan program APU PPT, terutama terkait dengan penilaian terhadap efektivitas penerapan program APU PPT di Indonesia. Seluruh Upaya tersebut di atas, baik dari sisi OJK maupun dari sisi PJK, akan memberikan dampak signifikan dalam mendukung upaya Indonesia untuk menjadi anggota FATF.

### 2.7.2 Pengembangan *Risk Based Supervisory Tools* dalam Pengawasan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan

#### I. *Soft Launching* Sistem Informasi Penanganan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (SIGAP)

Dalam rangka pengembangan infrastruktur untuk memperkuat pelaksanaan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU PPT), Pada triwulan IV-2017, OJK menyelesaikan keseluruhan proses pengembangan dan *soft launching* infrastruktur dalam rangka pelaksanaan anti pencucian uang dan

pencegahan pendanaan terorisme dalam bentuk Sistem Informasi Penanganan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (SIGAP). Sistem ini dibangun bertujuan untuk mengintegrasikan dan memperkuat proses pengawasan APU PPT khususnya bagi satuan kerja pengawasan.

#### II. Penyesunan Kajian Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Penawaran Produk Melalui Agen Penjual (*Selling Agent*)

Pada periode laporan, OJK menyelesaikan kajian "Penerapan Program APU PPT pada Penawaran Produk Melalui Agen Penjual (*Selling Agent*)", dengan mengambil responden dari 114 PJK di sektor perbankan, pasar modal dan asuransi. Kajian disusun dengan menggunakan pendekatan teoritis baik berupa analisis hukum dan perundang-undangan yang berlaku, peraturan di bidang APU PPT, informasi mengenai *best practice* dari negara lain serta analisis atas hasil perolehan data dari sektor industri yang telah disebarakan melalui kuisisioner terkait pelaksanaan program penawaran produk dan penerapan APU PPT oleh agen penjual. Hasil kajian ini akan digunakan berguna dalam rangka menyusun kebijakan terkait penerapan program APU PPT pada penawaran produk melalui agen penjual.

### 2.7.3 Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Sebagai kelanjutan dari rangkaian program pengembangan kapasitas sumber daya manusia, baik bagi pengawas APU PPT di internal OJK maupun bagi pelaku industri jasa keuangan, dalam periode laporan telah dilakukan beberapa kegiatan pengembangan kapasitas dalam bentuk pelatihan maupun *workshop* sebagai berikut:

1. Internalisasi *National Risk Assessment* TPPU/ TPPT dan Tindak Pidana Asal Terbesar – Korupsi, Narkotika, dan Perpajakan.

Kegiatan internalisasi tersebut dihadiri oleh 171 perwakilan dari seluruh sektor jasa keuangan. Tujuan dari kegiatan internalisasi ini untuk meningkatkan pemahaman pelaku industri jasa keuangan atas risiko nasional terkait TPPU TPPT, khususnya pemahaman terhadap tiga tindak pidana asal yang memiliki risiko tinggi terhadap TPPU dan TPPT. Untuk itu, dalam internalisasi tersebut, OJK mengundang narasumber yaitu Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Direktur pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP) dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

2. Sosialisasi Peraturan OJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan.

Sebagai kelanjutan dari rangkaian sosialisasi Peraturan OJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan, khususnya di daerah, pada periode laporan ini, GPUT bekerjasama dengan kantor regional dan kantor OJK di daerah melakukan sosialisasi kepada penyedia jasa keuangan di Papua.

Pada periode laporan, OJK juga melakukan finalisasi penyusunan SRA yang telah dimulai pada triwulan sebelumnya. Penyusunan SRA mencakup tiga sektor jasa keuangan yaitu sektor perbankan, pasar modal, dan IKNB. Pada tahap finalisasi dimaksud, tim penyusun SRA menyelenggarakan *focus group discussion* (FGD) dengan mengundang narasumber yaitu pakar APU PPT, LLM dan perwakilan PPATK. FGD ini penting untuk memberikan masukan atas konsep SRA dilihat dari pandangan *international best practice* sekaligus menyelaraskan dengan hasil *risk assessment* secara nasional. SRA dimaksud diharapkan akan dapat menjadi acuan bagi pelaku industri dalam menerapkan program APU PPT berbasis risiko.

## 2.8 HUBUNGAN KELEMBAGAAN

Sesuai dengan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, kedudukan OJK sebagai lembaga negara tidak sejajar dengan lembaga tinggi negara lain seperti Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan. Kedudukan OJK juga tidak sama dengan Kementerian, mengingat kedudukan OJK yang berada di luar pemerintahan. Adapun status dan kedudukan khusus tersebut diperlukan agar OJK dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang independen. Walau demikian, OJK tetap memiliki hubungan kerja dan koordinasi yang baik antar lembaga dengan DPR, BPK, Pemerintah, BI, LPS, serta pihak lainnya.

### 2.8.1 Kerjasama Domestik

OJK secara aktif mengadakan koordinasi antar lembaga dengan tujuan menjalin kerjasama strategis yang dapat mendukung pencapaian OJK di masa mendatang. Selama periode triwulan IV-2017, OJK telah melakukan penandatanganan kerjasama domestik sebagai berikut:

Tabel II - 49 Hubungan Kerja Sama Domestik OJK

Kerjasama Domestik	Ringkasan Kerja sama
Nota Kesepahaman antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Sektor Jasa Keuangan
Nota Kesepahaman antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Universitas Sumatera Utara	Pengembangan sektor jasa keuangan, peningkatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

Di samping penandatanganan kerjasama antar lembaga, OJK juga menjalin hubungan kelembagaan dengan menyelenggarakan 25 kegiatan kelembagaan bersama yang melibatkan beberapa lembaga negara, antara lain:

- Dewan Perwakilan Rakyat;
- Kementerian Keuangan;

- Mahkamah Agung;
- Bank Indonesia;
- Lembaga Penjamin Simpanan;
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Pemerintah Daerah; dan
- Industri Jasa Keuangan.

Kegiatan kelembagaan yang telah dilakukan mencakup antara lain *Focus Group Discussion* (FGD) mengenai Rapat Kerja Anggaran 2018, pengadaan kantor OJK di seluruh Indonesia dan sosialisasi terkait fungsi dan peran OJK dalam pembangunan ekonomi nasional, investasi cerdas dan optimalisasi peran OJK di kalangan generasi muda, solusi preventif dan represif untuk mengatasi meningkatnya penipuan investasi ilegal, peranan OJK pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap kegiatan di sektor jasa keuangan, mengenal pengelolaan investasi yang legal dan logis, pendampingan kunjungan kerja DPR serta bimbingan teknis penguatan kapasitas kelembagaan sektor jasa keuangan dan pembahasan RKA OJK tahun anggaran 2018 antara OJK dengan Sekretariat Komisi XI DPR RI

## 2.8.2 Kerjasama Internasional dan Regional

### a. Penyelesaian Negosiasi dalam rangka Peningkatan Komitmen Jasa Keuangan di ASEAN

Dalam rangka mendukung kebijakan & pelaksanaan tugas OJK, diperlukan peningkatan komitmen perbankan dalam paket perundingan jasa keuangan dalam lingkup ASEAN (*ASEAN Banking Integration Framework*) serta paket komitmen jasa keuangan lainnya, dilihat dari proses yang dilaksanakan dalam paket perundingan jasa keuangan lingkup ASEAN.

Pada bulan Oktober sampai dengan Desember triwulan IV-2017, telah tercapai beberapa hal yaitu proses negosiasi ABIF antara OJK dan negara-negara ASEAN sedang berlangsung, antara lain:

- i. OJK dan *Bank Negara Malaysia (BNM)* Penunjukan Bank Mandiri sebagai kandidat *Qualified ASEAN Banks (QABs)* Indonesia di Malaysia oleh Ketua OJK, sebagai implementasi *Bilateral Agreement* ABIF OJK dan BNM.
- ii. OJK dengan *Monetary Authority Singapore (MAS)* OJK, bersama delegasi RI BI dan BKF, telah melakukan *Bilateral Meeting* untuk membahas negosiasi ABIF Indonesia dan Singapura pada sela pertemuan WC-FSL ke-55 di Medan. Dalam pertemuan tersebut dibahas penyampaian draft Lol kepada OJK.

### b. Keterwakilan Posisi OJK Dalam Forum Perdagangan Jasa Internasional

Posisi (*stand point*) OJK diterima sebagai posisi RI dalam Forum Perdagangan Jasa Internasional. Terdapat lima jenis perundingan yang telah dilaksanakan, di mana pada triwulan IV-2017 terdapat dua posisi Indonesia diterima oleh *counterpart* dan didopsi menjadi posisi bersama yaitu Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IACEPA). Pada Triwulan IV-2017, Posisi OJK diterima sebagai posisi Indonesia dan diterima Australia selaku *counterpart* pada perundingan IA-CEPA di Jakarta, terutama pada Article X.13 '*Portfolio Management*' dan Article X.15 '*Transparency Considerations*';

### c. Tahap Negosiasi Penyusunan *Memorandum of Understanding (MoU)* dalam rangka mendukung kerjasama IJK dengan lain maupun organisasi internasional.

- i. MoU OJK dengan Otoritas Asing Pada triwulan IV-2017 telah dilakukan tahap negosiasi MoU antara OJK dengan *Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) Luxembourg*.
- ii. MoU OJK dengan Institusi asing lainnya : MoU dengan Pengawas SJK asing terkait *home-host supervision* bagi grup konglomerasi.



d. Pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan *international counterparts*, antara lain:

Pada triwulan IV-2017, OJK menerima kunjungan perwakilan dari beberapa instansi, antara lain:

1. Perwakilan Kedutaan Besar Luxemburg mengenai rencana kerjasama Luxemburg-RI
2. IFSB *Engagement Session and Working Group Meeting* dalam rangka mengevaluasi perkembangan serta tantangan yang dihadapi dalam keuangan syariah di Indonesia. (DEKS-BI)
3. Delegasi *Australian Securities and Investments Commission* (ASIC)
4. *International Labour Organization* (ILO)
5. *Asia-Pacific Rural and Agricultural Credit Association* (APRACA)
6. Lembaga Pemeringkat *Standard & Poor* (S&P)
7. *Australia Prudential Regulation Authority* (APRA) perihal pembahasan program *capacity building*
8. IFC perihal pembahasan kontribusi pada keuangan digital di Indonesia
9. *International Monetary Fund* (IMF) dalam rangka membahas rekomendasi *Financial Sector Assesment Program* (FSAP)
10. *Fitch Ratings* dalam hal membahas kinerja pengawasan OJK pada sektor jasa keuangan





Tinjauan Industri dan  
Operasional  
Sektor Jasa Keuangan Syariah



## Pengembangan



Penerbitan 1 POJK dan 2 SEOJK yang mengatur Pengawasan Perbankan, Pasar Modal dan IKNB Syariah

Kajian Dampak *Multilicense* bagi BPRS dan *Platform Sharing* Perbankan Syariah

Penyusunan Modul Sertifikasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Kajian Materi Pasar Modal Syariah dalam Pendidikan Profesi Lanjutan bagi ASPM

## Event



Pendirian Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Syariah – Bank Wakaf Mikro di Pondok Pesantren

Seminar Akhir Tahun Perbankan Syariah

Kegiatan Ijtima' Sanawi (*Annual Meeting*) Dewan Pengawas Syariah Lembaga Keuangan Syariah.

*Workshop Spin Off* Asuransi Syariah di Jakarta



# Tinjauan Industri dan Operasional Sektor Jasa Keuangan Syariah



## 3.1 TINJAUAN INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH

### 3.1.1 Perkembangan Perbankan Syariah

Perkembangan industri perbankan syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sampai dengan triwulan IV-2017 masih menunjukkan pertumbuhan yang positif. Hal ini tercermin dari meningkatnya aset, pembiayaan, dan dana pihak ketiga (DPK) masing-masing sebesar 7,33% (*qtq*), 5,13% (*qtq*), dan 5,17% (*qtq*) menjadi Rp435,02 triliun, Rp293,45 triliun, dan Rp341,88 triliun. Total aset perbankan syariah didominasi aset BUS dan UUS yang sebesar Rp424,18 triliun atau sebesar 97,50% dari total aset perbankan syariah, sementara aset BPRS sebesar Rp10,84 triliun.

Pada triwulan IV-2017, proporsi aset perbankan syariah terhadap aset perbankan nasional berada

pada angka 5,78%, meningkat dari triwulan sebelumnya yang sebesar 5,34%. Peningkatan proporsi ini dilatarbelakangi meningkatnya pertumbuhan aset beberapa BUS dan UUS pada periode laporan. Pertumbuhan *market size* perbankan syariah juga diiringi dengan membaiknya beberapa rasio kinerja lainnya dibandingkan triwulan sebelumnya, seperti kondisi permodalan dan indikator likuiditas. Aset bank syariah masih didominasi oleh aset BUS sebesar 66,17%. Porsi BUS ini mengalami penurunan dibandingkan triwulan IV-2016 yang sebesar 69,51%. Sebagian besar aset bank syariah merupakan pembiayaan yang disalurkan (PYD) sebesar 67,72%, penempatan pada Bank Indonesia (14,74%), dan diikuti surat berharga yang dimiliki sebesar 10,27%.

#### A. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Sumber dana perbankan syariah didominasi oleh DPK sebesar 86% dengan komposisi DPK yaitu 58,40% berupa deposito, diikuti

oleh tabungan dan giro masing-masing sebesar 29,80% dan 11,80%.

Searah dengan pergerakan tahunan, secara triwulanan DPK bank syariah juga tumbuh sebesar 5,12% (*qtq*) relatif stabil dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,52% (*qtq*), yang ditopang oleh pertumbuhan deposito sebesar 8,69% (*qtq*).

Peningkatan didorong oleh pertumbuhan pada giro, tabungan dan deposito masing-masing sebesar 5,19% (*qtq*) 8,87% dan 3,32% (*qtq*) menjadi Rp40,19 triliun, Rp98,50 triliun dan Rp196,20 triliun.

## B. Likuiditas

Likuiditas perbankan syariah yang dilihat dari rata-rata bulanan rasio AL/NCD dan AL/DPK stabil cenderung meningkat pada periode laporan masing-masing sebesar 0,02% dan 0,09% menjadi 124,81% dan 22,20%. Namun, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) BUS dan UUS mengalami peningkatan sebesar 0,43% menjadi 85,68% . Hal ini terjadi karena lebih tingginya pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan BUS dan UUS dibandingkan dana pihak ketiga yang dikelola.

## C. Permodalan

OJK mencatat ketahanan perbankan syariah relatif cukup kuat yang diindikasikan oleh tingkat permodalan yang memenuhi persyaratan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM). Pada periode laporan, CAR BUS meningkat 175 bps (*qtq*) menjadi 17,91%, sementara aset tertimbang menurut risiko (ATMR) BUS sebesar Rp173,69 triliun. Di sisi penyebut, ATMR yang dibentuk BUS tumbuh 6,36% (*yoy*), atau lebih rendah dari pertumbuhan modal.

## D. Pembiayaan

Penggunaan dana perbankan syariah didominasi untuk tujuan pembiayaan. Secara triwulanan, penyaluran pembiayaan bank syariah tumbuh 5,20% (*qtq*) atau lebih tinggi dibandingkan posisi triwulan III-2017 yang tumbuh sebesar 2,36% (*qtq*). Percepatan pertumbuhan antara lain dipengaruhi oleh meningkatnya pembiayaan ke sektor listrik, gas, dan air sebesar 42,82% (*qtq*) serta pembiayaan sektor rumah tangga sebesar 5,40% (*qtq*). Hal tersebut juga tercermin pada tingginya laju pertumbuhan pembiayaan investasi, konsumsi, serta pembiayaan modal kerja yang masing-masing tumbuh sebesar 5,51%, 5,47%, dan 4,67% (*qtq*). Kualitas pembiayaan bank syariah secara triwulan sedikit menurun, ditandai dengan meningkatnya NPF *Gross* sebesar 1 bps (*qtq*) menjadi 3,87%. Secara *year-on-year* kualitas pembiayaan masih membaik, terlihat dari menurunnya rasio NPF *gross* sebesar 28 bps (*yoy*) dari 4,15% pada Desember 2016.

Secara spasial, sebagian besar pembiayaan masih terpusat di wilayah Jawa sebesar 72,45%, khususnya DKI Jakarta (43,12%), Jawa Barat (11,09%), Jawa Timur (8,52%), dan Jawa Tengah (5,92%). Besarnya dominasi pembiayaan antara lain dipengaruhi kondisi infrastruktur serta akses keuangan yang lebih baik di pulau Jawa dibandingkan di wilayah lainnya terutama Bagian Timur Indonesia. Besarnya pembiayaan yang terpusat di wilayah Jawa didukung pula dengan sebaran jaringan kantor BUS dan UUS yang masih terkonsentrasi di wilayah Jawa.

## E. Rentabilitas dan Efisiensi

Rentabilitas BUS dan UUS menurun, tercermin dari rasio ROA sebesar 1,17%, sedikit lebih

rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 1,41%. Akan tetapi secara *year-on-year* ROA mengalami peningkatan dipengaruhi oleh meningkatnya pembiayaan serta efisiensi bank syariah sehingga turut mendorong kenaikan laba sebesar 49,69% (yoy) dari Rp2,95 triliun pada Desember 2016 menjadi Rp4,42 triliun pada Desember 2017.

Efisiensi bank syariah juga sedikit menurun tercermin dari naiknya rasio BOPO menjadi 89,62%, dibandingkan posisi September 2017 yang sebesar 87,46%. Akan tetapi secara *year-on-year* terjadi peningkatan pada efisiensi bank syariah. Selain itu, perbaikan rentabilitas juga tercermin dari meningkatnya NOM sebesar 10 bps menjadi 1,16% sebagai dampak dari meningkatnya pembiayaan.

**Tabel III - 1** Indikator Perbankan Syariah

Indikator Utama	Triwulan IV-2016	Triwulan I-2017	Triwulan II-2017	Triwulan III-2017	Triwulan IV-2017	Pertumbuhan (q <sub>tq</sub> )	
						Nominal	%
<b>SHARE TOTAL ASET BUS + UUS + BPRS</b>							
Total aset BUS + UUS (dalam Triliun Rupiah)	356,50	358,74	378,20	395,09	424,18	29,09	7,36
Total aset BPRS (dalam Triliun Rupiah)	9,16	9,42	9,67	10,21	10,84	0,63	6,17
Share Aset Perbankan Syariah (BUS+UUS+BPRS) terhadap Total Perbankan Indonesia (BUS+BUK+BPRS+BPR)	5,34	5,29	5,42	5,57	5,78		0,22
<b>BUS + UUS</b>							
DPK (dalam Triliun Rupiah)	279,33	286,18	302,01	318,57	334,89	16,31	5,12
- Giro	27,97	30,62	35,97	38,21	40,19	1,98	5,19
- Tabungan	85,19	85,84	86,94	90,47	98,50	8,03	8,87
- Deposito	166,17	169,72	179,10	189,90	196,20	6,30	3,32
Pembiayaan (dalam Triliun Rupiah)	248,01	250,54	265,32	271,58	285,69	14,12	5,20
Jumlah NPF (dalam Triliun Rupiah)	10,31	10,75	10,59	10,53	11,05	0,52	4,96
CAR (%) – BUS	16,63	16,98	16,42	16,16	17,91		1,75
NPF Gross (%)	4,16	4,29	3,99	3,88	3,87		-0,01
ROA (%)	0,95	1,53	1,49	1,41	1,17		-0,24
BOPO (%)	93,62	88,58	87,13	87,46	89,62		2,16
FDR (%)	88,78	87,55	87,85	85,25	85,31		0,06
<b>Jumlah Bank</b>							
- BUS	13	13	13	13	13	0,00	0,00
- UUS	21	21	21	21	21	0,00	0,00
<b>Jumlah Kantor</b>	<b>2201</b>	<b>2184</b>	<b>2185</b>	<b>2189</b>	<b>2169</b>	<b>-20,00</b>	<b>-0,91</b>
<b>BPRS</b>							
DPK (dalam Triliun Rupiah)	5,82	6,02	6,04	6,49	6,99	0,50	7,72
Pembiayaan (dalam Triliun Rupiah)	6,66	7,04	7,52	7,56	7,76	0,21	2,75
Jumlah NPF (dalam Triliun Rupiah)	0,58	0,70	0,81	0,82	0,75	-0,06	-7,97
CAR (%)	21,73	21,53	20,62	20,89	20,81		-0,08
NPF Gross (%)	8,63	9,94	10,71	10,79	9,68		-1,11
ROA (%)	2,27	2,29	2,24	2,56	2,55		-0,01
BOPO (%)	87,09	85,13	86,50	86,31	85,34		-0,97
FDR (%)	114,40	116,98	124,47	116,49	111,12		-5,37
<b>Jumlah Bank</b>	<b>166</b>	<b>166</b>	<b>167</b>	<b>167</b>	<b>167</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Kantor</b>	<b>453</b>	<b>454</b>	<b>456</b>	<b>444</b>	<b>441</b>	<b>-3,00</b>	<b>-0,68</b>

Sumber : Data Statistik Perbankan Indonesia dan Sistem Informasi Perbankan Syariah, Desember 2017

### 3.1.2 Perkembangan Industri Pasar Modal Syariah

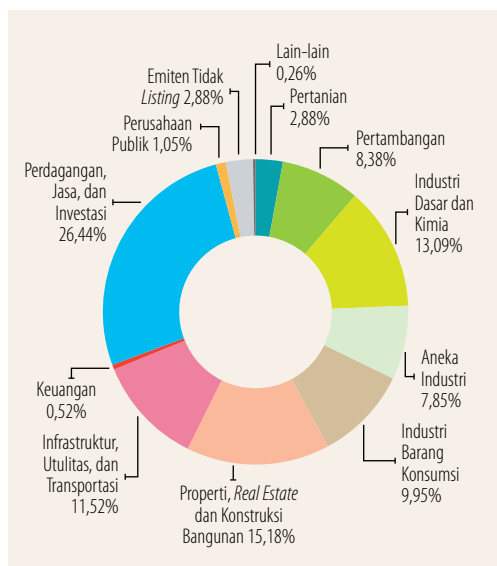
Pada triwulan IV-2017 terjadi peningkatan pada industri pasar modal syariah jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Peningkatan tersebut terjadi pada sukuk korporasi baik jumlah maupun nilainya, reksa dana syariah baik dari sisi jumlah maupun NAB dan saham syariah baik dari sisi indeksnya maupun kapitalisasinya. Selain itu, peningkatan juga terjadi pada sukuk negara *outstanding*.

#### A. Perkembangan Saham Syariah

OJK menerbitkan Daftar Efek Syariah (DES) periode II meliputi 375 Efek jenis Saham Emiten dan Perusahaan Publik serta Efek syariah lainnya. Sejak diterbitkannya DES Periode II sampai akhir triwulan IV-2017, terdapat penambahan tujuh saham yang masuk dalam DES yang diperoleh dari hasil penelaahan DES insidental bersamaan dengan efektifnya pernyataan pendaftaran Emiten yang melakukan penawaran umum perdana saham. Secara keseluruhan, saham yang termasuk dalam DES hingga akhir Desember 2017 berjumlah 382 saham.

Mayoritas Saham Syariah berasal dari sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi

**Grafik III - 1** Sektor Industri Saham Syariah di Indonesia



sebanyak 101 saham (26,44%), sektor Properti, Real Estate & Konstruksi sebanyak 58 saham (15,18%), sektor Industri Dasar dan Kimia sebanyak 50 saham (13,09%), sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi sebanyak 44 saham (11,52%) dan 129 saham sektor-sektor lainnya masing-masing di bawah 10%.

Kinerja saham syariah, dapat dilihat pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan Jakarta Islamic Index (JII). Pada akhir tahun 2017, ISSI ditutup pada level 189,86 poin atau meningkat sebesar 3,06%. Sementara itu, kapitalisasi pasar saham yang tergabung dalam ISSI per Desember 2017 sebesar Rp3.704,54 triliun atau 52,53% dari total kapitalisasi pasar seluruh Saham sebesar Rp7.052.388 triliun, meningkat sebesar 6,49% jika dibandingkan kapitalisasi pasar Saham ISSI pada akhir periode triwulan III-2017.

**Tabel III - 2** Perkembangan Kapitalisasi Saham Syariah (dalam jutaan rupiah)

Tahun	Jakarta Islamic Index	Indeks Saham Syariah Indonesia	Indeks Harga Saham Gabungan
2012	1.671.004,23	2.451.334,37	4.126.994,93
2013	1.672.099,91	2.557.846,77	4.219.020,24
2014	1.944.531,70	2.946.892,79	5.228.043,48
2015	1.737.290,98	2.600.850,72	4.872.701,66
2016	2.035.189,92	3.170.056,08	5.753.612,76
2017	Triwulan I	2.106.211,65	3.323.611,39
	Triwulan II	2.231.679,45	3.491.395,41
	Triwulan III	2.188.062,82	3.478.918,47
	Triwulan IV	2.288.015,67	3.704.543,09

**Tabel III - 3** Perkembangan Indeks Saham Syariah (dalam jutaan rupiah)

Tahun	Jakarta Islamic Index	Indeks Saham Syariah Indonesia	Indeks Harga Saham Gabungan
2012	594,78	144,99	4.316,69
2013	585,11	143,71	4.274,18
2014	691,04	168,64	5.226,95
2015	603,35	145,06	4.593,01
2016	694,13	172,08	5.296,71
2017	Triwulan I	718,35	180,49
	Triwulan II	749,60	185,22
	Triwulan III	733,30	184,23
	Triwulan IV	759,07	189,86

## B. Perkembangan Sukuk Korporasi

Selama periode triwulan IV-2017 terdapat penerbitan 14 seri Sukuk Korporasi dengan total nilai penerbitan Rp 1,94 triliun. Selain itu, terdapat pula 4 seri Sukuk Korporasi yang jatuh tempo dengan total Rp397miliar. Dengan demikian, jumlah outstanding Sukuk korporasi menjadi sebanyak 79 seri atau meningkat sebesar 17,91% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Dari sisi nilai *outstanding* sebesar Rp 15.740 triliun atau meningkat sebesar 11,66% dibandingkan triwulan sebelumnya.

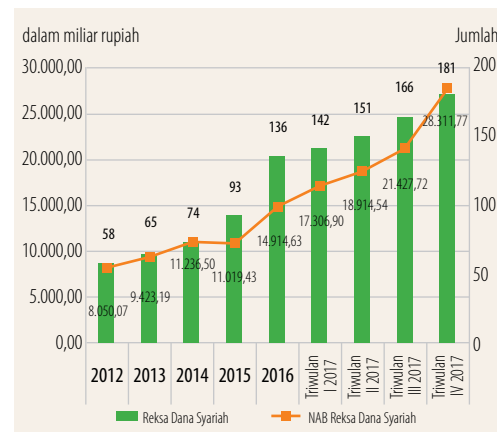
## C. Perkembangan Reksa Dana Syariah

Selama triwulan IV-2017 terdapat 17 Reksa Dana Syariah efektif terbit. Sampai akhir Desember 2017, total Reksa Dana Syariah yang beredar sebanyak 181 dengan NAB sebesar Rp28,31 triliun atau meningkat 9,04% dari sisi jumlah dan meningkat 32,13% dari sisi NAB dibanding periode sebelumnya. Proporsi jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah terhadap total industri Reksa Dana masing-masing mencapai 10,19% dari total 1.777 Reksa Dana dan 6,19% dari total NAB Reksa Dana sebesar Rp457,50 triliun.

Tabel III - 4 Perkembangan Emisi Sukuk Korporasi

Tahun	Emisi Sukuk		Sukuk Outstanding		
	Total Nilai (dalam miliar rupiah)	Total Jumlah	Total Nilai (dalam miliar rupiah)	Total Jumlah	
2012	9.790	54	6.883	32	
2013	11.994	64	7.553	36	
2014	12.956	71	7.105	35	
2015	16.114	87	9.902	47	
2016	20.425	102	11.878	53	
2017	Triwulan I	20.793	105	12.134	55
	Triwulan II	21.443	111	15.314	71
	Triwulan III	21.441	122	14.096	67
	Triwulan IV	26.394	137	15.740	79

Grafik III - 2 Perkembangan Jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah



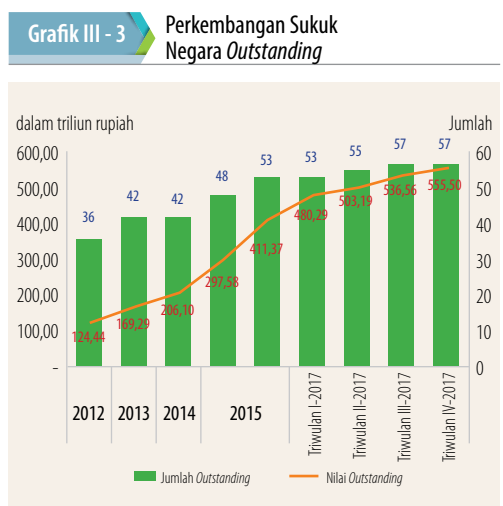
Tabel III - 5 Perkembangan Reksa Dana Syariah

Tahun	Perbandingan Jumlah Reksa Dana				Perbandingan NAB (dalam miliar rupiah)				
	Reksa Dana Syariah	Reksa Dana Konvensional	Reksa Dana Total	%	Reksa Dana Syariah	Reksa Dana Konvensional	Reksa Dana Total	%	
2012	58	696	754	7,69%	8.050,07	204.541,97	212.592,04	3,79%	
2013	65	758	823	7,90%	9.432,19	183.112,33	192.544,52	4,90%	
2014	74	820	894	8,31%	11.236,00	230.225,59	241.462,09	4,65%	
2015	93	998	1.091	8,52%	11.019,43	260.949,57	271.969,00	4,05%	
2016	136	1.289	1.425	9,54%	14.914,63	323.835,18	338.749,81	4,40%	
2017	Triwulan I	142	1349	1491	9,52%	17.306,90	347.114,82	364.421,72	4,75%
	Triwulan II	151	1.376	1.527	9,89%	18.914,54	363.929,69	382.844,23	4,94%
	Triwulan III	166	1.511	1.677	9,90%	21.427,72	392.607,61	414.035,34	5,18%
	Triwulan IV	181	1.596	1777	10,19%	28.311,77	429.194,80	457.506,57	6,19%

#### D. Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara, adalah surat berharga yang diterbitkan oleh negara berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

Sampai akhir Desember 2017, jumlah keseluruhan SBSN yang *outstanding* sebanyak 57 seri, dengan nilai sebesar Rp555,50 triliun, tidak terdapat perubahan pada jumlahnya, namun meningkat dari sisi nilai sebesar 5,53% dibandingkan periode sebelumnya.



**Tabel III - 6** Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara *Outstanding*

Tahun	Nilai <i>Outstanding</i> (dalam triliun rupiah)	Total Jumlah <i>Outstanding</i>
2010	44,34	16
2011	77,73	22
2012	124,44	36
2013	169,29	42
2014	206,10	42
2015	296,07	47
2016	411,37	53
2017	Triwulan I	480,29
	Triwulan II	503,19
	Triwulan III	536,56
	Triwulan IV	555,50

#### E. Perkembangan Jasa Syariah di Pasar Modal

Sampai dengan triwulan IV-2017, para pihak yang terlibat atau telah mempunyai jasa layanan di Pasar Modal syariah meliputi:

- Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana Syariah berjumlah 48 Manajer Investasi.
- Perusahaan Efek turut serta sebagai penjamin Emisi dalam penerbitan Sukuk Korporasi berjumlah 27 Penjamin Emisi Efek
- Terdapat 10 Pihak yang telah memperoleh persetujuan dari OJK sebagai Pihak Penerbit DES.
- Bank Kustodian yang telah memperoleh rekomendasi DSN-MUI untuk memberikan layanan syariah berjumlah 14 bank
- Perusahaan Efek yang telah mengembangkan dan melaksanakan perdagangan *online* saham berdasarkan prinsip syariah (*online trading* syariah) berjumlah 12 Perusahaan Efek.
- Terdapat enam Wali Amanat yang telah terlibat dalam perwaliamanatan penerbitan Sukuk Korporasi.
- Terdapat 62 pihak yang telah memperoleh izin Ahli Syariah Pasar Modal dari OJK.

#### 3.1.3 Perkembangan IKNB Syariah

Selama triwulan IV-2017, aset IKNB Syariah mengalami peningkatan sebesar 1,82% dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi Rp99,13 triliun. Aset industri perasuransian syariah mendominasi porsinya yaitu sebesar 40,87% dari total aset IKNB syariah secara keseluruhan.

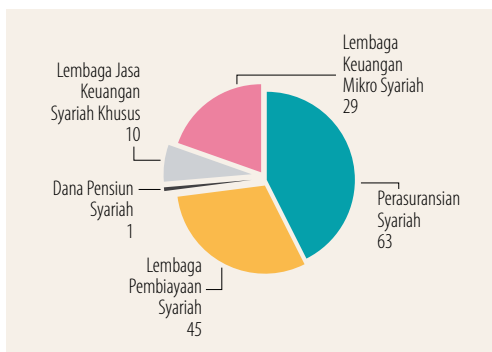
Sampai akhir triwulan IV-2017, terdapat 63 perusahaan perasuransian syariah, 45 lembaga pembiayaan syariah, satu Dana Pensiun Syariah, 10 lembaga jasa keuangan syariah khusus, dan

**Tabel III - 7** Aset IKNB Syariah (dalam triliun rupiah)

No.	Industri	Triwulan IV-2016	Triwulan I-2017	Triwulan II-2017	Triwulan III-2017	Triwulan IV-2017
1	Perasuransian Syariah	33,24	35,25	37,37	38,21	40,52
2	Lembaga Pembiayaan Syariah	36,94	37,64	38,78	36,80	34,48
3	Dana Pensiun Syariah	-	-	-	-	1,29
4	Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus	18,43	19,61	21,39	22,26	22,74
5	Lembaga Keuangan Mikro Syariah	0,06	0,07	0,07	0,10	0,10
<b>Total</b>		<b>88,67</b>	<b>92,57</b>	<b>97,61</b>	<b>97,37</b>	<b>99,13</b>

29 lembaga keuangan mikro syariah. Selama periode laporan, terdapat 14 penambahan jumlah entitas IKNB Syariah.

**Grafik III - 4** Jumlah Entitas IKNB Syariah Triwulan IV-2017



#### A. Industri Perasuransian Syariah

Pada triwulan IV-2017, industri perasuransian syariah mengalami peningkatan nilai aset, investasi, kontribusi bruto, dan klaim bruto masing-masing sebesar 6,05%, 5,34%, 46,34%, dan 46,88% menjadi Rp40,52 triliun, Rp35,31 triliun, Rp13,99 triliun, dan Rp4,95 triliun dibandingkan triwulan III-2017. Kewajiban juga mengalami penurunan sebesar 11,49% menjadi Rp7,78 triliun.

**Tabel III - 8** Indikator Perusahaan Perasuransian Syariah (dalam triliun rupiah)

No.	Jenis Indikator	Triwulan IV-2016	Triwulan I-2017	Triwulan II-2017	Triwulan III-2017	Triwulan IV-2017
<b>1</b>	<b>Aset</b>					
	Asuransi Jiwa Syariah	27,08	28,93	30,42	31,32	33,48
	Asuransi Umum Syariah	4,80	4,91	4,98	5,28	5,37
	Reasuransi Syariah	1,37	1,42	1,96	1,61	1,66
	<b>Jumlah</b>	<b>33,24</b>	<b>35,25</b>	<b>37,37</b>	<b>38,21</b>	<b>40,52</b>
<b>2</b>	<b>Investasi</b>					
	Asuransi Jiwa Syariah	24,56	26,28	27,41	28,78	30,42
	Asuransi Umum Syariah	3,16	3,23	3,36	3,54	3,67
	Reasuransi Syariah	1,08	1,12	1,49	1,19	1,22
	<b>Jumlah</b>	<b>28,81</b>	<b>30,63</b>	<b>32,26</b>	<b>33,52</b>	<b>35,31</b>
<b>3</b>	<b>Kontribusi Bruto</b>					
	Asuransi Jiwa Syariah	9,49	2,39	4,91	7,60	11,34
	Asuransi Umum Syariah	2,13	0,51	0,95	1,43	1,88
	Reasuransi Syariah	0,41	0,13	0,30	0,53	0,78
	<b>Jumlah</b>	<b>12,03</b>	<b>3,03</b>	<b>6,16</b>	<b>9,56</b>	<b>13,99</b>
<b>4</b>	<b>Klaim Bruto</b>					
	Asuransi Jiwa Syariah	3,32	0,85	1,73	2,21	3,53
	Asuransi Umum Syariah	0,76	0,22	0,46	0,68	0,88
	Reasuransi Syariah	0,25	0,09	0,24	0,49	0,53
	<b>Jumlah</b>	<b>4,34</b>	<b>1,16</b>	<b>2,44</b>	<b>3,37</b>	<b>4,95</b>
<b>5</b>	<b>Kewajiban</b>					
	Asuransi Jiwa Syariah	3,45	3,91	4,07	5,37	4,32
	Asuransi Umum Syariah	2,56	2,66	2,66	2,82	2,86
	Reasuransi Syariah	0,46	0,47	0,64	0,60	0,59
	<b>Jumlah</b>	<b>6,47</b>	<b>7,05</b>	<b>7,37</b>	<b>8,79</b>	<b>7,78</b>

Pengelolaan perusahaan perasuransian syariah dilakukan dalam bentuk *full fledged* dan unit syariah. Sampai akhir periode laporan terdapat 63 perusahaan yang terdiri dari 12 perusahaan asuransi syariah, 48 perusahaan asuransi yang memiliki unit syariah, satu perusahaan reasuransi syariah, dan dua perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariah. Pengelolaan Dana Pensiun Syariah terdiri dari satu Dana Pensiun Syariah berbentuk *full fledged* dengan aset sebesar Rp1,29 triliun.

## B. Industri Pembiayaan Syariah

Pada triwulan IV-2017, jumlah aset perusahaan pembiayaan syariah pada periode pelaporan mengalami penurunan sebesar 9,34% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya menjadi Rp32,26 triliun.

**Tabel III - 9** Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah (dalam miliar rupiah)

No.	Komponen	Triwulan IV-2016	Triwulan I-2017	Triwulan II-2017	Triwulan III-2017	Triwulan IV-2017
1	Kas dan Setara Kas	643,08	602,17	955,26	833,92	1.103,56
2	Aset Tagihan Derivatif	16,77	-10,27			4,02
3	Investasi Jangka Pendek dalam Surat Berharga					
4	Piutang Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah - Neto	33.073,30	33.746,41	34.050,84	31.993,54	28.645,49
5	Penyertaan Modal					
6	Investasi Jangka Panjang dalam Surat Berharga					
7	Aset yang Disewaoperasikan - Neto	109,00	95,71	111,28	98,05	88,45
8	Aset tetap dan Inventaris - Neto	151,85	144,30	124,20	118,03	114,60
9	Aset Pajak Tangguhan	19,30	23,23	23,57	48,23	24,80
10	Rupa-Rupa Aset	1.727,63	1.888,20	2.224,19	2.486,93	2.275,66
	Total	35.740,95	36.489,75	37.489,36	35.578,71	32.256,57

Sampai akhir triwulan IV-2017 terdapat 37 perusahaan pembiayaan syariah, yang terdiri atas tiga perusahaan berbentuk *full fledged* dan 34 perusahaan berbentuk UUS. Pada perusahaan modal ventura syariah, terdapat empat perusahaan berbentuk *full fledged* dan tiga perusahaan berbentuk UUS dengan total aset sebesar Rp1.108,69 miliar. Selain itu, terdapat satu perusahaan pembiayaan infrastruktur unit syariah dengan aset sebesar Rp1.110,59 miliar.

## C. Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus terdiri dari enam Perusahaan Penjaminan

Syariah, unit syariah pada PT Pegadaian (Persero) dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dan dua Pergadaian Swasta. Jumlah perusahaan penjaminan syariah sebanyak enam perusahaan, terdiri atas dua *full fledged* dan empat UUS dengan total aset sebesar Rp1,07 triliun. Aset kegiatan syariah pada PT Pegadaian (Persero) dan LPEI masing-masing sebesar Rp5,22 triliun dan Rp16,45 triliun. Sementara itu, jumlah Lembaga Keuangan Mikro Syariah adalah sebanyak 29 perusahaan berbentuk *full fledged* dengan total aset Rp99,96 miliar.

## 3.2 PENGATURAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

### 3.2.1 Pengaturan Perbankan Syariah

Sepanjang triwulan IV-2017, terdapat satu ketentuan yang diterbitkan dan berlaku bagi BUS dan UUS, yaitu POJK Nomor 59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (POJK Remunerasi BUS dan UUS). POJK ini merupakan penyempurnaan dari pengaturan terkait remunerasi tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sehingga tidak mencabut peraturan sebelumnya secara keseluruhan. POJK Remunerasi BUS dan UUS bertujuan untuk mendorong dilakukannya *prudent risk taking*, transparansi informasi, dan kesesuaian dengan prinsip syariah dalam pemberian remunerasi. Perbedaan pengaturan antara POJK Remunerasi BUS dan UUS dengan POJK Remunerasi BUK adalah terdapat pengaturan terkait penerapan prinsip syariah dan pengaturan remunerasi bagi DPS.

Selain itu, OJK menerbitkan SEOJK Nomor 56/SEOJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pengaturan ini merupakan peraturan pelaksanaan dari POJK Nomor 19/POJK.03/2017





tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Status pengawasan BPRS dan BPRS terdiri dari pengawasan normal, pengawasan intensif, dan pengawasan khusus.

### 3.2.2 Pengaturan Pasar Modal Syariah

Selama triwulan IV-2017, OJK menerbitkan POJK Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Peraturan ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan industri keuangan syariah, khususnya Pasar Modal syariah dengan kebutuhan pengembangan pasar saat ini serta memperkuat kerangka hukum Pasar Modal syariah untuk memberikan kepastian hukum serta meningkatkan kepercayaan pasar untuk mempercepat pertumbuhan Efek syariah sebagaimana telah tercantum dalam *Roadmap Pasar Modal Syariah 2015-2019*.

Dalam peraturan ini diatur antara lain:

- Daftar Efek Syariah hanya dapat memuat Efek Syariah yang diperdagangkan di luar negeri.
- Efek Syariah yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah.
- Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah dilarang memuat Efek Syariah.
- Kewajiban Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan pemenuhan kesyariahan atas Efek Syariah yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah.
- Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah wajib mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan kecuali bagi Manajer Investasi Syariah dan/atau Manajer Investasi yang memiliki Unit Pengelolaan Investasi Syariah.
- Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah dapat mengumumkan Daftar Efek Syariah yang diterbitkannya kepada publik dan/atau menggunakannya secara terbatas untuk kepentingan pihak tertentu.
- Dalam hal mengumumkan, maka Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah wajib mengumumkan setiap perubahannya.
- Dalam hal menggunakan secara terbatas,

maka Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah wajib menyampaikan laporan setiap tahunnya kepada Otoritas Jasa Keuangan

### 3.2.3 Pengaturan IKNB Syariah

Selama triwulan IV-2017, OJK menerbitkan SEOJK Nomor 54/SEOJK.05/2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin.

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 58 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6015), perlu untuk mengatur mengenai bentuk, susunan dan tata cara penyampaian laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi lembaga penjamin dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. Secara garis besar pihak-pihak yang diatur didalam laporan tersebut meliputi Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.

## 3.3 PENGAWASAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

### 3.3.1 Pengawasan Perbankan Syariah

Optimisme terhadap perekonomian yang membaik memberikan harapan positif dan mendorong penyaluran pembiayaan oleh perbankan syariah (BUS) sehingga mencapai Rp186,37 triliun di triwulan IV-2017 (tumbuh 6,77% yoy). Sejalan harapan positif tersebut, stimulus ketentuan mengenai restrukturisasi pembiayaan yang tidak diperpanjang lagi telah menyebabkan adanya peningkatan NPF *gross (net)* dari 4,49% (2,72%) menjadi 5,27% (3,05%). Meski demikian, masing-masing BUS terus mengoptimalkan pengelolaan NPF sehingga mampu menahan penurunan kualitas pembiayaan dari portofolio pembiayaan sektor tertentu. Sejalan dengan meningkatnya pemahaman tersebut, permodalan industri

Perbankan Syariah (terutama untuk BUS) sampai dengan triwulan IV-2017 semakin terjaga dan tetap berada di atas *threshold* (rasio KPMM minimum 14%), yakni 17,00% atau meningkat dibandingkan periode sebelumnya 16,40%.

Dari sisi operasional, secara umum efisiensi masih memerlukan penyempurnaan akibat struktur dana BUS masih didominasi oleh dana mahal (deposito) dan rendahnya *fee based income*. Di sisi lain, dengan adanya peningkatan NPF menyebabkan tiap BUS membentuk pencadangan yang lebih besar dan mengakibatkan rasio BOPO naik dari 92,03% pada triwulan sebelumnya menjadi 94,05%. Terkait hal tersebut, masing-masing BUS terus berupaya mengoptimalkan pendapatan dan biaya melalui penyempurnaan layanan dan produk, peningkatan efisiensi dan produktifitas karyawan, optimalisasi jaringan kantor dengan mengurangi jaringannya secara bertahap (*network reprofiling*) dan membuka layanan tanpa kantor.

Berkenaan dengan profil risiko Perbankan Syariah yang cenderung stabil akibat upaya perbaikan yang dilakukan oleh masing-masing BUS dan didukung oleh efektifitas *supervisory action* OJK dalam menjaga kelangsungan bank, maka *rating* peringkat RBBR di Perbankan Syariah masih sejalan dengan periode sebelumnya (Juni 2017), yaitu tergolong Cukup Sehat. Adapun potensi risiko utama masih berasal dari risiko kredit dan risiko operasional, sehingga *Supervisory Plan* 2018 masih difokuskan pada kedua risiko tersebut. Adapun aspek permodalan dan rentabilitas hanya menjadi *concern Supervisory Plan* pada BUS tertentu.

### 3.3.2 Pengawasan Pasar Modal Syariah

Sampai akhir triwulan IV-2017, terdapat 10 Pihak yang memperoleh persetujuan dari OJK sebagai Pihak Penerbit DES, yaitu: PT CIMB Principal Asset Management, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, PT BNP Paribas Investment Partners, PT Schroders Investment Management Indonesia, PT Aberdeen Asset

Management, PT Bahana TCW Investment Management, PT Mandiri Manajemen Investasi, PT Maybank Asset Management, PT Eastspring Investments Indonesia dan PT Indosurya Asset Management.

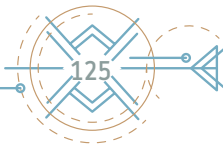
Terkait pengawasan terhadap Pihak Penerbit DES yang telah ada, telah dilakukan pengawasan berdasarkan laporan DES yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit DES secara periodik yang telah disampaikan oleh Pihak tersebut. Laporan perubahan DES periodik dari masing-masing Pihak Penerbit DES tersebut didasari oleh perubahan yang dilakukan oleh masing-masing penyedia indeks luar negeri.

### 3.3.3 Pengawasan IKNB Syariah

Selama periode laporan, OJK melakukan pengawasan terhadap 63 perusahaan perasuransian syariah dan menerbitkan tiga Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Sementara (LHPLS) serta empat Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Final (LHPLF) terhadap Perusahaan Perasuransian syariah. OJK juga melakukan pemeriksaan *on-site* terhadap satu Perusahaan Perasuransian syariah. Terkait dengan pengawasan terhadap Lembaga Pembiayaan dan Industri Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus, OJK menerbitkan satu LHPLS Perusahaan Pembiayaan Syariah, satu LHPLF Perusahaan Penjaminan Syariah, dua LHPLF Perusahaan Pembiayaan Syariah, serta melakukan pemeriksaan *on-site* terhadap satu Perusahaan Pembiayaan Syariah dan satu pegadaian syariah.

Berkaitan dengan layanan kelembagaan, OJK melakukan kegiatan:

1. Pemberian Izin Usaha.  
OJK memberikan izin usaha pegadaian syariah PT Jasa Gadai Syariah, izin unit syariah kepada PT. MNC Asuransi Indonesia, izin usaha di bidang asuransi umum dengan prinsip syariah kepada PT Asuransi Askrida Syariah, dan pencatatan pendaftaran penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi



- informasi PT Ammana Fintek Syariah, Perizinan Dana Pensiun dari DPLK Syariah PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk
2. Pencabutan Izin Usaha  
OJK melakukan pencabutan izin UUS PT Trust Finance Indonesia Tbk
  3. Kantor Cabang Syariah  
OJK memberikan izin satu kantor cabang syariah Perusahaan Penjaminan Syariah; pencatatan kantor selain kantor cabang pada tiga Perusahaan Pembiayaan Syariah dan satu Perusahaan Perasuransian Syariah.
  4. Dewan Pengawas Syariah  
OJK melakukan pencatatan perubahan Dewan Pengawas Syariah pada satu Perusahaan Pembiayaan Syariah dan empat Perusahaan Perasuransian Syariah.
  5. Pimpinan Unit Syariah  
OJK melakukan pengadministrasian pengangkatan Pimpinan Unit Syariah pada tiga Perusahaan Perasuransian Syariah
  6. Tenaga Ahli  
OJK melakukan pengadministrasian tenaga ahli unit syariah pada lima Perusahaan Perasuransian Syariah.
  7. Produk Asuransi syariah  
OJK melakukan persetujuan 17 produk baru asuransi jiwa syariah dan sembilan produk baru asuransi umum syariah, serta pencatatan tujuh produk asuransi jiwa syariah dan persetujuan kerjasama pemasaran *Bancassurance* 19 produk asuransi syariah.
  8. Uji kemampuan dan Kepatutan  
OJK melakukan uji kemampuan dan kepatutan terhadap lima Dewan Pengawas Syariah (DPS) perusahaan asuransi syariah, empat DPS Dana Pensiun Syariah, empat DPS Pembiayaan syariah, dan dua DPS Perusahaan Penjaminan Syariah. OJK juga melakukan uji kemampuan dan kepatutan terhadap lima Direksi Perusahaan asuransi

umum syariah, tiga Direksi Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah, dua Direksi perusahaan pembiayaan syariah, dan satu Direksi Perusahaan Modal Ventura Syariah.

Selama periode laporan, OJK juga melakukan uji kemampuan dan Kepatutan terhadap satu komisaris utama perusahaan asuransi jiwa syariah, dua komisaris independen perusahaan asuransi jiwa syariah, dan dua komisaris independen perusahaan asuransi umum syariah. OJK juga melakukan uji kemampuan dan kepatutan terhadap satu Aktuaris Perusahaan asuransi jiwa syariah, satu Pengendali Perusahaan asuransi jiwa syariah, satu Auditor Internal Perusahaan asuransi jiwa syariah, dan satu Auditor Internal Perusahaan asuransi umum syariah.

### 3.4 PENGEMBANGAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

#### 3.4.1 Pengembangan Perbankan Syariah

##### A. Kajian Dampak *Multilicense* bagi BPRS

Penerapan ketentuan yang bersifat *one fits for all* bagi industri BPRS dirasakan tidak tepat lagi, karena terdapat kesenjangan (*gap*) aset dan permodalan yang cukup lebar dalam industri BPRS. Terkait hal tersebut, telah dilakukan analisis data kajian dengan metodologi kualitatif dan kuantitatif. Metodologi kualitatif digunakan untuk memetakan 167 BPRS berdasarkan kinerja dan ketentuan BPRS existing, pemetaan berdasarkan kebijakan BPR KU, dan perbandingan pengaturan *rural banking* di negara lain. Metodologi kuantitatif menggunakan metode *Two Step Clustering* untuk mendapatkan kelompok BPRS yang memiliki karakteristik berdekatan. Selanjutnya telah dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan praktisi BPRS untuk mendapatkan masukan.

## B. Kajian *Platform Sharing* Perbankan Syariah

Kajian ini bertujuan mendukung perkembangan industri perbankan syariah terkait dengan kewajiban UUS untuk melakukan *spin-off* pada tahun 2023 dilakukan serangkaian *assessment* dan diskusi untuk mempertajam analisis terkait *platform sharing*, antara lain:

- i. Review literatur terkait *shared service*, *subsidiaries governance*, kaidah fikih dan fatwa, serta *benchmarking* pengaturan negara lain yang sudah mengimplementasikan model *platform sharing*;
- ii. *Assessment* kesiapan UUS dalam melakukan *spin-off*;
- iii. Analisis kontribusi BUS dan UUS terhadap BUK induk, tingkat efisiensi BUS-UUS, dampak *platform sharing* yang sudah diimplementasikan serta simulasi *cost saving* dari model *platform sharing*;
- iv. Diskusi dengan pakar untuk memperoleh masukan tentang manfaat dan konsekuensi *spin-off* UUS bagi industri perbankan syariah dan perekonomian nasional, FGD dengan industri perbankan syariah serta *in-depth interview* dengan beberapa UUS untuk mengetahui praktik *platform sharing* pada masing-masing bank serta masukan mengenai konsep *platform sharing* yang dibutuhkan industri;
- v. FGD dengan DSN-MUI untuk membahas kesesuaian kebijakan *platform sharing* terhadap prinsip syariah.

## C. Kajian Model Bisnis dan Pendirian Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Syariah - Bank Wakaf Mikro di Pondok Pesantren

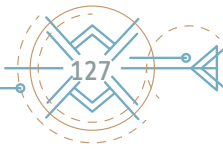
Pada triwulan IV-2017, OJK memfasilitasi pendirian LKM Syariah – Bank Wakaf Mikro agar dapat beroperasi sesuai dengan rancangan model bisnis yang disusun. Sampai akhir periode laporan, OJK

memberikan izin usaha kepada 10 LKM Syariah yang merupakan percontohan tahap awal, dan satu LKM Syariah lainnya yang merupakan bagian dari program pendirian LKM Syariah tahap kedua. OJK juga memfasilitasi pendirian sembilan LKM Syariah lainnya yang diharapkan dapat berdiri pada awal 2018.

Khusus untuk 10 LKM Syariah tahap awal, setelah menyalurkan pembiayaan pertama saat ini setiap LKM Syariah memanfaatkan dana modal kerja Rp100 juta untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada nasabah dengan total pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp586 juta dengan total jumlah nasabah 747 orang. Dengan perkembangan kinerja LKM Syariah hingga saat ini, serta mempertimbangkan potensi jumlah 28.194 pesantren di seluruh Indonesia, pada tahun 2018 dicanangkan Gerakan Nasional Pendirian Seribu LKM Syariah di seluruh Indonesia dengan potensi calon nasabah mencapai 2 juta orang.

## D. Penyusunan Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan (SNPPK)

SNPPK merupakan salah satu amanat dari pembentukan Forum Koordinasi - Pembiayaan Pembangunan Melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK) yang beranggotakan OJK, BI dan Kemenkeu. Dalam rangka penyusunan SNPPK, OJK berperan sebagai salah satu anggota Tim Teknis yang bertugas menganalisis peran perbankan syariah terhadap pengembangan dan pendalaman pasar keuangan. Konsep SNPPK telah dibahas pada *High Level Meeting* tiga lembaga bersamaan dengan rapat KSSK Selama triwulan IV-2017, telah dilakukan serangkaian FGD untuk melengkapi konsep SNPPK dengan berbagai narasumber antara lain IMF, BUMN Pelaksana Proyek Infrastruktur, KPPIP, dll.



#### E. Penyusunan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) BPRS

Sebagai tindak lanjut SKKNI BPRS yang telah diterbitkan, OJK merumuskan KKNI BPRS. Pada bulan Oktober, OJK menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) dan *workshop* Perumusan KKNI BPRS dengan industri, Kementerian Ketenagakerjaan RI, ASBISINDO BPRS dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Certif. Pada bulan November, diselenggarakan verifikasi eksternal KKNI BPRS dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI yang dilanjutkan dengan Konvensi KKNI BPRS

#### F. Penyusunan Modul Sertifikasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Sebagai tindak lanjut dari SKKNI dan KKNI yang telah disusun, perlu dirumuskan modul sertifikasi BPRS berdasarkan SKKNI BPRS dan KKNI BPRS tersebut. Sebelumnya penyusunan modul tersebut dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Namun mengingat telah munculnya beberapa LSP di bidang perbankan khususnya perbankan syariah, maka telah disepakati bahwa penyusunan modul sertifikasi kali ini dilakukan secara bersama-sama agar modul yang diterbitkan merujuk pada standar yang sama dan tidak terdapat persaingan antar LSP. Terkait dengan hal tersebut maka telah diselenggarakan pembahasan penyusunan Modul Sertifikasi BPRS yang dihadiri oleh praktisi dan akademisi.

#### G. Seminar Akhir Tahun Perbankan Syariah

Dalam rangka diseminasi hasil kajian dan sosialisasi ketentuan perbankan syariah dan memperoleh tanggapan serta pandangan dari stakeholders, OJK menyelenggarakan Seminar Akhir Tahun (SAT) Perbankan Syariah yang terdiri dari pemaparan sebagai berikut:

- a. Hasil Kajian Tim Spesialis Review Kebijakan dan Standar Internasional sebagai berikut:
  - 1) Kajian *Platform Sharing* Perbankan Syariah
  - 2) Kajian *Multilicense* BPRS
- b. Presentasi kajian "Pembentukan APEX *IT Company* untuk BPRS." Kajian tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan TI bagi BPRS melalui pembentukan lembaga pengayom APEX *IT Company*
- c. Sosialisasi Standar Produk oleh Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi, yaitu:
  - 1) Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah
  - 2) Standar Produk Perbankan Syariah Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqisah
  - 3) Standar Produk Perbankan Syariah Ijarah
  - 4) Standar Produk Perbankan Syariah Mudharabah
- d. *Overview* ketentuan terkait perbankan syariah 2017

### 3.4.2 Pengembangan Pasar Modal Syariah

1. Kajian Terkait Produk Investasi Syariah Berbasis Pertanian  
Kajian Terkait Produk Investasi Syariah Berbasis Pertanian bertujuan mengidentifikasi produk investasi syariah di pasar modal yang dapat digunakan sebagai sumber permodalan baru di sektor pertanian serta memperluas alternatif pembiayaan bagi sektor pertanian dan sarana investasi untuk investor.
2. Kajian Terkait *Bundling Product* dengan Keuangan Syariah Lainnya

Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan pasar modal syariah melalui inovasi produk investasi yang baru serta memberikan alternatif investasi bagi investor dengan memperkenalkan produk gabungan baru dari sektor industri keuangan syariah.

3. Kajian Terkait Lindung Nilai Syariah dalam Pasar Modal

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi lindung nilai syariah di pasar modal serta melihat aspek ke-syariah-an atas lindung nilai di Pasar Modal dan akad yang memungkinkan digunakan.

4. Kajian Lanjutan terkait Inisiasi UU tentang Efek Syariah

Kajian ini bertujuan untuk merekomendasikan pembentukan UU khusus yang mengatur pasar modal syariah. Berdasarkan hal tersebut kajian ini merupakan kajian lanjutan yang bertujuan untuk mengidentifikasi muatan isi yang akan dibahas dalam UU tentang Efek Syariah tersebut.

5. Kajian Terkait Proses Pernyataan Pendaftaran Efek Syariah

Kajian ini bertujuan sebagai landasan argumentasi tentang penerbitan dan persyaratan Sukuk, sehingga mendorong pengembangan Sukuk Korporasi melalui penyediaan regulasi yang jelas, mudah dipahami, efisien dan efektif, serta fleksibel. Kajian ini juga bertujuan untuk mendorong perkembangan sukuk, antara lain dengan mendorong BUMN untuk menerbitkan sukuk sebagai alternatif pendanaan dengan menyediakan insentif bagi BUMN dalam penerbitan sukuk dan mengembangkan jenis Sukuk Daerah, Sukuk Perpetual yang belum diatur di Indonesia, baik dalam Peraturan OJK atau peraturan lainnya.

6. Penyusunan Kajian Lanjutan terkait Materi Pasar Modal Syariah Dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi

Kajian ini bertujuan untuk menghasilkan standar nasional materi pengajaran pasar modal syariah dan metode pembelajaran yang tepat dalam materi pasar modal syariah di perguruan tinggi.

7. Penyusunan Kajian terkait Penyusunan Materi Pasar Modal Syariah dalam Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) bagi Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM)

Kajian ini bertujuan sebagai bahan referensi dalam menyusun materi pasar modal syariah dalam PPL bagi ASPM dan menetapkan standar kualifikasi bagi lembaga yang akan menyelenggarakan PPL bagi ASPM.

8. Penyusunan Kajian terkait Perluasan Akses bagi masyarakat untuk berinvestasi di Produk Pasar Modal Syariah

Kajian ini bertujuan untuk menentukan strategi pengembangan pasar modal syariah melalui perluasan akses serta mengidentifikasi pihak-pihak yang berpotensi memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk berinvestasi di produk pasar modal syariah.

### 3.4.3 Pengembangan IKNB Syariah

Beberapa kegiatan sosialisasi dan *workshop* dilakukan untuk mengembangkan IKNB syariah antara lain sebagai berikut :

1. Kajian Standarisasi Ketentuan Akad-Akad dalam Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pembiayaan Syariah Oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS Perusahaan Pembiayaan Konvensional

Pedoman penerapan akad-akad yang diperkenankan oleh OJK, memberikan standarisasi penggunaan akad dan mempermudah pelaksanaan kegiatan usaha, sehingga dapat mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah. Isu pengembangan penggunaan akad dalam kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah menjadi penting karena

pelaksanaanya belum berjalan maksimal. Berkenaan dengan hal tersebut, kajian ini dimaksudkan untuk menyusun standarisasi penggunaan akad-akad pembiayaan syariah dan menyusun standarisasi pelaporan dalam rangka review penerapan kaidah atas akad pembiayaan syariah.

2. Kajian Pembentukan Jakarta *International Islamic Financial Centre* (JIFC).

Persiapan pembentukan Jakarta *International Islamic Centre* (JIFC) dilakukan melalui studi kelayakan agar nantinya JIFC dapat memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional.

Studi kelayakan dalam rangka persiapan pembentukan Jakarta *International Islamic Financial Centre* disusun dengan memperhatikan perkembangan keuangan syariah yang cukup pesat baik secara global maupun lokal dan Indonesia berada pada peringkat ke-6 *Islamic Finance Country Index* untuk tahun 2016. Kondisi terkini menunjukkan industri keuangan syariah di Indonesia yang terdiri dari industri perbankan syariah, pasar modal syariah dan keuangan non-bank syariah yang dari tahun ke tahun terus mengalami perkembangan serta analisis studi kelayakan.

3. Kajian Penghitungan Ujrah Kontribusi Pada Asuransi Syariah.

Kajian ini melibatkan seluruh perusahaan asuransi yang mengeluarkan produk

asuransi jiwa syariah serta pihak-pihak terkait yang mempunyai data atau informasi tentang pengelolaan asuransi jiwa syariah. Hasil kajian berupa penentuan ujah yang optimal dan rekomendasi beberapa hal di luar nilai ujah kontribusi yang dapat dimanfaatkan oleh OJK dalam menentukan kebijakan terkait asuransi jiwa syariah. Diharapkan hasil kajian ini juga dapat dimanfaatkan oleh pihak industri asuransi sebagai *benchmarking* penentuan ujah yang wajar.

4. *Workshop Spin off* Asuransi Syariah di Jakarta.

5. Kegiatan *Ijtima' Sanawi* (*Annual Meeting*) Dewan Pengawas Syariah Lembaga Keuangan Syariah.

*Ijtima' Sanawi* merupakan kegiatan rutin tahunan berupa pertemuan seluruh DPS di industri jasa keuangan syariah dalam rangka meningkatkan kapasitas DPS untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagai pengawas kepatuhan terhadap prinsip syariah di industri jasa keuangan. Adapun rangkaian kegiatan *Ijtima' Sanawi* dimaksud antara lain penyusunan fatwa, sosialisasi fatwa terbaru, sosialisasi peraturan OJK, dan *sharing knowledge* mengenai isu terkini. Sehingga melalui kegiatan ini menjadi sarana komunikasi antara Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Dewan Pengawas Syariah pada industri jasa keuangan yang terdiri IKNB Syariah, Perbankan Syariah dan Pasar Modal Syariah.

## **Pendirian Bank Wakaf Mikro (LKM Syariah)**



Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga keuangan mikro syariah (LKM syariah) yang fokus pada pembiayaan masyarakat kecil. Dalam membentuk LKM syariah, OJK bekerjasama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas). LKM Syariah Bank Wakaf Mikro merupakan salah satu upaya untuk mengatasi ketimpangan dan kemiskinan di masyarakat. Selain itu, pendirian LKM syariah di lingkungan pesantren ini juga diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan syariah.

Pada tanggal 20 Oktober 2017, Presiden Joko Widodo bersama OJK telah meresmikan LKM Syariah di Cirebon. Hingga triwulan IV-2017, telah terbentuk 11 LKM syariah dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel III- 10** LKM Syariah pada triwulan IV-2017

No	Nama LKM Syariah
1.	Koperasi LKMS Bankwakaf Al Muttaqien Pancasila Sakti
2.	Koperasi LKMS Amanah Berkah Nusantera
3.	Koperasi LKMS Ranah Indah Darussalam
4.	Koperasi LKMS Berkah Bersama Baiturrahman
5.	Koperasi LKMS Buntet Pesantren
6.	Koperasi LKM Syariah Denanyar Sumber Barokah
7.	Koperasi LKMS Berkah Rizqi Lirbowo
8.	Koperasi LKM Syariah KHAS Kempek
9.	Koperasi LKMS Pesantren An Nawawi Tanara
10.	Koperasi LKM Syariah Almuna Berkah Mandiri
11.	Koperasi LKMS Amanah Makmur Sejahtera

Selain itu, dalam rangka meningkatkan kapasitas pengawas serta pengurus LKM syariah Bank Wakaf Mikro, OJK bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) melaksanakan pelatihan Dewan Pengawas Syariah (DPS) LKM syariah.





# Manajemen Strategis dan Tata Kelola Organisasi



# Manajemen Strategis dan Tata Kelola Organisasi



## 4.1 MANAJEMEN STRATEGI DAN KINERJA OJK

### 4.1.1 Pelaksanaan Siklus Manajemen Strategi dan Kinerja

OJK memiliki Sistem Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK) yang mengintegrasikan penyusunan dan penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta penilaian kinerja OJK. Siklus MSAK OJK terdiri dari empat tahap. Pada periode laporan, siklus MSAK berada pada tahap keempat untuk periode 2017 yaitu evaluasi pelaksanaan *strategy map*, *scorecard*, realisasi RKA dan penilaian kinerja triwulan III-2017 melalui pengisian capaian masing-masing Satuan Kerja (Satker) pada Sistem Pengelolaan Kinerja (SIMPEL). Pada periode ini, Siklus MSAK OJK juga memasuki tahap pertama untuk periode 2018 yaitu merumuskan dan mengkomunikasikan *Destination Statement* OJK 2017-2022 serta Peta Strategi OJK 2018 melalui Rapat Kerja Strategis (Rakerstra) 2018. Pada periode yang sama telah dilakukan penandatanganan kontrak kinerja baik untuk level Deputi Komisioner maupun Kepala Departemen. Penandatanganan ini bersamaan dengan penandatanganan *project charter* Inisiatif Strategis OJK 2015.

Untuk mendukung proses *monitoring* kinerja, OJK melakukan integrasi Sistem Pengelolaan Kinerja (SIMPEL) dengan Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMARIO). Dengan integrasi ini, diharapkan risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian IKU dapat dimitigasi dengan baik. Pengembangan sistem juga dilakukan untuk mempermudah penyusunan Laporan Bulanan internal OJK melalui pengembangan Sistem Informasi Laporan Kegiatan Bulanan.

Sebagai bentuk akuntabilitas lembaga, OJK menerbitkan Laporan Triwulan III-2017 sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban kegiatan OJK selama periode laporan.

Grafik IV - 1

#### Siklus Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK)

(sesuai PDK No.1/PDK.01/2013)



#### 4.1.2 Pelaksanaan Sasaran Strategis OJK

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, OJK memiliki *Strategy Map* 2017 yang di dalamnya terdapat tujuh Sasaran Strategis OJK yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Sektor Jasa Keuangan (SJK) yang Tangguh, Kontributif dan Inklusif  
Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui indeks penetrasi SJK seperti target peningkatan kredit (Perbankan), pertumbuhan Emiten dan perusahaan publik (Pasar Modal) serta pertumbuhan premi asuransi, piutang pembiayaan, aset penjaminan dan aset dana pensiun (IKNB) serta melalui pengukuran indeks kesehatan SJK seperti rasio *Capital Adequacy Ratio* (Perbankan), Perusahaan Efek yang memenuhi persyaratan Modal Kerja Bersih Disesuaikan/MKBD (Pasar Modal), serta rasio tingkat kesehatan IKNB.
2. Mengembangkan SJK yang Kontributif  
Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui tingkat kontribusi SJK pada sektor prioritas pemerintah, pengembangan *sustainable finance* dan peningkatan kualitas dan peran pelaku SJK.
3. Mengembangkan SJK yang Stabil  
Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui tingkat penyelesaian Penguatan Protokol Manajemen Krisis, tindak pengawasan dalam rangka menciptakan IJK yang *resilient*, tingkat pelayanan perizinan terintegrasi, dan peningkatan kualitas *Surveillance* Sistem Keuangan.
4. Mengembangkan SJK yang inklusif  
Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui pengembangan produk dan atau layanan keuangan dan mikro, tingkat pelaksanaan program Manfaat Balik kepada IJK dan *Stakeholder*, serta peran OJK terhadap peningkatan perekonomian dan pembangunan daerah.

5. Mendorong Akselerasi Pertumbuhan SJK Syariah  
Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui tingkat pelaksanaan program akselerasi pertumbuhan syariah dan tingkat kualitas pelaksanaan *Outreach* SJK yang terintegrasi.
6. Meningkatkan Pengaturan SJK yang Selaras dan Terintegrasi  
Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui tingkat penyelesaian penerbitan peraturan yang dapat meningkatkan SJK yang kontributif, stabil dan inklusif

#### 4.1.3 Inisiatif Strategis

Pada periode laporan OJK melakukan penandatanganan *Project Charter* Inisiatif Strategis 2018. Inisiatif strategis merupakan proyek strategis lintas satker yang bertujuan untuk mendukung pencapaian rencana jangka menengah (*Destination Statement*) OJK 2017-2022 serta pencapaian Peta Strategis OJK *Wide* 2018. Inisiatif Strategis 2018 terdiri dari enam proyek Inisiatif Strategis. dengan detail sebagai berikut :

1. Inovasi keuangan digital untuk peningkatan efisiensi dan inklusi keuangan  
Tujuan dari pelaksanaan inisiatif strategis ini adalah mendorong inklusi, efisiensi dan pertumbuhan industri jasa keuangan sehingga dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Beberapa kegiatan utama pada inisiatif strategis ini antara lain penyusunan *roadmap* inovasi keuangan digital, penyelenggaraan *regulatory sandboxing*, POJK inovasi keuangan digital dan pembentukan *National Fintech Center* dan *Innovation Hub*
2. Penguatan pengawasan Sektor Jasa Keuangan Berbasis IT  
Tujuan dari pelaksanaan inisiatif strategis ini adalah terwujudnya pengawasan SJK yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi permasalahan SJK secara dini, memberikan respon pengawasan yang

cepat, dan pemanfaatan sumber daya yang efisien. Beberapa kegiatan utama pada inisiatif strategis ini antara lain penguatan infrastruktur pengawasan berbasis IT dan penyempurnaan proses bisnis pengawasan berbasis IT

### 3. Pendalaman Pasar Keuangan

Tujuan dari pelaksanaan inisiatif strategis ini adalah melakukan pemetaan isu, potensi dan tantangan terkait regulasi kebijakan, proses bisnis, dan infrastruktur pasar yang dihadapi dalam kerangka upaya pendalaman pasar keuangan serta menyusun rekomendasi dan upaya-upaya konkrit yang perlu dilakukan OJK dalam jangka pendek dan menengah untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut. Beberapa kegiatan utama pada inisiatif strategis ini antara lain pengembangan instrumen baru di pasar modal (obligasi daerah, produk pengelolaan investasi berbasis KIK, pengembangan *Indonesia Government Futures Bond*), penguatan intermediasi dan kelembagaan di pasar modal serta pengembangan infrastruktur pasar modal yang efisien (percepatan proses IPO, penyelesaian transaksi T+3 menjadi T+2 dan penerapan *electronic book building*)

### 4. Reformasi Industri Keuangan Non Bank

Tujuan dari pelaksanaan inisiatif strategis ini adalah melakukan penyusunan pengaturan terhadap manajemen, kelembagaan, produk dan layanan serta meningkatkan kompetensi pengawasan dalam rangka pengembangan industri keuangan non bank. Beberapa kegiatan utama pada inisiatif strategis ini antara lain pengembangan sistem pengawasan, penerapan *exit policy* yang efektif, perluasan distribusi produk dan skema penyelesaian sengketa antar LJK.

### 5. Penyederhanaan dan Otomasi Proses Bisnis

Tujuan dari pelaksanaan inisiatif strategis ini adalah terciptanya proses Bisnis yang standar, efektif dan efisien guna memenuhi kebutuhan stakeholder utama OJK. Beberapa kegiatan utama pada inisiatif

strategis ini antara lain implementasi SIAUTO, penyusunan peraturan terkait *Activity Based Costing* (ABC), dan desain sistem informasi manajemen keuangan yang dibutuhkan oleh *stakeholder*.

### 6. Penyempurnaan Manajemen Sistem Keuangan

Tujuan dari pelaksanaan inisiatif strategis ini adalah memastikan sistem aplikasi keuangan OJK dapat diandalkan untuk menyajikan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu serta tersedianya infrastruktur dan kebijakan dalam penerapan anggaran berbasis kinerja. Beberapa kegiatan utama pada inisiatif strategis ini antara lain simplifikasi proses bisnis, *digital office* dan implementasi *e-procurement*.

## 4.2 AUDIT INTERNAL, MANAJEMEN RISIKO, DAN PENGENDALIAN KUALITAS

### 4.2.1 Implementasi *Combined Assurance* untuk Penguatan *Governance* OJK

Demi terwujudnya tata kelola yang baik, OJK melakukan beberapa kegiatan antara lain pelaksanaan audit internal, pengendalian kualitas, pengelolaan risiko serta penanganan dan pencegahan anti fraud. OJK mengimplementasikan *Combined Assurance* untuk memastikan tercapainya tujuan strategis OJK dengan efektif dan efisien. Selama periode pelaporan, pelaksanaan audit internal telah dilaksanakan dengan 11 tema asuransi yaitu pengelolaan SDM dan organisasi, perencanaan dan pengelolaan anggaran, logistik, sistem informasi, pelaksanaan dan penerapan inisiatif strategis dan IKU, pengawasan terintegrasi, perizinan terintegrasi, perizinan sektoral, pengawasan sektoral, pengaturan terintegrasi dan penyusunan laporan keuangan. Selain hal tersebut, telah dilaksanakan pula enam audit pada KR/KOJK, tiga audit khusus, dan satu peninjauan.

Pada sisi pengendalian kualitas, terdapat lima tema reviu kualitas yang menjadi fokus yakni Tata Kelola, Pengembangan SJK Syariah, Perlindungan Konsumen, Penanganan Gugatan dan Penyidikan. Sementara itu, dari sisi risiko telah dilaksanakan dua reviu terkait dengan *big data* dan pendalaman pasar. Diharapkan reviu ini meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan data yang baik serta mendorong kesiapan implementasi *big data* di OJK. Selaras dengan visi dan misi *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan 2015-2019, melalui reviu pendalaman pasar, OJK dapat mengevaluasi penanganan risiko pendalaman pasar secara lebih optimal sehingga tercipta iklim perekonomian yang kondusif

#### 4.2.2 Mitigasi Risiko

Profil Risiko OJK 2017 terdiri dari 17 risiko dengan 602 rencana mitigasi yang telah ditetapkan. Mitigasi tersebut dibagi ke dalam tiga area besar yang dikelompokkan sebagai berikut:

- 316 rincian mitigasi (69,91%) terkait Proses Bisnis (*Process*);
- 107 rincian mitigasi (23,67%) terkait Sumber Daya Manusia (*People*); dan
- 29 rincian mitigasi (6,42%) terkait Teknologi (*Technology*).

Selama triwulan IV-2017, sebanyak 429 (94,91%) rincian mitigasi telah dilaksanakan. Sisanya masih dalam proses pelaksanaan dikarenakan ada yang bersifat *multiyears* dan bersifat *contingency plan*.

#### 4.2.3 Control Self Assessment (CSA)

Pelaksanaan *Control Self Assessment* (CSA) OJK *Wide* memiliki tiga tujuan antara lain untuk menilai efektifitas pengendalian internal, menemukan area pengendalian yang masih lemah dan memperbaiki pelaksanaan proses pengendalian internal secara berkelanjutan. Lima komponen pengendalian internal yang

dinilai meliputi aspek lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian internal. Hasil penilaian pengendalian internal dalam triwulan ini menunjukkan bahwa pengendalian internal OJK cukup efektif.

#### 4.2.4 Program Pengendalian Gratifikasi (PPG)

OJK melakukan beberapa Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) melalui pengelolaan laporan gratifikasi. Pada triwulan IV-2017 OJK menerima dan mengelola 65 laporan gratifikasi berupa uang dan barang. Kegiatan lain yang dilakukan antara lain *enhancement* SiPeGa, *email blast* PPG melalui Info OJK, *reminder* larangan gratifikasi pada saat hari raya keagamaan dan tahun baru serta survei *engagement* Insan OJK terhadap PPG. Survei *engagement* PPG dilaksanakan dengan jumlah responden sebanyak 3367 Insan OJK.

#### 4.2.5 Whistle Blowing System

*Whistle Blowing System* merupakan sarana yang disediakan OJK untuk melaporkan Insan OJK yang terindikasi melakukan *fraud*. Pada triwulan IV-2017, jumlah laporan WBS yang masuk 27 laporan sehingga total laporan yang diterima sebanyak 212 laporan. Jumlah laporan yang berindikasi pelanggaran oleh jajaran OJK dan didukung bukti yang memadai sehingga dapat ditindaklanjuti berjumlah 23 laporan dan laporan yang telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 29 laporan.

#### 4.2.6 Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Realisasi tingkat kepatuhan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sampai dengan periode pelaporan sebanyak 99,8%. Selain itu pada triwulan IV-2017, telah dilakukan aktivasi *e-LHKPN* untuk pelaporan LHKPN, sebagaimana penyesuaian perubahan peraturan KPK tentang LHKPN.

## **OJK Raih Penghargaan Pengelolaan LHKPN dan Pengendalian Gratifikasi Terbaik dari KPK**

Otoritas Jasa Keuangan meraih dua penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk penilaian pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan bidang pengendalian gratifikasi terbaik 2017 di kategori Kementerian dan Lembaga. Penghargaan di bidang sistem pengendalian gratifikasi terbaik merupakan yang kedua kalinya diterima OJK. Pada tahun 2016 OJK juga meraih penghargaan tersebut. Penghargaan ini diberikan kepada pejabat negara dan instansi yang mempunyai komitmen tinggi dalam upaya pencegahan

korupsi melalui kepatuhan pelaporan gratifikasi dan LHKPN.

OJK berkomitmen untuk menerapkan tata kelola yang baik sehingga dapat menjadi *role model* bagi industri jasa keuangan. Hal-hal yang dilakukan antara lain dengan menerapkan program anti gratifikasi dan membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi, membangun *Whistle Blowing System* OJK (WBS OJK) yang merupakan sarana untuk menyampaikan, mengelola dan menindaklanjuti laporan mengenai dugaan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak internal OJK



### 4.3 RAPAT DEWAN KOMISIONER

Dewan Komisiner menyelenggarakan Rapat Dewan Komisiner (RDK) secara rutin dalam rangka menetapkan atau melakukan evaluasi atas kebijakan Otoritas Jasa Keuangan. RDK diselenggarakan dengan prinsip akuntabilitas, bertanggung jawab, wajar, efektif, transparan, dan tata kelola yang baik. Selama triwulan IV-2017, RDK diselenggarakan sebanyak 17 kali yang membahas 13 topik yang bersifat laporan dan 48 topik dalam rangka pengambilan keputusan.

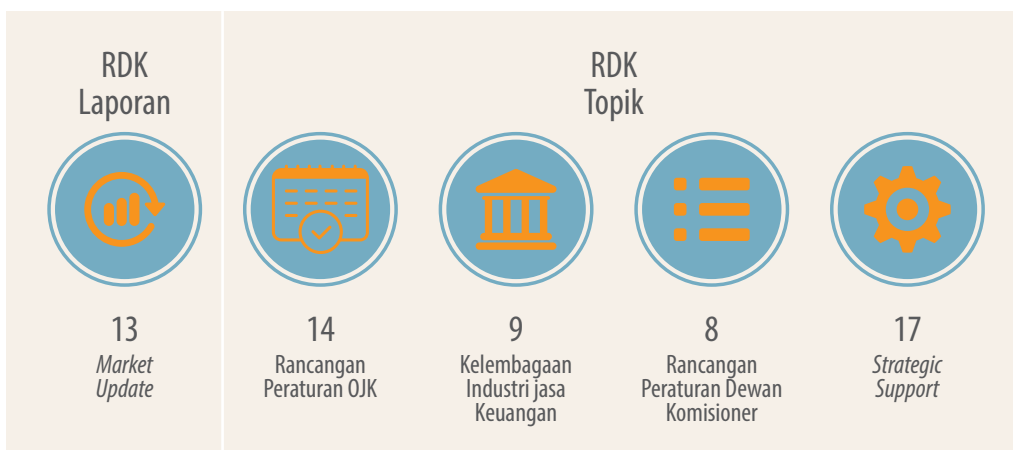
Dewan Komisiner secara rutin menerima laporan *surveillance* terhadap kondisi perekonomian dan sektor jasa keuangan dalam RDK Laporan *Market Update*. Pada triwulan ini, terdapat 14 Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) yang dibahas dalam RDK. Dari 14 RPOJK tersebut, 11 di antaranya merupakan ketentuan yang mengatur industri Pasar Modal. Secara umum, 11 RPOJK tersebut meliputi penerbitan ketentuan baru terkait produk di industri Pasar Modal, penyempurnaan peraturan dalam rangka mendorong pengembangan produk di Pasar Modal, serta revisi atas beberapa peraturan.

Terkait penerbitan ketentuan baru di industri Pasar Modal, OJK menerbitkan ketentuan baru yang mengatur Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) yaitu RPOJK tentang

Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan. Selain itu, RDK juga menyetujui tiga RPOJK yang mengatur mengenai Obligasi Daerah. Selain ketentuan tentang produk di Pasar Modal, ketentuan baru di industri Pasar Modal yang disetujui oleh RDK adalah RPOJK tentang Penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau Pengajuan Aksi Korporasi Secara Elektronik. Melalui ketentuan ini, penyampaian beberapa jenis Pernyataan Pendaftaran dan Aksi Korporasi harus dilakukan secara elektronik, dengan tujuan agar proses penyampaian Pernyataan Pendaftaran dan pengajuan Aksi Korporasi dapat dilakukan dengan lebih efisien dan transparan.

Selanjutnya, terkait penyempurnaan terhadap ketentuan yang mengatur produk di Pasar Modal, RDK menyetujui dua RPOJK yang terkait dengan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yaitu Efek Beragunan Aset berbentuk KIK (KIK EBA) dan Dana Investasi Real Estate berbentuk KIK (DIRE). Penyempurnaan ketentuan KIK EBA antara lain penambahan kriteria dan jenis aset keuangan. Penyempurnaan ketentuan DIRE antara lain ketentuan tentang *share acquisition*, perluasan aset portofolio, dan penerbitan Efek Bersifat Utang. Selain itu, penyempurnaan pada dua RPOJK juga meliputi penyederhanaan terhadap dokumen pernyataan pendaftaran Penawaran Umum. Dengan RPOJK ini, seluruh ketentuan yang mengatur KIK EBA dan DIRE dituangkan masing-masing dalam satu kesatuan RPOJK yaitu RPOJK KIK EBA dan RPOJK DIRE.

Grafik IV - 2 Gambaran Topik Rapat Dewan Komisiner





Terkait industri perbankan, RDK menyetujui RPOJK tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Selain itu, RDK juga memutuskan kebijakan bagi industri perbankan di Bali yaitu Penetapan Kabupaten Karangasem Bali Sebagai Daerah Yang Memerlukan Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Bank. Kebijakan ini diambil sebagai respons OJK terhadap bencana alam berupa erupsi Gunung Agung di Bali. Perlakuan khusus terhadap kredit Bank mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam.

Selain forum RDK, Dewan Komisioner juga melakukan pembahasan atas materi tertentu untuk memberikan arahan atas pelaksanaan fungsi dan tugas OJK dalam bentuk forum *Board Seminar*. Khusus untuk materi peraturan, materi wajib terlebih dahulu dibahas dalam *Board Seminar* untuk mendapatkan arahan atau perspektif dari Dewan Komisioner dan masukan Satuan Kerja lain terhadap substansi aturan. Selama triwulan IV-2017, telah diselenggarakan *Board Seminar* sebanyak 14 kali dengan jumlah topik yang dibahas sebanyak 35 materi. Dari 35 materi tersebut, 16 di antaranya merupakan materi RPOJK yang selanjutnya akan disampaikan kepada industri untuk mendapatkan tanggapan dan masukan atas substansi aturan.

## 4.4 KOMUNIKASI

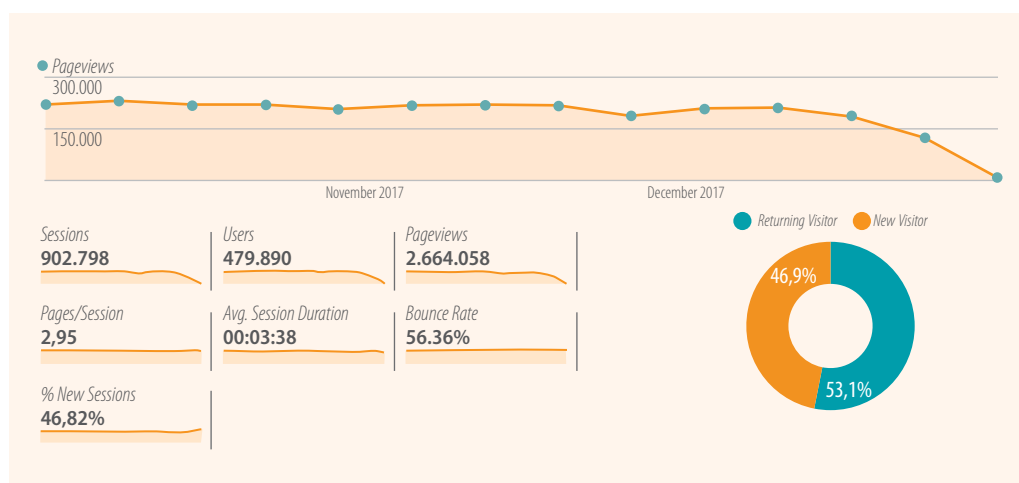
### 4.4.1 Komunikasi Informasi OJK

OJK melakukan serangkaian kegiatan komunikasi yang terintegrasi dan berkesinambungan melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik dan digital, termasuk media milik OJK antara lain *website* OJK dan media jejaring sosial seperti *Twitter*, *Facebook*, *Instagram* dan *Youtube*.

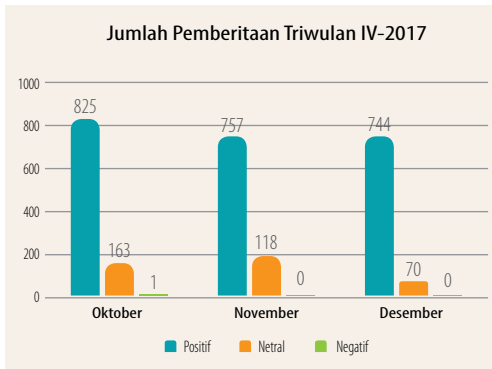
Selama triwulan IV-2017, *website* OJK mengunggah 366 materi informasi (meliputi Siaran Pers, Regulasi, Data dan Statistik, Pengumuman dan sebagainya), 53 foto, dan memiliki 15 *minisite*. Berdasarkan data statistik, jumlah pengunjung *website* dan jumlah halaman yang dilihat atau dibaca mengalami kenaikan yaitu 20.5% dan 6.19% masing-masing menjadi 479.890 *users* dan 2.664.058 jumlah halaman yang diakses pada triwulan IV-2017. Media sosial twitter OJK memiliki lebih dari 32.400 *followers*, media sosial facebook OJK memiliki lebih dari 25.682 *fans* dan Instagram OJK memiliki lebih dari 40.500 *followers*.

Terkait pengelolaan opini publik, OJK memiliki program analisis kuantitatif dan kualitatif untuk setiap pemberitaan OJK di media. Analisis ini dilakukan melalui *monitoring* terhadap *tone* berita mengenai OJK dan Industri Keuangan secara umum pada 22 media cetak, 54 media *online*, 14 stasiun televisi nasional, dan TV daerah terpilih.

**Grafik IV - 3** Statistik Pengunjung Website OJK

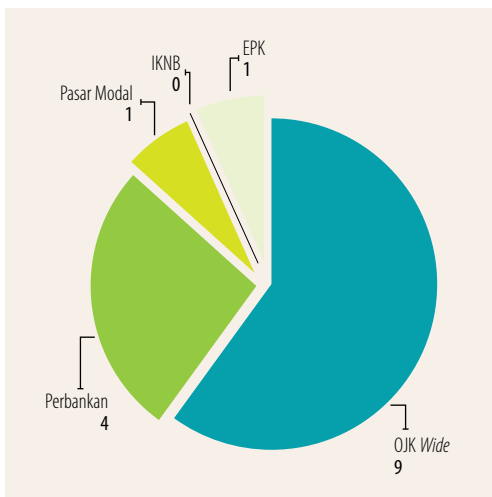


**Grafik IV - 4** Tone Pemberitaan OJK Triwulan IV-2017



Total pemberitaan selama triwulan IV-2017 adalah 2.688 berita atau sekitar 28 berita per harinya. Sementara itu, dari segi *tone* pemberitaan terbagi dari 2.326 berita positif, 361 pemberitaan netral, dan 1 berita negatif. Berita negatif tersebut dimuat pada media online yang tidak berpengaruh terhadap opini publik sehingga bisa dikatakan tidak mempengaruhi reputasi OJK. Terkait dengan relasi media, selama triwulan IV-2017 OJK telah menerbitkan 15 siaran pers yang didominasi oleh OJK Wide sebanyak sembilan siaran pers.

**Grafik IV - 5** Siaran Pers Per Bidang



**Tabel IV - 1** Judul Siaran Pers Triwulan IV-2017

No	Judul Siaran Pers	Bidang
1	OJK Tetapkan 10 Kebijakan Utama 2017 – 2022	OJK Wide
2	OJK Dukung Program Global Anti-Serangan Siber "Pidato Ketua Dewan Komisiner OJK di Rangkaian Pertemuan Tahunan Bank Dunia – IMF di Washington DC"	OJK Wide
3	OJK Keluarkan Izin Sepuluh Lembaga Keuangan Mikro Syariah " Presiden Jokowi Resmikan LKM Syariah di Pesantren Kempek Cirebon"	OJK Wide
4	Risiko Kredit Menurun, Stabilitas Sektor Jasa Keuangan dan Likuiditas	OJK Wide
5	Market Share Keuangan Syariah Capai 8 Persen "OJK Gelar Keuangan Syariah Fair Di Cibinong Bogor"	OJK Wide
6	Lindungi Masyarakat, Satgas Waspada Investasi Hentikan 14 Kegiatan Usaha	OJK Wide
7	Pencabutan Izin Usaha PT BPR KS Bali Agung Sedana, Badung	Perbankan
8	OJK Cabut Izin Usaha BPR LPN Kampung Manggis, Padang Panjang	Perbankan
9	OJK Cabut Izin Usaha PT BPR Sinar Baru Perkasa, Solo	Perbankan
10	Industri Jasa Keuangan Tumbuh Stabil dan Berkontribusi Positif di 2017	OJK Wide
11	Irjen Pol Rokhmad Sunanto Dilantik Sebagai Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan	OJK Wide
12	Bali is Safe: OJK Akan Keluarkan Kebijakan Terkait Dampak Gunung Agung	OJK Wide
13	Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (Revisit 2017), Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan	EPK
14	Bank Indonesia Alihkan Fungsi Pengaturan, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Perkreditan Kepada Otoritas Jasa Keuangan	Perbankan
15	OJK Terbitkan Tiga Peraturan Obligasi Daerah, Green Bonds, dan E-Registration Serta Kebijakan Lainnya	Pasar Modal

**Tabel IV - 2** Jumpa Pers Triwulan IV-2017

No	Nama Kegiatan
1	Kondisi Perekonomian Dalam Negeri khususnya Sektor Jasa Keuangan Menghadapi Tahun 2018
2	Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur melalui Pasar Modal
3	Stabilitas Sektor Jasa Keuangan dan Kondisi Likuiditas di Pasar Keuangan Indonesia terkini termasuk data-data kinerja Lembaga Jasa Keuangan
4	Perkembangan Pencegahan Investasi Illegal oleh Satgas Waspada Investasi
5	Perkembangan dan Issue Terkini Perbankan Syariah Indonesia
6	Konferensi Pers Akhir Tahun 2017

Pada triwulan IV-2017, jajaran Anggota Dewan Komisioner melakukan persesmian ruang pers OJK sekaligus memperkenalkan program terkait hubungan masyarakat terbaru OJK, yaitu "Bronis: Obrolan Manis" yang akan dilaksanakan secara rutin setiap hari Jumat. Program ini merupakan upaya OJK dalam melakukan media *briefing* dan upaya menjalin kerja sama yang erat dengan para wartawan media.

Sebagai upaya untuk menjaga relasi dan meningkatkan pemahaman media terhadap program dan kebijakan OJK, perkembangan Industri Jasa Keuangan serta membangun opini positif OJK di masyarakat, OJK mengadakan kegiatan pelatihan dan *gathering* wartawan media massa dengan jumlah peserta sebanyak 37 media. OJK juga melakukan diskusi akhir tahun Anggota Dewan Komisioner OJK bersama Redaktur Pelaksana Media Massa pada akhir tahun dan dihadiri oleh 30 redaktur pelaksana. Pada kegiatan tersebut, OJK memberikan pendalaman materi mengenai isu-isu OJK yang perlu mendapatkan pemberitaan media di masa mendatang.

#### 4.4.2 Kunjungan Instansi

Sebagai salah satu upaya untuk melaksanakan program edukasi kepada masyarakat terhadap peran dan fungsi OJK, OJK menerima kunjungan masyarakat (inststitusi, lembaga pendidikan, dan sebagainya). Permintaan kunjungan dilakukan

dengan mengirimkan surat permohonan kunjungan beserta waktu dan topik yang diinginkan ke email di [visitOJK@OJK.go.id](mailto:visitOJK@OJK.go.id).

**Tabel IV - 3** Kunjungan Inststitusi Triwulan IV-2017

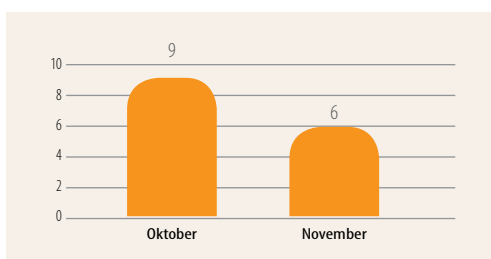
No	Nama Inststitusi	Kota
1	UIN Raden Intan jurusan Ekonomi Syariah	Lampung
2	IPB Gugus Mahasiswa Matematika	Bogor
3	Universitas Islam Indonesia Pascasarjana Fakultas Ekonomi	Yogyakarta
4	HIMA Akuntansi STIE Indonesia Banking School	Jakarta
5	Magister UNS	Solo
6	SMK Perbankan Alumnika Palembang	Palembang
7	Himpunan Mahasiswa Analisis Efek FE Univ. MH. Thamrin	Jakarta
8	SMA Pax Patriae Bekasi	Bekasi
9	SMK Arrohmah Dadaha	Tasikmalaya
10	Unversitas Galuh Jurusan Akuntansi	Ciamis
11	SDN 15 Tangerang	Tangerang
12	SMA 21 Jakarta	Jakarta
13	SMK Lentera Bangsa I	Karawang
14	Heritage School	Jakarta
15	Politeknik Negeri Jakarta Prodi D3 Keuangan Perbankan	Depok

Selama periode triwulan IV-2017, OJK menerima 15 kunjungan institusi dengan total 986 peserta.

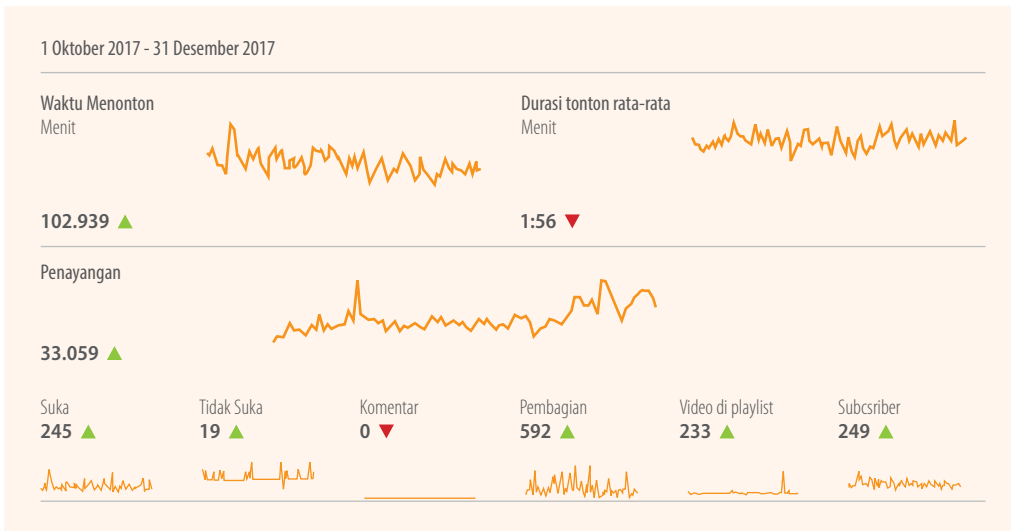
#### 4.4.3 OJK TV

OJK TV merupakan salah satu medium komunikasi OJK untuk menyiarkan kebijakan, program, dan kegiatan OJK yang ditayangkan melalui kanal *Youtube* dengan akun Jasa Keuangan dan disiarkan di IDX Channel (TV Bursa). Selama triwulan IV-2017, OJK TV memproduksi 48 liputan yang terdiri dari 35 liputan OJK Wide, enam liputan di bidang Pasar Modal, empat liputan di bidang Perbankan, dua liputan di bidang IKNB, dan satu liputan di bidang EPK. Selama periode triwulan IV-2017 kanal youtube Jasa Keuangan telah disaksikan lebih dari 53.059 *viewers*.

**Grafik IV - 6** Kunjungan Inststitusi Triwulan IV-2017



Grafik IV - 7 Statistik OJK TV Triwulan IV-2017

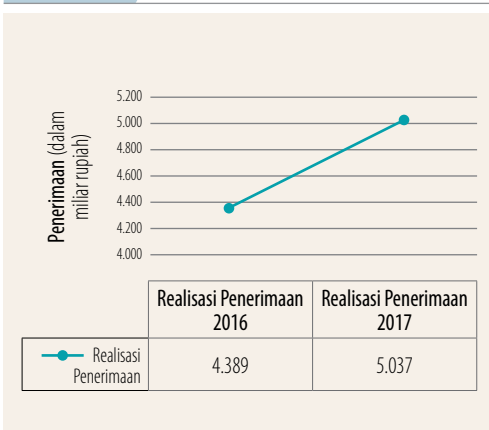


## 4.5 KEUANGAN

### 4.5.1 Realisasi Penerimaan Pungutan

Pada 2017, penerimaan pungutan mencapai Rp5.037 miliar, meningkat sebesar 15% dibandingkan 2016 yang mencapai Rp4.389 miliar. Peningkatan penerimaan pungutan ini sejalan dengan pertumbuhan industri jasa keuangan.

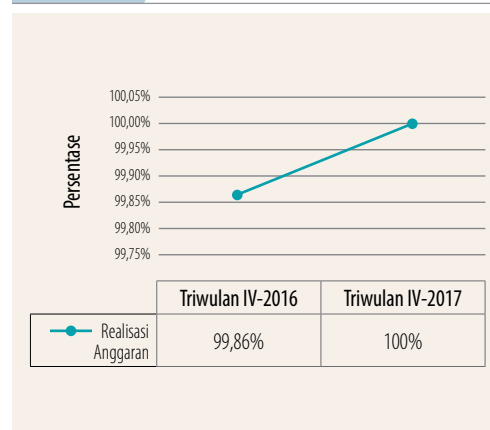
Grafik IV - 8 Realisasi Penerimaan



### 4.5.2 Realisasi Anggaran

Anggaran OJK 2017 sebesar Rp4.371,49 miliar dibiayai dari penerimaan pungutan OJK. Sampai akhir 2017, realisasi anggaran OJK adalah sebesar Rp4.371,49 miliar (100%), meningkat dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Peningkatan realisasi tersebut merupakan indikator bahwa OJK lebih optimal dalam menyusun anggaran dan melaksanakan program kerja yang telah disusun.

Grafik IV - 9 Realisasi Anggaran





### 4.5.3 Penyempurnaan Pengelolaan Keuangan

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan yang efektif dan akuntabel, OJK melakukan penyempurnaan peraturan dan sistem aplikasi keuangan. Salah satu penyempurnaan berbasis *Blueprint* Sistem Manajemen Keuangan OJK adalah mengembangkan aplikasi pengelolaan keuangan OJK (SI-AUTO) yang telah diselesaikan pada akhir 2017.

SI-AUTO merupakan aplikasi yang mengintegrasikan empat aplikasi keuangan yaitu Sistem Informasi Penyusunan Anggaran (SIPA), Sistem Informasi Keuangan (SISKA), Sistem Informasi Revisi Anggaran (SI-VIRA) dan Sistem Akuntansi OJK (SAIKO) serta satu aplikasi penatausahaan aset OJK saat ini (SISPUAS). SIAUTO juga melakukan *interface* dengan Sistem Informasi Penerimaan OJK (SIPO), Sistem Manajemen Kinerja (SIMPEL), Sistem Informasi SDM (SIMFOSIA), Sistem Remunerasi OJK (OJK-SAR) dan Sistem yang ada di Bank Persepsi. Dengan pembangunan aplikasi SI-AUTO, diharapkan dapat mendukung pengelolaan keuangan OJK, antara lain melalui:

- a. peningkatan kehandalan data keuangan;
- b. pengelolaan keuangan yang terintegrasi dan sesuai dengan praktik umum (*best practice*); dan
- c. simplifikasi proses bisnis pengelolaan keuangan.

Di samping itu, dalam rangka meningkatkan kualitas penganggaran, OJK melakukan penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja atau *Performance Based Budgeting* (PBB) untuk RKA 2018. Implementasi PBB, antara lain melalui penjabaran (*alignment*) antara peta strategis dengan anggaran serta penyusunan kajian awal Standar Biaya dengan menggunakan metode *Activity Based Costing* (ABC).

## 4.6 SISTEM INFORMASI

OJK sebagai lembaga pengawas industri jasa keuangan terus mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tujuan tersebut, OJK dari sisi *supporting* khususnya dalam pengelolaan dan penyediaan sistem informasi antara lain mengembangkan hal-hal sebagai berikut:

### 4.6.1 Penguatan Sistem Informasi untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas Pokok

#### A. Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)

Untuk mendukung pelayanan kepada Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan masyarakat dalam memantau informasi kredit yang dimiliki debitur serta untuk mendukung LJK dalam mengendalikan risiko kredit yang diberikan oleh debitur guna menurunkan tingkat kredit bermasalah maka OJK melakukan pembangunan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Implementasi SLIK secara paralel run dengan SID Bank Indonesia telah dilakukan sejak awal triwulan II-2017 sampai dengan triwulan IV-2017. Pada awal 2018, akses informasi perkreditan beralih sepenuhnya dari SID yang dikelola oleh BI ke SLIK OJK.

#### B. Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT)

Pengembangan SPRINT merupakan aplikasi perizinan berbasis web secara *end-to-end solution* dan adaptif, di mana LJK dapat melakukan registrasi perizinan dan pemantauan proses perizinan di OJK secara cepat dan transparan. Aplikasi

ini dikembangkan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi waktu proses perizinan dan mengurangi frekuensi korespondensi serta memudahkan pihak eksternal dalam memantau proses permohonan perizinan. Sistem ini diperkaya pengembangannya ke seluruh sektor baik Perbankan, Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Pengembangan SPRINT pada 2017 diutamakan pada modul Obligasi dan Sukuk, Modul Dana Pensiun, Modul Merger Akuisisi Konsolidasi (IKNB) dan Modul Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik (AP/KAP).

#### C. Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi (SIPT)

Pengembangan SIPT bertujuan untuk membantu pengawas terintegrasi dalam melakukan analisis, menentukan keputusan terkait konglomerasi keuangan dan peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan serta standarisasi pelaksanaan tugas pengawasan. Pengembangan SIPT pada tahun 2017 diutamakan pada modul rasio keuangan konglomerasi (*Financial Conglomerate Ratio*).

#### D. Pengembangan Sistem E-Reporting

Pengembangan sistem *E-Reporting* merupakan aplikasi pelaporan laporan keuangan secara elektronik yang bertujuan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang disampaikan oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK), penyampaian tepat waktu, memudahkan pengawas dalam pengolahan dan analisa data keuangan LJK serta proses monitoring laporan perusahaan. Pengembangan sistem ini pada 2017 diutamakan pada pelaporan untuk Industri Keuangan Non Bank (IKNB) dan *Self Regulatory Organization* (SRO).

#### E. Sistem Aplikasi Pengawasan dan Monitoring

OJK mengembangkan sistem aplikasi untuk mendukung tugas pokok pengawasan dan monitoring. Sistem aplikasi yang berada pada tahap pengembangan antara lain (a) Pengembangan Sistem Informasi *Risk Based Supervision* (SIRIBAS), (b) Pengembangan Sistem Informasi Penetapan Tarif Premi Asuransi (SIPETIR), (c) Pengembangan Sistem Monitoring Data Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi (SIKARIN), (d) Pengembangan Sistem Informasi Pasar Modal Terpadu (SIPM), (e) Pengembangan Sistem Informasi Perbankan (SIP) untuk modul Laporan Validasi dan Statistik, modul Data Keuangan Syariah, modul Investigasi Perbankan serta Modul *Banking Surveillance Dashboard*, (f) Pengembangan *Data Warehouse* Pasar Modal, (g) Pengembangan Data Warehouse Bank Umum dan (h) Pengembangan SIPETRO (SID SBN).

#### 4.6.2 Penguatan Sistem Informasi untuk Meningkatkan Kapasitas Organisasi

Selain mengembangkan aplikasi yang digunakan untuk mendukung fungsi pengawasan dan monitoring, OJK juga mengembangkan aplikasi untuk meningkatkan kapasitas organisasi. Sistem aplikasi yang berada pada tahap pengembangan antara lain (a) Sistem Informasi Pelaporan Gratifikasi (SIPEGA), (b) Sistem Informasi Pembuatan Peraturan Perundang-undangan di OJK, (c) Sistem Informasi Akuntansi OJK (SI-AUTO) tahap 2, (d) Pengembangan Aplikasi Sistem Pengelolaan Kinerja (SIMPEL), (e) Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMARIO) modul *Control Self Assessment* (CSA), (f) *E-Procurement* OJK, (g) *Whistle Blowing System* (WBS), (h) Sistem Informasi Pengelolaan Pekerjaan (SIPEKA) dan (i) Sistem Informasi Pusat Edukasi, Layanan Konsumen dan Akses Keuangan UMKM (PELAKU)

## 4.7 LOGISTIK

### 4.7.1 Penyiapan Gedung Kantor Pusat dan Regional

Kegiatan OJK terkait kelogistikan adalah diselesaikannya penataan dan pemindahan beberapa satuan kerja kantor pusat ke gedung kantor pusat baru. OJK masih mengkaji mengenai kepemilikan gedung kantor pusat terpadu, demi terciptanya efektifitas dan efisiensi koordinasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi OJK. Di daerah, Kantor Regional dan Kantor OJK yang telah menempati gedung kantor sendiri baik yang merupakan milik OJK, gedung sewa maupun pinjam pakai aset milik pemerintah daerah hingga periode laporan adalah sebanyak 31 kantor, yakni:

Tabel IV - 4

Kantor Regional dan KOJK dengan Gedung Sendiri

1.	Kantor Regional 2 Jawa Barat (Bandung) – Milik OJK
2.	Kantor Regional 3 Jawa Tengah & D.I.Y (Semarang)
3.	Kantor Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua (Makassar)
4.	Kantor Regional 7 Sumatera Bagian Selatan (Palembang)
5.	Kantor Regional 8 Bali & Nusa Tenggara (Denpasar)
6.	Kantor Regional 9 Kalimantan (Banjarmasin)
7.	Kantor OJK Tasikmalaya (Tasikmalaya)
8.	Kantor OJK Prov. D.I.Y (Yogyakarta)
9.	Kantor OJK Solo (Solo)
10.	Kantor OJK Tegal (Tegal)
11.	Kantor OJK Purwokerto (Purwokerto)
12.	Kantor OJK Jember (Jember)
13.	Kantor OJK Kediri (Kediri)
14.	Kantor OJK Prov. Kepulauan Riau (Batam)
15.	Kantor OJK Prov. N.A.D (Banda Aceh)
16.	Kantor OJK Prov. Sulawesi Tenggara (Kendari) – pinjam pakai
17.	Kantor OJK Prov. Sulawesi Tengah (Palu)
18.	Kantor OJK Prov. Maluku (Ambon)
19.	Kantor OJK Prov. Papua dan Papua Barat (Jayapura)
20.	Kantor OJK Prov. Lampung (Bandar Lampung)
21.	Kantor OJK Prov. Jambi (Jambi)
22.	Kantor OJK Prov. Bengkulu (Bengkulu)
23.	Kantor OJK Prov. Nusa Tenggara Timur (Kupang)
24.	Kantor OJK Prov. Kalimantan Tengah (Palangkaraya)

25.	Kantor OJK Cirebon (Cirebon)
26.	Kantor Regional 5 Sumbagut (Medan)
27.	Kantor OJK Prov. Sumatera Barat (Padang)
28.	Kantor OJK Prov. Riau (Pekanbaru)
29.	Kantor OJK Prov. Sulawesi Utara (Manado) – pinjam pakai
30.	Kantor OJK Prov. Kalimantan Barat (Pontianak)
31.	Kantor OJK Prov. Kalimantan Timur (Samarinda)

### 4.7.2 Pengembangan Pengaturan dan Sistem Logistik

Dari sisi pengaturan kelogistikan, dalam periode laporan telah dilaksanakan kegiatan *Workshop* Penatausahaan Aset dengan mengundang perwakilan dari seluruh kantor OJK di daerah serta seluruh satuan kerja di lingkungan kantor pusat untuk mensosialisasikan ketentuan terkait Pengelolaan barang milik OJK dan barang milik pihak lainnya, serta ketentuan terkait Penatausahaan barang milik OJK dan barang milik pihak lainnya. Selain itu dalam kegiatan tersebut juga dilakukan *live* penginputan data aset semester II-2017.

Beberapa ketentuan telah ditetapkan dalam periode laporan, antara lain; Ketentuan tentang (1) Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Milik Daerah di OJK, serta (2) Pedoman Penghapusan Barang Milik OJK.

## 4.8 SDM DAN TATA KELOLA ORGANISASI

### 4.8.1 Kebijakan Sumber Daya Manusia

Pada triwulan IV-2017, OJK menerbitkan beberapa kebijakan terkait sumber daya manusia antara lain mengatur mengenai : (1) Tunjangan Pendukung Operasional, Tunjangan Fasilitas, Asuransi, dan Pesangon bagi Anggota Dewan Komisioner dan Mantan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan; (2) Tunjangan Pendukung Operasional, Tunjangan Fasilitas, Asuransi, dan Dana Pensiun bagi Pegawai dan Pensiunan Otoritas Jasa Keuangan,

(3) Besaran Tunjangan Pendukung Operasional dan Tunjangan Fasilitas Bagi Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan; (4) Besaran Tunjangan Pendukung Operasional dan Tunjangan Fasilitas bagi Pegawai Otoritas Jasa Keuangan; dan (5) Insentif Organisasi Tahun 2017.

#### 4.8.2 Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Sejalan dengan komitmen dalam peningkatan pengelolaan Sumber Daya Manusia, pada triwulan IV-2017 OJK melakukan:

1. Pemetaan kebutuhan pegawai OJK 2018, termasuk mekanisme pemenuhannya. Dalam rangka perencanaan SDM 2018, OJK melakukan pemetaan kebutuhan dan ketersediaan pegawai di internal OJK. Adapun strategi pemenuhan diutamakan berasal dari internal OJK, dan dalam hal dinilai perlu, maka OJK akan melakukan rekrutmen dengan tetap mengedepankan prinsip prioritas dan efisiensi.
2. Penyusunan *Training Need Analysis* (TNA) Penyusunan TNA 2018 didasarkan pada standar kompetensi yang ditetapkan pada masing-masing jabatan, yang selanjutnya akan dianalisis terkait pelaksanaan training yang sesuai.
3. Seleksi pegawai yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Sebanyak 39 pegawai mengikuti seleksi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, yang terdiri dari 4 skema pembiayaan:
  - 1) beasiswa yang seluruhnya ditanggung OJK;
  - 2) beasiswa dari pihak lain dan OJK membayarkan selisihnya sesuai ketentuan internal OJK;
  - 3) program pendidikan dengan beasiswa yang seluruhnya berasal dari pihak lain; dan

- 4) pendidikan formal atas inisiatif sendiri dengan Beasiswa penggantian biaya pendidikan formal (penggantian) dari OJK

#### 4.8.3 Pengembangan Organisasi

OJK menetapkan peraturan internal terkait Direktori Kompetensi Teknis Otoritas Jasa Keuangan. Penyusunan Direktori Kompetensi Teknis memiliki bertujuan antara lain: (1) Memberikan pemahaman dan pedoman kepada Pegawai mengenai kemampuan teknis yang diperlukan untuk berkinerja optimal pada suatu jabatan tertentu, (2) Membantu menetapkan kebutuhan kompetensi bagi organisasi untuk setiap Jabatan atau pekerjaan. (3) Sebagai acuan dalam implementasi sistem manajemen sumber daya manusia, yaitu dasar bagi proses rekrutmen, pengembangan, promosi/mutasi/rotasi, dan menciptakan *talent* terbaik, guna mendukung kinerja organisasi.

Kompetensi teknis di OJK ditampilkan dalam sebuah kamus yang disebut Direktori Kompetensi Teknis, yaitu sebuah katalog yang memuat seluruh kompetensi teknis berikut definisi dan level profisiensi, baik yang bersifat generik maupun fungsi, yang diperlukan oleh organisasi dalam mencapai misi dan visi. Kompetensi Teknis OJK terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Kompetensi Teknis Generik adalah kompetensi dasar yang wajib dimiliki oleh seluruh pemangku jabatan.
2. Kompetensi Teknis Fungsi adalah kemampuan teknis yang diperlukan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi pekerjaannya, yang dibagi menjadi sembilan fungsi utama antara lain Riset, Pengaturan, Pengawasan, Perizinan, Penyidikan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Sekretariat Lembaga dan Hubungan Eksternal, Mitra Strategis, Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas.





## 4.9 OJK INSTITUTE

### 4.9.1 Program Pengembangan Kepemimpinan Berjenjang (PPKB)

Program Pengembangan Kepemimpinan Berjenjang (PPKB) bertujuan untuk mempersiapkan pegawai untuk menduduki jabatan dengan kompleksitas tugas dan tingkat pengambilan keputusan yang lebih tinggi. Pada 2017, Penyelenggaraan PPKB mengalami perubahan seiring dengan penyempurnaan model kompetensi kepemimpinan di OJK. Penyelenggaraan Program yang semula hanya bersifat klasikal, sekarang terbagi menjadi tahap *Pre-Training*, *Training* dan *Post Training (assignment)*. Selama triwulan IV-2017, OJK melaksanakan PPKB Level Lanjutan untuk pejabat Setingkat Direktur yang diikuti oleh 27 peserta dan Program Pengembangan Kepemimpinan Kepala Regional dan Kepala Kantor OJK yang diikuti oleh 35 peserta.

### 4.9.2 Program Pengembangan Kompetensi

Program Pengembangan Kompetensi pegawai baik untuk kompetensi teknis (*hard skill*) maupun perilaku (*soft skill*) yang telah dilaksanakan pada triwulan IV-2017 sebagai berikut :

- a. Program Sertifikasi Pengawas Sektor Jasa Keuangan (SJK)  
Pada triwulan IV-2017 telah diselenggarakan Program Sertifikasi Pengawas SJK untuk level 2 tahap 2 dengan total peserta 33 orang dan Program Sertifikasi Pengawas SJK untuk level 3 tahap 1 dengan total peserta 24 orang.
- b. PPK *Non In-House* Luar Negeri  
PPK *Non In-House* Luar Negeri dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas dan

efisiensi penyelenggaraan terkait biaya, kualitas materi dan kualitas penyelenggara pelatihan. Selama triwulan IV-2017 tercatat total 18 pegawai melaksanakan pengembangan di luar negeri, dengan rincian 17 pegawai untuk pengembangan kompetensi teknis (*hard skill*) dan satu pegawai mengikuti pengembangan kompetensi kepemimpinan (*leadership*).

- c. PPK *Non In House* Dalam Negeri  
PPK *Non In House* Dalam Negeri tercatat selama triwulan IV-2017 sebanyak 97 pegawai mengikuti program pengembangan kompetensi, yang terdiri dari 84 pegawai melaksanakan program pengembangan kompetensi teknis, dan 13 pegawai untuk program pengembangan kompetensi perilaku.
- d. PPK *In-House* Dalam Negeri  
PPK *In-House* Dalam Negeri selama triwulan IV-2017 OJK Institute melaksanakan 21 IHT dengan jumlah peserta secara keseluruhan mencapai 905 pegawai yang terdiri dari 14 program pengembangan kompetensi teknis yang diikuti 691 pegawai dan tujuh program pengembangan kompetensi perilaku yang diikuti 214 pegawai.

### 4.9.3 Program Pendidikan Formal

Program Pendidikan Formal merupakan bentuk pengembangan SDM pada jenjang pendidikan formal yang diberikan kepada pegawai OJK potensial yang telah memenuhi kriteria, baik untuk jenjang pendidikan Strata-2 maupun Strata-3. Selama triwulan IV-2017 tercatat 10 orang pegawai untuk skim-1 (beasiswa penuh dari OJK), tujuh orang pegawai untuk skim-2 (beasiswa dari pihak lain dengan *top up* fasilitas dari OJK), empat orang pegawai untuk skim-3 (beasiswa dari pihak lain dengan remunerasi dari OJK), dan satu orang pegawai untuk skim-4 (*reimbursement*).



- Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, menyampaikan Kuliah Umum pada mahasiswa fakultas ekonomi di beberapa Universitas Negeri terkemuka, antara lain:
  1. Universitas Indonesia
  2. Universitas Sumatera Utara
  3. Institut Teknologi Bandung
- Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Nurhaida, menyampaikan Kuliah Umum pada mahasiswa fakultas ekonomi di beberapa Universitas Negeri terkemuka, antara lain:
  1. Universitas Andalas
  2. SMA 70 Jakarta Selatan
  3. Institut Pertanian Bogor
- Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Heru Kristiyana, menyampaikan Sosialisasi dan Edukasi pada siswa SMK 38, Jakarta Pusat;
- Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hoesen, menyampaikan Edukasi Literasi dan Sistem Keuangan pada siswa SMAN 8 Jakarta
- Kepala Eksekutif Pengawas IKNB OJK, Riswinandi, menyampaikan Sosialisasi dan Edukasi tentang Otoritas Jasa Keuangan pada siswa Pangudi Luhur Jakarta Selatan;
- Kepala Eksekutif Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Tirta Segara Sosialisasi dan Edukasi tentang Otoritas Jasa Keuangan pada SMP 26, Kebon Pala, Jakarta Pusat
- Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner, Ahmad Hidayat, menyampaikan Sosialisasi dan Edukasi tentang Otoritas Jasa Keuangan pada mahasiswa UNAIR, Surabaya.

#### 4.9.4 Program Penugasan

Selama triwulan IV-2017, OJK Institute telah menugaskan satu pegawai untuk mengikuti program *secondment* di GLOPAC, Japan, dan sembilan orang mengikuti program assignment dengan menjadi narasumber pada acara The 4th Padjajaran Financial Festival, ADB International Conference, Peran OJK dalam Meningkatkan Investasi di Sektor Keuangan Syariah, WongPartnership's Annual 2017 Regulatory Dialogue, Karya Tulis Ilmiah Nasional ACTIVE (Accounting Society in Versality), Regional Expert on Indonesia, Sosialisasi POJK-77/POJK.01/2016, dan Rapiernas KADIN 2017.

#### 4.9.5 Program Peningkatan Kompetensi SDM Sektor Jasa Keuangan

Dalam rangka persiapan pelaksanaan Program Manfaat Balik melalui Program Peningkatan Pengembangan Kompetensi SDM Sektor Jasa Keuangan, OJK Institute telah melaksanakan delapan *workshop* pada triwulan IV-2017 yang diselenggarakan dengan jumlah peserta sebanyak 3620 peserta. Beberapa *workshop* yang telah diselenggarakan adalah *Pathway to Professional Accountant Training*, *Workshop Arah Pengembangan SDM OJK dan SJK*, *Workshop Pengawasan Terintegrasi*, Kegiatan Regulator Mengajar di Universitas Andalas, Universitas Sumatera Utara, dan Universitas Nusa Cendana, dan *Workshop Entrepreneurs Wanted*.

#### 4.9.6 Program Kaji Ulang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)

Pada triwulan IV-2017, telah dilaksanakan kegiatan kaji ulang/penyusunan SKKNI terkait Manajemen Risiko dan BPR/BPRS.

#### 4.9.7 Program Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian di OJK

Sebagai salah satu bentuk manfaat balik kepada masyarakat/pelajar/mahasiswa dalam rangka memberikan kesempatan magang/penelitian di OJK. Selama triwulan IV-2017, OJK Institute memberikan kesempatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) kepada 35 pelajar/mahasiswa dan telah membantu mahasiswa yang melakukan penelitian di Satuan Kerja terkait untuk 67 penelitian skripsi/tesis/disertasi.

#### 4.10 MANAJEMEN PERUBAHAN

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi OJK serta *Destination Statement* tahun 2017, OJK menyelesaikan sejumlah program dan melaksanakan kegiatan terkait fungsi manajemen perubahan dan budaya organisasi selama 2017. Sesuai *Roadmap* dan *Action Plan* Program Transformasi Manajemen Perubahan 2014-2017, seluruh kegiatan difokuskan dalam rangka memenuhi tema "Bangga menjadi Insan OJK", yaitu menjadikan Insan OJK sebagai *Brand Ambassador OJK*.

OJK menetapkan tiga program budaya kerja yaitu Program OJK Melayani, OJK Peduli, dan OJK Inovatif. Program budaya tersebut dirancang untuk mendukung *Roadmap OJKway* 2017 yaitu menjadikan insan OJK sebagai *brand ambassador* yang bangga terhadap institusinya. Adapun tujuan program OJK Melayani adalah untuk membangun perilaku cepat tanggap dan menerapkan pelayanan prima kepada *stakeholders*. Program OJK Peduli dicanangkan untuk meningkatkan kepedulian insan OJK terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar melalui kegiatan sosial dan juga sebagai wadah/sarana untuk mengkampanyekan OJK.



Program OJK Inovatif mendorong insan OJK untuk membuat terobosan baru, perbaikan proses kerja dan mutu produk satker sehingga menumbuhkan rasa bangga karena dapat memberikan pelayanan prima kepada *stakeholder* dan berkontribusi lebih dengan cara menciptakan inovasi-inovasi baru.

#### 4.10.1 Program Budaya

Kegiatan program budaya dan perubahan yang dilaksanakan selama triwulan IV-2017 adalah:

##### 1. *Change Partner Forum 2017*

*Change Partner Forum* (CPF) bertujuan untuk mengevaluasi program budaya 2017 secara keseluruhan dan penyusunan program budaya satuan kerja 2018. Secara garis besar kegiatan CPF 2017 terdiri dari: (1) *Sharing session* dari perwakilan *Change Partner* terkait pelaksanaan program budaya OJKway 2017; (2) *Panel Session*; (3) *Soft launching* Visi Program Budaya OJKway 2022; dan Evaluasi Program Budaya OJKway 2017 dan *Workshop* Penyusunan Program Budaya OJKway 2018.

##### 2. *Change Leader Forum II 2017*

Dalam rangka mengkomunikasikan arah kebijakan pelaksanaan program budaya dan pembentukan karakter Insan OJK serta untuk menggalang komitmen seluruh jajaran pimpinan di lingkungan OJK terhadap pelaksanaan Program Budaya, telah diselenggarakan *Change Leader Forum II 2017* yang dihadiri oleh seluruh *Change Leader* yang terdiri dari Anggota Dewan Komisioner, Deputi Komisioner/ setingkat, Kepala Departemen/Setingkat, Direktur/setingkat, dan Kepala KR dan KOJK.

Secara garis besar kegiatan CLF 2017 terdiri dari:

- a. Arahan Ketua Dewan Komisioner sebagai penegasan arah budaya kerja guna meningkatkan produktivitas OJK.

- b. Peluncuran Visi OJKway 2022.

- c. Penandatanganan dokumen Komitmen Budaya Kerja, Kesepakatan Kinerja, Project Charter Inisiatif Strategis dan Project Khusus 2018 oleh seluruh Pimpinan Satuan Kerja dan Anggota Dewan Komisioner.

#### 4.10.2 *Monitoring* Program Budaya

Di bidang *monitoring* program budaya, OJK menjalankan sejumlah kegiatan untuk mengukur tingkat keberhasilan dan memantau *progress* implementasi program-program perubahan dan budaya yang telah dilaksanakan, di antaranya yaitu:

##### 1. *Monitoring* Program Budaya 2017:

*Konsultasi, Offsite & Onsite Monitoring* OJK memberikan kesempatan kepada masing-masing satuan kerja untuk melakukan penilaian pelaksanaan program budaya melalui metode *self-assessment* yang didukung bukti-bukti pelaksanaan program budaya. Penilaian dan pengumpulan bukti-bukti tersebut dilakukan triwulanan dengan cara *online* melalui aplikasi *dashboard monitoring system* (*ojkway.com*) dan dapat diakses oleh seluruh satuan kerja.

Berdasarkan hasil kalibrasi *offsite* dan *onsite monitoring*, didapatkan nilai Indeks Kinerja Utama (IKU) Budaya Triwulan IV-2017 dengan nilai 5,44 secara *OJK-wide*. Nilai IKU Budaya 2017 secara *OJK-wide* mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 5,22.

#### 4.10.3 Media Komunikasi Budaya dan Perubahan

Di bidang media komunikasi budaya, OJK melakukan sejumlah pengembangan dan penyempurnaan media kampanye, di antaranya:

1. Penerbitan Majalah Integrasi  
Majalah Integrasi merupakan media komunikasi internal OJK yang diterbitkan untuk mengkomunikasikan kegiatan-kegiatan terkait program perubahan dan budaya serta pencapaian-pencapaian yang telah diraih OJK dalam periode penerbitan. Selama periode laporan, OJK menerbitkan tiga edisi Majalah Integrasi dengan tema "Millennial Bersuara", "Kredibel dan Berperan Nyata" serta "OJK Sigap: Siap Menanggapi Perubahan" dengan fokus pembahasan mengenai 3 program OJKway 2018 dan visi budaya sampai dengan tahun 2022.
2. Pesan Anggota Dewan Komisiner  
OJK melakukan penyebaran Pesan Ketua Dewan Komisiner dan Pesan Anggota Dewan Komisiner melalui *e-mail blast* ke seluruh Insan OJK. Pesan yang didistribusikan secara masif tersebut bertujuan mendorong para Insan OJK agar lebih efektif dan efisien dalam bekerja untuk para pemangku kepentingan, dan juga pesan prioritas kebijakan OJK ke depan. Selama periode laporan terdapat tiga pesan ADK/Ketua dengan tema "Memimpin dan Bekerja Sebagai Tim", "Dirgahayu OJK ke-6", dan "Menjadi Pahlawan Literasi Keuangan Indonesia".
3. Pengkinian *Screen Saver* Nilai Strategis, Program Budaya, dan Kampanye Efisiensi  
Pengkinian *screen saver* yang ditayangkan pada monitor komputer seluruh insan OJK terus dilakukan untuk mengkampanyekan program budaya, nilai strategis dan program efisiensi dengan menarik dan mudah dimengerti
4. Pengembangan Sosial Media OJK  
Pada triwulan IV-2017 OJK menggunakan Media sosial dan OJKway TV untuk mengkampanyekan nilai-nilai strategis OJK dan menyampaikan program transformasi budaya yang tengah dilaksanakan di OJK.

## Akronim

AAJI	: Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia
AAS	: Australia Awards Scholarship
AASI	: Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia
AAUI	: Asosiasi Asuransi Umum Indonesia
ABIF	: ASEAN Banking Integration Framework
ACIA	: ASEAN Comprehensive Investment Agreement
ACKS	: Aku Cinta Keuangan Syariah
ADK	: Anggota Dewan Komisioner
AFAS	: ASEAN Framework Agreement on Services
AHM	: Anugerah Media Humas
AIMRPK	: Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas
AML	: Anti Money Laundering
APERD	: Agen Penjual Efek Reksa Dana
APRA	: Australia Prudential Regulatory Authority
ASBANDA	: Asosiasi Bank Pembangunan Daerah
ASEAN	: Association of Southeast Asian Nations
ASIC	: Australia Securities and Investment Commission
ATIGA	: ASEAN Trade in Goods Agreement
ATISA	: ASEAN Trade In Services Agreement
ATM	: Automatic Teller Machine
ATMR	: Aset Tertimbang Menurut Risiko
AUTP	: Asuransi Usaha Tani Padi
BAE	: Biro Administrasi Efek
BAMPPPI	: Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia
BAPMI	: Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia
BAVI	: Badan Arbitrase Ventura Indonesia
BEI	: Bursa Efek Indonesia
BI	: Bank Indonesia
BIN	: Badan Intelijen Negara
BMAI	: Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia
BMDP	: Badan Mediasi Dana Pensiun
BMPP	: Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan
BMPPPI	: Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia
BMT	: Baitul Mal Wat Tamwil
BNP2TKI	: Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
BNSP	: Badan Nasional Sertifikasi Profesi
BOPO	: Beban Operasional Pendapatan Operasional
BPD	: Bank Pembangunan Daerah
BPKP	: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
BPK-RI	: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
BPR	: Bank Perkreditan Rakyat
BRC	: BPD Regional Champion
BS	: Board Seminar
BSA	: Basic Saving Account
BUK	: Bank Umum Konvensional

BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BUS	: Bank Umum Syariah
CA	: Combined Assurance
CBRC	: China Banking Regulatory Commission
CDD	: Customer Due Diligence
CFT	: Combating the Financing of Terrorism
CKPN	: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
CR	: Cash Ratio
CRM	: Customer Relationship Management
CTKI	: Calon Tenaga Kerja Indonesia
DCC	: Data Center Collocation
DES	: Daftar Efek Syariah
DFSA	: Dubai Financial Service Authority
DJPU	: Direktorat Jendral Pengelola Utang
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPK	: Dana Pihak Ketiga
DPLK	: Dana Pensiun Lembaga Keuangan
DPPK PPIP	: Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Iuran Pasti
DPPK PPMP	: Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Manfaat Pasti
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DRC	: Disaster Recovery Center
EBA-SP	: Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi
EDC	: Electronic Data Capture
Eduwan	: Edukasi Wartawan
ETP	: Electronic Trading Platform
FAPM	: Forum Akuntan Pasar Modal
FGD	: Focus Group Discussion
FKMM	: Forum Koordinasi Makroprudensial-Mikroprudensial
FKSSK	: Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan
FREKS	: Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah
FSA	: Financial Services Agency
FSAP	: Financial Sector Assessment Program
FSC	: Financial Service Commission
FSS	: Financial Supervisory Service
FTA	: Free Trade Agreement
GCG	: Good Corporate Governance
GeNTa PM	: Gerakan Nasional Cinta Pasar Modal
GIZ	: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
GMRA	: Global Master Repurchase Agreement
GRC	: Governance Risk and Compliance
HKHPPM	: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
HMETD	: Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
ICMA	: International Capital Market Association
IDB	: Islamic Development Bank
IFAC	: International Federation of Accountant
IFAR	: Investasi Terhadap Total Aset
IFC	: International Finance Corporation



IFCC	: Integrated Financial Customer Care
IFN	: International Finance News
IFSB	: Islamic Financial Services Board
IGBF	: Indonesia Government Bond Futures
IHSG	: Indeks Harga Saham Gabungan
IJEPA	: Indonesia-Jepang Economic Partnership Agreement
IJK	: Industri Jasa Keuangan
IKI	: Indikator Kinerja Individual
IKNB/NBFI	: Industri Keuangan Non Bank/Non Bank Financial Industry
IKU/KPI	: Indikator Kerja Utama/Key Performance Indicators
ILM	: Iklan Layanan Masyarakat
IMF	: International Monetary Fund
INDOBEX	: Indonesia Bond Indexes
IOSCO	: International Organization of Securities Commission
IRR	: Integrated Risk Rating
IS	: Inisiatif Strategis
JARING	: Jangkau, Sinergi, dan Guideline
JII	: Jakarta Islamic Index
JPSK	: Jaring Pengaman Sistem Keuangan
KDK	: Keputusan Dewan Komisiner
Kemenaker	: Kementerian Ketenagakerjaan
Kemendagri	: Kementerian Dalam Negeri
Kemendes	: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
KI	: Kredit Investasi
KIK	: Kontrak Investasi Kolektif
KK	: Kredit Konsumsi
KKB	: Kredit Kendaraan Bermotor
KKP	: Kementerian Kelautan dan Perikanan
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KMK	: Kredit Modal Kerja
KOINKU	: Kompetisi Inklusi Keuangan
KOJK	: Kantor OJK
KPD	: Kontrak Pengelolaan Dana
KPJKS	: Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah
KPMM/CAR	: Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum/Capital Adequacy Ratio
KPMR	: Kualitas Penerapan Manajemen Risiko
KPPU	: Komisi Pengawasan Persaingan Usaha
KPR	: Kredit Pemilikan Rumah
KR	: Kantro Regional
KSEI	: Kustodian Sentral Efek Indonesia
KUB	: Kelompok Usaha Bersama
KYC	: Know Your Customer
KYFC	: Know Your Financial Conglomerates
LAPS	: Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
LAPSPI	: LAPS Perbankan
LAPSPI	: Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia
LDR	: Loan to Deposit Ratio
LJK	: Lembaga Jasa Keuangan

LJKNB	: Lembaga Jasa Keuangan Non Bank
LKM	: Lembaga Keuangan Mikro
LoI	: Letter of Intent
LoU	: Letter of Understanding
LPEI	: Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
LPHE	: Lembaga Penilaian Harga Efek
LPS	: Lembaga Penjamin Simpanan
LTV	: Loan to Value
MCRA	: Market Conduct Risk Assessment
MEA/AEC	: Masyarakat Ekonomi Asean/Asean Economic Community
MI	: Manajer Investasi
MIA	: Manajer IKU dan Anggaran
MoU	: Memorandum Of Understanding/Nota Kesepahaman
MPSJKI	: Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia
MSAK	: Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja
NAB	: Nilai Aktiva Bersih
NIM	: Net Interest Margin
NPF	: Non Performing Finance
NPL	: Non-Performing Loan
OECD	: Organisation for Economic Co-operation and Development
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
ORP	: Outreach Program
OSINT	: Open Source Intelligence
PCE	: Pendidikan Calon Staf Edukasi dan Perlindungan Konsumen
PCP	: Pendidikan Calon Pejabat
PCS	: Pendidikan Calon Staf
PCT	: Pendidikan Calon Pegawai Tata Usaha
PDB	: Produk Domestik Bruto
PDK	: Peraturan Dewan Komisiner
PDN	: Posisi Devisa Neto
PE	: Perusahaan Efek
PELAKU	: Pusat Edukasi, Layanan Konsumen dan Akses Keuangan UMKM
PESTEL	: Politic, Economy, Social, Technology, Environment, and Law
PI	: Penasihat Investasi
PKR	: Pasar Keuangan Rakyat
PM	: Pasar Modal
PMK	: Protokol Manajemen Krisis
POJK	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
POKTAN	: Kelompok Tani
PPF	: Program Pendidikan Formal
PPG	: Program Pengendalian Gratifikasi
PPK	: Program Pengembangan Kompetensi
PPKB	: Program Pengembangan Kepemimpinan Berjenjang
PPKD	: Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah
PPL	: Program Pendidikan Lanjutan
PPP	: Program Penugasan Pegawai
PSP	: Pemegang Saham Pengendali
PUB	: Penawaran Umum Berkelanjutan

PUJK	: Pelaku Usaha Jasa Keuangan
Rakerstra	: Rapat Kerja Strategis
RBS	: Risk Based Supervisory
RCEP	: Regional Comprehensive Economic Partnership
RDK	: Rapat Dewan Komisioner
REPO	: Repurchase Agreement
RGS	: Risk and Governance Summit
RKA	: Rencana Kerja Anggaran
ROA	: Return on Assets
ROE	: Return on Equity
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RSS	: Rumah Sehat Sejahtera
Satgas	: Satuan Tugas
SBN	: Surat Berharga Negara
SBSN	: Surat Berharga Syariah Negara
SDM	: Sumber Daya Manusia
SEDK	: Surat Edaran Dewan Komisioner
SEOJK	: Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
SIAI	: Sistem Informasi Audit Internal
SID/DIS	: Sistem Informasi Debitur/Debtor Information System
SIELOG	: Sistem Informasi Ekspedisi Logistik
SIMARIO	: Sistem Informasi Manajemen Risiko
SIMFOSIA	: Sistem Informasi Sumber Daya Manusia
SiMOLEK	: Mobil Literasi Keuangan
SimPel	: Simpanan Pelajar
SIMPEL	: Sistem Pengelolaan Kinerja
SIPMI	: Sistem Informasi Pelaporan Market Intelijen
SIPP	: Sistem Informasi Perusahaan Pembiayaan
SISKA	: Sistem Aplikasi Keuangan OJK
SISPANDI	: Sistem Informasi Pengelolaan Kendaraan Dinas
SISPUAS	: Sistem Informasi Penatausahaan Aset
SJK	: Sektor Jasa Keuangan
SKM	: Sahat Keuangan Maritim
SKP	: Satuan Kredit Profesi
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SLA	: Service Level Agreement
SMES	: Sederhana, Mudah, Ekonomis, dan Segera
SNKI	: Strategis Nasional Keuangan Inklusif
SNLKI	: Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia
SPE	: Sistem Pelaporan Emiten
SPP/WBS OJK	: Sistem Pelaporan Pelanggaran OJK/Whistle Blowing System OJK
SRO	: Self Regulatory Organization
STP	: Straight Through Processing
STTD	: Surat Tanda Terdaftar
SUN	: Surat Utang Negara
SWOT	: Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats
TKHT	: Tunjangan Kesehatan Hari Tua
TKI	: Tenaga Kerja Indonesia

TOT	: Training of Trainers
TPHT	: Tunjangan Perumahan Hari Tua
TPI	: Tempat Pelelangan Ikan
UMKM/MSME	: Usaha Mikro, Kecil dan Menengah/Micro, Small, and Medium Enterprises
UU	: Undang-Undang
UU LKM	: Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro
UU OJK	: Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan
UUS	: Unit Usaha Syariah
WAPERD	: Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana
WBS	: Whistle Blowing System
WCFSL	: Working Committee on Financial Services Liberalisation
WMI	: Wakil Manajer Investasi
WPEE	: Wakil Penjamin Emisi Efek
WPPE	: Wakil Perantara Pedagang Efek
XBRL	: Extensible Business Reporting Language
YKP OJK	: Yayasan Kesejahteraan Pekerja
yoy	: year over year
ytd	: year to date
ZMET	: Zaltman Metaphor Elicitation Technique